

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



H. ROMI HARIYANTO, SE

Bupati Tanjung Jabung Timur

Periode 2021-2026



H. ROBBY NAHLIYANSYAH, SH

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Periode 2021-2026



MAHRUP

Ketua DPRD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



SAIDINA HAMZAH, SE

Wakil Ketua DPRD I

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



GATOT SUMARTO, SH

Wakil Ketua DPRD II

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) Maksud RPJMD ini :
 - a. menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam 5 (lima) tahun periode penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tujuan RPJMD ini yakni terwujudnya pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rakyat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
- a) visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional;
 - b) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerjasama dan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

- (1) RPJMD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD terdiri dari :
- 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III Gambaran Keuangan Daerah
 - Bab IV Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Daerah
 - Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

 - Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Bab IX Penutup

- 3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah Daerah, maka penetapan target capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

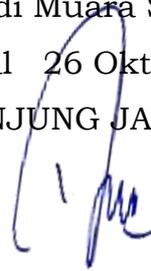
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI (2-68/2021)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2
TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

SAMBUTAN
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dapat kita selesaikan tepat waktu.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif, efisien mewujudkan visi dan misi daerah diperlukan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Beserta Perubahannya. Bagi Daerah, kedua Undang-undang ini menegaskan rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD 2021–2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra-PD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2021-2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta Perubahannya dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya

Saya berharap bahwa RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dapat dipedomani oleh jajaran pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, kalangan akademisi, para cerdik pandai, ulama dan LSM serta segenap kalangan masyarakat luas lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sehingga visi “MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR MERAKYAT” dapat diwujudkan

Muara Sabak, Oktober 2021
Bupati Tanjung Jabung Timur,


H. ROMI HARIYANTO, SE

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5 UU No 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi dan misi serta program Bupati terpilih, menyatakan orientasi atau keberpihakan proses pembangunan pada ekonomi kerakyatan. Rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja yang bersifat indikatif.

Selain dilandasi oleh pernyataan Visi dan Misi serta program Kepala Daerah terpilih, penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan secara realistis berdasarkan penilaian kondisi nyata sosial ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga RPJMD 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan semua pihak, bukan keinginan sepihak.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMD ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya.

Muara Sabak, Oktober 2021
Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. ALI FAHRUDDIN, M.PA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4.1 Maksud.....	I-10
1.4.2. Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografis	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.1.3. Topografi	II-3
2.1.1.4. Geologi.....	II-4
2.1.1.5. Hidrologi	II-4
2.1.1.6. Klimatologi.....	II-7
2.1.1.7. Penggunaan Lahan.....	II-8
2.1.1.8. Peruntukan Lahan	II-9
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-12
2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana	II-13
2.1.2. Aspek Demografis	II-14
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-18
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-20
2.2.1.3. Struktur Ekonomi	II-22
2.2.1.4. PDRB per kapita	II-24
2.2.1.5. Inflasi	II-25
2.2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio)	II-26
2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	II-27
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-29
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	II-29
2.2.2.2. Angka melek huruf.....	II-31
2.2.2.3. Angka pendidikan yang ditamatkan.....	II-31
2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar	II-33
2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni	II-35

2.2.2.6.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-36
2.2.2.7.	Angka Harapan Lama Sekolah	II-37
2.2.2.8.	Angka Usia Harapan Hidup	II-38
2.2.2.9.	Angka Kematian Ibu	II-39
2.2.2.10.	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal	II-40
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-41
2.2.3.1.	Jumlah Grup Kesenian	II-41
2.2.3.2.	Jumlah Klub Olahraga	II-42
2.2.3.3.	Jumlah Gedung Olahraga	II-42
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-43
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-43
2.3.1.1	Pendidikan	II-43
2.3.1.2.	Kesehatan	II-46
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-53
2.3.1.4.	Perhubungan	II-58
2.3.1.5.	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-60
2.3.1.6.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-61
2.3.1.7.	Ketenagakerjaan	II-64
2.3.1.8.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-66
2.3.1.9.	Penanaman Modal	II-67
2.3.1.10.	Perpustakaan	II-68
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-69
2.3.2.1.	Pertanian	II-60
2.3.2.2.	Peternakan	II-74
2.3.2.3	Perkebunan	II-75
2.3.2.4.	Kehutanan	II-78
2.3.2.5.	Energi dan Sumberdaya Mineral	II-78
2.3.2.6.	Kelautan dan Perikanan	II-80
2.3.2.7.	Perindustrian dan Perdagangan	II-81
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-85
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-85
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita	II-85
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani	II-85
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-87
2.4.2.1.	RTRW	II-87
2.4.2.2.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	II-88
2.4.2.3.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran, Penginapan/Hotel	II-88
2.4.2.4.	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	II-89
2.4.2.5.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II-90
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-91
2.4.3.1.	Kriminalitas	II-91
2.4.3.2.	Demo	II-91

	2.4.3.3. Perizinan	II-92
	2.4.3.4. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-92
	2.4.3.5. PERDA yang mendukung iklim usaha.....	II-94
	2.4.4. Sumberdaya Manusia	II-94
	2.4.4.1. Rasio Ketergantungan.....	II-94
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.1.1.	Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2.	Proporsi Sumber Pendapatan	III-25
3.1.1.3.	Realisasi Belanja Daerah	III-26
3.1.2.	Neraca Daerah	III-46
3.1.2.1.	Analisis Neraca	III-46
3.1.2.2.	Analisis Rasio Keuangan.....	III-54
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-55
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-56
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-57
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-2
4.1.1.	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-2
4.1.2.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-9
4.2	Analisis Isu Strategis.....	IV-23
4.2.1.	Isu Strategis Global	IV-24
4.2.2.	Isu Strategis Nasional	IV-40
4.2.3.	Isu Strategis Regional	IV-42
4.3	Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-53
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi Daerah.....	V-1
5.2	Misi Daerah	V-1
5.3	Agenda Pembangunan.....	V-4
5.4	Tujuan dan Sasaran.....	V-5
5.4.1.	Tujuan Pembangunan Daerah	V-5
5.4.2.	Sasaran Pembangunan Daerah	V-5
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-4
6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-34
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1

BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-2
Tabel II.2.	Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)	II-6
Tabel II.3.	Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-9
Tabel II.4.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2019 dan 2020.....	II-14
Tabel II.5.	Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-15
Tabel II.6.	Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	II-17
Tabel II.7.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel II.8.	Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	II-23
Tabel II.9.	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, <i>Year on Year</i> , Kota Jambi Tahun 2014 - 2020.....	II-26
Tabel II.10.	Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-26
Tabel II.11.	Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-52
Tabel II.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2020	II-65
Tabel II.13.	Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-66
Tabel II.14.	Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-70
Tabel II.15.	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produktivitas Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2016 - 2020	II-71
Tabel II.16.	Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020....	II-75
Tabel II.17.	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel II.18.	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020.....	II-76
Tabel II.19.	Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2015 - 2019	II-77
Tabel II.20.	Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 – 2018	II-78
Tabel II.21.	Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2016 - 2020.....	II-80
Tabel II.22.	Perkembangan Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Produksi Benih Ikan Tahun 2017 – 2020.....	II-81

Tabel II.23.	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-85
Tabel II.24.	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	II-87
Tabel II.25.	Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020	II-88
Tabel II.26.	Perkembangan Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-89
Tabel II.27.	Jumlah Hotel/Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-89
Tabel II.28.	Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-90
Tabel II.29.	Indeks Kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019	II-91
Tabel II.30.	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020	II-92
Tabel II.31.	Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	II-92
Tabel II.32.	Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	II-93
Tabel III.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-3
Tabel III.2.	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-26
Tabel III.3.	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-27
Tabel III.4.	Realisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020	III-28
Tabel III.5.	Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2020	III-48
Tabel III.6.	Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 – 2019	III-54
Tabel III.7.	Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-56
Tabel III.8.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 (Dalam Jutaan)	III-57
Tabel IV.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-3
Tabel IV.2.	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020	IV-10
Tabel IV.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020	IV-11
Tabel IV.4.	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	IV-12

Tabel IV.5.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020.....	IV-15
Tabel IV.6.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020.....	IV-16
Tabel IV.7.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-23
Tabel IV.8.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-31
Tabel V.1.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.....	V-7
Tabel VI.1.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026	VI-11
Tabel VI.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026	VI-15
Tabel VI.3.	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026	VI-39
Tabel VII.1.	Proyeksi Pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Rupiah)	VII-3
Tabel VII.2.	Proyeksi Anggaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026 (Rupiah).....	VII-4
Tabel VII.3.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 (Rupiah).....	VII-5
Tabel VII.4.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	VII-6
Tabel VII.5.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	VII-7
Tabel VIII.1.	Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026.....	VIII-2
Tabel VIII.2.	Indikator Kinerja Makro dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026	VIII-3
Tabel VIII.3.	Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran	I-9
Gambar II.1.	Persentase Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Kecamatan.....	II-2
Gambar II.2.	Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-7
Gambar II.3.	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	II-8
Gambar II.4.	Peta Guna Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur	II-8
Gambar II.5.	Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	II-16
Gambar II.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2016 - 2020.....	II-19
Gambar II.7.	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan MIGAS Tahun 2016 - 2020.....	II-21
Gambar II.8.	Struktur Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	II-23
Gambar II.9.	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 – 2020	II-25
Gambar II.10.	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2020 (persen)	II-25
Gambar II.11.	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020	II-28
Gambar II.12.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020.....	II-29
Gambar II.13.	IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020.....	II-30
Gambar II.14.	Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-31
Gambar II.15.	Tingkat Kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-32
Gambar II.16.	Tingkat Kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-33
Gambar II.17.	APK SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-33
Gambar II.18.	APK SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-34
Gambar II.19.	APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-35
Gambar II.20.	APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-36

Gambar II.21.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-37
Gambar II.22.	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-38
Gambar II.23.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-38
Gambar II.24.	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2019	II-39
Gambar II.25.	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-40
Gambar II.26.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 –2020	II-40
Gambar II.27.	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019.....	II-41
Gambar II.28.	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-42
Gambar II.29.	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	II-43
Gambar II.30.	Rasio Sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun 2016 – 2020.....	II-44
Gambar II.31.	Rasio Sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun tahun 2016 – 2020	II-44
Gambar II.32.	Rasio Guru SD/ sederajat Terhadap Murid SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-45
Gambar II.33.	Rasio guru SMP/Sederajat Terhadap Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-45
Gambar II.34.	Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-46
Gambar II.35.	Ratio Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	II-47
Gambar II.36.	Jumlah dan Ratio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-48
Gambar II.37.	Jumlah dan Ratio Dokter gigi Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-49
Gambar II.38.	Jumlah dan Ratio Tenaga Kefarmasian Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-50
Gambar II.39.	Jumlah dan Ratio Tenaga Perawat Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-51
Gambar II.40.	Jumlah dan Ratio Tenaga Bidan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-51

Gambar II.41.	Jumlah Penduduk Yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-53
Gambar II.42.	Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-54
Gambar II.43.	Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020..	II-55
Gambar II.44.	Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 202	II-56
Gambar II.45.	Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-57
Gambar II.46.	Jumlah Pembangunan Box Culvert di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-57
Gambar II.47.	Perkembangan Jumlah Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-59
Gambar II.48.	Perkembangan Konstruksi Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2019	II-59
Gambar II.49.	Perkembangan Kondisi dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	II-60
Gambar II.50.	Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2016 - 2020.....	II-60
Gambar II.51.	PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efektif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-62
Gambar II.52.	PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efisien di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-62
Gambar II.53.	Peserta KB Baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-63
Gambar II.54.	Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-63
Gambar II.55.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020	II-64
Gambar II.56.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-65
Gambar II.57.	Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	II-67
Gambar II.58.	Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-68
Gambar II.59.	Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	II-68
Gambar II.60.	Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020	II-69

Gambar II.61.	Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-71
Gambar II.62.	Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedele di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-72
Gambar II.63.	Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-73
Gambar II.64.	Jumlah dan Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-74
Gambar II.65.	Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2015 - 2019.....	II-79
Gambar II.66.	Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019.....	II-79
Gambar II.67.	Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019	II-81
Gambar II.68.	Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019	II-82
Gambar II.69.	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2015 - 2019	II-82
Gambar II.70.	Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2015 - 2019.....	II-83
Gambar II.71.	Perkembangan Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2015 - 2019.....	II-84
Gambar II.72.	Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2015 - 2019.....	II-84
Gambar II.73.	Cakupan Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	II-90
Gambar II.74.	Rasio ketergantungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020.....	II-95
Gambar III.1.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-4
Gambar III.2.	Nilai Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-5
Gambar III.3.	Perkembangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-6
Gambar III.4.	Nilai Efektivitas PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-7
Gambar III.5.	Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-8
Gambar III.6.	Nilai Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-8
Gambar III.7.	Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-9
Gambar III.8.	Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-10
Gambar III.9.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-11
Gambar III.10.	Nilai Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-11

Gambar III.11.	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-13
Gambar III.12.	Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-13
Gambar III.13.	Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-14
Gambar III.14.	Nilai Efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-15
Gambar III.15.	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-16
Gambar III.16.	Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-17
Gambar III.17.	Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016- 2020	III-18
Gambar III.18.	Nilai Efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-18
Gambar III.19.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-19
Gambar III.20.	Nilai Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-20
Gambar III.21.	Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-21
Gambar III.22.	Nilai Efektivitas Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-21
Gambar III.23.	Perkembangan Dana Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-22
Gambar III.24.	Nilai Efektivitas Dana Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-23
Gambar III.25.	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-24
Gambar III.26.	Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-24
Gambar III.27.	Perkembangan Pendapatan Hibah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020.....	III-25
Gambar III.28.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-29
Gambar III.29.	Nilai Efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-30
Gambar III.30.	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-31
Gambar III.31.	Nilai Efektivitas Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-32
Gambar III.32.	Perkembangan Belanja Pegawai Daerah Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-33
Gambar III.33.	Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-33

Gambar III.34.	Perkembangan Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-34
Gambar III.35.	Nilai Efektivitas Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-35
Gambar III.36.	Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-36
Gambar III.37.	Nilai Efektivitas Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-36
Gambar III.38.	Perkembangan Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-37
Gambar III.39.	Nilai Efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-38
Gambar III.40.	Perkembangan Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-39
Gambar III.41.	Nilai Efektivitas Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-39
Gambar III.42.	Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-40
Gambar III.43.	Nilai Efektivitas Belanja Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-41
Gambar III.44.	Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020	III-42
Gambar III.45.	Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-43
Gambar III.46.	Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-43
Gambar III.47.	Nilai Efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-44
Gambar III.48.	Perkembangan Belanja Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-45
Gambar III.49.	Nilai Efektivitas Belanja Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020	III-46
Gambar IV.1.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020.....	IV-11
Gambar IV.2.	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020.....	IV-17
Gambar IV.3.	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020	IV-18
Gambar IV.4.	Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020	IV-18
Gambar IV.5.	Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020	IV-19
Gambar IV.6.	Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i>	IV-30

B

A

B

I

PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) .

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak melupakan nilai kekhasan suatu daerah.

Dokumen RPJMD ditinjau dari proses menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan

perencanaan, hal ini bertujuan agar RPJMD dapat menjadi refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Melalui RPJMD diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan lebih terarah dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta kebutuhan masyarakat.

Dokumen RPJMD ditinjau dari substansinya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik merupakan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Pendekatan integratif merupakan keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional dan pendekatan spasial merupakan kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan dilapangan.

Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya Tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknnya kembali Bupati Tanjung Jabung Timur H. Romi Hariyanto, SE dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur H. Robby Nahliansyah, SH pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tetap pada Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

tahun 2021-2026 adalah “*Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)*”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan; 2) Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing; 3) Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari; dan 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis. Penjelasan Visi dan Misi ini akan diuraikan secara rinci pada Bab-bab berikutnya dalam dokumen ini.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 menggunakan sejumlah peraturan sebagai rujukan sebagai berikut :

- A. Peraturan Perundangan yang berlaku
 - 1. Landasan idiil dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah Pancasila, dan
 - 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- B. Landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu :
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

- Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJMD ini Selain menjabarkan, dan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 sebagai rujukan dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. RPJMN 2020 - 2024

menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

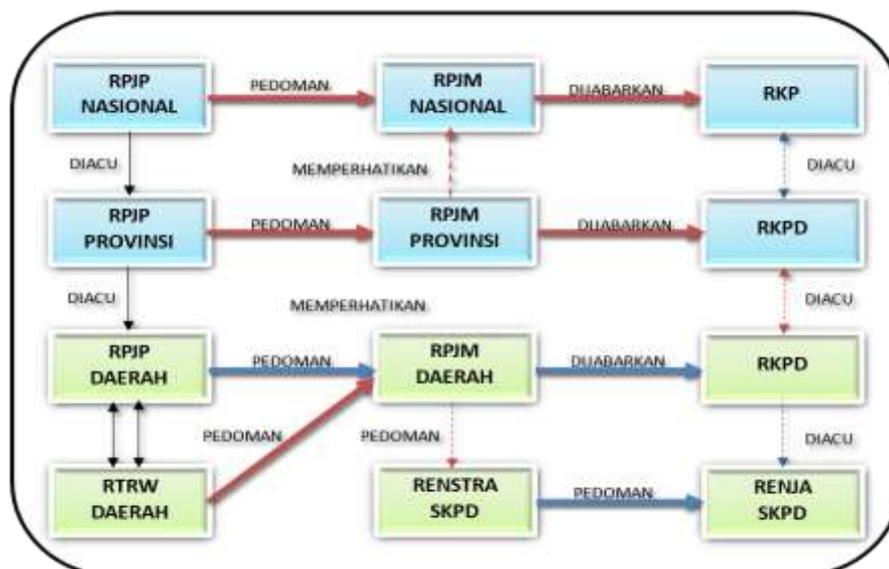
6. RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan rinci bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1

Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan metoda dan pendekatan kerangka fikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 2021-2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun kedepan.

B

A

B

II

Gambaran

Umum

Kondisi

Daerah

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

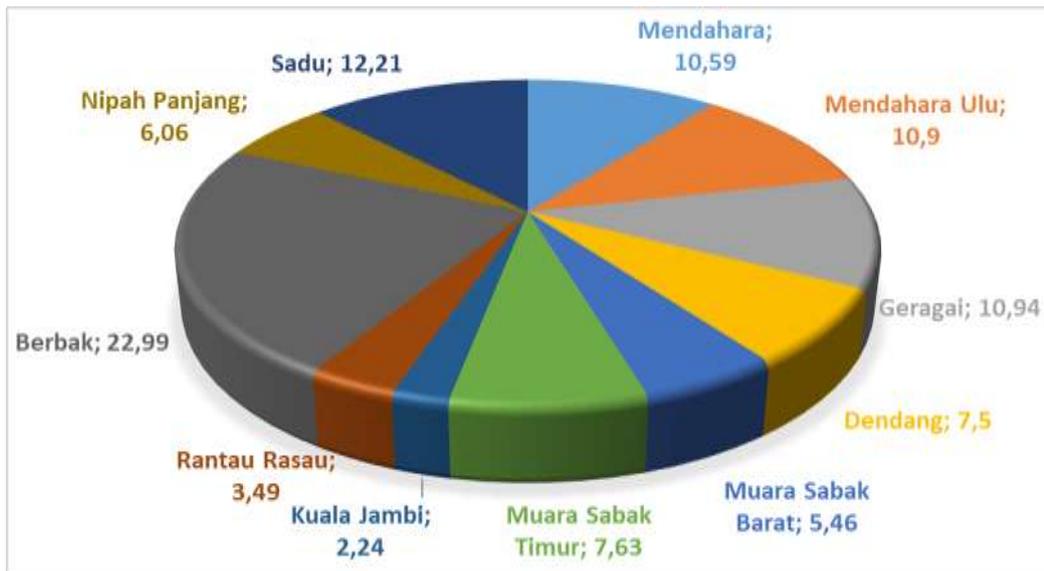
Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas wilayah 5.445,0 Km².

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031, luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 8.507,70 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.085,705 Km² dan lautan atau perairan seluas 3.421,995 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Apabila ditinjau dari sudut Kecamatan, wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kecamatan Berbak yaitu meliputi 22,99% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 2,24%.

Gambar II.1.
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	538,578	10,59
2.	Mendahara Ulu	1	6	554,226	10,90
3.	Geragai	1	8	556,303	10,94
4.	Dendang	1	6	381,516	7,50
5.	Muara Sabak Barat	7	0	277,469	5,46
6.	Muara Sabak Timur	2	10	388,059	7,63

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
7.	Kuala Jambi	2	4	113,952	2,24
8.	Rantau Rasau	1	10	177,552	3,49
9.	Berbak	1	5	1.169,17	22,99
10.	Nipah Panjang	2	8	307,941	6,06
11.	Sadu	1	8	620,939	12,21
JUMLAH		20	73	5.085,705	100,00

Sumber : Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8 - 9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Sebaran desa/kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada di sekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara dan antara 103°23' - 104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat terhambat sampai terhambat sehingga menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input

drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (*Bench Mark*) BK 63.

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesearangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai kelulusan 10 - 5 s/d 10 - 2 m/h dan material kasar antara 10 - 1 s/d 10 - 2 m/h. Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang.

2. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan.

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, menempati sebagian kecil daerah penyelidikan.

Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 akuifer sebagai berikut :

- Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.
- Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batulanau dan napal. Ditemui setempat-setempat dengan luas singkapan relatif sempit.

2.1.1.5. Hidrologi

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah

ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadikan daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh.

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometrik sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai permukiman dan lahan pertanian.

A. Pasang Air Laut

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang besar.

- Pasang Kecil (Pasang perbani)
- Pasang Besar (Pasang purnama)

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, *neap-tide*) pasang surut di kawasan perencanaan berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan selama pasang besar (pasang purnama, *spring-tide*) pasang surut menjadi diurnal, dengan hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air terendah (*tidal range*) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada

pasang besar. Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10 - 30 cm lebih tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus.

B. Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hampir tidak ada fluktuasi pasang yang terjadi di sebelah hulu (Simpang).

Tabel II.2.
Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)

Sungai & Lokasi	Jarak dr Muara Sungai	Pasang Surut	Musim Hujan				Musim Kemarau			
			Pasang	Rata ²	Surut	Range	Pasang	Rata ²	Surut	Range
Sungai Batanghari										
Pertemuan	61 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,90	+ 1,00	+ 1,50	+ 2,40	+ 1,50	+ 0,30	+ 2,10
Berbak		Rata ²	+ 2,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 1,10	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,50	+ 1,70
		Perbani	+ 2,20	+ 1,90	+ 1,50	+ 0,70	+ 2,10	+ 1,50	+ 0,90	+ 1,20
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30										
Pertemuan	41 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,60	+ 0,20	+ 2,30	+ 2,40	+ 1,30	- 0,40	+ 2,80
Pamusiran		Rata ²	+ 2,30	+ 1,60	+ 0,50	+ 1,80	+ 2,20	+ 1,30	- 0,10	+ 2,30
		Perbani	+ 2,20	+ 1,60	+ 1,00	+ 1,20	+ 2,10	+ 1,30	+ 0,50	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10										
Sungai Pamusiran										
Pamusiran	31 km	Purnama	+ 2,30	+ 1,50	+ 0,00	+ 2,30	+ 2,20	+ 1,20	- 0,60	+ 2,80
AWLR		Rata ²	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,00	+ 1,20	- 0,30	+ 2,30
		Perbani	+ 2,10	+ 1,50	+ 1,80	+ 1,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 0,30	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80										
Sungai Berbak										
Nipah	0 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,30	- 0,80	+ 3,30	+ 2,40	+ 1,10	- 0,10	+ 3,50
Panjang		Rata ²	+ 2,30	+ 1,30	- 0,40	+ 2,70	+ 2,20	+ 1,10	- 0,70	+ 2,90
		Perbani	+ 2,20	+ 1,30	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,10	+ 1,10	+ 0,00	+ 2,10

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 - 2031

C. Kualitas Air dan Rembesan Air Laut

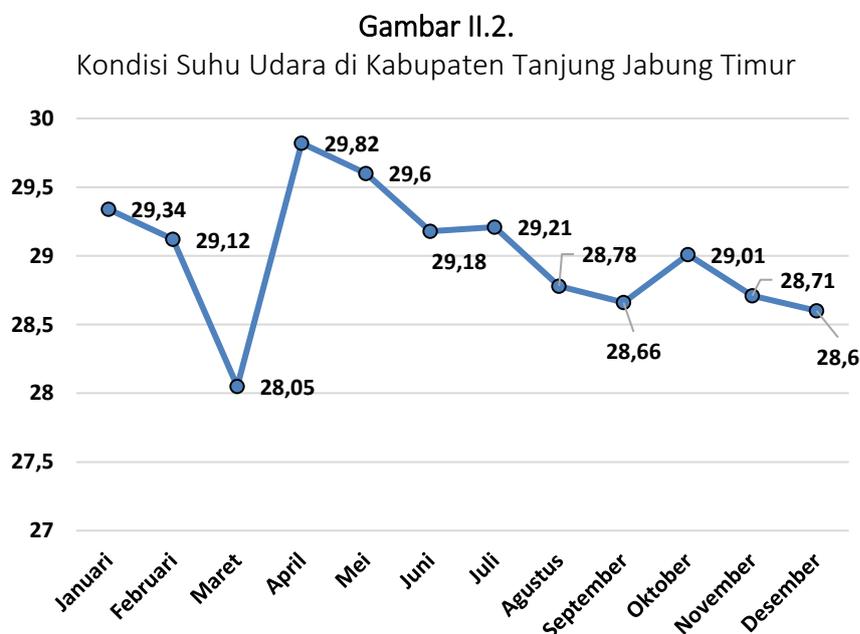
Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sungai Berbak, Sungai Batanghari, dan Sungai Pemusiran serta saluran-saluran drainase/irigasi. Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air

minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan antara bulan September - Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik dipakai untuk irigasi tanaman.

2.1.1.6. Klimatologi

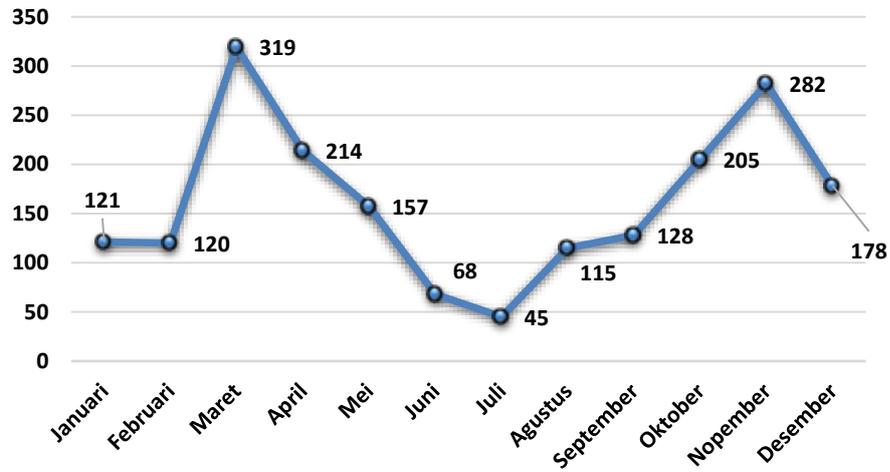
Iklim merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil tidaknya pembangunan. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun. Pada Tahun 2019 Suhu udara rata-rata sebesar 27,324° Celsius dengan Suhu Maksimum sebesar 28,246° Celsius pada bulan Mei dan Suhu Minimum sebesar 26,596° Celsius pada bulan April. Curah Hujan rata-rata sebesar 162,6 mm per tahun. Curah Hujan maksimum sebesar 319 mm pada bulan maret dan minimum sebesar 45 mm pada bulan Juli. Kondisi Suhu dan Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2021

Gambar II.3.
Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

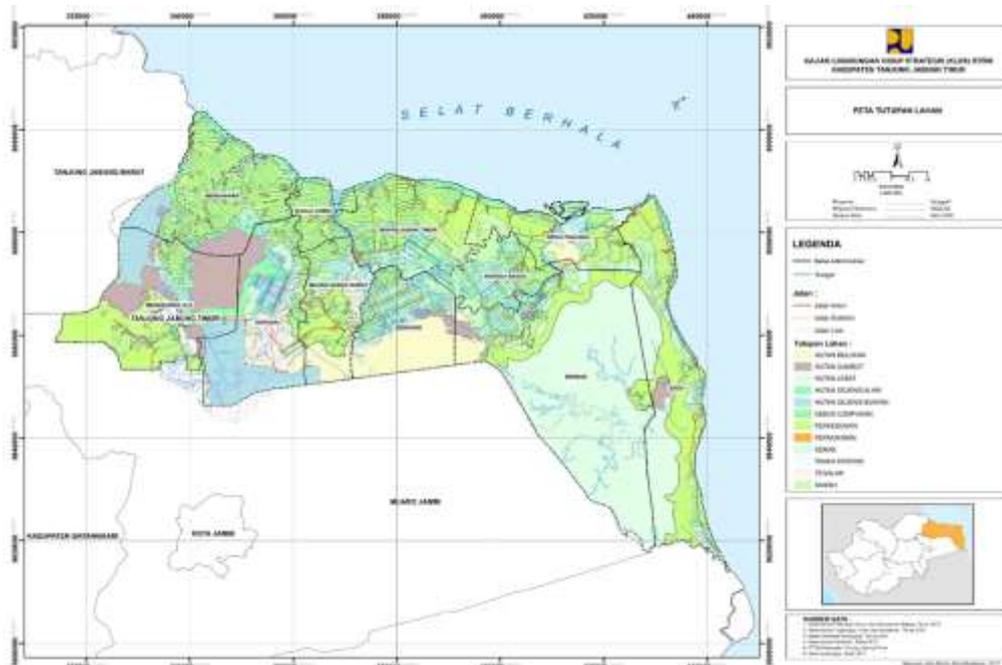


Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2020

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan SIG (*interpretasi citra satelit*), maka diperoleh penggunaan lahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut.

Gambar II.4.
Peta Guna Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur



Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Tabel II.3
Pergunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Pergunaan Lahan (Ha)											Total	
		Hutan					Perkebunan		Sawah		Tanah Kosong			Peremukimanan
		Hutan Belukar	Hutan Gambut	hutan lebat	Hutan Sejenis Alam	Hutan Sejenis Buatan	Perkebunan Campuran	Perkebunan	Sawah	Tegalan	Semak Belukar	Lahan Kosong		
1	Mendahara Ulu	2.807,48	17.527,01	-	3.254,61	329,09	12,63	29.956,79	992,21	93,91	2.285,41	1.308,80	173,61	58.741,55
2	Geragai	4.402,33	3.645,16	-	4.112,09	15.026,40	1.141,49	5.098,31	1.322,34	8.991,11	5.622,74	-	249,75	49.611,72
3	Kuala Jambi	-	-	-	966,69	-	-	9.150,82	543,32	-	46,08	-	271,12	10.978,03
4	Mendahara	281,89	4.483,85	-	4.585,92	4.376,10	-	31.724,33	361,16	-	3.475,10	-	770,69	50.059,04
5	Dendang	18.585,89	1.291,91	-	-	-	-	2.677,83	7.749,58	-	2.631,09	-	876,11	33.812,41
6	Muara Sabak Barat	7.849,98	-	-	675,81	961,92	116,36	12.198,11	1.985,57	-	3.751,75	-	733,13	28.272,62
7	Muara Sabak Timur	-	-	-	2.170,84	-	1.201,89	23.826,91	9.255,10	-	2.611,54	-	437,82	39.504,10
8	Rantau Rasau	0,63	-	-	-	-	441,31	4.366,06	12.465,99	-	1.892,72	-	395,68	19.562,39
9	Berbak	4.211,45	1.302,40	82.339,54	-	-	443,52	13.383,75	6.339,78	-	3.256,19	-	363,54	111.640,17
10	Nipah Panjang	2.892,90	-	-	2.568,73	-	-	12.958,04	6.005,96	-	3.975,21	-	168,38	28.569,22
11	Sadu	85,84	1.527,44	18.377,32	2.218,74	-	-	31.421,23	3.174,21	-	3.843,47	-	120,81	60.769,06
Jumlah/Total		41.118,39	29.777,77	100.716,86	20.553,43	20.693,51	3.357,20	176.762,18	50.195,22	9.085,02	33.391,30	1.308,80	4.560,64	491.520,31
						212.859,96		180.119,38		59.280,24		34.700,10		4.560,64

Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019 (data diolah)

2.1.1.8. Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

A. Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Rencana kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, didistribusikan untuk fungsi sebagai berikut :

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya :
 - berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.693 hektar terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Dendang.

b. Kawasan perlindungan setempat :

1. Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 999 hektar meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.
2. Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 5.123 hektar meliputi Sungai Batang Hari, Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut.
3. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

c. Kawasan konservasi

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 4.944 hektar terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang.
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional Berbak Sembilang dengan luas kurang lebih 122.416 hektar terdapat di Kecamatan Berbak dan Sadu dan Taman Hutan Raya dengan luas kurang lebih 3.157 hektar terdapat di Kecamatan Berbak.
3. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KLDD) meliputi Reservat (Sinoran) sungai Sinoran di Kecamatan Mendahara dengan luas kurang lebih 100 hektar dan *Reservat* (Lembur lestari) kuala sunai Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas kurang lebih 100 hektar.

B. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas :

1. Kawasan Hutan Produksi berupa :

- a. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 60.090 hektar meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Dendang.

- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 1.374 hektar meliputi Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai.
2. Kawasan Pertanian;
Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 262.760 hektar meliputi fungsi sebagai berikut:
 - a) Kawasan Tanaman Pangan,
kawasan tanaman pangan ditetapkan dengan luas kurang lebih 43.872 hektar.
 - b) Kawasan Hortikultura;
Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 29.168 hektar.
 - c) Kawasan Perkebunan;
Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 188.358 hektar.
3. Kawasan Perikanan;
terdiri atas : kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya dan prasarana perikanan.
4. Kawasan Pertambangan dan Energi;
kawasan pertambangan dan energi, terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral bukan logam dan atau batuan terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Dendang.
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di seluruh Kecamatan kecuali di Kecamatan Sadu.
5. Kawasan Peruntukan Industri;
 - a. Kawasan industri Kecamatan Sadu dengan luasi 4.134 hektar dan
 - b. Kawasan industri Kecamatan Muara Sabak Barat seluas 1.672 hektar.
6. Kawasan Pariwisata;
 - a. Kawasan Wisata Alam.
Kawasan wisata alam meliputi :

1. Kawasan Prioritas Pariwisata Daerah (KPPD), meliputi :
 1. Sadu dan Sekitarnya;
 2. Komplek perkantoran Muara Sabak Barat;
 3. Nipah Panjang dan sekitarnya;
 4. Teluk Majelis dan sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), meliputi :
 1. Sungai Batanghari dan sekitarnya;
 2. Berbak dan sekitarnya.
3. kawasan Taman Nasional Berbak di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.
- b. Kawasan Wisata Religi meliputi:
 1. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kecamatan Berbak;
 2. Makam Habib Salim di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 3. Makam Naga Ukir di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 4. Makam Syekh Johor di Kecamatan Kuala Jambi;
 5. Makam Siti Hawa di Kecamatan Rantau Rasau; dan
 6. Makam Datuk Dendang di Kecamatan Muara Sabak Barat.
- c. Kawasan Wisata Budaya meliputi:
 1. kawasan wisata mandi safar Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang;
 2. Mandi Air Masin di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan
 3. Makan dikelung di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi.
7. Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 12.496 hektar, terdiri atas :
 - a. Kawasan permukiman perkotaan yang berada diseluruh Kecamatan ; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang berada diseluruh Kecamatan.

2.1.1.9.Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Muara Sabak;
2. Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Kecamatan Sadu;
3. Kawasan Agropolitan Rantau Rasau dan sekitarnya;
4. Kawasan pengolahan industri hasil tambang minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai;
5. Kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya;
7. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Geragai.

2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, daerah rawan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. ***Kawasan rawan bencana banjir*** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau.
2. ***Kawasan rawan bencana kebakaran*** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Mendahara Ulu.
3. ***Kawasan rawan bencana gelombang pasang*** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Muara Sabak Barat.

4. **Kawasan rawan bencana puting beliung** yang lokasinya terletak di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Kuala Jambi.

2.1.2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan 1,1 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2019 sebesar 45 jiwa/km² dan sex ratio 104,33.

Dari data pada tabel II.4 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Rantau Rasau, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah relatif kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel II.4.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	2019			2020		
	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Mendahara	26.443	104,22	29,01	26.675	104,23	50,00
Mendahara Ulu	19.001	112,87	49,83	16.676	108,14	30,00
Geragai	23.435	113,53	82,13	26.202	105,82	47,00
Dendang	15.078	103,76	31,53	16.485	103,95	43,00
Ma Sabak Barat	18.092	105,31	71,86	21.409	103,22	77,00
Ma Sabak Timur	31.475	101,13	76,72	32.606	102,36	84,00
Kuala Jambi	14.755	102,82	122,43	14.485	106,54	127,00
Rantau Rasau	23.831	104,86	66,92	24.780	103,52	140,00
Berbak	9.939	104,89	51,11	10.591	106,45	9,00
Nipah	25.660	102,22	109,33	26.503	102,48	86,00
Sadu	12.276	105,9	6,74	13.401	105,35	22,00
Jumlah	219.985	105,36	40,4	229.813	104,33	45,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Dari tabel diatas terlihat dimana kepadatan penduduk pada tahun 2020 (45/Km²) meningkat dari tahun 2019 (40,4 Km²). Tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk terbesar

berada di Kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 140/Km², sementara tingkat kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Berbak sebesar 9/ Km².

Selanjutnya, struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga kelompok yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0 - 14 tahun yang jumlahnya mencapai 55.654 jiwa atau sekitar 24,22 persen dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15 - 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 159.877 jiwa atau 69,57 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif yaitu yang berumur dari 65 - 75+ mencapai 14.282 Jiwa atau sebesar 6,21 persen dari total jumlah penduduk. Pengelompokan umur penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan rasionya disajikan pada Tabel II.5.

Tabel II.5.
Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

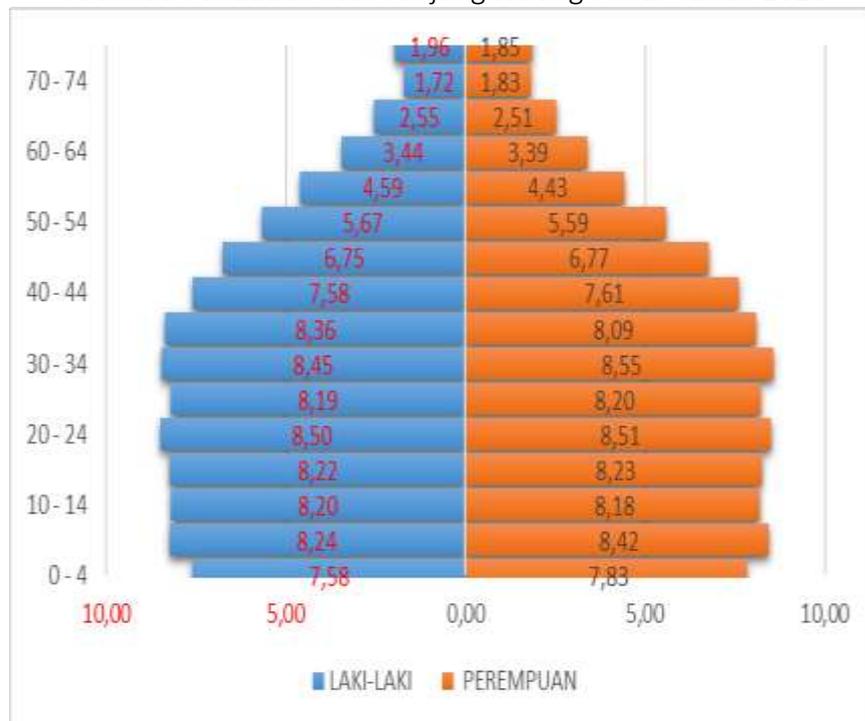
KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
0 - 4	8.896	8.804	17.700	101,04
5 - 9	9.665	9.473	19.138	102,03
10 - 14	9.620	9.196	18.816	104,61
15 - 19	9.650	9.257	18.907	104,25
20 - 24	9.978	9.576	19.554	104,20
25 - 29	9.613	9.219	18.832	104,27
30 - 34	9.911	9.620	19.531	103,02
35 - 39	9.810	9.099	18.909	107,81
40 - 44	8.895	8.557	17.452	103,95
45 - 49	7.922	7.614	15.536	104,05
50 - 54	6.648	6.286	12.934	105,76
55 - 59	5.392	4.986	10.378	108,14
60 - 64	4.031	3.813	7.844	105,72
65 - 69	2.989	2.824	5.813	105,84
70 - 74	2.023	2.063	4.086	98,06
75+	2.302	2.081	4.383	110,62
	117.345	112.468	229.813	104,34

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5 - 19 tahun) mencapai 24,74 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) jumlahnya mencapai 76.415 jiwa atau sebesar 33,25 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar II.5.

Gambar II.5.
Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) *Expansive*, bila sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) *Constructive*, bila penduduk yang berada pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian

bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) *Stationary*, bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori "*expansive*". Dalam bentuk piramida ini akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan angka kelahiran rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur di atasnya terutama umur 15 - 29 tahun dimana pada kelompok perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk kelompok usia subur yang berpotensi pada peningkatan total kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa pemeluk agama islam dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah terbesar berikutnya berturut turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Keragaman penganut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran komposisi Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.6.

Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Mendahara	25.954	11	14	-	5	-
Mendahara Ulu	16.955	479	-	-	-	-
Geragai	20.764	103	653	1	3	-
Dendang	19.534	155	200	2	4	-
Muara Sabak Barat	8.871	29	261	-	-	-
Muara Sabak Timur	39.451	245	8	-	-	-

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kuala Jambi	14.304	2	85	-	16	6
Rantau Rasau	22.802	172	201	-	-	-
Berbak	9.828	24	45	-	-	-
Nipah Panjang	26.396	15	91	135	-	-
Sadu	12.174	24	8	35	39	-
Total	227.033	1.259	1.566	173	67	6

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

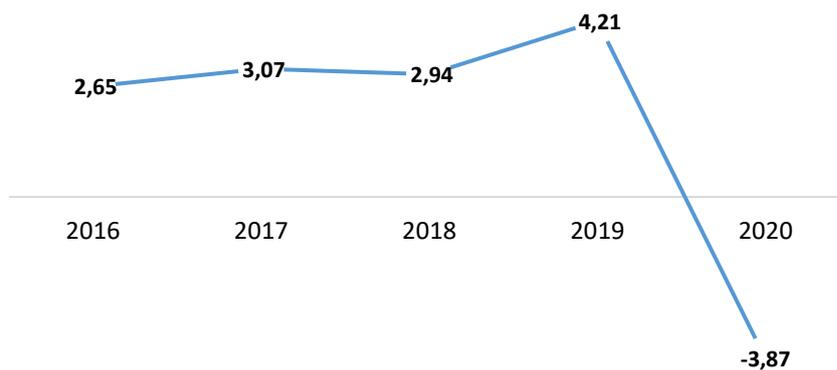
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 mengalami tren peningkatan cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami pemerosotan yang cukup tajam. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,65 persen meningkat menjadi 3,07 persen pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,09 persen, meningkat kembali 4,25 persen pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2019 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia yang dimulai dari Propinsi Wuhan di China dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat Harus beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial Yang Diakibatkannya. Pola kehidupan sosial Pra-Pandemi harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan menuju kenormalan baru atau New Normal. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul

perekonomian Nasional termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan ekonomi merosot tajam dibawah nol persen yaitu minus 3,87 persen dan dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar minus 0,46. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.6.

Gambar II.6.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Berbeda dari tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang ditopang oleh 17 sektor, 8 sektor diantaranya tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi secara berurutan dari yang tertinggi dicapai oleh kategori sebagai berikut : 1) Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,81 persen; 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,13 persen; 4) Industri Pengolahan sebesar 5,18 persen; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,42 persen; 6) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,01 persen; 7) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,68 persen; 8) Industri Pengolahan sebesar 1,25 persen; 9) Jasa Pendidikan sebesar 0,40 persen; 10) Konstruksi sebesar - 0,09 persen; 11) Real Estate sebesar - 0,18 persen; 12) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar - 0,34 persen; 13) Jasa Perusahaan sebesar - 0,34 persen, 14) Transportasi dan Pergudangan sebesar - 1,25 persen, 15) Jasa lainnya sebesar -1, 52 persen dan 16) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 7,24 persen dan 17) Pertambangan dan Penggalan

sebesar - 7,47 persen. Tabel II.7. menunjukkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada periode tahun 2016 – 2020.

Tabel II.7.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,58	6,41	4,11	2,95	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	- 0,31	0,87	1,53	4,38	-7,47
C	Industri Pengolahan	1,08	1,93	4,35	0,28	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,26	2,00	4,43	3,42	5,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,13	2,61	7,24	5,46	6,81
F	Konstruksi	6,54	13,32	5,79	7,54	-0,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	7,19	6,01	6,19	3,01
H	Transportasi dan Pergudangan	7,74	6,17	4,66	5,20	-1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,29	10,54	8,11	2,44	-7,24
J	Informasi dan Komunikasi	9,91	7,69	9,46	7,69	7,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	5,40	1,24	3,85	3,42
L	Real Estate	8,23	8,81	8,48	9,13	-0,18
M,N	Jasa Perusahaan	7,67	5,32	4,51	3,33	-0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	4,55	5,46	4,55	-0,34
P	Jasa Pendidikan	8,59	6,03	4,88	6,03	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	6,06	4,88	6,07	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,83	5,37	6,67	4,11	-1,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,65	3,07	2,94	4,25	-3,87

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2021

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

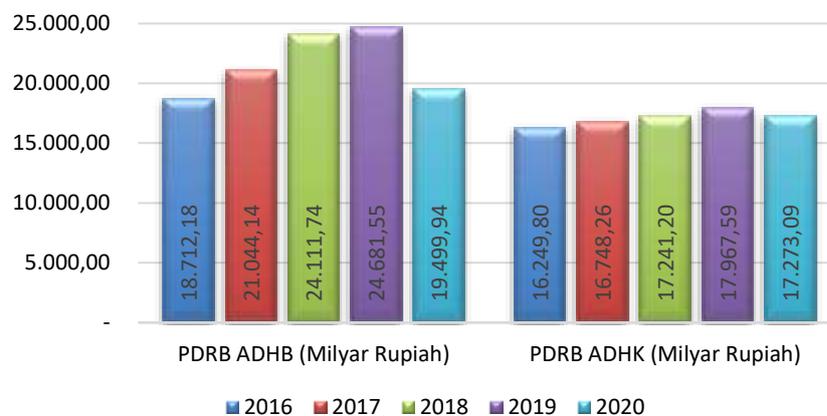
Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku yang digunakan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami penurunan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2020 menurut lapangan usaha dalam satuan milyar sebesar Rp 24.681,55 turun sebesar Rp. 5.181,61 menjadi Rp. 19.499,94 pada Tahun 2020. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam satuan milyar Tahun 2019 sebesar Rp. 17.967,59 menurun sebesar Rp. 694,5 pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 17.273,09. Nilai PDRB tersebut diatas dalam satuan milyar rupiah. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.7.

Gambar II.7.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan Migas Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

2.2.1.3. Struktur Ekonomi

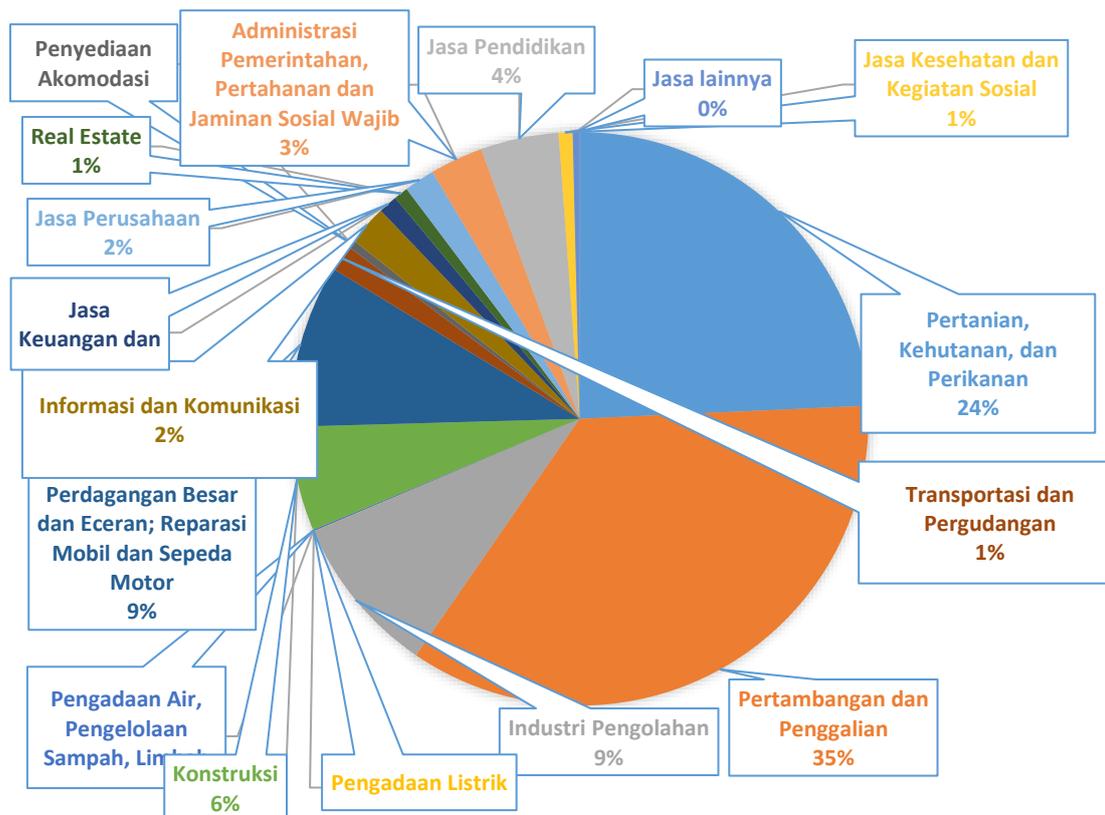
Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2017 – 2020 didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Tahun 2020 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 35,3 persen (angka ini turun dari 50,13 pada Tahun 2019), urutan kedua yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,27 persen (naik dari 18,33 persen pada Tahun 2019), urutan ketiga yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,2 persen (naik dari 7,35 persen pada Tahun 2019), urutan keempat yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 9 persen (naik dari 7,04 persen pada Tahun 2019), dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 5,88 persen (naik dari 4,55 persen pada Tahun 2019).

Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peranan yang cenderung meningkat. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sempat meningkat pada tahun 2018 namun mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020. Sedangkan kategori lapangan usaha Industri pengolahan pada tahun 2016-2019 peranannya cukup stabil pada angka 7-8 persen dan meningkat menjadi 9 persen pada tahun 2020. Gambar II.5 dan Tabel II.8. menunjukkan struktur ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dan peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.

Gambar II.8.

Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapangan usaha, 2021.

Tabel II.8.

peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,16	19,17	17,76	18,31	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	48,27	49,39	52,20	50,16	35,30
C	Industri Pengolahan	7,90	7,71	7,16	7,04	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
F	Konstruksi	4,25	4,37	4,24	4,55	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,20	6,92	7,34	9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,31	1,26	1,17	1,22	1,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,39	0,37	0,39	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,48	1,64	2,23

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,83	0,76	0,80	1,06
L	Real Estate	0,59	0,59	0,58	0,62	0,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	1,31	1,24	1,34	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,26	2,22	2,34	2,97
P	Jasa Pendidikan	3,14	3,14	3,04	3,32	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,50	0,54	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,29	0,28	0,27	0,30	0,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapangan usaha, 2021

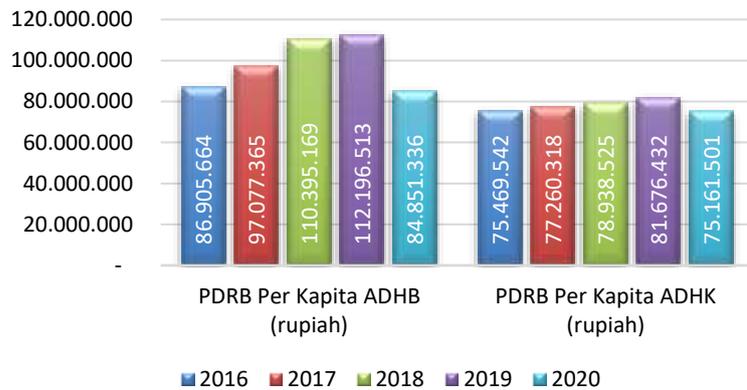
2.2.1.4. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2015-2019, namun mengalami kontraksi dan melemah pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 84.851.336,00 mengalami penurunan bila dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 112.262.791 atau melemah sebesar minus 24,37 persen, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami pelemahan sebesar minus 7,98 persen pada Tahun 2020 atau sebesar Rp. 75.161.501,00 Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. PDRB per kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.9. dan untuk grafik laju pertumbuhan PDRB per kapita Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.10.

Gambar II.9.

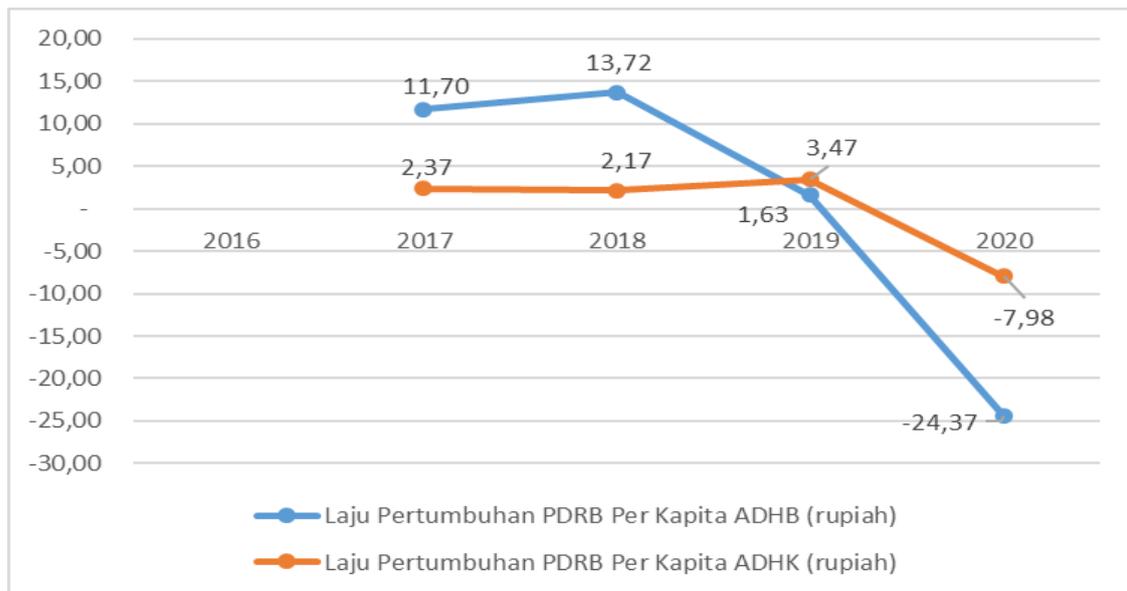
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2020.

Gambar II.10.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2020 (persen)



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021.

2.2.1.5. Inflasi

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti.

Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang. Tingkat Inflasi Kota Jambi dijadikan sebagai acuan inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel II.9.
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on Year*, Kota Jambi Tahun 2016 - 2020

NO	INFLASI	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desember	0,36	1,52	0,98	0,38	0,72
2	Desember (Tahun Kalender)	4,54	2,61	3,02	1,27	3,09
3	Desember terhadap Desember (year on year)	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

2.2.1.6. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju ke arah ketimpangan yang hampir sempurna, akan tetapi perlu mendapat perhatian karena adanya trend naik sejak capaian pada Tahun 2016 yang sebesar 0,26 dibanding Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sebesar 0,29. Data pada Tabel II.10. disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020.

Tabel II.10.
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gini Ratio	0,26	0,28	0,29	0,29	0,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Saat ini Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

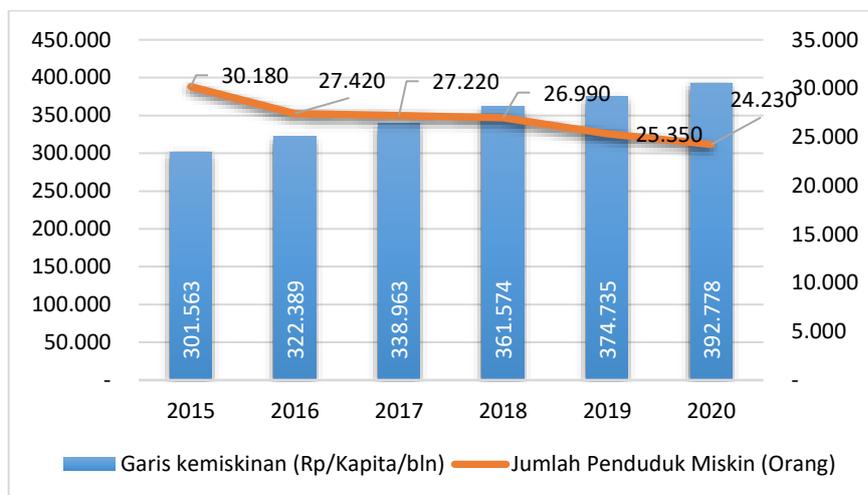
Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan tren angka menurun. Pada Tahun 2015 penduduk miskin berjumlah 30.180 orang. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.420 orang pada Tahun 2016, 27.220 orang pada Tahun 2017, 26.990 pada Tahun 2018, 25.350 pada Tahun 2019 dan 24.230 orang pada Tahun 2020.

Sementara pendapatan keluarga miskin pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 301.563 kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2020 menjadi Rp. 392.778. Grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode Tahun 2015 - 2020 disajikan pada Gambar II.11.

Gambar II.11.

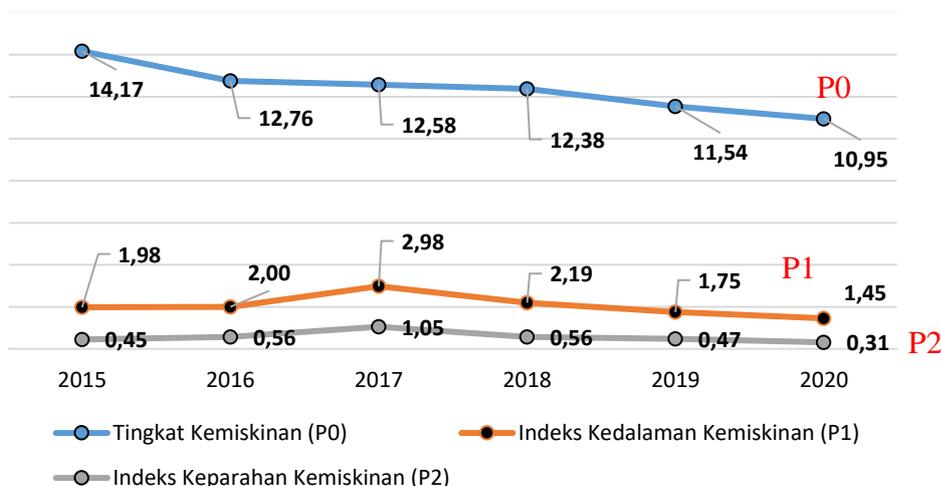
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahannya kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar II.12.

Gambar II.12.
 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif selama periode 2015 sampai dengan 2020. dimana pada Tahun 2015 P1 berada di posisi 1,98 persen kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2,98 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 1,45. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,45 tahun 2015 menjadi 1,05 pada Tahun 2017 dan menurun menjadi 0,31 pada Tahun 2020.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia merupakan suatu proses manusia agar mampu memiliki pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya yang lebih baik. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

UNDP menyempurnakan metode IPM dengan metode baru pada Tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar

daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Gambar II.13. menunjukkan angka IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.13.
IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 berada di posisi angka 61,88 kemudian terus mengalami peningkatan secara nyata tiap tahunnya hingga pada Tahun 2020 menjadi 64,43. Rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung

Jabung Timur sebesar 1,01 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 1,18 persen dan terendah pada pada Tahun 2020 yaitu 0,80 persen.

2.2.2.2. Angka melek huruf

Angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun belakangan ini cenderung naik setiap tahun. Jika pada Tahun 2016, angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 97,75 persen meningkat menjadi sebesar 99,27 persen di Tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,39 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 0,40 persen dan terendah pada pada Tahun 2018 yaitu 0,36 persen. Gambar II.14. menunjukkan angka melek huruf dan pertumbuhannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.14.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021 (data diolah)

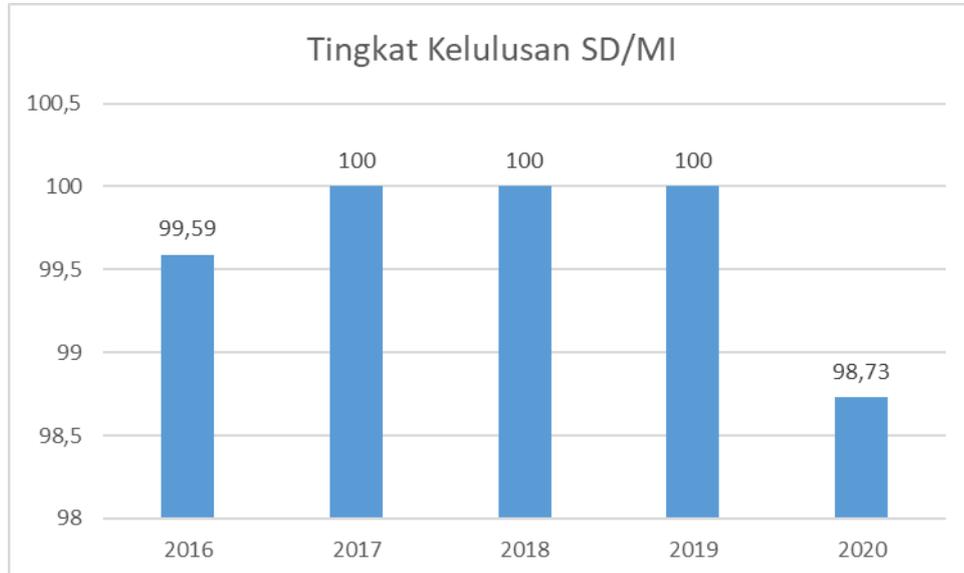
2.2.2.3. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tingkat kelulusan SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yaitu 99,59 persen Tahun 2016 meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2017 dan seterusnya stabil sampai tahun 2019 dengan capaian 100 persen. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 98,73 persen. Tingkat

kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.15.

Gambar II.15.

Tingkat Kelulusan SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

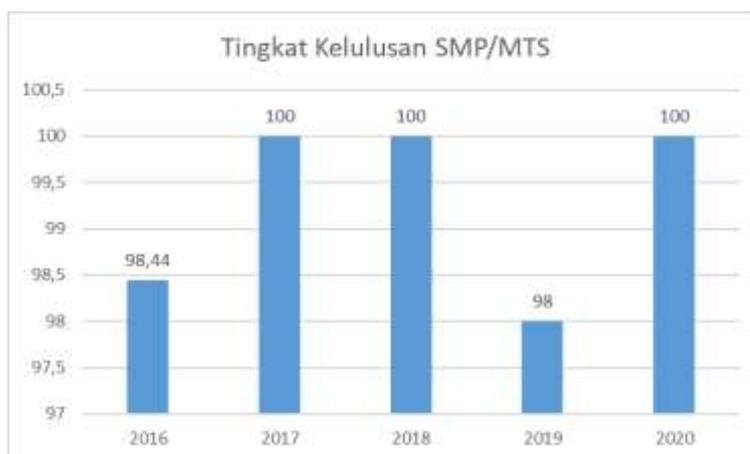


Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021

Tingkat kelulusan SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama juga cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tergambar dari tingkat kelulusan SMP/Sederajat sebesar 98,44 persen pada Tahun 2016, kemudian mencapai 100 persen pada Tahun 2017 dan 2018, turun kembali menjadi 98 persen pada Tahun 2019 dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 100 persen. Tingkat kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.16.

Gambar II.16.

Tingkat Kelulusan SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



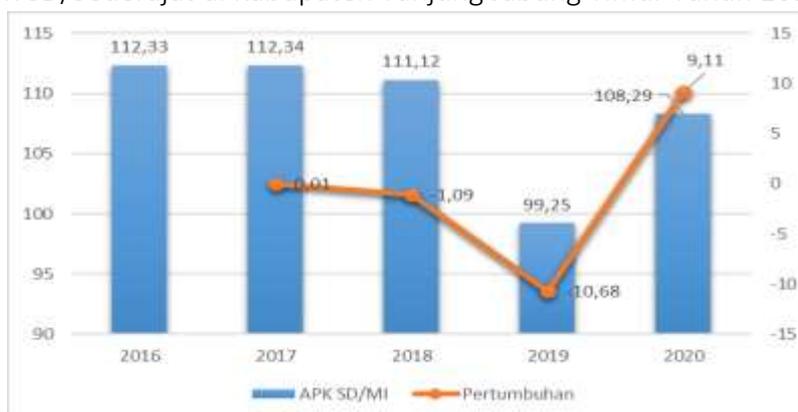
Sumber : LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur, 2021 (data diolah)

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SD/Sederajat dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.17.

Gambar II.17.

APK SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung menurun sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Hal ini terlihat dari gambar II.17 dimana pada Tahun 2016 APK SD/Sederajat sebesar 112.33 persen mengalami penurunan menjadi 99,25 persen pada Tahun 2019, namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 108,29 persen. Rata-rata pertumbuhan minus 0,66 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 9,11 persen dan pertumbuhan terendah pada Tahun 2019 sebesar minus 10,68 persen.

APK SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi cenderung penurunan. Pada tahun 2016 APK SMP/Sederajat sebesar 97.83 persen mengalami penurunan menjadi sebesar 90,44 persen pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 92,42 persen pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 APK SMP/Sederajat kembali mengalami penurunan menjadi 88,44 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 91,63 persen. Rata-rata pertumbuhan pertahun dalam periode lima Tahun 2016-2020 sebesar minus 1,52 persen. Angka Partisipasi Kasar tingkat (APK) SMP/Sederajat dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.18.

Gambar II.18.

APK SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



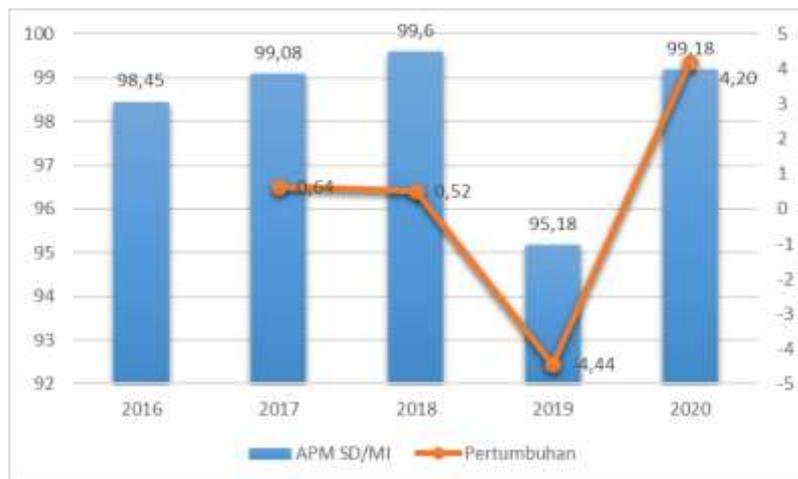
Sumber : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPJ Bupati 2019 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD/MI yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 - 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Gambar II.19. menunjukkan APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.19.

APM SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPJ Bupati 2019 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020.

Capaian APM SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 fluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan dari sebesar 98,45 pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 99,6 persen pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar minus 4,44 persen menjadi 95,18 persen, namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 99,18 persen.

Adapun laju pertumbuhan capaian APM SD/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,23 persen per tahun.

Sedangkan capaian APM SMP/ Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode yang sama mengalami fluktuasi cenderung menurun. Adapun capaian APM SMP/Sederajat sebesar 85,23 persen Tahun 2016 mengalami penurunan hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 80,73 persen. Pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 81,87 persen. Laju pertumbuhan capaian APM SMP/Sederajat Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun dengan rata-rata minus 0,99 persen per tahun. APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.20.

Gambar II.20.

APM SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2019, LKPI Bupati 2019 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada Periode Tahun 2016 - 2020, angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2016 sebesar 6,32 tahun meningkat menjadi 6,70 tahun pada Tahun 2020. Peningkatan pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2016 – 2020 rata-rata sebesar 1,5 persen setiap tahunnya.

Rata-Rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Upaya

percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama sekolah yang hanya 6,7 tahun berarti rata-rata penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya sampai sekolah kelas 6 SD sampai 1 SLTP.

Gambar II.21.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Periode Tahun 2016 – 2020 terus mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2016 sebesar 11,48 tahun meningkat menjadi 12,16 tahun pada Tahun 2020. Peningkatan persentase Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,45 persen setiap tahunnya.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2020 sebesar 12,16 tahun. Artinya, secara rata-rata anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,16 tahun atau setara dengan SLTA kelas 3 (menamatkan SLTA).

Gambar II.22.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.2.2.8. Angka usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Terdapat peningkatan pada angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2016 – 2020, dimana angka harapan hidup sebesar 65,56 tahun pada Tahun 2016 meningkat menjadi 66,23 tahun pada Tahun 2020. Angka harapan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.23.

Gambar II.23.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator Angka

Harapan Hidup melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan dan pelayanan kesehatan.

2.2.2.9. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian global dan menjadi salah satu indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi resiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2016 – 2020 meskipun fluktuatif tetapi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 8 kasus terus menurun menjadi 2 kasus pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6 kasus kematian ibu.

Gambar II.24.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



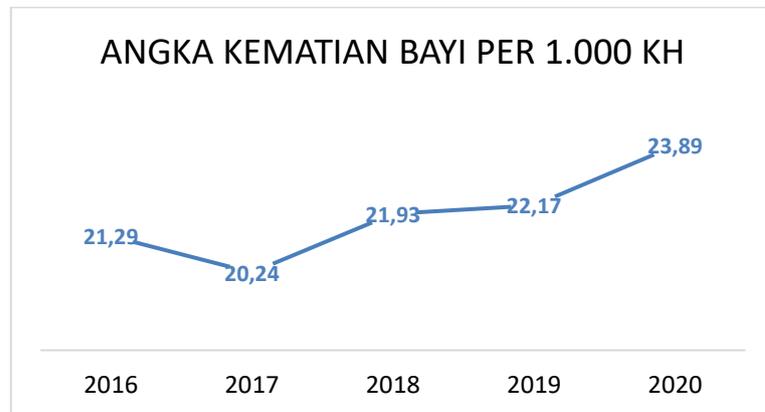
Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.2.2.10. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal

Angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum tepat berusia satu tahun. Berbeda dengan Angka Kematian Bayi, pada Angka Kematian Neonatal kematian bayi yang terjadi saat bayi berumur tepat dan sebelum 28 hari. Target *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada Tahun 2030 menghakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian bayi dan Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.25.

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.26.

Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 –2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi dan Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2017 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH mengalami penurunan dari 21,29 pada Tahun 2016 menjadi 20,24, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 menjadi 21,93 , 22,17 dan 23,89.

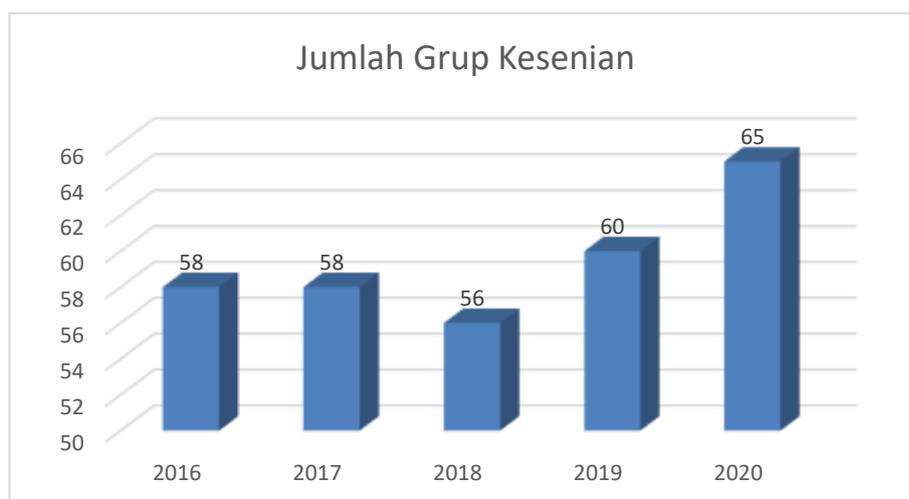
Angka Kematian Neonatal pada Tahun 2017 juga mengalami penurunan dari 21,29 menjadi 20,24 kematian neonatal per 1.000 KH. Kemudian meningkat lagi pada Tahun 2018 menjadi 21,65. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 21,63 kematian neonatal per 1.000 KH dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 23,89.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2016, hanya pada Tahun 2018 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 terdapat 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk naik menjadi sebanyak 65 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian di Tahun 2020. Gambar II.27. menunjukkan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.27.
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



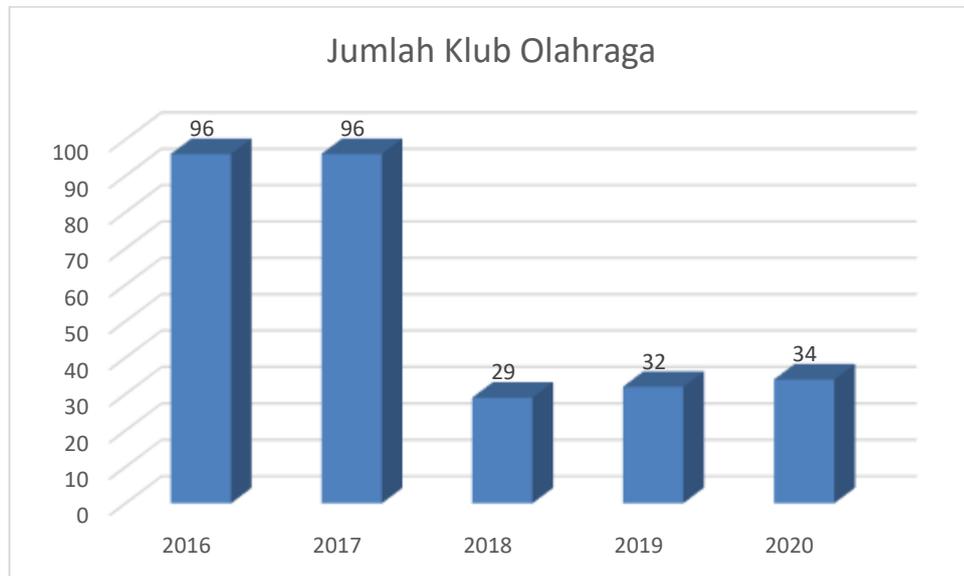
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.2.3.2. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 - 2020 mengalami penurunan, pada Tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak mengalami perubahan sebanyak 96 klub olahraga dan mengalami penurunan pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi sebanyak 29 dan 32 klub olahraga, Tahun 2020 terdapat penambahan 2 klub olahraga baru sehingga total jumlah klub olahraga menjadi 34 klub sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar II.28.

Gambar II.28.

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.2.3.3. Jumlah gedung olahraga.

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 - 2020 juga mengalami fluktuasi seperti klub olahraga. Dimana pada Tahun 2016 dan 2017 jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk adalah sebanyak 17 gedung, kemudian berkurang pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi 15 gedung. Pada Tahun 2020 kembali bertambah menjadi 17 gedung. Data jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 disajikan pada Gambar II.29.

Gambar II.29.
 Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 - 2020



Sumber : LKPI Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Rasio sekolah sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang Tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuatif cenderung menurun, dimulai pada Tahun 2016 mencapai 94,18 persen kemudian meningkat Tahun 2017 sebesar 94,93 persen, terjadi penurunan pada Tahun 2018 – 2020 menjadi sebesar 94,27 persen, 84,39 persen dan 83,6 persen. Gambar II.22. menunjukkan rasio sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020.

Selanjutnya Rasio sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk 13 - 15 tahun juga cenderung mengalami penurunan pada Tahun 2016 sebesar 61,29 persen menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 56,9 persen. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 65,87

persen, namun kembali menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 38,49 persen dan 37,94 persen. Gambar II.31. menunjukkan angka rasio sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.30.
Rasio Sekolah SD/Sederajat terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.31.
Rasio Sekolah SMP/Sederajat terhadap penduduk berusia 13 - 15 tahun
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Rasio guru terhadap murid SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 – 2020 diperoleh angka rata-rata sebesar 59,92 persen. Rasio guru terhadap murid SD/Sederajat periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar II.32.

Gambar II.32.

Rasio Guru SD/Sederajat Terhadap Murid SD/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Sementara itu untuk rasio guru terhadap murid SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang Tahun 2016 - 2020 diperoleh angka rata-rata sebesar 62,19 persen. Rasio guru terhadap murid SMP/Sederajat periode Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar II.33.

Gambar II.33.

Rasio guru SMP/Sederajat Terhadap Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Keberadaan posyandu dimasyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Melalui posyandu diharapkan dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran Imunisasi, Pelayanan KIA, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan masyarakat. Perkembangan Jumlah posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar berikut

Gambar II.34.

Perkembangan Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

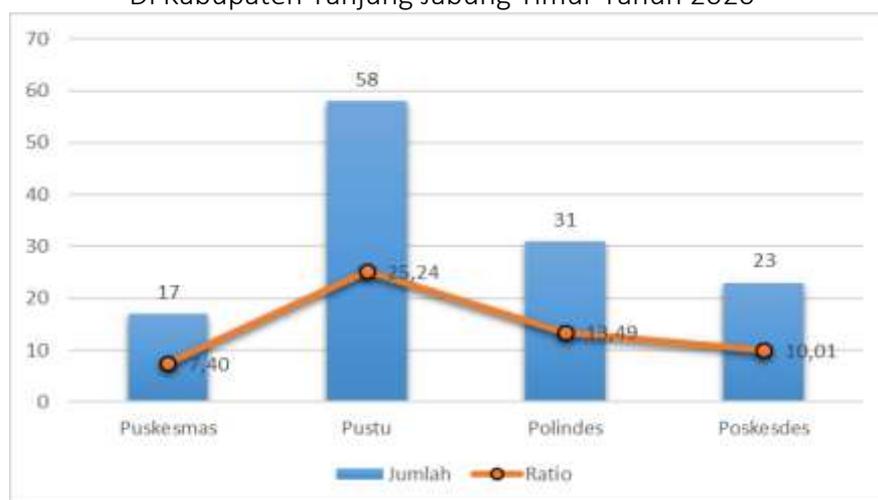
Dari data diatas terlihat jumlah posyandu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 jumlah posyandu sebanyak 277 unit meningkat menjadi 290 unit pada Tahun 2020.

Komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat diantaranya adalah peningkatan jumlah sarana dan

prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas (termasuk perawatan) terus meningkat dari 14 unit pada Tahun 2004 menjadi 15 unit pada Tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 17 unit pada Tahun 2006. Dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada penambahan Puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penambahan unit Puskesmas namun selama Tahun 2020 dilakukan peningkatan kualitas bangunan fisik Puskesmas yang sudah ada seperti kegiatan relokasi pembangunan Puskesmas Dendang, rehab Puskesmas Berbak, serta penimbunan lahan parkir Puskesmas Sungai Lokan, Puskesmas Lambur, Puskesmas Muara Sabak Barat dan Puskesmas Pangkal Duri. Dari 17 Puskesmas terdapat 10 Puskesmas yang berstatus Puskesmas dengan status rawat inap atau puskesmas perawatan . Ratio puskesmas terhadap 100.000 penduduk tahun 2020 adalah 7,40. Ini berarti pada Tahun 2020 setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani 7 puskesmas. Disamping Puskesmas, masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan juga bisa melalui jaringan Puskesmas yang ada dalam wilayah kerjanya berupa Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes. Selama tahun 2020 terdapat 58 unit Puskesmas Pembantu, 31 unit Polindes, dan 23 unit Poskesdes. Keberadaan unit jaringan Puskesmas ini untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas dan jaringan Puskesmas terhadap 100.000 penduduk Tahun 2020 dapat digambarkan seperti gambar berikut.

Gambar II.35

Ratio Pelayanan Puskesmas dan Jaringan Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020*

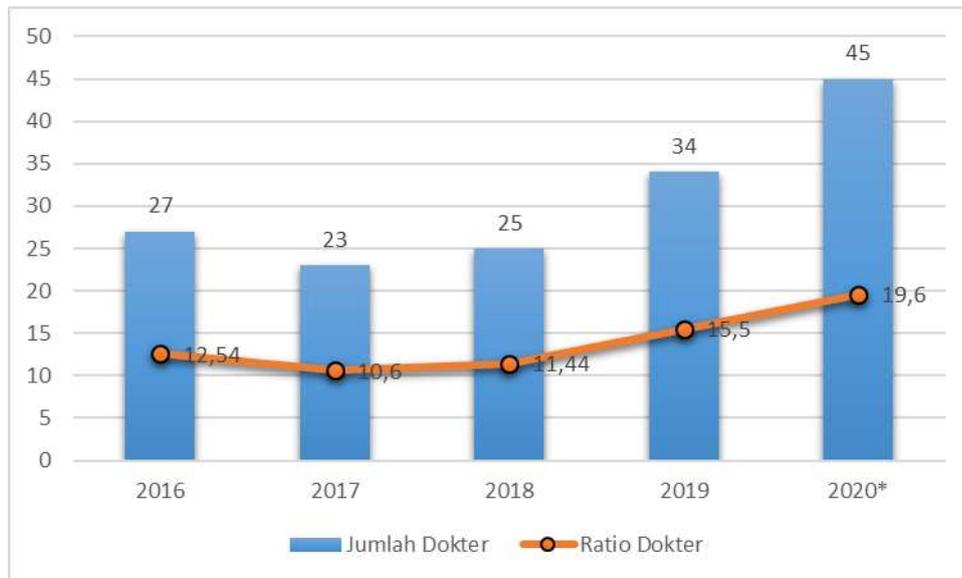


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020. * angka sementara

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga medis. Yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis. Kecukupan tenaga ini secara kualitas dan kuantitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Gambar II.36

Jumlah dan Ratio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 * angka sementara

Jumlah dokter umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada periode Tahun 2016 – 2020 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah dokter umum sebanyak 27 orang, menurun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 23 orang. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 meningkat menjadi 25, 34 dan 45 orang.

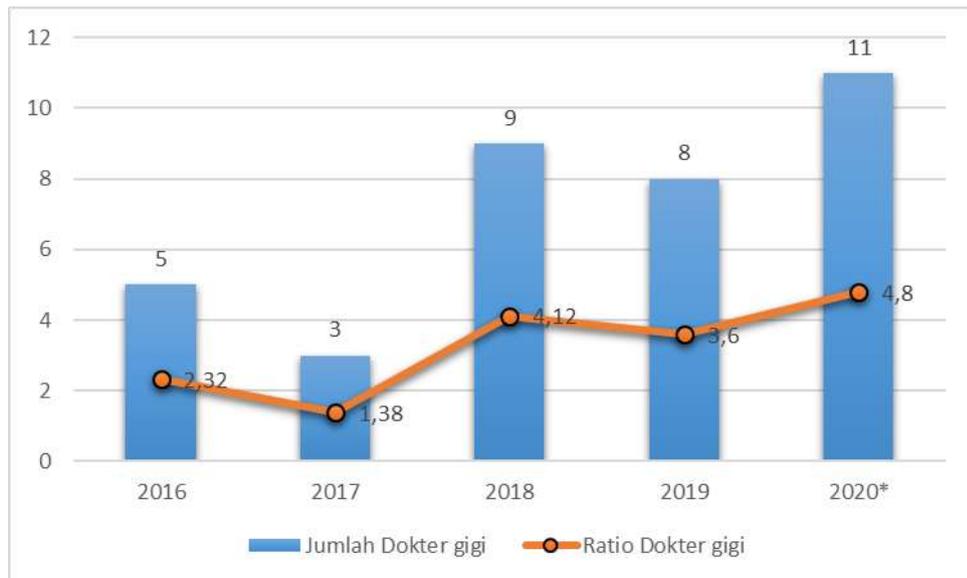
Rasio Dokter Umum pada periode Tahun 2016 – 2020 juga berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 rasio dokter umum 12,54 per 100.000 penduduk menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 10,6. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 11,44, 15,5 dan 19,6 per 100.000 penduduk.

Sama halnya dengan dokter umum, jumlah dan rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk pada periode 2016 – 2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 rasio dokter gigi sebesar 2,32 dengan jumlah sebanyak 5 orang, menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 1,38 per 100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 3 orang. Pada Tahun 2018

meningkat sebesar 4,12 dengan jumlah 9 orang dan kembali menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 3,6 per 100.000 penduduk dengan jumlah 8 orang. Pada Tahun 2020 rasio dokter gigi per 100.000 penduduk kembali meningkat menjadi 4,8 dengan jumlah sebanyak 11 orang.

Gambar II.37

Jumlah dan Ratio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

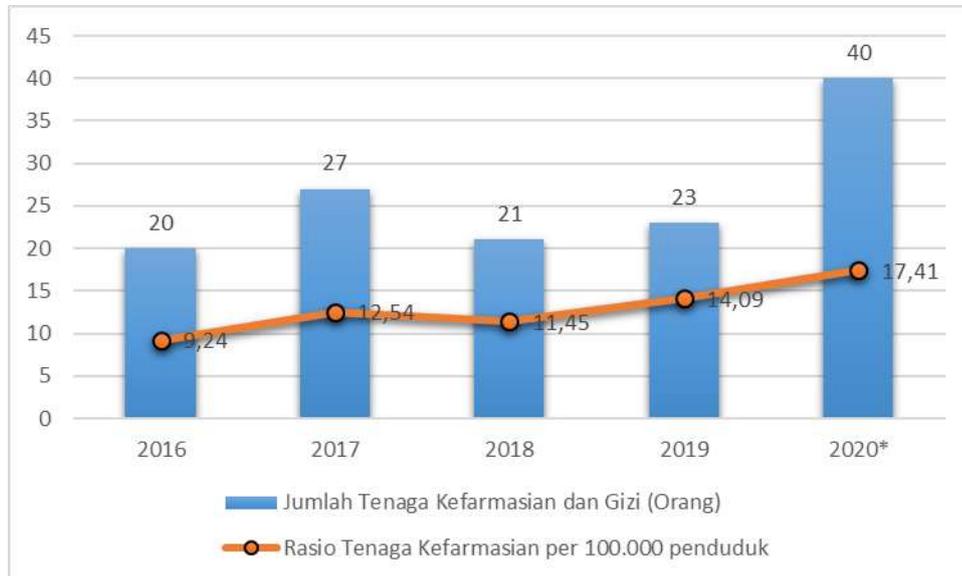


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020, * angka sementara

Rasio tenaga kefarmasian dan gizi dihitung berdasarkan akumulasi dari jumlah tenaga yang ada di Puskesmas serta tenaga yang bekerja di Rumah Sakit. Yang termasuk tenaga farmasi adalah apoteker dan asisten apoteker, sedangkan untuk tenaga gizi adalah DI, DIII Gizi (SPAG dan AKZI) dan DIV.

Gambar II.38

Jumlah dan Ratio Tenaga Kefarmasian Per 100.000 Penduduk
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



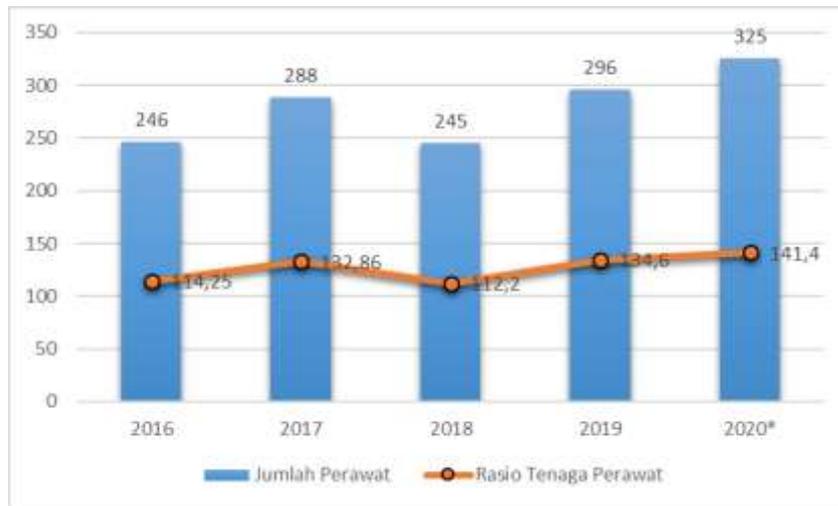
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020, * angka sementara

Jumlah dan Ratio tenaga farmasi per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Rasio Tenaga kefarmasian Pada Tahun 2016 sebesar 9,24 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 12,54 pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 menurun sebesar 11,45 dan pada Tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat menjadi 14,09 dan 17,41 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga farmasi meningkat pada Tahun 2017 sebanyak 27 orang dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 20 orang, namun menurun pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 21 orang dan meningkat kembali pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 23 dan 40 orang.

Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 114,25 per 100.000 penduduk meningkat pada Tahun 2017 dengan rasio 132,86 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar 112,2 per 100.000 penduduk dan pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 134,6 dan 141,4 per 100.000 penduduk.

Gambar II.39

Jumlah dan Ratio Tenaga Perawat Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020, * angka sementara

Rasio tenaga bidan pada Tahun 2016 sebesar 314,76 per 100.000 penduduk, meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 328,09 per 100.000. Terjadi penurunan pada tahun rasio bidan terhadap 100.000 penduduk sebesar 170,3 dan dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 170,9 dan 188,4. Rasio tenaga perawat dan bidan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.40

Jumlah dan Ratio Tenaga Bidan Per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 * angka sementara

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum; 2) Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum; dan 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah meliputi Bed Occupation Rate (%), Average Length of Stay (Hari), Bed Turn Over (Kali), Turn Over Interval (Hari), Net Death Rate (%), Gross Death Rate (%), Jumlah Tempat Tidur (Unit), Jumlah Kematian (Jiwa), Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa). Peningkatan maupun penurunan masing-masing persentase pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nurdin Hamzah dapat dilihat pada Tabel II.11.

Tabel II.11.

Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bed Occupation Rate (%)	23,23	38,58	30,95	37,42	29,31
Average Length of Stay (Hari)	2	3	3	3	4
Bed Turn Over (Kali)	31	46	46	50	28
Turn Over Interval (Hari)	9	4	6	5	9
Net Death Rate (%)	1,19	1,19	1,16	1,29	18,23
Gross Death Rate (%)	3,69	4,27	4,02	4,59	6,09
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	54	54		68	68
Jumlah Kematian (Jiwa)	60	100	101	132	117
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	10.368	14.575	15.541	17.626	11.896
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.729	2.567	2.511	3.234	1.954

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

Gambar II.39. menerangkan bahwa pada Tahun 2016 penduduk yang sakit berjumlah 171.315 orang, pada Tahun 2017 mengalami penurunan sehingga penduduk yang sakit berjumlah 34.884 orang. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 168.685 orang dan 190.672 orang, namun menurun kembali pada Tahun 2020 menjadi 136.979 orang . Rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 72,20 persen per tahun.

Gambar II.41.

Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD NH Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

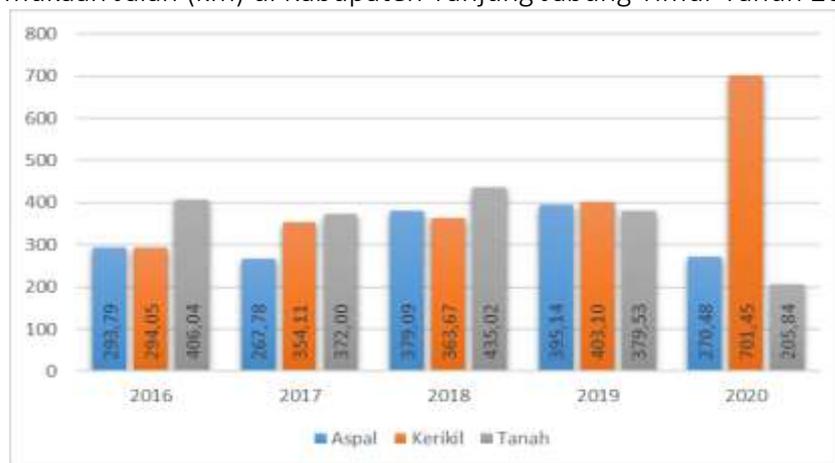
Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas keinfrastrukturan, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019 antara lain : 1) Pembangunan sarana jalan, jembatan dan irigasi memerlukan biaya yang sangat tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur di wilayah berawa dan dataran rendah serta lahan gambut; 2) Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, sehingga capaian yang telah ditetapkan mengalami hambatan pencapaian target; 3) Lambatnya penunjukan penyedia mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu; 4) Kondisi lokasi dan cuaca sangat mempengaruhi lamanya pelaksanaan pekerjaan fisik; dan 5) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dalam pemanfaatan ruang. Gambar II.40. menunjukkan data tentang perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2016 - 2020.

Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Jalan aspal pada Tahun 2016 sepanjang 293,79 km, menurun pada Tahun 2017 menjadi 267,78 Km. Pada Tahun 2018 hingga pada Tahun 2019 meningkat menjadi 379,09 dan 395,14 km, namun menurun pada Tahun 2020 menjadi atau rata-rata perkembangan jalan aspal sebesar minus 5,83 Km per tahun atau minus 1,98 persen per tahun. Sebaliknya terjadi pada Panjang jalan kerikil mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2016 panjang 294,05 km meningkat berturut-turut sampai dengan Tahun 2020 menjadi panjang 354,11 km, 363,67 km, 403,10 km dan 701,45 Km. Rata-rata perkembangan jalan kerikil sepanjang 101,85 Km pertahun atau 34,64 persen pertahun. Panjang Jalan tanah juga berfluktuasi namun cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir dimana pada Tahun 2016 panjang jalan tanah 406,04 km menurun pada Tahun 2017 dengan panjang 372 km, kembali meningkat pada Tahun 2018 dengan panjang 435,02 km namun menurun pada Tahun 2019 dan 2020 dengan panjang 379,53 km dan 205,84 Km. Rata-rata perkembangan jalan tanah sepanjang minus 50,05 Km atau minus 12,33 persen per tahun.

Gambar II.42.

Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



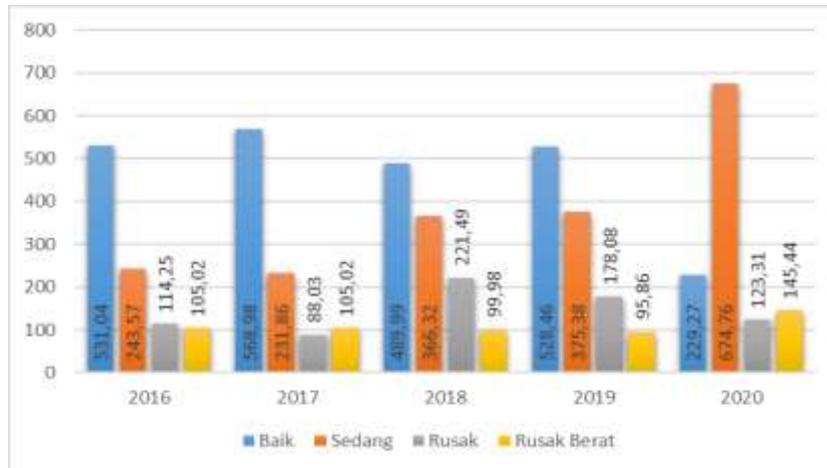
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Penanganan jalan dan jembatan memang menjadi sangat sentral apabila tidak mampu dilaksanakan. Hal tersebut akan berakibat terhadap aktifitas barang dan orang akan menjadi terhambat, untuk mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul, maka kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang

termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan).

Gambar II.43.

Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



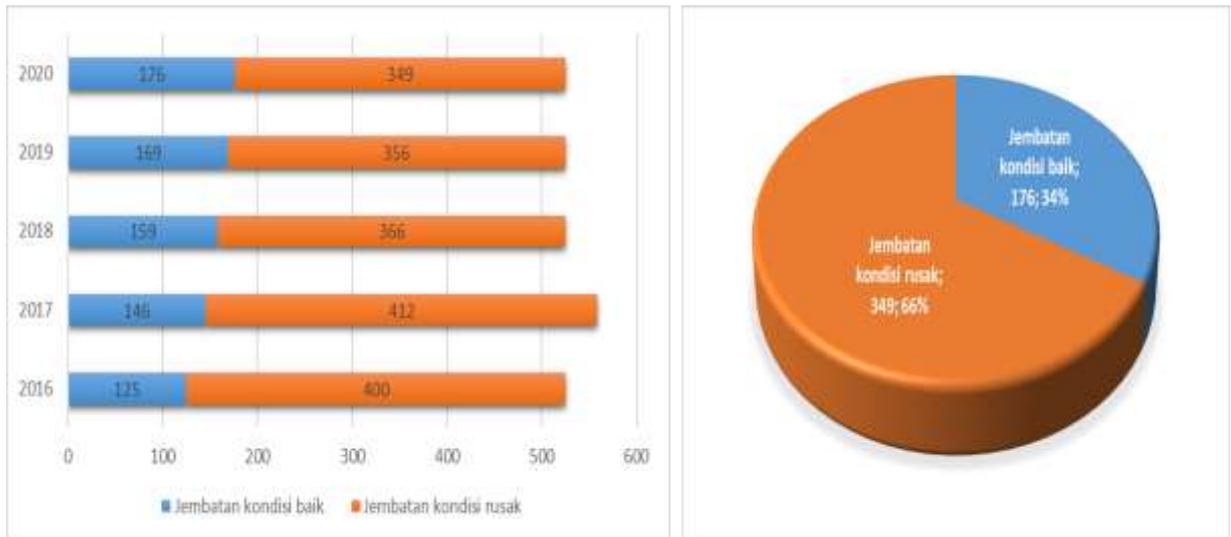
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Hingga Tahun 2020, kondisi jalan mantap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami peningkatan kualitas dengan capaian sepanjang 904,025 Km (229,27 km baik dan 674,76 km sedang) jika dibandingkan dari tahun 2016 yang hanya sepanjang 774,61 km (531,04 km baik dan 243,57 km sedang), sehingga selama 5 tahun peningkatan kondisi jalan mantap rata-rata sebesar 4,18 persen atau sepanjang 32,35 km.

Kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun pada kondisi awal Tahun 2016 sepanjang 114,25 km, mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi 88,03. Pada Tahun 2018 meningkat menjadi 221,49 Km kemudian kembali menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 178,08 km dan 123,31 km. Berbeda dengan kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan pada Tahun 2016 – 2019 dari 105,02 Km menurun menjadi 95,86 Km. Namun pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jalan rusak berat menjadi 145,44 Km. Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.43.

Gambar II.44.

Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.44. menunjukkan data jumlah jembatan dari Tahun 2016 - 2020 yang telah dibangun tidak bertambah yaitu sebanyak 525 unit. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya peningkatan kualitas jembatan yang telah dibangun. Pada Tahun 2016 hanya terdapat 125 unit jembatan dalam kondisi baik dan pada Tahun 2019 jumlah jembatan dalam kondisi baik meningkat menjadi sebanyak 176 unit, sehingga ada penurunan angka jumlah jembatan dalam kondisi rusak dari Tahun 2016 sebanyak 400 unit menjadi 349 unit pada Tahun 2020. Secara persentase jembatan yang baik sebesar 34 % dan yang rusak sebesar 66 % pada Tahun 2020.

Kondisi rehabilitasi irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari Gambar II.45. yang menunjukkan data awal rehabilitasi irigasi di Tahun 2016 sepanjang 172.516 m', Tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat pekerjaan Rehabilitasi Irigasi, pekerjaan di fokuskan pada pembangunan tanggul. Pada Tahun 2019 rehabilitasi irigasi dengan panjang 94.055 m' dan Kondisi akhir di Tahun 2020 sepanjang 177.141 m'.

Gambar II.45.

Jumlah Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pembangunan Box Culvert yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 juga mengalami kondisi yang fluktuatif cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2016 sebanyak 13 unit, meningkat pada Tahun 2017 sebanyak 29 unit dan Tahun 2018 sebanyak 36 unit. Pada Tahun 2019 menurun sebanyak 29 unit dan terakhir di Tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 35 unit sebagaimana tersaji pada Gambar II.46.

Gambar II.46.

Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

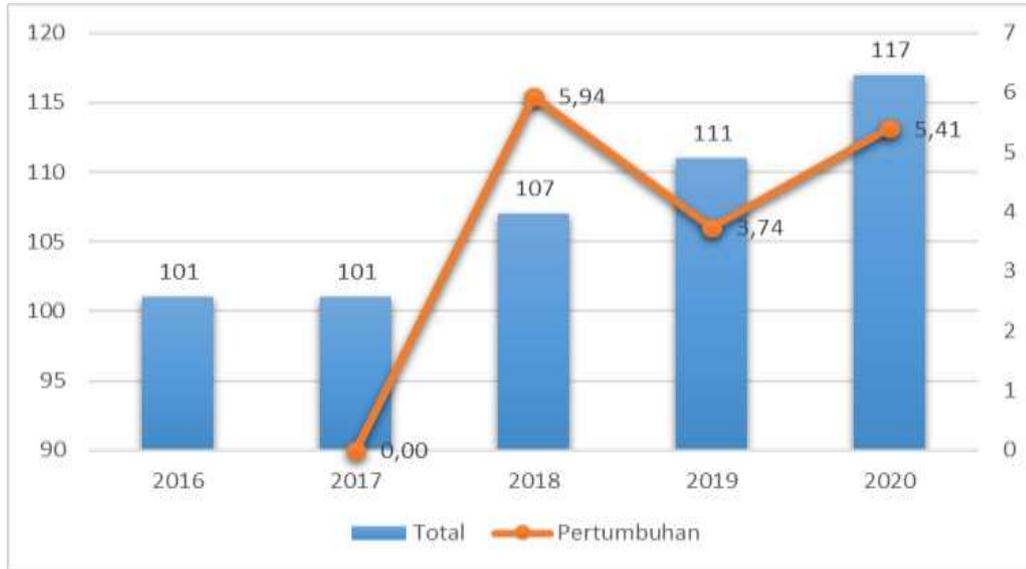
2.3.1.4. Perhubungan

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian.

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 jumlah dermaga sebanyak 101 unit, terus meningkat sampai Tahun 2020 menjadi 117 unit dengan angka rata-rata pertumbuhan jumlah dermaga sebesar 3,77 persen. Dari segi konstruksi dermaga terbuat dari kayu, besi dan beton. Perkembangan dermaga dari segi konstruksi dalam periode 2016 – 2020 untuk dermaga kayu dan beton cenderung stagnan sebanyak 70 unit dan 10 unit, kecuali pada Tahun 2020 bertambah masing-masing 1 unit menjadi 71 unit dermaga kayu dan 11 unit dermaga beton. Dermaga besi mengalami peningkatan dari Tahun 2018 - 2020 menjadi 27 unit, 31 unit dan 35 unit dari sebelumnya dimana pada Tahun 2016 - 2017 sebanyak 21 unit. Perkembangan Jumlah dermaga dan konstruksi dermaga dapat dilihat pada gambar II.47. Dan II.48.

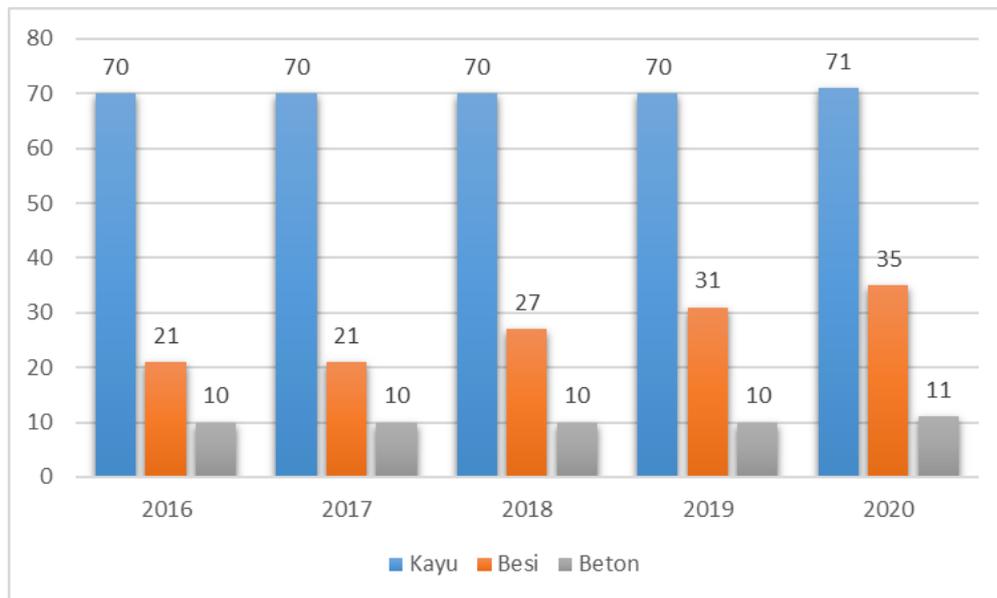
Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga. Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2016 – 2020 semua dermaga kayu dalam kondisi rusak yaitu sebanyak 70 unit, kecuali 1 unit dermaga kayu di LLASDP Sungai Puding dalam kondisi bagus. dan dermaga besi serta beton semuanya masih dalam kondisi baik sebanyak 46 unit. Perkembangan Kondisi dermaga dapat dilihat pada Gambar II.49.

Gambar II.47.
Perkembangan Jumlah Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

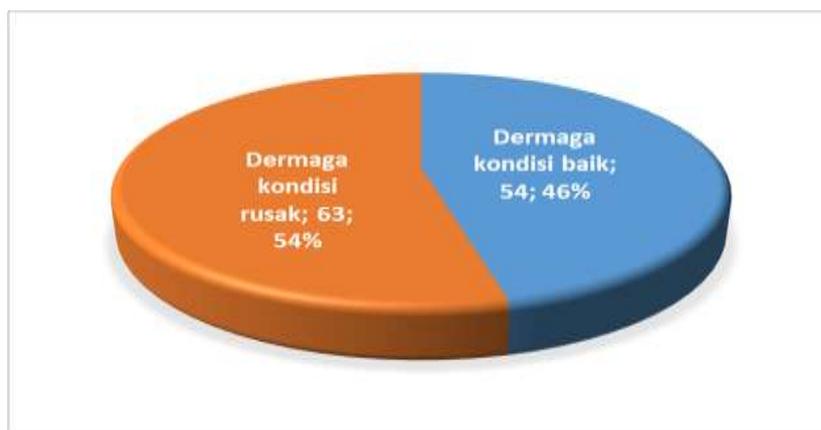
Gambar II.48.
Perkembangan Konstruksi Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.49.

Perkembangan Kondisi dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan KK sejak Tahun 2016 hingga 2020, realisasi KK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat, pada Tahun 2016 sebesar 61.594 KK, meningkat pada Tahun 2017 sebesar 66.858 KK, pada Tahun 2018 dan 2019 menurun menjadi 65.135 KK dan 59.662 KK dan kemudian pada Tahun 2020 meningkat kembali sebesar 72.886 KK.

Gambar II.50.

Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Pada periode yang sama realisasi pembuatan KTP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 140.911 KTP, 142.219 KTP pada tahun 2017, 154.329 di tahun 2018, 163.360 KTP di tahun 2019 dan terakhir di Tahun 2020 menjadi 170.375 KTP. Untuk pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kondisi fluktuatif cenderung meningkat, pada Tahun 2016 sebanyak 64.744 akta kelahiran meningkat menjadi 71.737 akta kelahiran pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 68.392 dan 66.873 akta kelahiran, kemudian kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 70.276 Akta Kelahiran. Realisasi pembuatan KK, KTP dan akta kelahiran di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.50.

2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Data menunjukkan bahwa pelayanan keluarga berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 berjumlah 172.007 akseptor. Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif (akseptor) dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 belfluktuasi cenderung menurun dengan rata-rata perkembangan pertahun minus 0,28 persen. Pada Tahun 2016 jumlah PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif sebanyak 34.341 akseptor, meningkat pada Tahun 2017 – 2019 menjadi 34.601 akseptor, 34.511 akseptor dan 34.607 akseptor. Pada Tahun 2020 jumlah PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efektif mengalami penurunan menjadi 33.947 akseptor.

Gambar II.51.

PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efektif (Akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Pada periode yang sama pelayanan KB PUS yang melakukan Program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 berjumlah 26.345 akseptor. Perkembangan PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien Tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata perkembangan per tahun sebesar 103,99 persen. Pada Tahun 2016 PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien berjumlah 1.198 akseptor meningkat menjadi 5.669 akseptor pada Tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar II.52.

PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasepsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

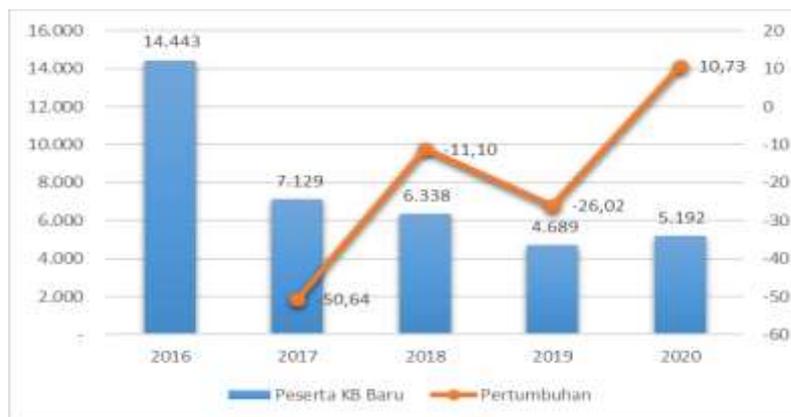


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020

Untuk jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 cenderung menurun, dimana pada Tahun 2016 jumlah peserta KB baru sebanyak 14.443 jiwa menurun berturut-turut sebesar 7.129 jiwa, 6.338 jiwa dan 4.689 jiwa pada Tahun 2017 - 2019. Pada Tahun 2020 Jumlah Peserta KB Baru sedikit mengalami peningkatan menjadi 5.192 jiwa. Gambar II.53. menunjukkan data peserta KB baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.53.

Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

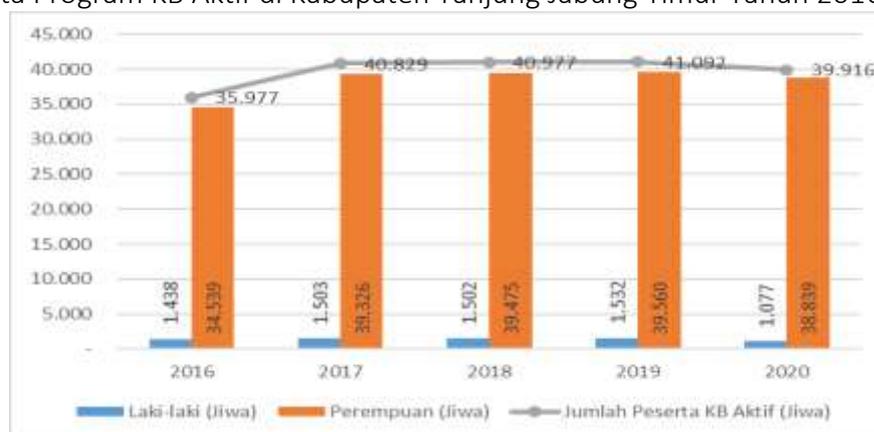


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Jumlah peserta program KB Aktif tiap tahunnya cenderung meningkat dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,82 persen pertahun. Pada Tahun 2016 Jumlah peserta program KB Aktif sebanyak 35.977 jiwa dan terus meningkat menjadi 39.916 jiwa di Tahun 2020 dengan peserta masih didominasi oleh peserta perempuan. Gambar berikut menunjukkan peserta program KB aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.54.

Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

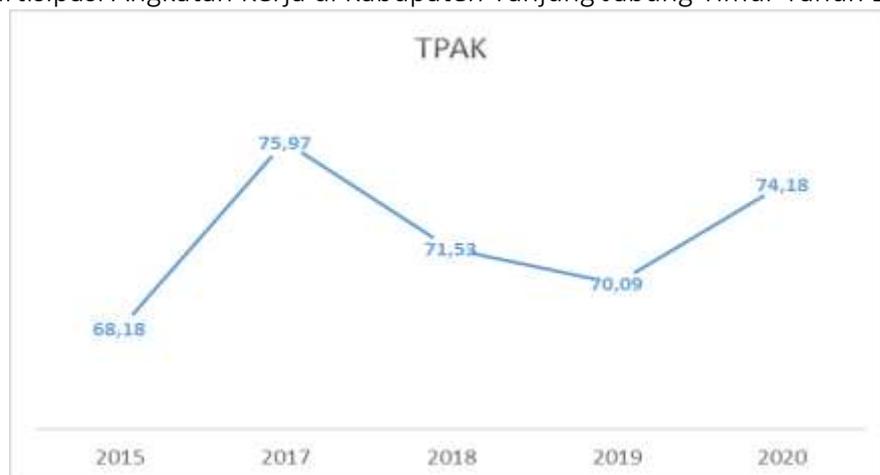
2.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa dalam perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi menghasilkan barang atau jasa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2015 hingga Tahun 2020 berfluktuasi. Pada Tahun 2015 TPAK sebesar 68,18 persen yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,97 persen pada Tahun 2017, akan tetapi mengalami penurunan di Tahun 2018 dan 2019 berturut-turut menjadi 71,53 persen dan 70,09 persen, dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 74,18 persen. Sedangkan pada Tahun 2016, BPS Provinsi Jambi tidak melaksanakan survey TPAK. TPAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang mencapai sebesar 74,18 persen ini artinya tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan lebih mudah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan kata lain angka TPAK yang tinggi menunjukan besarnya tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar II.55.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020



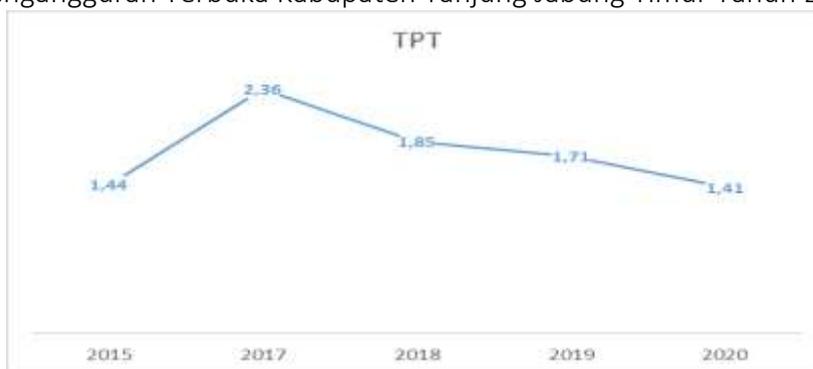
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Seiring dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan rendahnya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar II.56.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (diolah)

Tabel II.12.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2020

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROVINSI JAMBI	4,34	4	3,87	3,86	4,19	4,41
KERINCI	3,67		3,26	2,89	2,75	2,43
MERANGIN	5,38		4,1	3,64	3,8	4,86
SAROLANGUN	4,53		2,25	4,18	4,24	5,71
BATANGHARI	3,38		3,57	4,01	4,7	4,42
MUARO JAMBI	5,4		5,39	4,66	5,29	5,43
TANJUNG JABUNG TIMUR	1,44		2,36	1,85	1,71	1,41
TANJUNG JABUNG BARAT	2,68		3,07	2,46	2,67	2,16
TEBO	1,94		1,98	2,07	2,99	2,95
BUNGO	2,98		4,89	3,09	3,93	5,94
KOTA JAMBI	7,32		5,55	6,56	6,72	10,49
KOTA SUNGAI PENUH	8,18		4,14	5,44	4,17	5,56

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (diolah)

2.3.1.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah seperti pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.

Pada periode Tahun 2016-2020, jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung tetap sebanyak 41 Unit, hanya pada Tahun 2017 jumlah KUD sebanyak 40 unit. Sementara jumlah Koperasi Non KUD meningkat yaitu dari 261 unit pada Tahun 2016 menjadi 273 unit pada Tahun 2020 atau meningkat rata rata sebesar 1,13 persen. Tabel berikut menunjukkan data KUD dan Non KUD yang aktif maupun tidak aktif serta anggotanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020.

Tabel II.13
Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020

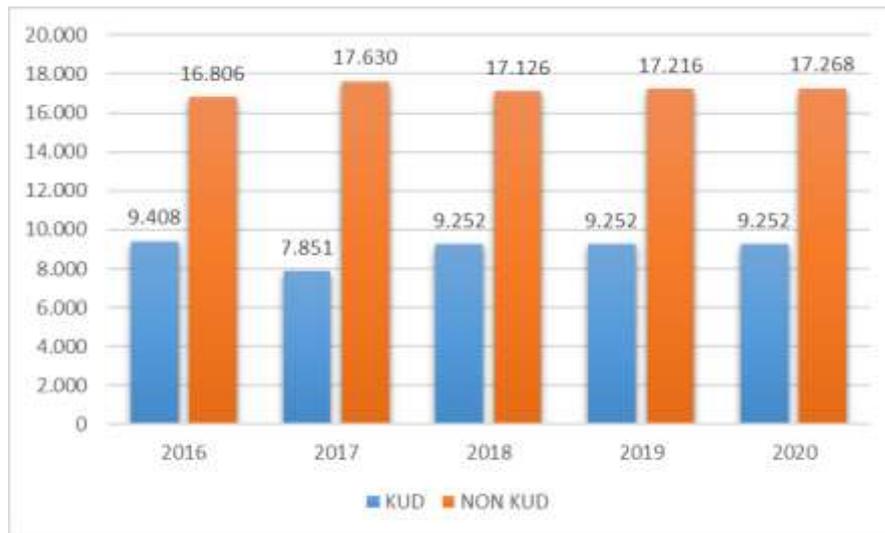
TAHUN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2016	41	261	2	103	39	158	9.408	16.806
2017	40	265	1	155	39	110	7.851	17.630
2018	41	270	2	93	39	147	9.252	17.126
2019	41	273	2	96	39	177	9.252	17.216
2020	41	273	1	99	40	174	9.252	17.268

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung tetap yaitu sebanyak 41 unit KUD dan sampai pada Tahun 2020 hanya terdapat 1 unit KUD yang aktif. Jumlah anggota KUD cenderung tetap dimana pada Tahun 2016 jumlah

anggota KUD sebanyak 9.408 orang menurun pada Tahun 2017 menjadi sebanyak 7.851 orang, namun tetap pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 9.252 orang. Kondisi tersebut berbeda dengan koperasi non KUD yang cenderung meningkat setiap tahunnya, baik dari jumlah, kondisi maupun jumlah anggotanya sebagaimana tersaji pada Gambar berikut.

Gambar II.57.
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 - 2020



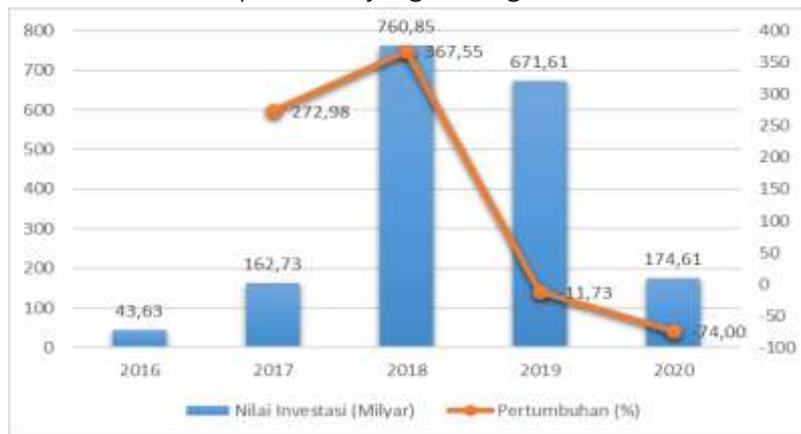
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

2.3.1.9. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan naik rata-rata 138,70 persen. Namun penurunan invstasi terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar minus 74 persen. Gambar berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 nilai investasi sebesar Rp.43.63 Milyar meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp. 162,73 Milyar Rp. 760,85 Milyar namun menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar Rp. 671,61 Milyar dan Rp.174,61 Milyar. Total Jumlah nilai investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020 sebesar 1.813,24 Milyar.

Gambar II.58.

Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



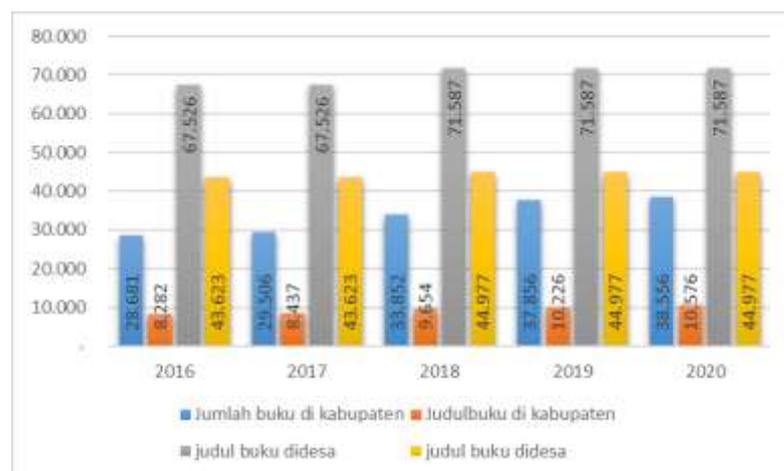
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.3.1.10. Perpustakaan

Koleksi buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semuanya mengalami peningkatan pada periode 2016 – 2020. Jumlah buku di Kabupaten meningkat dari 28.681 eksemplar pada Tahun 2016 menjadi 38.556 eksemplar pada Tahun 2020. Judul Buku juga mengalami peningkatan dari 8.282 judul pada Tahun 2016 menjadi 10.576 judul pada Tahun 2020. Jumlah buku didesa mengalami peningkatan dari 67.526 eksemplar pada Tahun 2016 menjadi 71.587 eksemplar pada Tahun 2020. Judul buku didesa juga mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebanyak 43.623 judul menjadi 44.977 judul pada Tahun 2020. Perkembangan koleksi buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar II.59.

Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan pada periode 2016 – 2020 tidak mengalami perubahan sebanyak 93 desa/kelurahan, ini artinya dari Tahun 2016 seluruh desa dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memiliki perpustakaan. Jumlah Pengunjung perpustakaan dalam periode Tahun 2016 -2019 juga mengalami peningkatan yang pesat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 jumlah pengunjung baru mencapai 9.139 orang meningkat pada Tahun 2019 menjadi 19.235 orang dan menurun pada Tahun 2020 menjadi 6.460 orang. Penurunan ini disebabkan diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat pada Tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Jumlah Perpustakaan dan pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.60.

Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Hasil produksi dari sektor pertanian pada periode Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi. Produksi Padi cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 86.337 ton dari sebelumnya pada Tahun 2016 sebesar 90.052 ton dan sebesar 58.294 ton pada Tahun 2020 yang sebelumnya pada Tahun 2019 sebesar 118.507 ton. Pada Tahun 2018 dan 2019 produksi padi mengalami peningkatan menjadi sebesar 92.273 dan 118.507 ton. Sama halnya dengan padi, produksi jagung juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan terjadi pada Tahun 2017 menjadi 13.108 ton dari

sebelumnya pada Tahun 2016 sebesar 13.950 ton dan pada Tahun 2020 menjadi 13.043 ton dari sebelumnya 16.696 ton pada Tahun 2019. Peningkatan produksi jagung terjadi pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi 14.456 dan 16,696 ton. Penyebab dari menurunnya produksi kedua komoditas pangan unggulan tersebut dikarenakan oleh faktor iklim cuaca yang tidak menentu selama Tahun 2017 sehingga menyulitkan para petani untuk bercocok tanam, dan pandemi covid-19 pada Tahun 2020 cukup besar mempengaruhi produksi akibat refocusing anggaran. Kegiatan UPSUS PAJALE pada Tahun 2018 dan 2019 sangat membantu dalam peningkatan produksi padi dan Jagung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Produksi Kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar pada periode 2016 -2020 berfluktuasi. Penurunan produksi terjadi pada komoditi kedele terjadi pada Tahun 2018 menjadi 332 ton dari sebelumnya sebesar 1.413 ton pada Tahun 2017, namun produksi kedele kembali meningkat pada Tahun 2019 menjadi 640 ton dan kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi 624 ton. Jumlah produksi pada sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.14.

Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

Jenis	Produksi hasil Pertanian (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi (ton)	90.052	86.337	92.273	118.507	58.294
Jagung (ton)	13.950	13.108	14.456	16.696	13.043
Kedelai (ton)	1.356	1.413	332	640	624
Kacang Tanah (ton)	99	176	54	66	58
Kacang Hijau (ton)	24	19	8	2	5
Ubi Kayu (ton)	5.523	6.482	3.450	2.021	3.105
Ubi Jalar (ton)	1.167	712	1.031	574	1.270

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Tabel berikut menunjukkan data mengenai program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun (GERTAK TANPA DUSTA). Pada Tahun 2016 – 2020 Realisasi tanam dan produktivitas padi berfluktuasi cenderung meningkat. Realisasi tanam mengalami penurunan pada Tahun 2018 dan 2019 sebesar 90,88 persen (1.545 Ha) dan 88,53 persen (1.505 Ha) dari target yang ditetapkan (1.700 Ha), namun produktivitas padi mengalami peningkatan menjadi

sebesar 41,30 Kw/Ha dan 42,32 Kw/Ha dari sebelumnya Tahun 2017 sebesar 39,49 Kw/Ha. Pada Tahun 2020 Realisasi tanam melebihi target yang ditetapkan yaitu 1.700 hektar realisasi dari target 1.500 Ha. Produktivitas padi juga mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 44,90 Kw/Ha.

Tabel II.15.
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produktivitas
Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2016 - 2020

Tahun	Gerakan Serentak Tanam Padi 2 Kali Setahun		
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
2016	1.500	1.500	39,83
2017	1.700	1.700	39,49
2018	1.700	1.545	41,30
2019	1.700	1.505	42,32
2020	1.500	1.700	44,90

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.61.
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



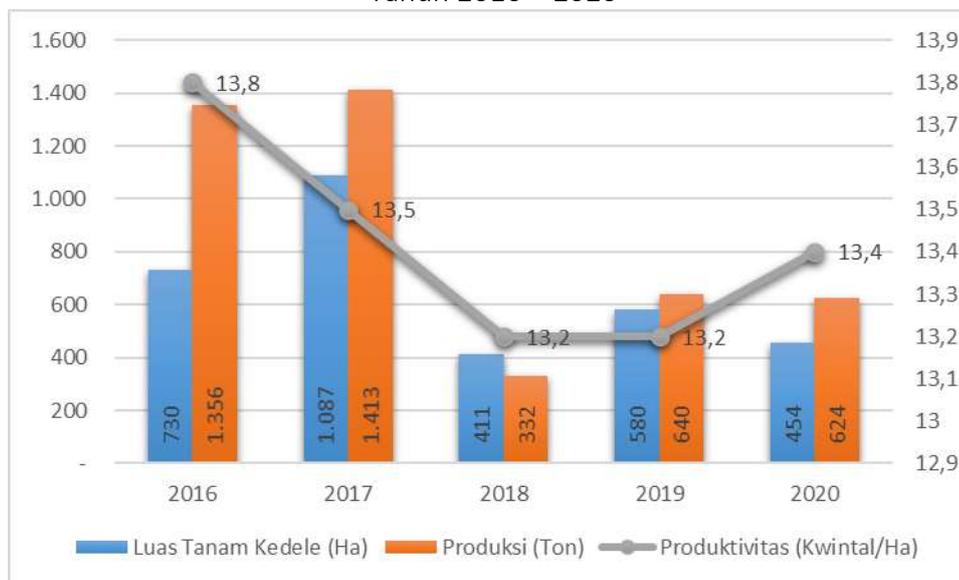
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.47. menunjukkan data luas tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020. Luas Tanam dan Produksi tanaman padi pada periode 2016 – 2020 berfluktuasi. Luas Tanam padi pada Tahun 2016 seluas 19.646 Ha menurun pada Tahun 2017 dan 2020 menjadi 18.387 Ha dan 13.009 Ha. Pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan menjadi 26.582 Ha dan 25.369 Ha. Produksi tanaman

padi juga meningkat dari Tahun 2016 sebesar 90.052 ton menjadi 118.507 ton pada Tahun 2019, namun menurun pada Tahun 2020 menjadi 58.294 ton. Produktivitas tanaman padi pada periode 2016 – 2020 juga berfluktuasi dimana pada Tahun 2016 produktivitas tanaman padi sebesar 46,25 kwintal per hektar menurun pada Tahun 2017 menjadi 41,93 kwintal per hektar. Pada Tahun 2018 - 2020 meningkat menjadi 43,37 kwintal per hektar , 43,2 kwintal per hektar dan 44,9 kwintal per hektar.

Gambar II.62.

Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedele di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



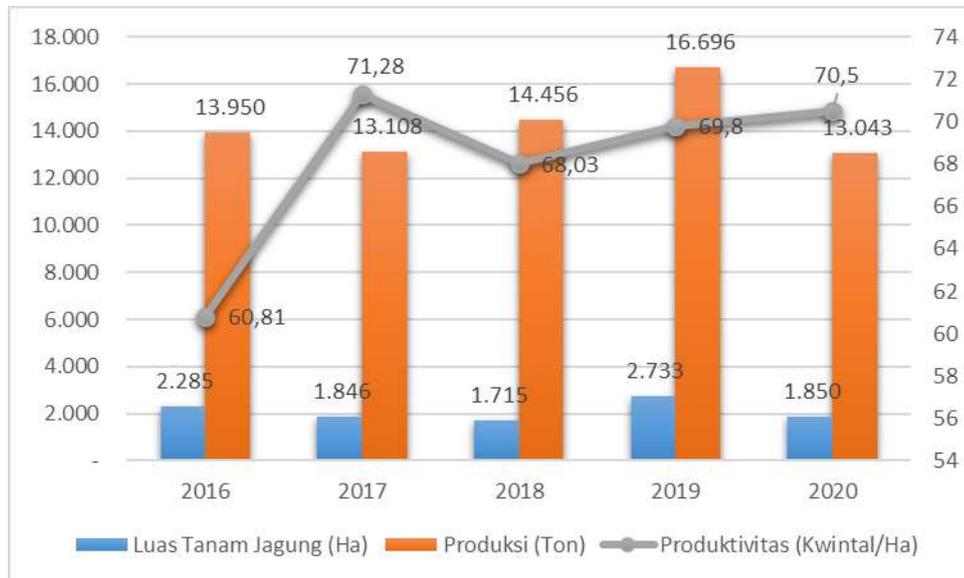
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.62. menunjukkan data luas tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedele di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020. Luas Tanam dan Produksi tanaman kedele pada periode 2016 – 2020 berfluktuasi cenderung menurun. Luas Tanam pada Tahun 2016 seluas 730 Ha meningkat pada Tahun 2017 seluas 1.087 Ha. Pada Tahun 2018 menurun seluas 411 Ha dan kembali sedikit peningkatan pada Tahun 2019 seluas 580 Ha. Namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi 454 Ha. Produksi Tanaman kedele pada Tahun 2016 sebesar 1.356 ton meningkat pada Tahun 2017 sebesar 1.413 ton. Pada Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 332 ton. Terjadi sedikit peningkatan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 640 ton, namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 624 ton. Produktivitas tanaman kedele pada periode 2016 – 2020 menurun dimana pada Tahun 2016

produktivitas tanaman kedele sebesar 13,8 kwintal per hektar menurun pada Tahun 2017 – 2020 menjadi berturut-turut sebesar 13,5, 13,2 dan 13,4 kwintal per hektar.

Gambar II.63.

Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



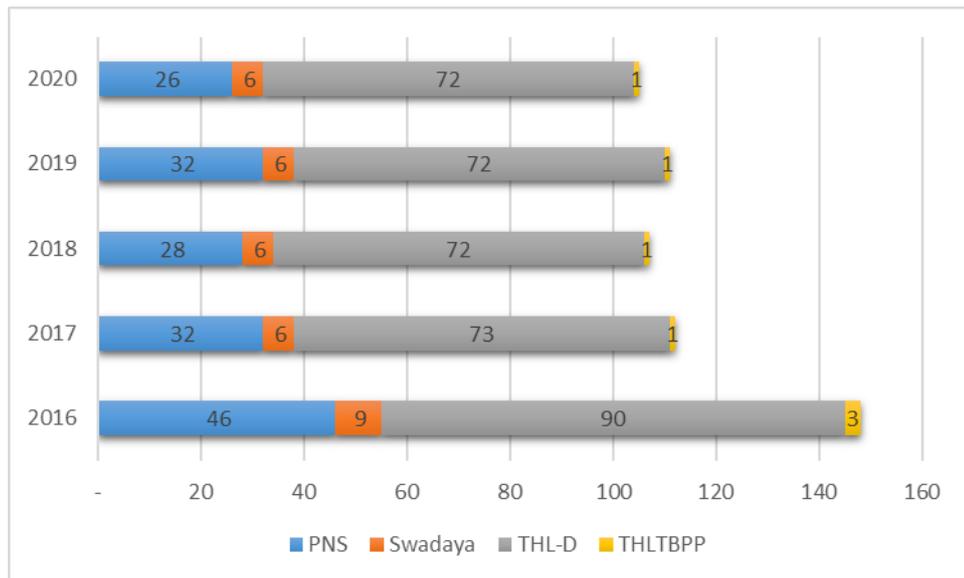
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar II.63. menunjukkan data luas tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020. Luas Tanam, produksi dan produktivitas tanaman Jagung pada periode 2016 – 2020 berfluktuasi cenderung meningkat. Luas Tanam pada Tahun 2016 seluas 2.285 Ha menurun pada Tahun 2017 menjadi seluas 1.846 Ha. Pada Tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi seluas 1.715 Ha dan 2.733 Ha, namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi seluas 1.850 Ha. Produksi Tanaman Jagung pada Tahun 2016 sebesar 13.950 ton menurun pada Tahun 2017 sebesar 13.108 ton. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat menjadi masing-masing sebesar 14.456 ton dan 16.696 ton, namun produksi kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 13.043 ton. Produktivitas tanaman jagung Tahun 2016 sebesar 60,81 kwintal per hektar meningkat pada Tahun 2017 sebesar 71,28 kwintal per hektar kemudian menurun pada Tahun 2018 sebesar 68,03 kwintal per hektar dan kembali meningkat pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi 69,8 kwintal per hektar dan 70,5 kwintal per hektar.

Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak Tahun 2016 - 2019 terdiri dari PNS, Swadaya, THL - D dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP). Jumlah penyuluh pada Tahun 2016 sebanyak 148 penyuluh dan di Tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 43 penyuluh hingga menjadi 105 penyuluh. Gambar II.64. menunjukkan jumlah dan status penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020.

Gambar II.64.

Jumlah dan Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.3.2.2. Peternakan

Subsektor peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak mengalami penambahan yang positif, hanya populasi domba, ayam buras dan ayam pedaging yang sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika pada Tahun 2016 jumlah populasi ternak hanya sebanyak 3.601.785 ekor dan di Tahun 2020 jumlah populasi ternak meningkat signifikan menjadi sebanyak 4.368.429 ekor. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak pertahun dalam periode Tahun 2016 – 2020 semuanya menunjukkan angka yang positif. Data populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Tabel II.16.

Tabel II.16.
Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Sapi	18.518	19.244	20.480	21.010	21.204
Kerbau	85	85	82	80	80
Kambing	40.198	41.073	42.987	43.941	44.741
Domba	51	51	51	57	59
Ayam Buras	3.629.402	3.817.768	3.976.841	3.909.743	4.021.985
Itik	33.502	25.457	39.885	45.959	48.772
Ayam Pedaging	22.990	36.131	43.478	47.895	58.590
Ayam Petelur	172.831	172.831	172.239	172.619	172.998
Jumlah	3.601.785	3.917.577	4.112.640	4.296.043	4.368.429

*Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021. * Angka sementara*

2.3.2.3. Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode Tahun 2015 - 2019 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 jumlah luas lahan perkebunan hanya seluas 112.743 Ha dan mengalami penambahan luas lahan sampai dengan Tahun 2020 menjadi 113.511 Ha.

Tabel II.17.
Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2016 – 2020

Komoditi	Luas Lahan (Ha) Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Karet	7.824	7.755	7.768	7.768	7.868
Kelapa Sawit	33.620	33.702	52.475	33.872	33.872
Kelapa Dalam	58.609	58.521	58.505	58.521	58.821
Kelapa Hibrida	69	66	69	69	69
Lada	46	42	44	42	40
Kakao	384	400	419	400	405
Pinang	8.950	9.095	9.250	9.095	9.095
Kopi Robusta	3.232	3.323	3.323	3.323	3.333
Kemiri	9	8	8	8	8
Jumlah	112.743	112.912	131.861	113.098	113.511

**Angka Sementara Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021*

Perkembangan Luas Tanam untuk komoditi perkebunan selama periode Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi. Luas Tanam dari komoditi kelapa sawit pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33.872 Ha dari Tahun 2018 sebesar 52.475 Ha, kemudian pertumbuhan Luas Tanam

komoditi karet pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.868 Ha pada Tahun 2020 dari sebelumnya 7.824 Ha pada Tahun 2016. Komoditi kelapa dalam sedikit mengalami peningkatan Luas Tanam dimana pada Tahun 2016 sebesar 58.609 Ha menjadi 58.821 Ha pada Tahun 2020. Luas Tanam kelapa hybrida cenderung stagnan hanya 69 Ha pada Tahun 2016 dan Tahun 2020. Luas Tanam lada berfluktuasi cenderung menurun dimana luas tanam lada pada Tahun 2020 sebesar 40 Ha menurun dari Tahun 2016 sebesar 46 Ha. Luas tanam kakao mengalami peningkatan pada Tahun 2016 luas tanam kakao sebesar 384 Ha meningkat menjadi 405 Ha pada Tahun 2020. Luas tanam Pinang juga mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 luas tanam pinang sebesar 8.950 Ha meningkat menjadi 9.095 Ha pada Tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada luas tanam Kopi yaitu sebesar 3.232 Ha pada Tahun 2016 menjadi 3.333 Ha pada Tahun 2020. Sama halnya dengan luas tanam kemiri cenderung stagnan pada Tahun 2016– 2020 sebesar 8 Ha. Tabel II.18. menunjukkan perkembangan luas tanam komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020.

Tabel II.18.

Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

Komoditi	Produksi (Ton) Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Karet	3.058	3.647	3.647	3.647	3.692
Kelapa Sawit	45.739	47.806	46.887	47.806	47.806
Kelapa Dalam	51.117	51.398	51.376	51.398	51.398
Kelapa Hibrida	54	54	55	55	55
Lada	9	14	8	14	8
Kakao	173	212	173	212	173
Pinang	2.945	3.207	3.132	3.207	3.207
Kopi Robusta	1.048	1.237	1.237	1.237	1.237
Kemiri	2	4	2	2	2

*Angka sementara

Sumber : LKPI Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021, Tanjung Jabung Timur Dalam angka, 2021

Perkembangan Produksi untuk komoditi perkebunan selama periode Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi. Produksi dari komoditi kelapa sawit pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 47.806 ton dari Tahun 2018 sebesar 45.739 ton, kemudian produksi komoditi karet pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3.692 Ton pada Tahun 2020 dari

sebelumnya 3.058 ton pada Tahun 2016. Komoditi kelapa dalam juga mengalami peningkatan produksi dimana produksi pada Tahun 2016 sebesar 51.117 ton menjadi 51.398 ton pada Tahun 2020. Produksi kelapa hybrida cenderung stagnan hanya 54 dan 55 ton pada Tahun 2016 dan Tahun 2020. Produksi Tanaman lada berfluktuasi cenderung menurun dimana produksi lada pada Tahun 2020 sebesar 8 ton menurun dari Tahun 2019 sebesar 14 ton. Produksi tanaman kakao cenderung stagnan pada Tahun 2016 produksi kakao sebesar 173 ton, dan pada Tahun 2020 juga sebesar 173 ton. Produksi tanaman Pinang mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2016 produksi tanaman pinang sebesar 2.945 ton meningkat menjadi 3.207 ton pada Tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada produksi tanaman Kopi yaitu sebesar 1.048 ton pada Tahun 2016 menjadi 1.237 ton pada Tahun 2020. Produksi tanaman kemiri cenderung stagnan pada Tahun 2016– 2020 sebesar 2 Ton kecuali pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4 ton. Tabel II.18. menunjukkan perkembangan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020

Jumlah petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang Tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,29 persen per tahun. Perkembangan jumlah petani pada komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.19.
Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2015 - 2019

Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019*
	Petani (KK)				
Karet	5.266	5.281	5.263	5.283	5.283
Kelapa Sawit	11.357	11.399	11.474	11.474	11.808
Kelapa Dalam	22.821	22.783	22.743	23.054	22.743
Kelapa Hibrida	45	45	45	45	48
Lada	780	754	752	752	762
Kakao	690	692	688	688	688
Pinang	8.409	8.464	8.524	8.524	8.524
Kopi	2.448	2.435	2.426	2.567	2.567
Kemiri	31	31	27	27	27
Jumlah	51.847	51.884	51.942	52.414	52.450

*Angka sementara Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.3.2.4. Kehutanan

Luas kawasan hutan secara keseluruhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2018 yaitu seluas 205.164,86 Ha. Luas Hutan tersebut terdiri dari kawasan Suaka alam dan Pelestarian alam seluas 126.473,4 Ha, hutan lindung seluas 22.209,96 Ha, Hutan Produksi Tetap 55.194,61 Ha dan Hutan Produksi dapat dikonversi seluas 1.286,89 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.20. berikut.

Tabel II.20.

Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 – 2018

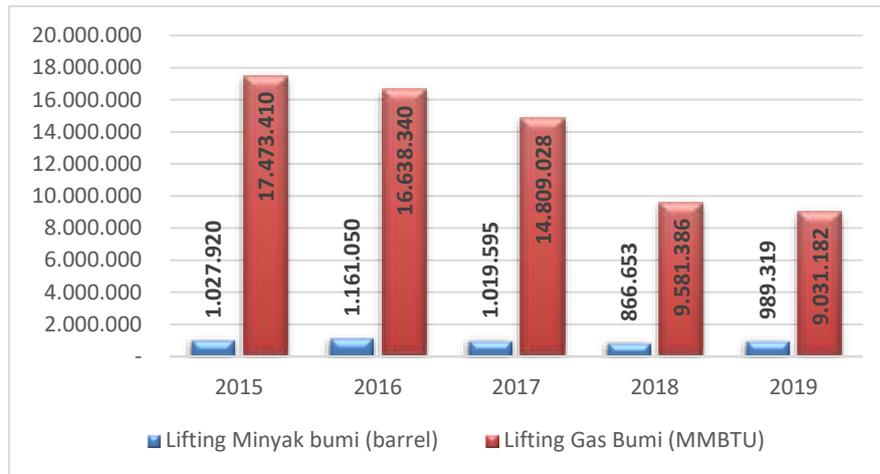
JENIS HUTAN/KAWASAN	2014	2015	2016	2017	2018
	Luas (Ha)				
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	123.412,03	123.412,03	123.412,03	123.412,03	126.473,40
Hutan Lindung (Ha)	24.288,33	24.288,33	24.288,33	24.288,33	22.209,96
Hutan Produksi Tetap (Ha)	54.686,75	54.686,75	54.686,75	54.686,75	55.194,61
Hutan Produksi dapat di Konversi (Ha)	1.334,87	1.334,87	1.334,87	1.334,87	1.286,89

Sumber : Provinsi Jambi dalam angka, 2020

2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Selama kurun waktu Tahun 2015 - 2019, capaian di bidang sumberdaya mineral berupa lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada Tahun 2015 lifting minyak bumi berjumlah 1.027.920 per barrel sempat mengalami peningkatan menjadi 1.161.050 per barrel pada Tahun 2016, lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami penurunan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 terakhir menjadi 989.319 per barrel dan selama periode 5 tahun terakhir lifting minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun sebesar minus 3,76 persen. Untuk lifting gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 5 tahun terakhir menurun sebesar minus 48,31 persen, dimana pada tahun 2015 lifting gas bumi sebesar 17.473.410 MMBTU yang mengalami penurunan menjadi 9.031.182 MMBTU di Tahun 2019. Gambar berikut menunjukkan hasil produksi bidang sumberdaya mineral di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 - 2019.

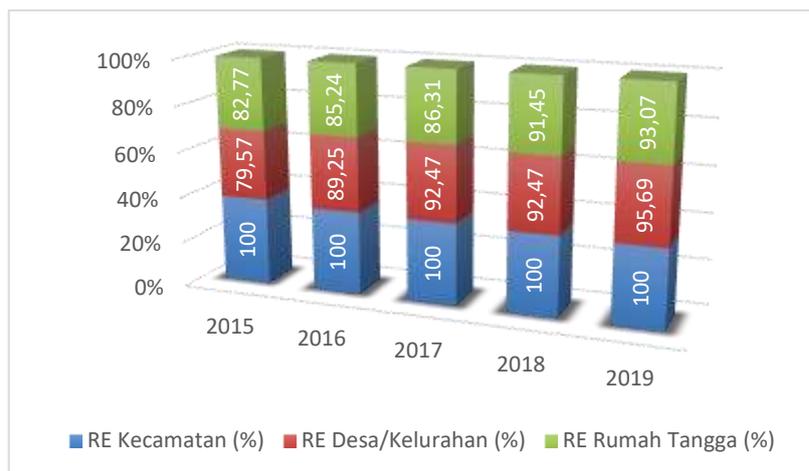
Gambar II.65.
Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2015 - 2019



Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Ratio Electricity rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen yaitu dari 82,77 persen Tahun 2015 menjadi 93,07 persen Tahun 2019. Sedangkan ratio electricity desa naik dari 79,57 persen Tahun 2012 menjadi 95,69 persen Tahun 2019 atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,51 persen. Untuk ratio electricity kecamatan sudah mencapai 100 persen sejak dari Tahun 2015 sampai dengan 2019. Ratio Electricity tingkat kecamatan, kelurahan dan rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar II.66.
Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019



Sumber : PLN Rayon Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur

2.3.2.6. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2020 didominasi oleh ikan perairan laut yaitu 95,89 persen, sedangkan sisanya adalah ikan perairan umum sebesar 1,24 persen, kolam sebesar 1,87 persen, tambak, keramba jaring apung dan mina padi sebesar 1,01 persen. Data jumlah produksi sektor perikanan Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel II.21.

Tabel II.21.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2016 - 2020

NO	SUB SEKTOR	Tahun Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perairan Laut	23.087,00	23.380,00	23.656,26	25.014,06	26.834,44
2	Perairan Umum	319,00	459,80	397,20	346,17	347,91
3	Kolam	107,50	108,30	129,54	468,55	522,06
4	Tambak	140,90	60,40	135,40	220,48	273,18
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	67,25	60,40	66,83	0	0
6	Mina Padi	0	0	0	8,4	8,41
Jumlah (Ton)		26.995,10	23.721,65	24.068,90	24.385,23	27.986,00

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Selain produksi, perkembangan sektor perikanan yang lain diantaranya Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Benih Ikan. Pada Periode 2017 – 2020 untuk ke tiga sektor perikanan tersebut mengalami peningkatan pada periode Tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan pada Tahun 2020, kecuali pada sektor Benih Ikan mengalami peningkatan dari Tahun 2017 – 2020. Jumlah Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat dari 1.005,12 ton pada Tahun 2017 meningkat menjadi 1.008,43 ton pada Tahun 2019 dan menurun pada Tahun 2020 menjadi 901,5 ton. Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat meningkat dari 34,13 Kg/Kapita pada Tahun 2017 menjadi 39,58 Kg/Kapita pada Tahun 2019 dan juga mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 37,55 Kg/kapita. Produksi Benih Ikan meningkat sebesar 473.100 ekor pada Tahun 2017 menjadi 594.100 ekor pada Tahun 2020. Perkembangan Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Benih Ikan dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel II.22.

Perkembangan Jumlah Olahan Hasil Perikanan, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat dan Produksi Benih Ikan Tahun 2017 – 2020

No	Subsektor	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.005,12	1.008,13	1018,43	901,5
2	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita)	34,13	39,51	39,58	37,55
3	Benih Ikan/ Ekor	473.100	482.500	580.300	594.100

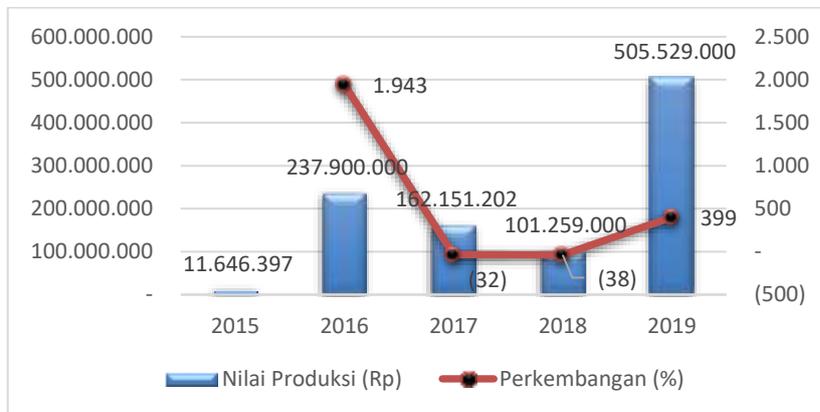
Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.3.2.7. Perindustrian dan Perdagangan

Gambar berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Nilai produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2015 sebesar Rp. 11.646.397 mengalami peningkatan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 237.900.000. Namun mengalami penurunan pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar Rp. 162.151.202 dan Rp. 101.259.000. Pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 505.529.000. Rata- rata perkembangan Nilai Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada kurun waktu Tahun 2015-2019 sebesar 568 persen.

Gambar II.67.

Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019



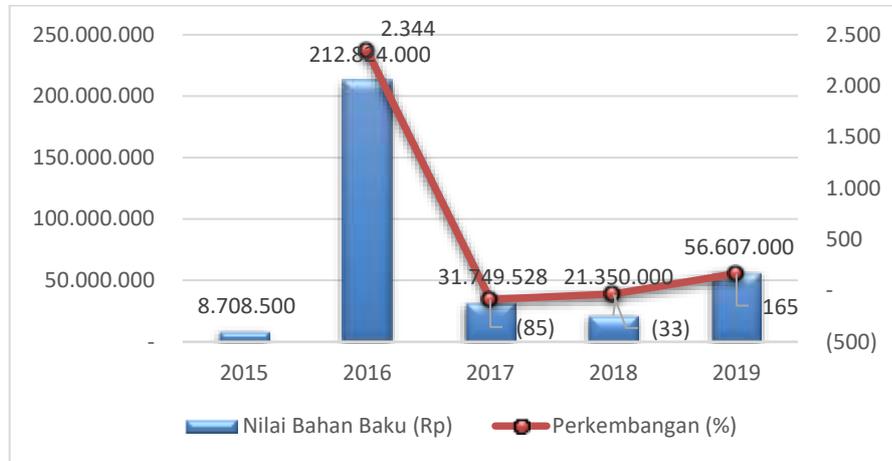
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Perolehan nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019 berfluktuatif cenderung menurun , dimana pada Tahun 2015 nilai bahan baku sebesar Rp.8.708.500 meningkat signifikan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 212.824.000. Pada Tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan menjadi berturut-turut sebesar Rp. 31.749.528, Rp. 21.350.000 dan Rp. 56.607.000. Rata-rata Perkembangan Nilai Bahan Baku dalam kurun waktu

Tahun 2015 – 2019 sebesar 598 persen. Gambar berikut menunjukkan nilai bahan baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019.

Gambar II.68.

Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Secara keseluruhan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu Tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan. Jumlah pasar pada Tahun 2015 sebanyak 26 unit, kemudian terus meningkat menjadi 28 unit pasar di Tahun 2018 - 2019, lalu. Perkembangan jumlah pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Gambar II.69.

Gambar II.69.

Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Gambar II.70. menunjukkan perkembangan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun Tahun 2015 – 2019. Kondisi pasar kurang baik jauh menurun dari 19 unit pada Tahun 2016 menjadi 4 unit pada Tahun 2019. Kondisi pasar baik cenderung stagnan sebanyak 8 unit pada Tahun 2018 – 2019. Kondisi pasar sedang meningkat tajam dari 1 unit pada Tahun 2015 menjadi 16 unit pada Tahun 2019.

Gambar II.70.
Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2015 - 2019

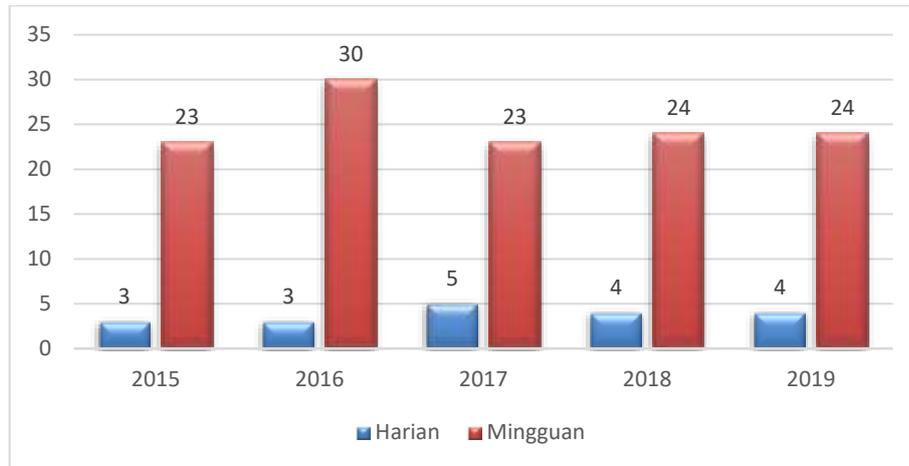


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Jenis pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi dua jenis yaitu jenis pasar harian dan jenis pasar mingguan. Jenis pasar harian dan mingguan pada periode Tahun 2015 - 2019 berfluktuasi. Pasar mingguan meningkat pada Tahun 2016 menjadi sebanyak 30 unit pasar dari sebelumnya Tahun 2015 sebanyak 23 unit. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 23 unit dan kembali bertambah menjadi 24 unit pada Tahun 2018 dan 2019. Pasar harian mengalami peningkatan pada Tahun 2017 menjadi sebanyak 5 unit dari sebelumnya Tahun 2015 dan 2016 sebanyak 3 unit. Namun berkurang pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi sebanyak 4 unit. Gambar berikut menunjukkan data perkembangan jumlah dan jenis pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019.

Gambar II.71.

Perkembangan Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2015 - 2019

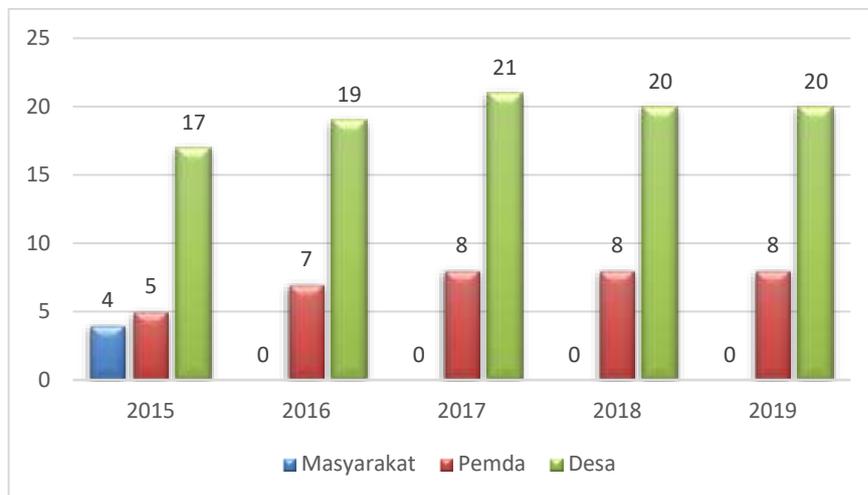


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar berikut ini menunjukkan perkembangan kepemilikan pasar dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019 yang didominasi oleh kepemilikan desa dimana pada Tahun 2019 mencapai 20 unit, sementara kepemilikan pasar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengalami peningkatan dari berjumlah 5 unit pada Tahun 2015 menjadi 8 unit pada Tahun 2019.

Gambar II.72.

Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat konsumsi. Selama periode Tahun 2016 - 2020, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran perkapita. Pengeluaran nominal per kapita untuk makanan meningkat dari Rp. 473.002 pada Tahun 2016 menjadi Rp. 593.818 pada Tahun 2020. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel II.23.
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

No	Jenis	Rata-rata Pengeluaran Perkapita (RP/bulan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Makanan	473.002	505.709	557.138	512.522	593.818

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (I_b). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi I_t yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Bila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan I_t , merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. *Kedua*, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Melalui perbandingan antara kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

Nilai NTP tidak dihitung sampai dengan Kabupaten/Kota, oleh karena itu NTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada NTP Provinsi Jambi. NTP Provinsi Jambi pada periode Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Fluktuasi NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena ketidakstabilan harga ditingkat petani dan pola konsumsi petani. Namun demikian dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan NTP, capaian ini cukup memberikan harapan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga jual namun juga meningkatkan keberdayaan petani dalam mengelola usaha taninya. Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.24.
Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

No	Item	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nlai Tukar Petani	98,60	100,78	97,13	100,85	117,83

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031. Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur haruslah disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Arahan Kawasan strategis kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Strategis Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Muara Sabak Barat;
2. Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
3. Kawasan Strategis Perindustrian di Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Kawasan Strategis Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
5. Kawasan Strategis Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
6. Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten berupa Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kecamatan Sadu.

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi meliputi kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai.

2.4.2.2. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Perkembangan bank baik bank milik pemerintah, bank pembangunan daerah maupun bank swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2015 - 2019 cenderung mengalami peningkatan. Untuk bank milik pemerintah pada Tahun 2015 – 2018 sebanyak 2 Bank, pada Tahun 2019 bertambah jumlahnya menjadi 3 Bank. Bank Milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2015 hingga 2018 berjumlah 1 Bank, bertambah 2 Bank pada Tahun 2019 sehingga berjumlah 3 Bank. Untuk Bank Swasta pada periode Tahun 2015 – 2019 tidak mengalami perkembangan hanya berjumlah 1 Bank. Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.25.

Jumlah dan Jenis Bank di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Perkembangan Bank					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Bank Milik Pemerintah	2	2	2	2	3	3
2	Bank Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	3	3
3	Bank Milik Swasta	1	1	1	1	1	1

Sumber : Badan Keuangan Daerah kab. Tanjung Jabung Timur, 2021 (* = angka sementara)

2.4.2.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran, penginapan/hotel

Perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2015 - 2019 mengalami kecenderungan meningkat, yaitu dari 56 rumah makan pada Tahun 2015 berkembang pada tahun 2019 menjadi 73 rumah makan. Data perkembangan restoran atau rumah makan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.26.
Perkembangan Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Perkembangan Rumah Makan/Restoran					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Rumah Makan	56	62	68	66	73	75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020 (= angka sementara)*

Kondisi jumlah hotel/penginapan mengalami kondisi stagnan pada Tahun 2015 - 2018, namun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 7 unit Hotel. Tabel berikut menunjukkan jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2019.

Tabel II.27.
Jumlah Hotel/Penginapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Perkembangan Hotel/Penginapan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel/Penginapan	6	6	6	6	7	5

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

2.4.2.4. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktivitas. Sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dibangun UPTD SPAM guna memenuhi kebutuhan air minum. Deskripsi jumlah penduduk yang mendapat layanan air bersih dari beberapa sumber dapat dilihat pada Gambar II.73

Gambar II.73.

Cakupan Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : LKPI Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.2.5. Rasio ketersediaan daya listrik

Secara nasional, persentase rumah tangga yang sumber penerangannya bukan listrik selama periode 2016 - 2020 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan dalam penyediaan akses energi listrik, walaupun belum secara menyeluruh akses tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik sebagai penerangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.28.

Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

Tahun	Rasio Ketersediaan Listrik (%)
2016	89,59
2017	96,79
2018	96,79
2019	96,60
2020	99,60

Sumber : PT PLN Persero ULP Ma Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Kriminalitas

Meskipun perkembangan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh dengan cepat, namun berbeda dengan tindak pidana/kriminalitas. Dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2020 tindak pidana/kriminalitas berfluktuasi cenderung menurun. Hal ini tergambar pada jumlah kejahatan yang terjadi. Kinerja aparat keamanan cukup baik disisi preventif maupun persuasif, hal tersebut dapat dilihat dari angka kriminalitas yang tertangani sebesar 5,71 persen di Tahun 2015 naik menjadi 7,84 persen pada Tahun 2017 namun mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,74 persen. Indeks kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.29.

Indeks Kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015 - 2020

NO	Kejahatan		Σ Penduduk	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Dilaporkan	Ditangani		
2015	237	122	213.670	5,71
2016	208	128	215.316	5,94
2017	207	170	216.777	7,84
2018	239	157	218.413	7,19
2019	170	122	219.985	5,55
2020	106	86	229.813	3,74

Sumber : BPS, Tanjabtim dalam angka, 2021 (data diolah)

2.4.3.2. Demonstrasi / Unjuk Rasa

Situasi yang kondusif merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menciptakan hal tersebut perlu dilakukan upaya meminimalisir setiap gangguan terhadap pelaksanaan tugas ke pemerintahan. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan, selain daripada itu masyarakat juga dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tertib. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2015 telah terjadi 4 kali unjuk rasa, Tahun 2016 tidak terjadi unjuk rasa, Tahun 2017 telah terjadi 1 kali unjuk rasa, Tahun 2018 dan 2019 sebanyak masing-masing 2 kali unjuk rasa dan Tahun 2020 terjadi sebanyak 4 kali unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan selama ini merupakan aksi unjuk rasa damai, aspirasi yang disampaikan didominasi pada permasalahan sengketa lahan dan tapal batas.

Tabel II.30.

Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Demo
1.	2015	4 Kali
2.	2016	0 Kali
3.	2017	1 Kali
4.	2018	2 Kali
5.	2019	2 Kali
6.	2020	4 kali

Sumber : Dinas Satpol-PP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.3.3. Perizinan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008, tentang OTK Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang kepada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana KPPT memiliki wewenang pelayanan perizinan secara terpadu. Melalui KPPT tersebut, waktu, tempat dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal lebih terpadu dan teratur. Waktu lamanya proses perizinan bervariasi antara 2 hingga 8 hari pengurusan dengan catatan persyaratan lengkap. Lama pengurusan perizinan terlama pada izin mendirikan bangunan selama 8 hari. Untuk lebih jelasnya lamanya proses perizinan perjenis izin dapat dilihat pada Tabel II.33.

Tabel II.31.

Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
3	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	5 hari
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 hari

Sumber : DPMPSTP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.3.4. Jumlah pajak dan retribusi daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pemerintah Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah. Pada Tahun 2020 jumlah jenis pajak sebanyak 11 jenis pajak dan retribusi sebanyak 16 jenis retribusi. Jenis pajak dan jenis retribusi daerah yang dipungut oleh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersaji pada Tabel II.32.

Tabel II.32.

Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Pajak Hotel	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Pajak Restoran	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
3	Pajak Hiburan	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Pajak Reklame	4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Pajak Penerangan Jalan	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Pajak Air Tanah	6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
7	Pajak Sarang Burung Walet	7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10	Retribusi Tempat Pelelangan
		11	Retribusi Terminal
		12	Retribusi Tempat Khusus Parkir
		13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
		14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
		15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
		16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

2.4.3.5. Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan peraturan daerah yang mendukung iklim tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai pentingnya dukungan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pengusaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik yang prima dan memenuhi standar pelayanan minimum.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan. Pemanfaatan penduduk usia produktif diperhatikan sebagai faktor kunci dalam kemajuan pembangunan. Selama kurun waktu Tahun 2016 – 2020 rasio ketergantungan di kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun, artinya jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari pada jumlah penduduk non produktif (usia 0-14 tahun dan > 65 tahun). Penurunan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keunggulan pada jumlah penduduk produktif. Hal ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan

Pada Tahun 2016 dan 2017 rasio ketergantungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 48,43 persen, menurun pada Tahun 2018 - 2020 menjadi sebesar 48,42 persen, 45,14 persen dan 43,75 persen. Selengkapnya rasio ketergantungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.74.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Statistik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021 (data diolah)

B

A

B

III

Gambaran
Keuangan
Daerah

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada tahun 2018 dan 2019, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjalankan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Perubahan standar akuntansi pemerintahan dari *Cash To Accrual Basis* (PP 25/2004) ke *Full Accrual* (PP 71/2010) mampu diupayakan dengan baik sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa didapatkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Opini ini juga merupakan bukti telah baiknya kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Tabel III.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Rerata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	PENDAPATAN	1.091.271.329.948,85	1.080.986.057.747,43	1.093.500.510.955,14	1.195.747.773.012,10	1.052.623.668.826,01	-0,60
01.01	Pendapatan Asli Daerah	43.935.738.483,85	76.737.507.723,26	49.607.102.060,03	53.919.302.033,20	49.654.020.387,85	10,02
01.01.01	Pajak daerah	12.399.377.006,85	16.624.618.742,10	17.705.729.232,42	16.647.635.508,94	1.752.106.753,00	-13,72
01.01.02	Retribusi daerah	4.368.648.180,25	7.361.353.133,14	1.174.130.455,14	1.586.254.225,29	1.586.254.225,29	4,89
01.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.960.217.704,08	5.782.470.649,60	6.393.385.881,15	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	8,10
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	22.207.495.592,67	46.969.065.198,42	24.333.856.491,32	29.041.076.152,88	25.310.974.265,27	17,45
01.02	Dana Perimbangan	968.373.794.264,00	896.259.003.727,00	905.488.095.447,00	959.088.814.692,00	833.566.346.360,00	-3,40
01.02.01	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	169.194.985.646,00	192.017.565.563,00	168.165.542.361,00	207.960.691.035,00	207.960.691.035,00	6,18
01.02.02	Dana alokasi umum	533.829.506.000,00	533.204.953.000,00	540.400.531.000,00	564.422.212.000,00	521.920.298.000,00	-0,46
01.02.03	Dana alokasi khusus	265.349.302.618,00	171.036.485.164,00	196.922.022.086,00	186.705.911.657,00	168.301.939.136,00	-8,86
01.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.961.797.201,00	107.989.546.297,17	138.405.313.448,41	182.739.656.286,90	169.403.302.078,16	22,42
01.03.01	Hibah	577.353.500,00	253.956.000,00	229.615.000,00	31.878.600.000,00	36.972.120.000,00	3.433
01.03.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
01.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	30.086.019.701,00	38.985.907.297,17	43.732.150.448,41	53.524.507.286,90	81.939.776.000,00	29,31
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	48.298.424.000,00	60.169.683.000,00	88.863.548.000,00	81.410.049.000,00	81.410.049.000,00	15,97
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	8.580.000.000,00	5.580.000.000,00	15.926.500.000,00	5.580.000.000,00	28,50

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020, * LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (data Unaudit)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Gambar III.1.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Secara lebih rinci yaitu, pada Tahun 2016, ditetapkan target penerimaan Pendapataan Daerah berjumlah Rp. 1.071,10 Milyar, menurun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 1.027,83 Milyar Kemudian meningkat pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi Rp. 1.083,17 Milyar dan Rp. 1.196.85 Milyar. Pada Tahun 2020 target kembali menurun menjadi Rp. 1.060,40 Milyar. Total pertumbuhan target meningkat 0,44 persen dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,11 persen.

Pada periode yang sama (5 tahun terakhir ini), realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung menurun. Untuk lebih rinci penjelasannya yaitu Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 1.091,27 Milyar, selanjutnya meningkat sampai Tahun 2019 menjadi Rp. 1.195,75 Milyar, namun menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.052,62 Milyar. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan sebesar minus 2,40 persen dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar minus 0,6 persen.

Gambar III.2.

Nilai Efektivitas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



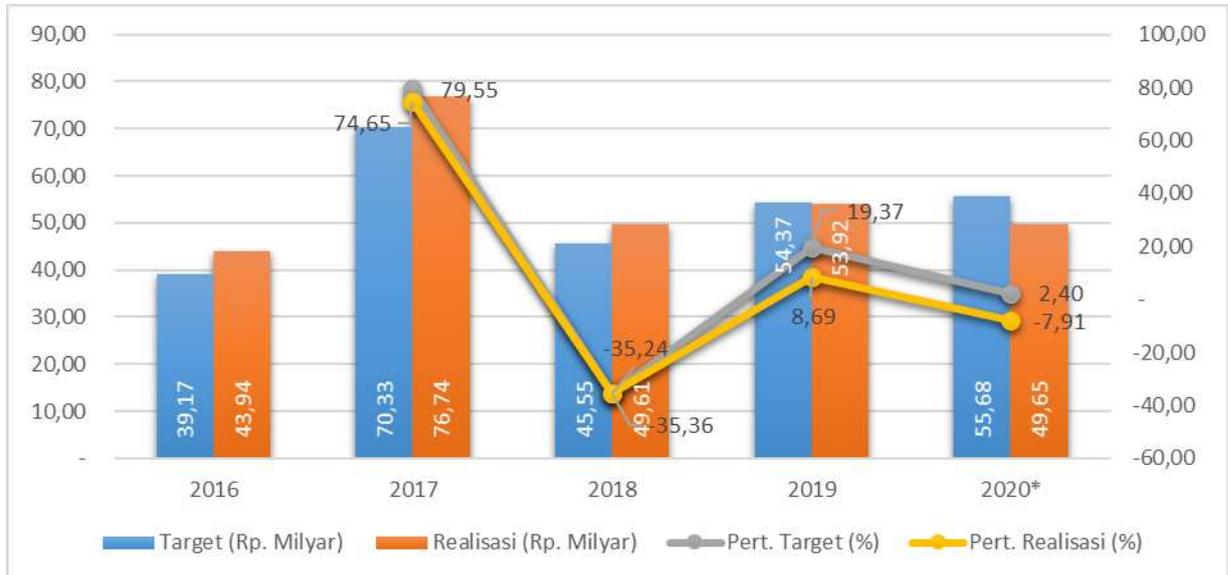
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Tingkat efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun Tahun 2016 sampai dengan 2020 secara umum dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 101,44 persen per tahun.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar III.3.
Perkembangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020

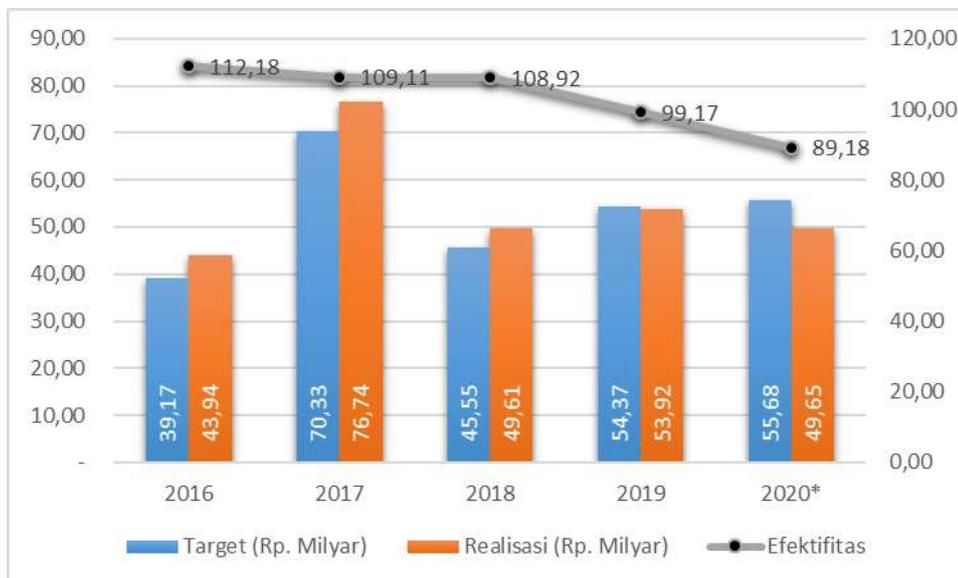


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi cenderung meningkat pada kurun waktu Tahun 2016 - 2020. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : Pada Tahun 2016, ditetapkan target penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 39.17 milyar selanjutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2017 menjadi Rp. 70,33 Milyar. Pada Tahun 2018 target PAD menurun menjadi Rp. 45,55 Milyar namun meningkat kembali pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 54,37 Milyar dan Rp. 55,68 Milyar. Pertumbuhan rata-rata target PAD per Tahun sebesar 16,52 persen.

Pada periode yang sama, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung meningkat. Penjelasan yang lebih detail sebagai berikut : Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 43,94 Milyar dan meningkat sangat signifikan sampai dengan Tahun 2017 yaitu sebanyak Rp. 76,74 Milyar. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 49,61 Milyar namun kembali meningkat pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar Rp. 53,92 Milyar dan Rp. 49,65 Milyar. Berdasarkan data realisasi tersebut, maka rata-rata realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 10,02 persen per tahun.

Gambar III.4.
 Nilai Efektivitas PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Selama Tahun 2016 - 2020 secara umum tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 103,71 persen per tahun.

A.1. Pajak Daerah

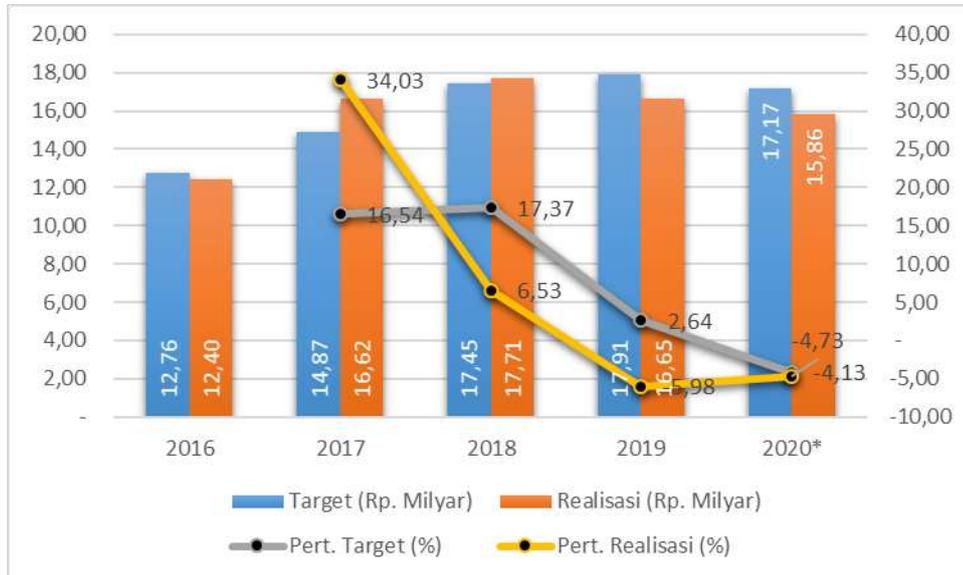
Periode Tahun 2016 - 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2016 ditargetkan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 12,76 Milyar kemudian pada Tahun 2020 target meningkat, ditetapkan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 17,17 milyar, atau meningkat 16,54 persen. Adapun rata-rata target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 8,10 persen per tahun.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016- 2020 cenderung naik setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2019 dan 2020 realisasi pajak daerah menurun dari Tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah Rp. 12,40 Milyar meningkat di Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 15.86 Milyar atau meningkat 27,9 persen. Maka secara rata-rata realisasi

penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 7,46 persen per tahun.

Gambar III.5.

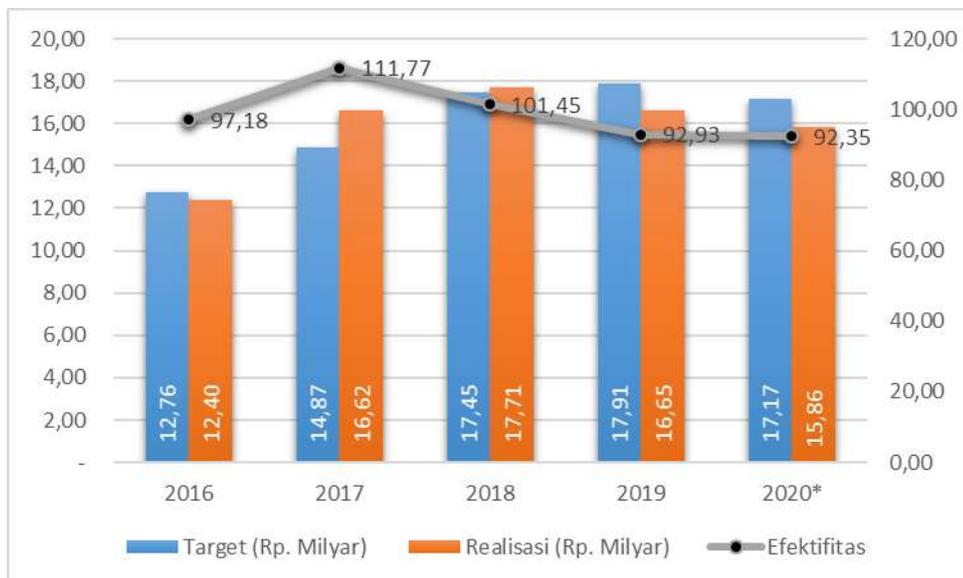
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Gambar III.6.

Nilai Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



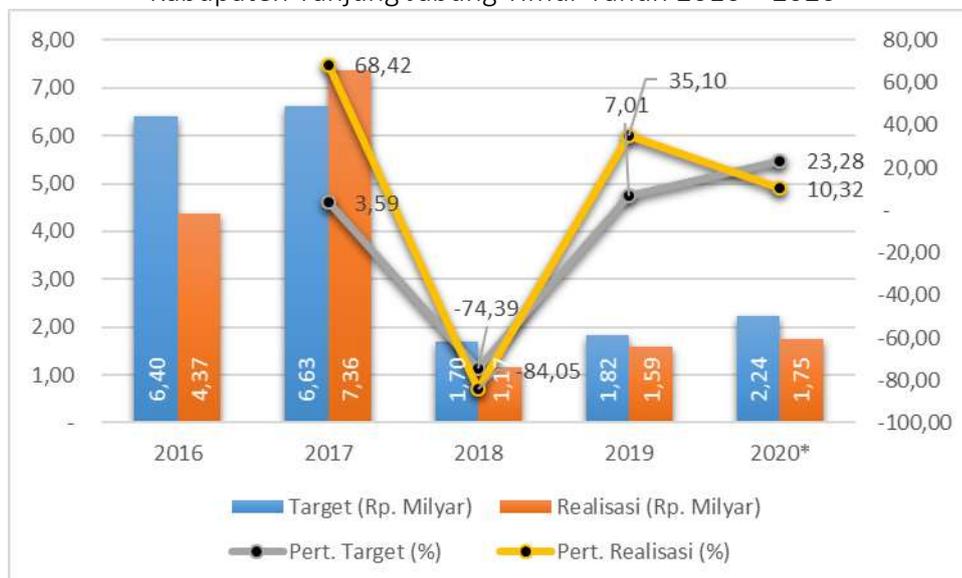
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir (2016-2020) secara keseluruhan efektif. Berdasarkan data yang dihasilkan tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 99,14 persen dari target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

A.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menetapkan target yang berbeda-beda, namun cenderung turun. Penjelasan secara detailnya yaitu: pada Tahun 2016 target Retribusi Daerah ditetapkan berjumlah Rp. 6,40 Milyar, target naik pada Tahun 2017 sebesar 3,59 persen menjadi Rp. 6,63 Milyar. Pada Tahun 2018 dan 2019 menurun sebesar minus 72,59 persen atau menjadi Rp. 1,82 Milyar. Pada Tahun 2020 kembali meningkat sebesar 23,28 persen menjadi 2,24 Milyar. Dengan demikian rata-rata target penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun sebesar minus 10,13 persen per tahun.

Gambar III.7.
Perkembangan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Sama halnya dengan target penerimaan Retribusi Daerah Pada periode yang sama, realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung menurun. Deskripsi realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap tahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan Retribusi Daerah berjumlah Rp. 4,37 Milyar meningkat pada Tahun 2017 sebesar 7,36 Milyar. Pada Tahun 2018 - 2020 realisasi penerimaan Retribusi Daerah menurun menjadi Rp. 1,17 Milyar, Rp. 1,59 Milyar dan 1,75 Milyar. Secara rata-rata realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 7,45 persen per tahun.

Gambar III.8.
 Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) bervariasi dari cukup efektif, efektif dan sangat efektif. Secara umum tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur efektif dengan angka rata-rata sebesar 82,77 persen. Namun pada Tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat efektif, pada Tahun 2016 dan 2018 tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup efektif serta pada Tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur efektif.

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Selama kurun waktu Tahun 2016 - 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2016, target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berjumlah Rp. 4,8 Milyar kemudian pada Tahun 2020 meningkat sampai sebesar 41,46 persen menjadi Rp. 6,79 Milyar. Secara umum rata-rata pertumbuhan target hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per tahun naik sebesar 9,41 persen.

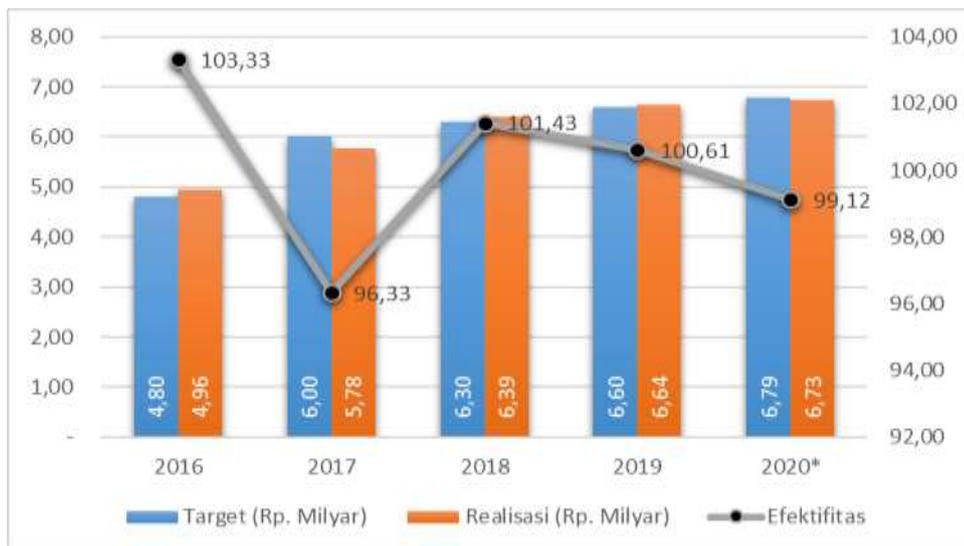
Gambar III.9.
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Pada periode yang sama, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat, lebih rinci penjelasannya yaitu : Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berjumlah Rp. 4,96 Milyar meningkat sampai dengan Tahun 2020 menjadi Rp. 6,73 Milyar. Berdasarkan capaian tersebut maka diperoleh rata-rata realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 8,09 persen per tahun.

Gambar III.10.
 Nilai Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan bisa dikatakan sangat efektif dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 100,16 persen, namun di Tahun 2017 dan 2020 tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

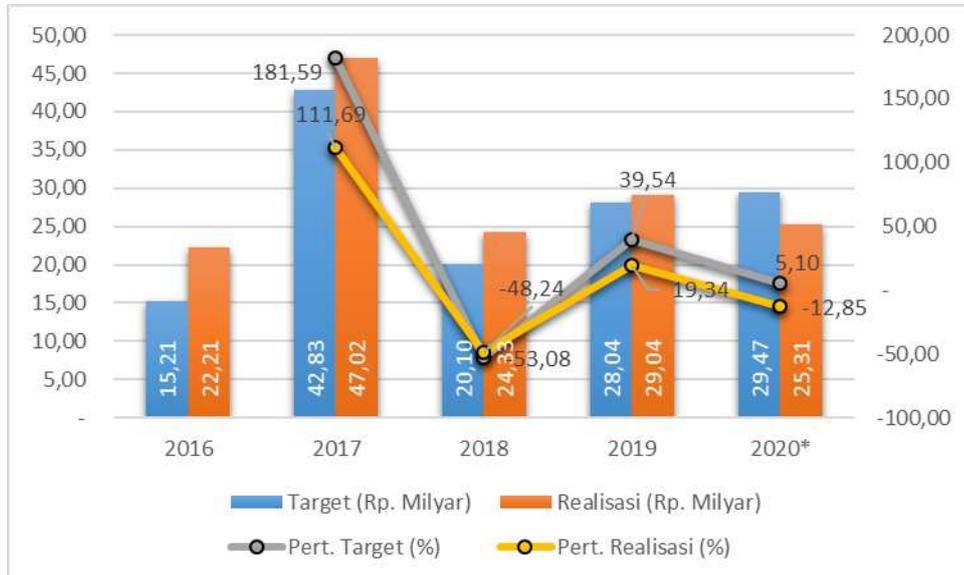
A.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Rp. 15,21 Milyar meningkat pada Tahun 2017 sebesar 181,59 persen menjadi Rp. 42,83 Milyar. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar minus 53,08 persen menjadi Rp. 20,10 Milyar namun meningkat kembali sebesar 39,54 persen dan 5,10 persen menjadi Rp. 28,04 Milyar dan 29,47 Milyar pada Tahun 2019 dan 2020. Rata-rata pertumbuhan Target Lain-lain PAD yang sah pada periode 2016 – 2020 sebesar 43,29 persen per tahun.

Sama halnya dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 22,21 Milyar kemudian meningkat pada Tahun 2017 menjadi Rp. 47,02 Milyar atau meningkat 111,69 persen. Pada Tahun 2018 menurun menjadi Rp. 24,33 Milyar atau sebesar minus 48,24 persen. Namun kembali meningkat sebesar 19,34 persen menjadi Rp. 29,04 Milyar pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 menurun sebesar minus 12,85 persen menjadi 25,31 Milyar. Realisasi dari jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh sebesar 17,48 persen per tahun.

Gambar III.11.

Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

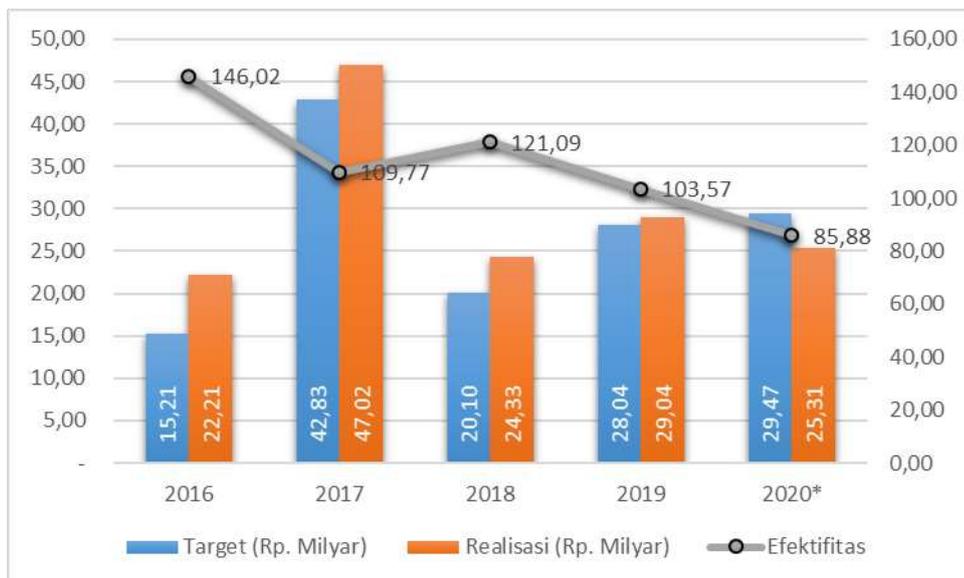


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Rata-rata tingkat efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 113,27 persen selama periode Tahun 2016 - 2020 sangat efektif.

Gambar III.12.

Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2019



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

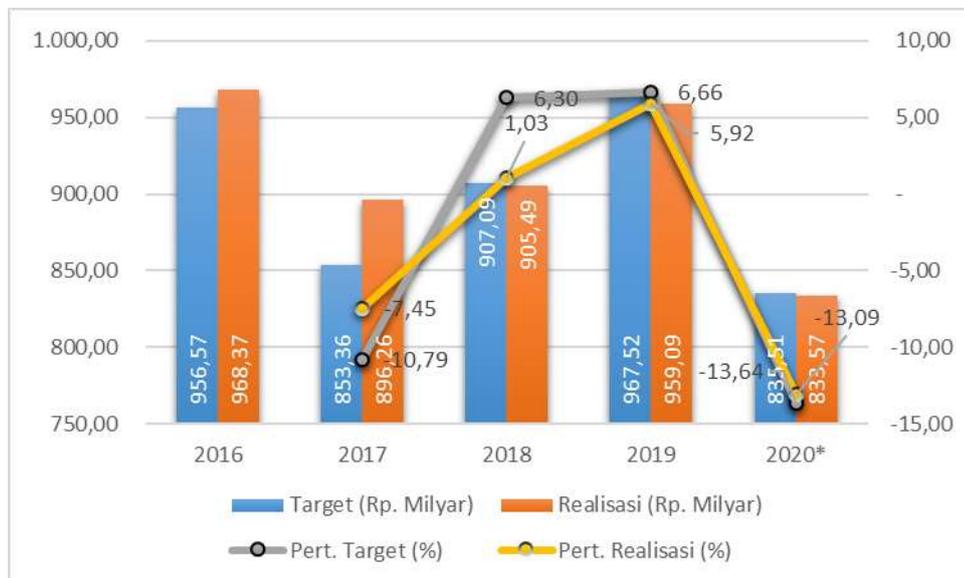
B. Pendapatan Transfer

B.1. Dana Perimbangan

Target dana perimbangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016 sampai 2020 cenderung menurun. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar minus 10,79 atau sebesar 853,36 Milyar dibandingkan Tahun 2016 sebesar 956,57 Milyar. Pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,30 persen dan 6,66 persen menjadi Rp. 907,09 Milyar dan Rp, 967,52 Milyar. Namun kembali menurun pada Tahun 2020 sebesar minus 13,64 persen atau sebesar 835,51 Milyar. Secara rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 2,87 persen per tahun.

Gambar III.13.

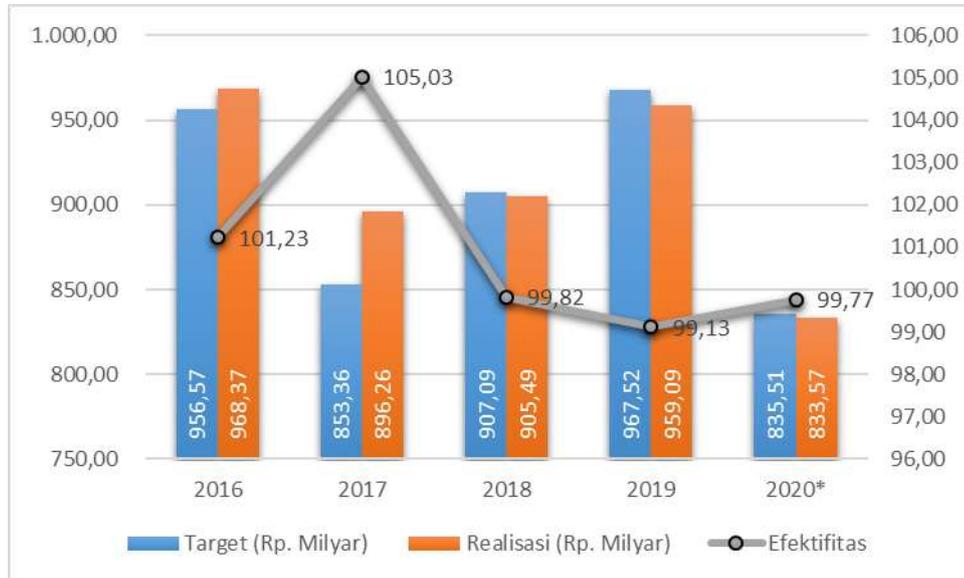
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Pada periode yang sama, penerimaan Dana Perimbangan realisasinya menunjukkan trend cenderung menurun setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 968,37 Milyar, kemudian pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 896,26 Milyar atau menurun sebesar minus 7,45 persen. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat sebesar 1,03 persen dan 5,92 persen menjadi Rp. 905,49 Milyar dan Rp. 959,09 Milyar dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar minus 13,09 persen menjadi 833,57 Milyar. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata turun sebesar minus 3,40 persen per tahun.

Gambar III.14.
 Nilai Efektivitas Dana Perimbangan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Berdasarkan capaian target dan realisasi untuk Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016-2020 secara umum setiap tahun sangat efektif dengan rata-rata sebesar 101,00 persen. Namun Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 tingkat efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

B.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 117,92 Milyar kemudian meningkat pada Tahun 2017 sebesar 17,38 persen menjadi Rp. 138,41 Milyar. selanjutnya terus-menerus naik setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2019 naik menjadi Rp. 191,61 Milyar. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 138,44 Milyar. Rata-rata target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 6,29 persen per tahun.

Gambar III.15.

Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 – 2020

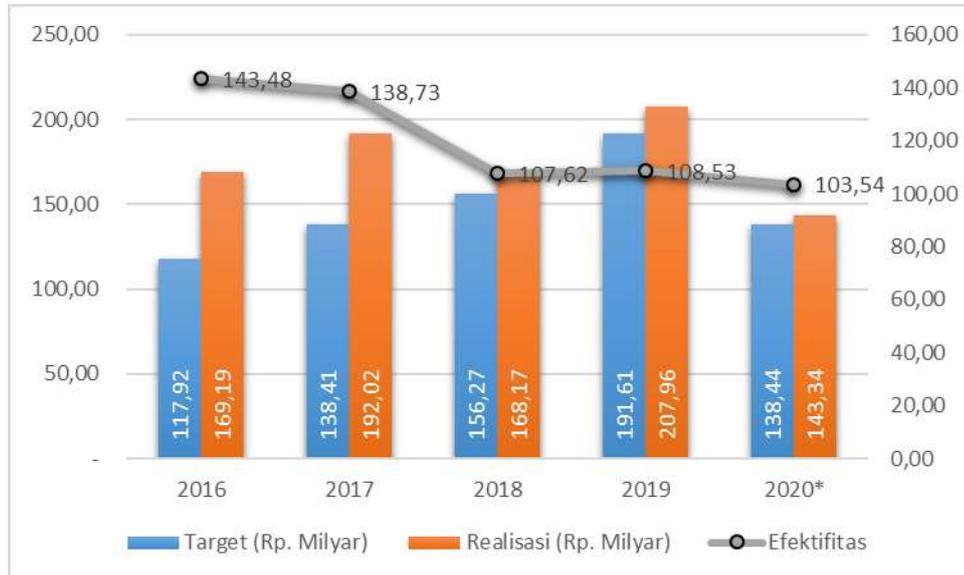


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020 , LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Selanjutnya, pada tahun yang sama realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 169,19 Milyar meningkat pada Tahun 2017 sebesar 17,38 persen menjadi Rp. 192,02 Milyar. Pada Tahun 2018 kembali menurun menjadi Rp. 168,17 Milyar namun kembali meningkat sebesar 22,62 persen atau menjadi sebesar Rp. 207,96 Milyar pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan realisasinya sebesar minus 31,07 persen menjadi Rp. 143,34 Milyar. Berdasarkan hasil tersebut maka rata-rata realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun minus 1,58 persen per tahun.

Gambar III.16.

Nilai Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



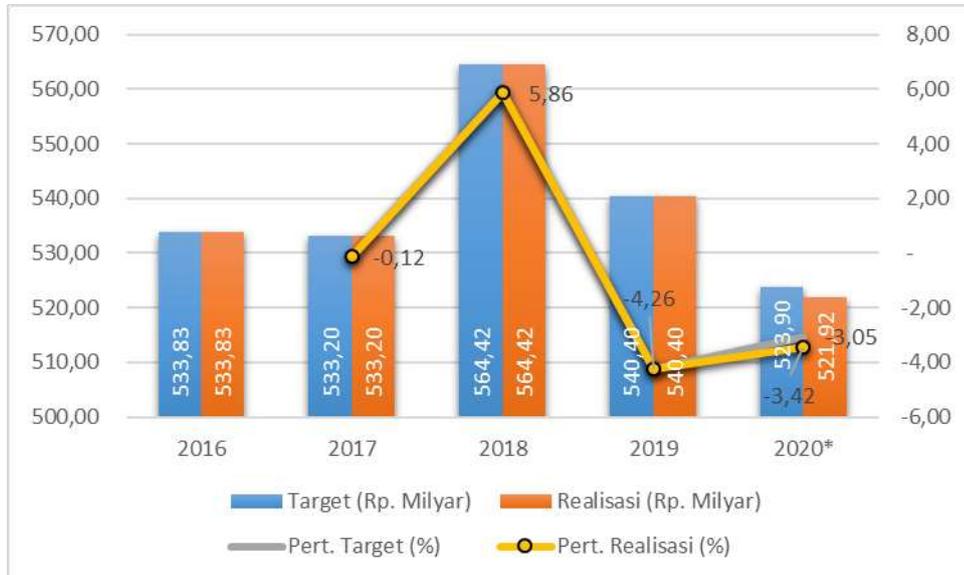
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Selama kurun waktu Tahun 2016 – 2020 penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat efektif setiap tahun. Jika dilihat hasil secara keseluruhan maka diperoleh tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rata-rata 120,38 persen.

B.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

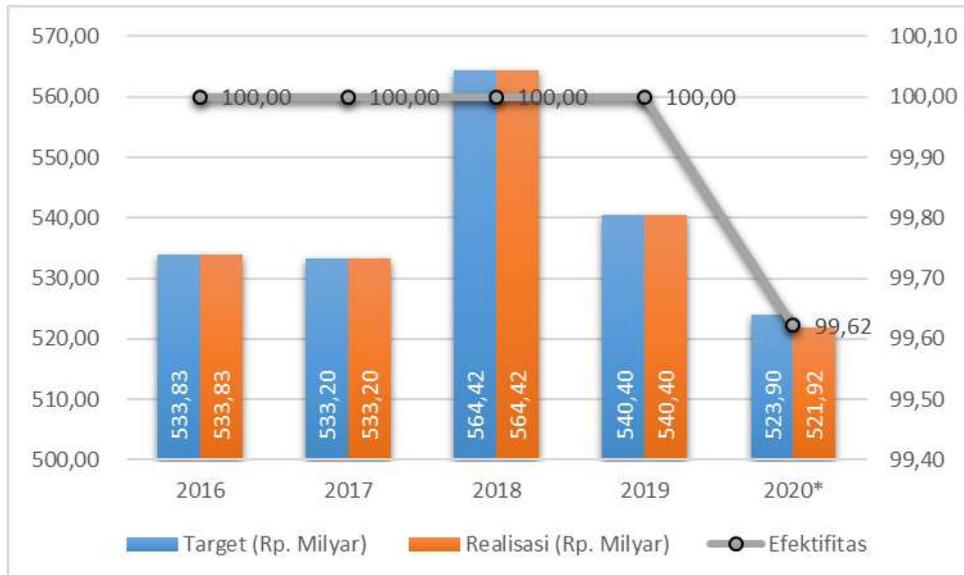
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 target dan realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 533,83 Milyar terus meningkat sampai dengan Tahun 2018 menjadi Rp 564,42 Milyar. Target dan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 menurun sebesar minus 4,26 persen menjadi Rp. 540,40 Milyar. Pada Tahun 2020 target dana alokasi umum menurun sebesar minus 3,05 persen menjadi Rp. 523,90 Milyar dan realisasi juga mengalami penurunan sebesar minus 3,42 persen menjadi Rp. 521,92 Milyar. Berdasarkan data tersebut rata-rata target dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar minus 0,39 dan minus 0,48 persen per tahun.

Gambar III.17.
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016- 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Gambar III.18.
Nilai Efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



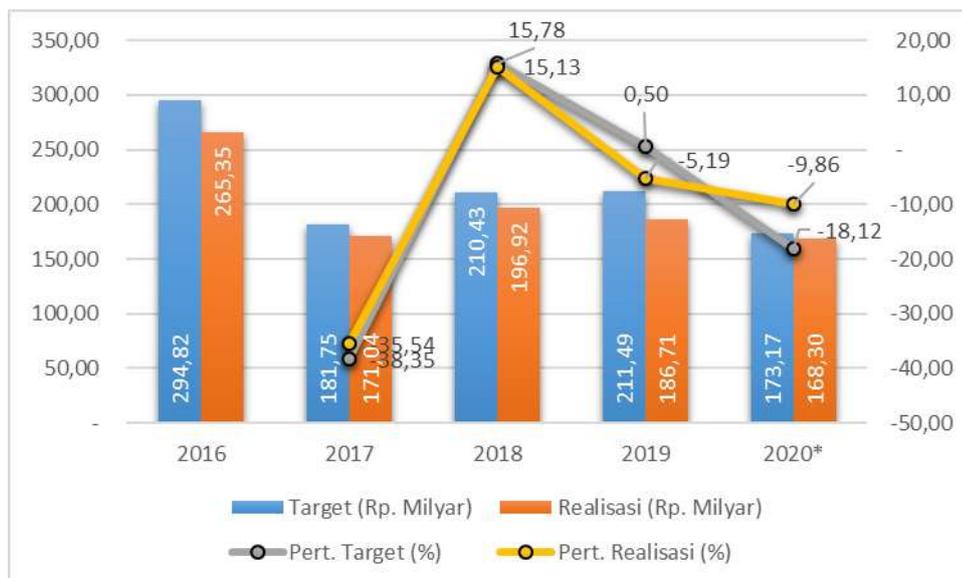
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penerimaan Dana Alokasi Umum, periode 2016-2020 secara umum efektif dengan rata-rata 99,62 persen dari tingkat efektivitas target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

B.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Periode Tahun 2016 – 2020 target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 target Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 294,82 Milyar, menurun pada Tahun 2017 sebesar minus 38,35 persen menjadi Rp. 181,75 Milyar namun Tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat sebesar 15,78 persen dan 0,50 persen menjadi Rp. 210,43 Milyar dan Rp. 211,49 Milyar. Pada Tahun 2020 kembali menurun sebesar minus 18,12 persen menjadi Rp. 173,17 Milyar. Rata-rata target penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun minus 10,05 persen per tahun.

Gambar III.19.
Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Pada periode yang sama, realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2016 realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 265,35 Milyar, kemudian menurun pada Tahun 2017 sebesar minus 35,54 persen menjadi Rp. 171,04 Milyar. Kemudian di Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 196,92 Milyar atau naik sebesar 15,13 persen, namun kembali turun pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar minus 5,19 dan minus 9,86 persen menjadi Rp. 186,71 Milyar dan Rp. 168,30 Milyar. Realisasi Dana Alokasi khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata turun sebesar minus 8,86 persen per

tahun. Adapun tingkat efektivitas penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir 2016 - 2020, secara umum sebesar 92,63 persen.

Gambar III.20.
 Nilai Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK)
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

B.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

B.2.1. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 memiliki target yang fluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 49,08 Milyar meningkat pada Tahun 2017 - 2019 sebesar 22,6 persen, 48,00 persen dan 28,45 persen menjadi Rp. 60,17 Milyar, Rp. 89,05 Milyar, Rp. 114,39 Milyar. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 28,37 persen menjadi Rp. 81,94 Milyar. Rata-rata target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 17,67 persen per tahun.

Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 48,30 Milyar. Selanjutnya pada Tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp. 60,17 Milyar dan Rp. 88,86 Milyar. Namun pada Tahun 2019 dan 2020 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menurun menjadi Rp. 81,41 Milyar dan Rp. 81,94 Milyar. Rata-rata Realisasi Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 16,13 persen per tahun.

Gambar III.21.

Perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Periode Tahun 2016-2020 penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung secara keseluruhan untuk tingkat efektivitas adalah efektif setiap tahun kecuali Tahun 2017 dan 2020 sangat efektif. Sebagaimana hasil yang diperoleh yaitu rata-rata sebesar 99,40 persen per tahun.

Gambar III.22.

Nilai Efektivitas Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

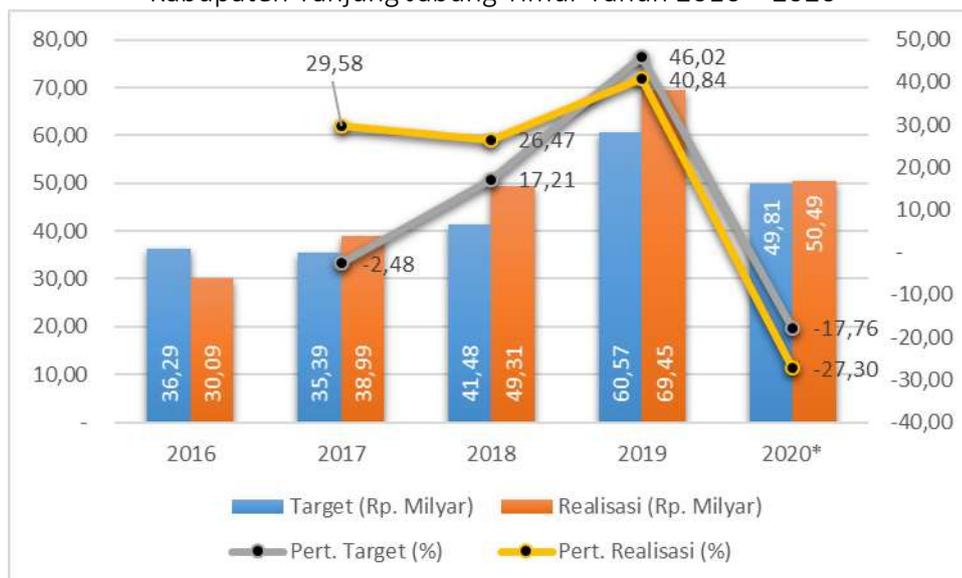
B.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Dana transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya dan Bantuan Keuangan Desa.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, target Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target sebesar Rp. 36,29 Milyar menurun sebesar minus 2,48 persen menjadi Rp. 35,39 Milyar pada Tahun 2017 dan meningkat kembali pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi Rp. 41,48 Milyar dan Rp. 60,57 Milyar. Pada Tahun 2020 target kembali menurun sebesar minus 17,79 persen menjadi Rp. 49,81 Milyar. Secara rata-rata target dana transfer pemerintah provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 10,75 persen per tahun.

Begitu juga dengan realisasi dana transfer pemerintah provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 terealisasi Rp. 30,09 Milyar. Pada Tahun 2017 – 2019 realisasi dana transfer pemerintah provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat masing-masing menjadi Rp. 38,99 Milyar, Rp. 49,31 Milyar dan Rp. 69,45 Milyar. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 27,30 persen menjadi 50,49 Milyar. Rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 17,40 persen per tahun.

Gambar III.23.
Perkembangan Dana Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Secara umum tingkat efektivitas Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat efektif dengan rata-rata 103,99 persen.

Gambar III.24.

Nilai Efektivitas Dana Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu Tahun 2016 - 2020. Pada Tahun 2016 target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp. 85,36 Milyar meningkat menjadi Rp. 104,14 Milyar, Rp. 130,53 Milyar dan Rp. 174,96 Milyar pada Tahun 2017 – 2019. Pada Tahun 2020 target mengalami penurunan sebesar minus 3,28 persen menjadi Rp. 169,22 Milyar. Berdasarkan data tersebut target lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh sebesar 19,52 persen per tahun.

Gambar III.25.

Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

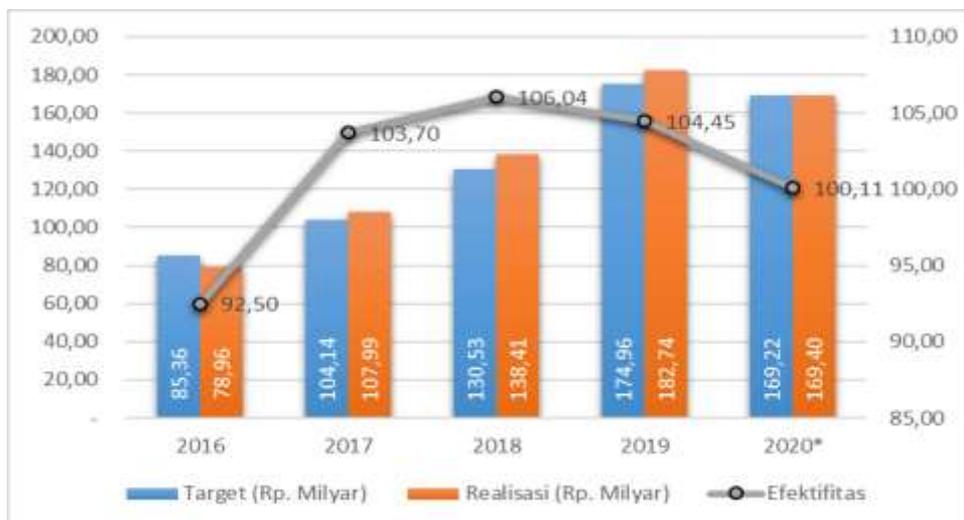


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

Penerimaan yang bersumber dari lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat selama Tahun 2016 - 2020. Pada Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 78,96 Milyar meningkat pada Tahun 2017 – 2019 menjadi Rp. 107,99 Milyar, Rp. 138,41 Milyar dan Rp. 182,74 Milyar. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 7,30 persen menjadi Rp. 169,40 Milyar. Secara rata-rata realisasi lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 22,42 persen per tahun.

Gambar III.26.

Nilai Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

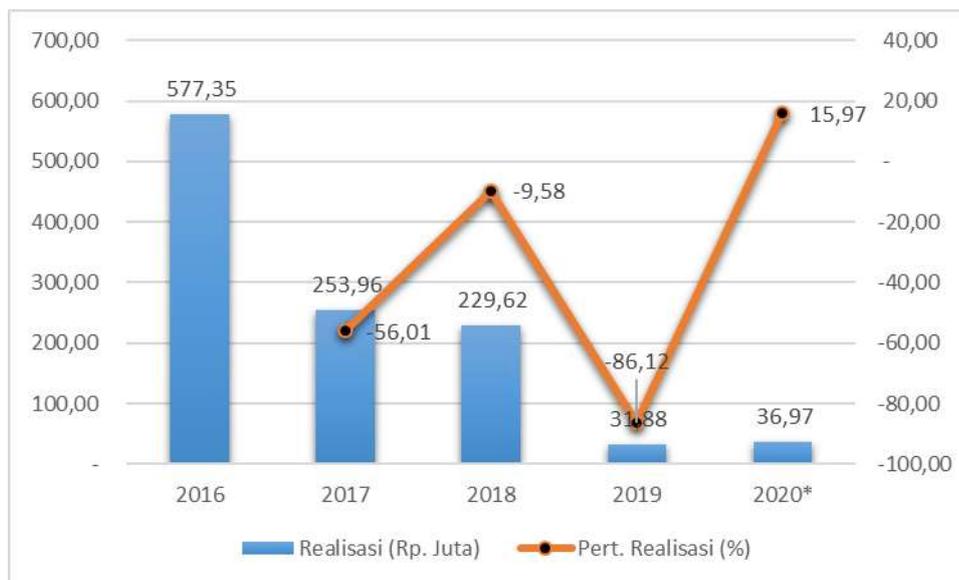
Sementara itu, untuk tingkat efektivitas penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 secara umum sangat efektif dengan rata-rata 100,75 persen. Kecuali pada Tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif.

C.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun setiap tahunnya selama kurun waktu 2016 – 2020 sedangkan target pendapatan Hibah tidak pernah dialokasikan pada periode tersebut. Pada Tahun 2016 pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 577,35 juta menurun pada Tahun 2017 – 2019 masing-masing sebesar minus 56,01 persen, minus 9,58 persen, minus 86,12 persen menjadi Rp. 253,96 juta , Rp. 229,62 juta dan Rp. 31,88 juta. Pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,97 persen menjadi Rp. 36,97 juta. Selengkapnya perkembangan pendapatan hibah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.27.

Perkembangan Pendapatan Hibah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020, LKPI Bupati Tanjung Jabung Timur 2020 (Unaudit)

3.1.1.2 Proporsi Sumber Pendapatan

Tabel berikut dapat dilihat gambaran kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 dari sisi pendapatan daerah.

Tabel III.2

Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah					Rerata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN						
01.01	Pendapatan Asli Daerah	4,03	7,10	4,54	4,51	4,72	4,98
01.01.01	Pajak daerah	1,14	1,54	1,62	1,39	1,51	1,44
01.01.02	Retribusi daerah	0,40	0,68	0,11	0,13	0,17	0,30
01.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,45	0,53	0,58	0,56	0,64	0,55
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	2,04	4,35	2,23	2,43	2,40	2,69
01.02	Dana Perimbangan	88,74	82,91	82,81	80,21	79,19	82,77
01.02.01	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	15,50	17,76	15,38	17,39	13,62	15,93
01.02.02	Dana alokasi umum	48,92	49,33	49,42	47,20	49,58	48,89
01.02.03	Dana alokasi khusus	24,32	15,82	18,01	15,61	15,99	17,95
01.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,24	9,99	12,66	15,28	16,09	12,25
01.03.01	Hibah	0,05	0,02	0,02	2,67	3,51	1,25
01.03.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	
01.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	2,76	3,61	4,00	4,48	4,27	3,82
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	4,43	5,57	8,13	6,81	7,78	6,54
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	0,79	0,51	1,33	0,53	0,79

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020 (data diolah)

Jika dilihat dari tabel diatas, dana perimbangan kontribusinya sangat mendominasi dari sumber-sumber pendapatan lainnya dimana secara rata-rata kontribusi dana perimbangan mencapai sebesar 82,77 persen dari total pendapatan daerah, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah secara rata-rata mencapai 12,25 persen dan selanjutnya Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata mencapai 4,98 persen.

Gambaran dari potret kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembiayaan dari pusat berfluktuatif menurun.

3.1.1.3. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Total belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016, total belanja yang dimiliki senilai Rp 1.064.104.883.813,00 menurun pada Tahun 2017 menjadi Rp 1.047.207.797.042,00. Kemudian Tahun 2018 dan 2019 meningkat mencapai Rp 1.133.467.029.869,60 dan Rp 1.188.855.416.731,04, namun pada Tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar Rp. 1.095.901.377.152,17.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah beserta deskripsinya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3
Proporsi Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun					Growth (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Pegawai (gaji/TKD)	79,82	68,44	68,65	68,88	61,54	-6,07
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	1,67	4,74	4,63	3,38	8,2	74,28
5	Belanja Bantuan Sosial	0,23	0,04	0,02	0,01	0,24	529,35
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,38	0,36	0,36	0,4	0,32	-3,54
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol	17,77	26,22	26,3	27,19	23,67	9,57
8	Belanja tidak terduga	0,13	0,2	0,04	0,14	6,03	1107,75
B	Belanja Langsung						
1	Belanja Pegawai	8,59	11,58	10,18	9,01	13,49	15,24
2	Belanja Barang dan Jasa	30,34	37,65	39,05	38,97	39,1	6,99
3	Belanja Modal	61,07	50,77	50,76	52,02	47,41	-5,82

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020 (data diolah)

Tabel III.4

Realisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Average Growth (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Pegawai (gaji/TKD)	371.325.171.336,00	345.905.327.709,00	354.894.755.578,60	383.439.891.662,40	376.943.514.397,00	0,53
2	Belanja Bunga	-	-	0	0	0	
3	Belanja Subsidi	-	-	0	0	0	
4	Belanja Hibah	7.784.500.000,00	23.949.336.600,00	23.956.568.000,00	18.793.750.000,00	50.228.050.200,00	88,35
5	Belanja Bantuan Sosial	1.052.048.829,00	222.000.000,00	79.900.000,00	60.000.000,00	1.452.500.000,00	538,25
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	1.745.432.551,00	1.808.534.237,00	1.875.290.190,00	2.247.305.584,00	1.967.537.000,00	3,67
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol	82.687.473.589,00	132.503.600.870,00	135.964.777.278,00	151.365.644.337,00	144.946.896.676,34	17,49
8	Belanja tidak terduga	597.439.384,00	998.983.220,00	213.636.528,00	780.647.000,00	36.935.840.930,64	1221,36
	Jumlah Belanja tidak Langsung	465.192.065.689,00	505.387.782.636,00	516.984.927.574,60	556.687.238.583,40	612.474.339.203,98	7,16
B	Belanja Langsung						
1	Belanja Pegawai	51.426.919.750,00	62.726.281.020,00	62.770.409.061,41	56.935.050.199,84	65.204.531.494,00	6,82
2	Belanja Barang dan Jasa	181.708.104.844,00	203.989.545.465,00	240.755.129.469,59	246.360.130.627,80	189.042.426.761,60	2,34
3	Belanja Modal	365.777.793.530,00	275.104.187.921,00	312.956.563.764,00	328.872.997.320,00	229.180.079.692,59	-9,06
	Jumlah Belanja Langsung	598.912.818.124,00	541.820.014.406,00	616.482.102.295,00	632.168.178.147,64	483.427.037.948,19	-4,18
	Total	1.064.104.883.813,00	1.047.207.797.042,00	1.133.467.029.869,60	1.188.855.416.731,04	1.095.901.377.152,17	0,93

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Dari sajian tabel diatas tergambar bahwa pada belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada Tahun 2016 mencapai 79,82 persen dari total belanja tidak langsung. Lalu setiap tahunnya berfluktuasi cenderung menurun hingga Tahun 2020 mencapai 61,54 persen dari total belanja tidak langsung.

Hal ini berbeda pada Belanja pegawai pada belanja langsung dimana belanja pegawai berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini terlihat dimana belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 8,59 persen dari total belanja langsung pada Tahun 2016. Kemudian terus berfluktuasi setiap tahunnya hingga mencapai 13,49 persen dari total belanja langsung pada Tahun 2020. Sementara belanja barang dan jasa selama tahun 2016-2020 persentasenya terhadap total belanja langsung mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat pada belanja barang dan jasa mendapat bagian sebesar 30,34 persen dari total belanja langsung pada Tahun 2016 dan terus meningkat sampai Tahun 2018 sebesar 37,65 persen dan 39,05 persen. Pada Tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 38,97 persen dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 39,1 persen. Sama halnya dengan belanja modal dinilai belum baik perkembangannya karena rata-rata belanja modal Tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Alokasi belanja modal mencapai 61,07 persen dari total belanja langsung Tahun 2016 menurun pada Tahun 2017- 2018 menjadi 50,77 persen dan 50,76 persen, sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2019 sebesar 52,02 persen, namun kembali mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 47,41 persen dari total belanja langsung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

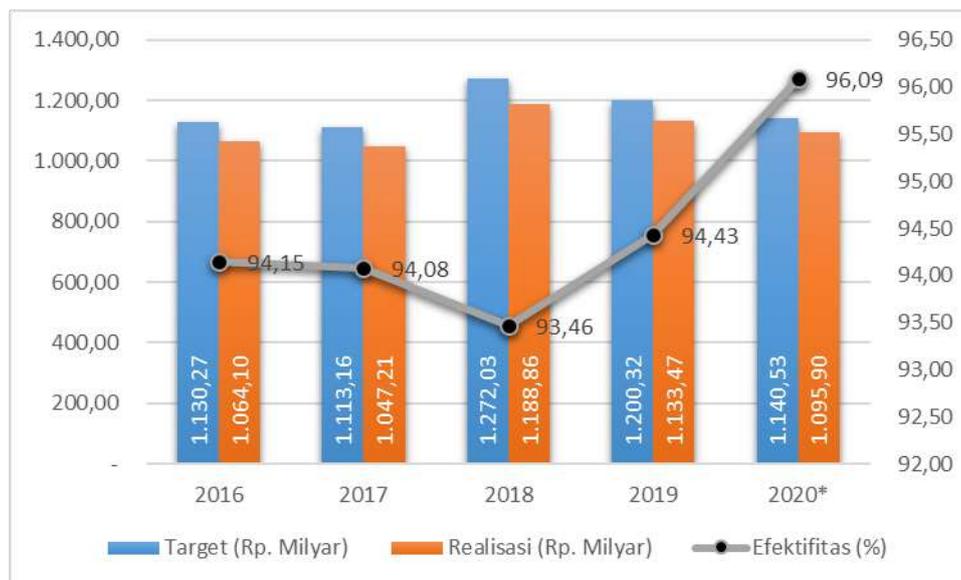
Gambar III.28.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Pada Tahun 2016 - 2020, target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat. Target belanja daerah Tahun 2016 sebesar 1.130,27 Milyar meningkat sampai Tahun 2018 menjadi Rp. 1.272,03 Milyar dan menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi Rp. 1.200,32 Milyar dan 1.140,53 Milyar. Rata-rata perkembangan Target Belanja daerah pada periode Tahun 2016-2020 tumbuh sebesar 0,53 persen. Sama halnya dengan realisasi belanja daerah yang berfluktuasi cenderung meningkat pada periode Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp. 1.064,10 Milyar meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar Rp. 1.047,21 Milyar dan Rp. 1.188,86 Milyar namun kembali menurun pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi Rp. 1.133,47 Milyar dan Rp. 1.095,90 Milyar. Adapun capaian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara rata-rata tumbuh 0,99 persen per tahun.

Gambar III.29.
 Nilai Efektivitas Belanja Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

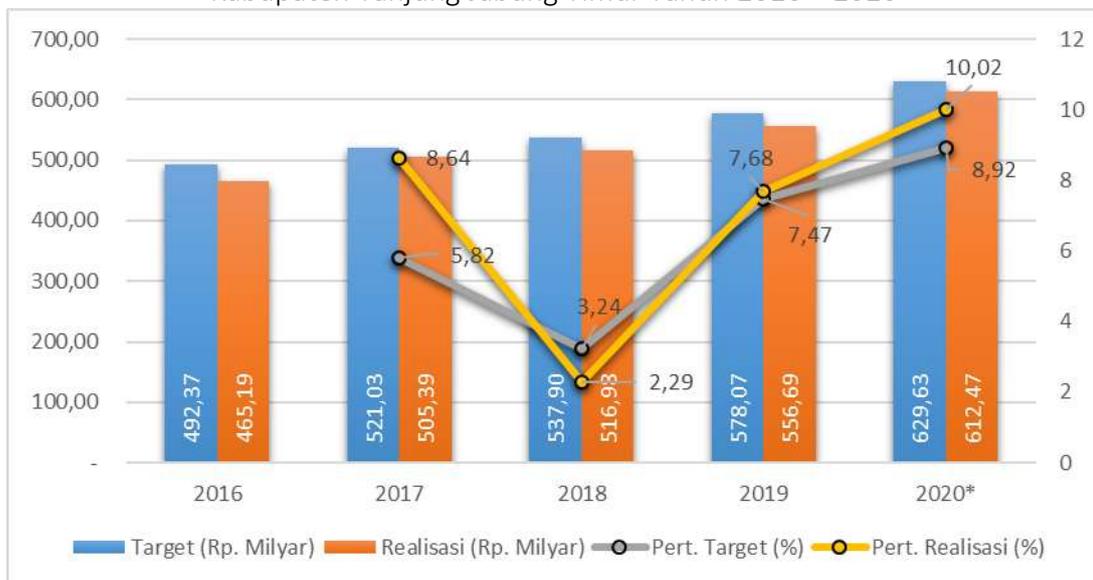
Berdasarkan hasil dari target dan realisasi yang diperoleh mengenai Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 secara umum adalah efektif dengan rata-rata yang didapat sebesar 94,44 persen.

A. Belanja Tidak langsung

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 menetapkan target Belanja Tidak Langsung meningkat setiap tahunnya. Adapun target pada Tahun 2016 sebesar Rp. 492,37 Milyar kemudian terus meningkat sampai dengan Tahun 2020 menjadi Rp. 629,63 Milyar atau meningkat 7,47 persen. Berdasarkan hal tersebut bahwa target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 6,36 persen per tahun.

Gambar III.30.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

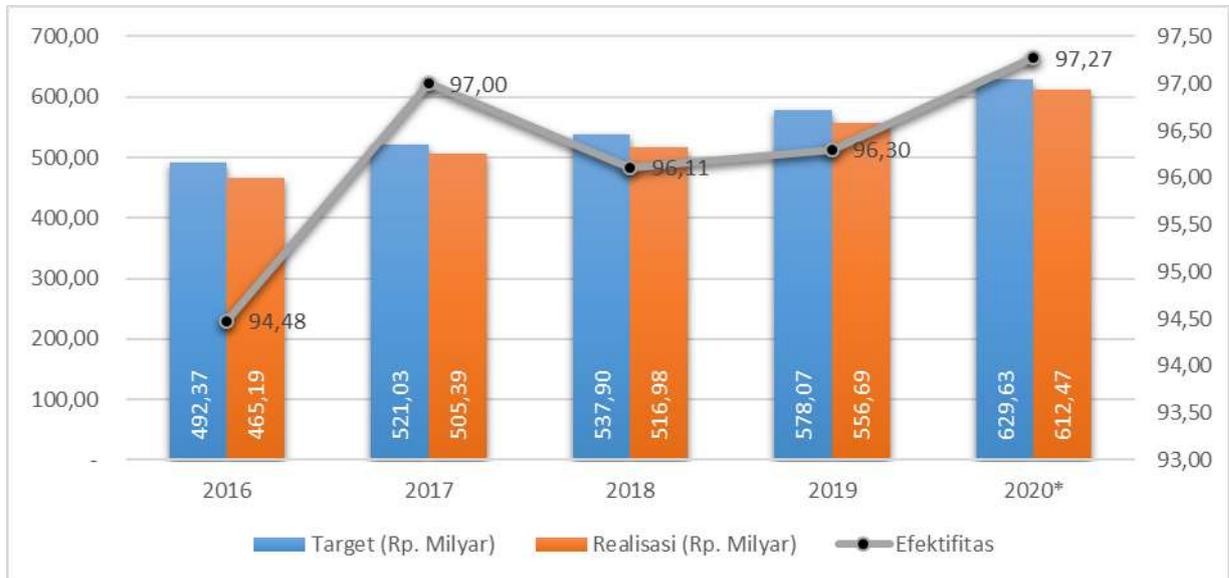


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Selanjutnya untuk realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2016 sebesar Rp. 465,19 Milyar selanjutnya meningkat pada Tahun 2020 menjadi Rp. 612,47 Milyar. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata naik sebesar 7,16 persen per tahun.

Berdasarkan target dan realisasi dapat ditentukan tingkat efektivitas Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah efektif, selama periode 2016 - 2020 rata-rata efektivitas setiap tahunnya sebesar 96,23 persen.

Gambar III.31.
 Nilai Efektivitas Belanja Tidak Langsung Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

A.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pada Tahun 2016-2020 Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Target Belanja Pegawai pada Tahun 2016 sebesar Rp. 390,32 Milyar mengalami penurunan pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar Rp. 367,65 Milyar dan Rp. 375,19 Milyar. Kembali meningkat pada Tahun 2019 menjadi Rp. 420,97 Milyar namun menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 391,17 Milyar . Secara rata-rata target Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun.

Gambar III.32.
Perkembangan Belanja Pegawai Daerah Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Pada periode yang sama realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Realisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 371,33 Milyar menurun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 345,91 Milyar. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 354,89 Milyar dan Rp. 383,44 Milyar, namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 376,94 Milyar. Pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 0,53 persen per tahun. Rata-rata tingkat efektivitas Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2015 - 2019 adalah 93,88 persen yaitu efektif.

Gambar III.33.
Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

A.2. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Target Belanja Hibah periode Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu meningkat setiap tahunnya kecuali Tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 target sebesar Rp. 13,52 Milyar meningkat Pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp. 17,96 Milyar dan Rp. 24,11 Milyar. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 18,98 Milyar namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 52,59 Milyar. Rata-rata target Belanja hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 tumbuh sebesar 55,72 persen per tahun.

Selanjutnya pada periode yang sama, realisasi Belanja Hibah juga mengalami mengalami hal yang sama berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 7,78 Milyar meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp. 23,95 Milyar dan Rp. 23,96 Milyar. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 18,79 Milyar namun kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 50,23 Milyar. Secara rata-rata realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 88,35 persen per tahun.

Gambar III.34.
Perkembangan Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Sementara itu, berdasarkan data target dan realisasi maka tingkat efektivitas Belanja Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan adalah efektif setiap tahunnya yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan rata-rata 96,96 persen.

Gambar III.35.
 Nilai Efektivitas Belanja Hibah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

A.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 2,00 Milyar menurun sampai dengan Tahun 2019 berturut-turut menjadi Rp. 100 Juta. Namun pada Tahun 2020 kembali meningkat signifikan menjadi Rp. 1,47 Milyar. Secara rata-rata pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 318,75 persen per tahun.

Pada periode yang sama, realisasi belanja bantuan sosial daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami hal yang sama dengan target, realisasi Belanja Bantuan Sosial tertinggi terdapat pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.45 Milyar, sedangkan yang terendah terdapat pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 60 Juta. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata tumbuh sebesar 537,25 persen per tahun.

Gambar III.36.
Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tingkat efektivitas dari target dan realisasi secara umum adalah sangat efektif, dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 102,23 persen.

Gambar III.37.
Nilai Efektivitas Belanja Bantuan Sosial Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

A.4. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2016-2020 meningkat kecuali pada Tahun

2020 mengalami sedikit penurunan. Pada Tahun 2016 target sebesar Rp. 82,87 Milyar meningkat sampai Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 132,51 Milyar, Rp. 135,97 Milyar dan Rp. 152,01 Milyar. Pada Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 144,95 Milyar. Rata-rata pertumbuhan target sebesar 17,42 persen per tahun.

Gambar III.38.

Perkembangan Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Sama halnya dengan target, realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 mencapai Rp. 82,69 Milyar meningkat menjadi Rp. 151,37 Milyar pada Tahun 2019 dan sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 144,95 Milyar. Rata-rata pertumbuhan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 17,49 persen per tahun.

Gambar III.39.

Nilai efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

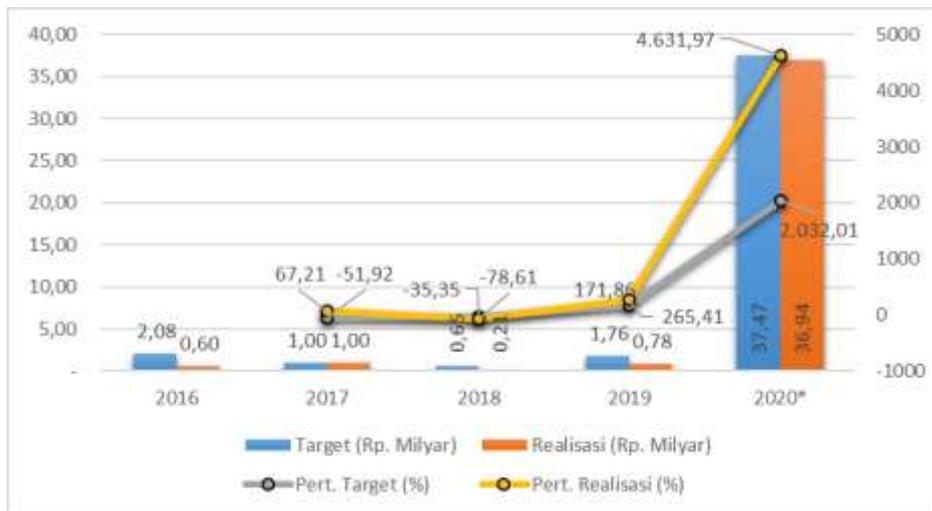
Tingkat efektivitas Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemdes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 secara umum efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 99,80 persen.

A.5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Periode Tahun 2016 – 2020 target Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 target belanja tidak terduga sebesar Rp. 2,08 Milyar menurun pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi masing-masing Rp. 1 Milyar dan Rp. 0,65 Milyar. Pada Tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 1,76 Milyar dan Rp. 37,47 Milyar. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rata-rata pertumbuhan target Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 529,15 persen per tahun.

Gambar III.40.

Perkembangan Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



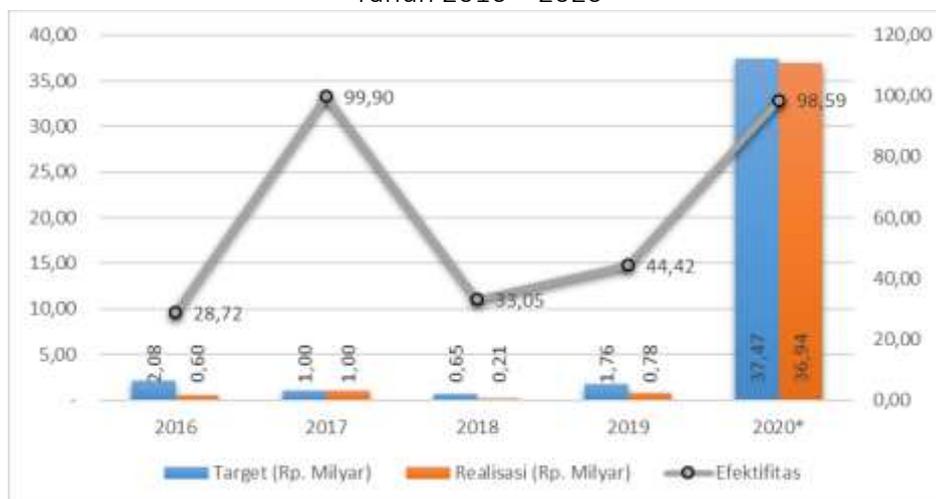
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 – 2020 berfluktuatif cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 0,6 Miliar meningkat pada Tahun 2017 menjadi Rp. 1 Miliar. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 0,21 Miliar. Namun kembali meningkat pada Tahun 2019 dan 2020 menjadi Rp. 0,78 Miliar dan Rp. 36,94 Miliar. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga per tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar 1.221,49 persen.

Tingkat efektivitas Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 secara umum kurang efektif dengan rata-rata 60,93 persen.

Gambar III.41.

Nilai Efektivitas Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode Tahun 2016 – 2020 berfluktuatif cenderung menurun. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan target pada Tahun 2016 sebesar Rp. 637,90 Milyar menurun pada Tahun 2017 sebesar minus 7,17 persen menjadi Rp. 592,13 Milyar. Pada Tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi Rp. 662,42 Milyar dan Rp. 693,97 Milyar namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi Rp. 510,90 Milyar. Rata-rata perkembangan target belanja langsung pada periode Tahun 2016 – 2020 turun sebesar minus 4,23 persen per tahun.

Gambar III.42.

Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 juga berfluktuasi cenderung menurun. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 sebesar Rp. 598,91 Milyar menurun pada Tahun 2017 sebesar minus 9,53 persen menjadi Rp. 541,82 Milyar kemudian meningkat kembali pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi Rp. 616,48 Milyar dan Rp. 632,17 Milyar. Pada Tahun 2020 kembali menurun sebesar minus 23,53 persen menjadi Rp. 483,43 Milyar. Rata-rata perkembangan realisasi belanja langsung Tahun 2016 – 2020 turun sebesar minus 4,18 persen per tahun.

Gambar III.43.

Nilai Efektivitas Belanja Langsung Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Selama periode Tahun 2016 - 2020, berdasarkan target dan realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan dengan tingkat efektivitasnya. Secara umum nilai efektivitas Belanja Langsung rata-rata setiap tahun efektif dengan nilai sebesar 92,83 persen.

B.1 Belanja Pegawai

Target Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Target pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 53,26 Milyar, kemudian meningkat sampai dengan Tahun 2018 menjadi Rp. 64,32 Milyar dan Rp. 66,48 Milyar. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 58,33 Milyar dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi 65,27 Milyar. Rata-rata pertumbuhan target belanja pegawai sebesar 5,94 persen per tahun.

Gambar III.44.

Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2016 - 2020 juga mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 51,43 Milyar meningkat sampai dengan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 62,73 dan Rp. 62,77 Milyar. Pada Tahun 2019 realisasi belanja pegawai menurun menjadi Rp. 56,94 Milyar dan kembali meningkat pada Tahun 2020 menjadi Rp. 65,20 Milyar. Secara rata-rata realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh sebesar 6,81 persen per tahun.

Tingkat efektivitas Belanja Pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) secara umum cukup efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 97,20 persen dari target dan realisasi Belanja Pegawai yang telah ditetapkan.

Gambar III.45.

Nilai Efektivitas Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

B.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Target belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2015 target belanja barang dan jasa sebesar Rp. 197,93 Milyar meningkat sampai dengan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 259,80 Milyar, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 203,14 Milyar. Rata-rata pertumbuhan pertahun target belanja barang dan jasa tumbuh sebesar 1,93 persen pertahun.

Gambar III.46.

Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

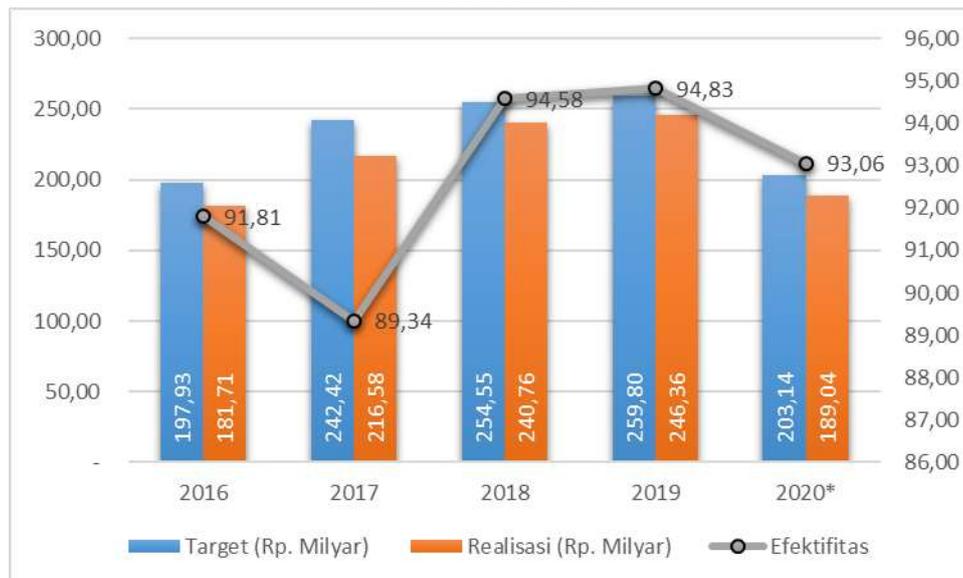


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Selanjutnya, realisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi cenderung meningkat. Pada Tahun 2016 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 181,71 Milyar dan terus meningkat sampai Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 246,36 Milyar, namun menurun pada Tahun 2020 menjadi Rp. 189,04 Milyar. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa tumbuh sebesar 2,35 persen per tahun.

Gambar III.47.

Nilai Efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Tingkat efektivitas Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) secara umum efektif setiap tahunnya, dengan rata-rata 92,72 persen dari target dan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.

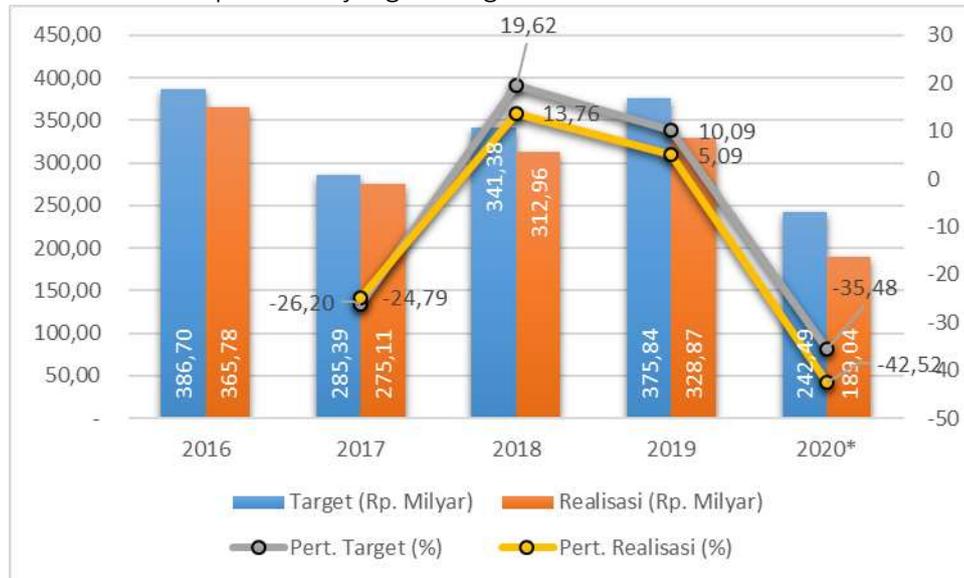
B.3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selama Tahun 2016 - 2020 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi cenderung menurun setiap tahunnya. Target Belanja Modal pada Tahun 2016 sebesar Rp. 386,70 Milyar menurun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 285,39 Milyar atau menurun minus 26,20 persen. Tahun 2018 dan 2019 target Belanja Modal kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 341,38 Milyar dan Rp. 375,84 Milyar,

namun kembali menurun pada Tahun 2020 menjadi Rp. 242,49 Milyar. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh rata-rata Pertumbuhan target Belanja Modal turun sebesar minus 7,99 persen per tahun.

Gambar III.48.

Perkembangan Belanja Modal Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

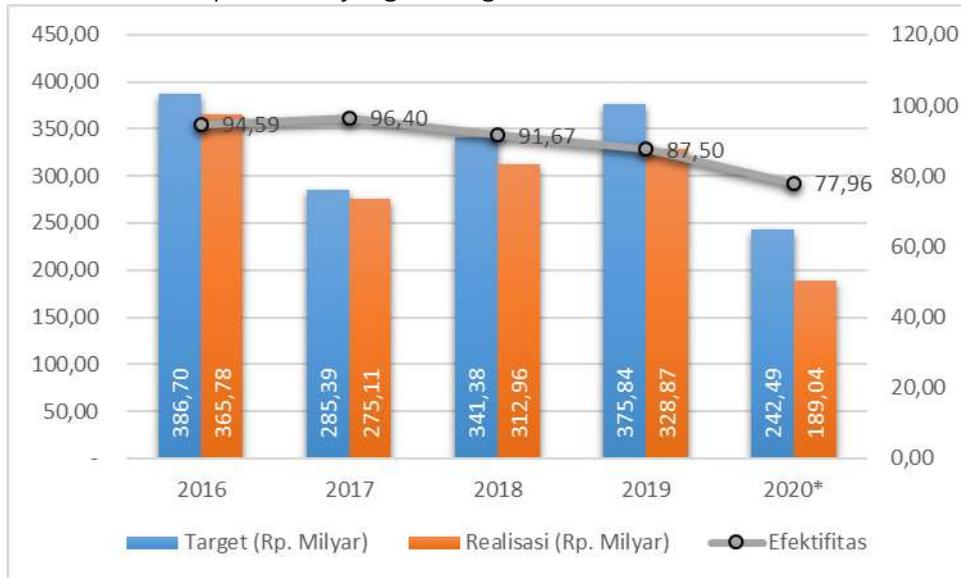


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode yang sama realisasinya berfluktuasi cenderung menurun setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 realisasi belanja modal sebesar Rp. 365,78 Milyar menurun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 275,11 Milyar atau turun sebesar minus 24,79 persen, namun pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 13,76 persen dan 5,09 persen sehingga menjadi Rp. 312,96 Milyar dan Rp. 328,87 Milyar, namun menurun pada Tahun 2020 sebesar minus 42,52 persen menjadi sebesar Rp. 189,04 Milyar. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara rata-rata turun sebesar minus 12,12 persen per tahun.

Tingkat efektivitas Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 secara umum cukup efektif dengan rata-rata 89,62 persen.

Gambar III.49.
 Nilai Efektivitas Belanja Modal Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

3.1.2. Neraca Daerah

3.1.2.1. Analisis Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah merupakan neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan deskripsi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan deskripsi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi

dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Paparan neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2013 - 2020 disajikan seperti berikut ini.

Tabel III.5.
Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2020

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
1	ASET	5.3.1									
2	ASET LANCAR	5.3.1.1									
3	<i>Kas Di Kas Daerah</i>	5.3.1.1.1.1	89.329.358.104,72	66.012.802.645,87	29.574.112.863,08	34.774.707.353,87	63.732.542.101,70	24.181.895.911,14	74.649.872.609,25	35.585.153.648,12	16,27
4	<i>Kas Di Bendahara Pengeluaran</i>	5.3.1.1.1.2	48.072.878,00	21.056.250,00	10.300.000,00	49.297.577,00	63.397.724,00	333.000,40	0,00	539.726.014,00	0,00
5	<i>Kas Lainnya dibendahara Pengeluaran</i>	5.3.1.1.1.3	969.533.055,00	57.785.589,00	28.913.889,76	35.355.140,94	0	33.904.331,00	0	35.187.315,00	0,00
6	<i>Kas Di Bendahara Penerimaan</i>	5.3.1.1.1.4	83.896.654,31	810.157.674,04	64.294.169,08	8.289.187,14	352.808.000,00	0,00	0,00	181.674.750,00	0,00
7	<i>Kas Di Bendahara Dana Bos</i>	5.3.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.073.411,47	72.666.963,87	
8	<i>Kas di BLUD</i>	5.3.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.324.171,88	1.915.928.379,45	
9	<i>Setara Kas (Deposito)</i>	5.3.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<i>Piutang Pajak</i>	5.3.1.1.2.1	42.873.301,00	227.382.193,00	2.462.557.435,00	2.138.698.797,31	1.960.362.710,31	2.565.610.180,31	2.664.859.394,00	3.216.926.184,45	206,76
11	<i>Piutang Retribusi</i>	5.3.1.1.2.2	1.013.421.148,00	1.216.260.183,00	669.407.965,00	1.415.422.788,00	339.620.188,00	18.316.188,00	123.192.388,00	18.316.188,00	57,62
12	<i>Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD</i>	5.3.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	7.088.808.214,73	5,31
13	<i>Piutang Dana Bagi Hasil</i>	5.3.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085.480.413,61	25.368.502.726,71	45.358.155.976,11	18.146.761.294,00	9,40
14	<i>Piutang lain-lain</i>	5.3.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.040.300,00	1.642.352.446,00	
15	<i>Piutang Lainnya</i>	5.3.1.1.3	9.741.353.161,43	7.903.041.177,00	1.104.029.999,00	1.102.029.999,00	7.425.354.880,15	938.451.749,00	887.766.749,00	1.011.634.599,00	55,70
16	<i>Penyisihan Piutang</i>	5.3.1.1.4	0	-718.530.628,10	-1.168.504.040,08	-1.308.512.766,30	-1.818.965.077,88	-1.391.683.273,19	-2.223.473.263,44	-2.056.650.224,40	15,95
17	<i>Beban dibayar dimuka</i>	5.3.1.1.5					298.489.772,21	372.187.412,46	373.460.607,29	247.551.747,84	-16,69
18	<i>Persediaan</i>	5.3.1.1.6	6.842.111.286,00	9.215.743.693,00	5.766.862.645,33	6.824.418.994,45	6.245.496.327,04	7.543.530.778,85	8.554.866.298,78	13.814.969.175,62	14,69
19	JUMLAH ASET LANCAR		108.070.619.588,46	84.745.698.776,81	38.511.974.926,17	45.039.707.071,41	78.300.616.853,32	119.275.385.150,77	132.339.468,05	61.558.043,87	-12,34

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2									
21	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1									
22	Investasi non Permanen Lainnya		29.726.452.611,00	25.153.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-30,26
23	Jumlah Investasi Non Permanen		29.726.452.611,00	25.153.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-30,26
24	Investasi Permanen	5.3.1.2.2									
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		30.890.130.513,41	34.491.011.312,41	36.514.357.000,00	38.514.357.000,00	40.014.357.000,00	42.014.357.000,00	44.014.357.000,00	46.014.357.000,00	5,89
26	Jumlah Investasi Permanen		30.890.130.513,41	34.491.011.312,41	36.514.357.000,00	38.514.357.000,00	40.014.357.000,00	42.014.357.000,00	44.014.357.000,00	46.014.357.000,00	5,89
27	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		60.616.583.124,41	59.644.011.312,41	37.414.357.000,00	39.414.357.000,00	40.914.357.000,00	42.914.357.000,00	44.914.357.000,00	46.014.357.000,00	-2,53
28	ASET TETAP	5.3.1.3									
29	Tanah	5.3.1.3.1	16.137.193.624,50	17.820.681.224,50	20.170.103.944,50	20.037.904.062,28	21.001.721.038,28	23.802.198.956,28	24.795.794.656,28	26.023.325.856,28	7,18
30	Peralatan dan mesin	5.3.1.3.2	259.790.566.217,86	269.125.135.573,86	261.340.473.217,04	262.730.563.280,39	299.605.445.854,39	329.407.741.587,39	359.081.793.268,39	407.505.117.601,39	7,35
31	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	446.550.485.745,00	499.441.370.792,14	508.700.025.995,00	499.381.838.320,28	530.753.805.463,33	576.362.191.994,33	648.727.480.168,33	703.198.595.324,33	5,97
32	Jalan, irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.653.129.352.006,35	1.911.136.516.264,97	2.109.978.927.561,40	2.432.667.057.163,58	2.495.124.701.617,42	2.696.026.135.854,71	2.987.682.992.363,37	3.120.506.271.939,07	8,60
33	Aset tetap lainnya	5.3.1.3.5	39.189.554.303,67	40.442.726.345,67	26.495.371.130,08	11.765.623.979,00	15.770.600.850,00	17.252.508.179,00	14.178.269.863,00	14.372.249.017,00	-10,52
34	Konstruksi dalam pengerjaan	5.3.1.3.6	11.368.188.379,00	9.283.709.385,86	10.268.173.237,77	17.382.814.843,07	14.327.571.537,78	49.305.041.908,49	22.645.579.162,83	21.714.082.359,73	41,38
35	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	0	1.017.577.427.142,11	-1.310.818.699.868,29	-1.552.114.065.533,76	-1.840.491.303.154,49	-2.026.067.920.794,13	-2.208.439.744.092,94	-2.408.909.792.005,79	13,03
36	JUMLAH ASET TETAP		2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	1.626.134.375.217,50	1.691.851.736.114,84	1.536.092.543.206,71	1.666.087.897.686,07	1.848.672.165.389,26	1.884.410.850.092,01	-2,64
37	Peralatan dan Mesin	b									
38	Alat-alat Berat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Alat-alat Angkutan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
40	Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur	3	-	-	-						
41	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4	-	-	-						
42	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5	-	-	-						
43	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6	-	-	-						
44	Alat-alat Kedokteran	7	-	-	-						
45	Alat-alat Laboratorium	8	-	-	-						
46	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	9	-	-	-						
47	Jumlah Peralatan dan Mesin		-	-	-						
48	Gedung dan Bangunan	c									
49	Bangunan Gedung	1									
50	Monumen	2									
51	Jumlah Gedung dan Bangunan		-	-	-						
52	Jalan, Irigasi dan Jaringan	d									
53	Jalan dan Jembatan	1	-	-	-						
54	Bangunan Air (Irigasi)	2	-	-	-						
55	Instalasi Listrik dan Telepon	3	-	-	-						
56	Jaringan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	4	-	-	-						
57	Jaringan Komputer E-Government	5	-	-	-						
58	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-						
59	Aset Tetap Lainnya	e									
60	Buku/Kepustakaan	1	-	-	-						

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
61	Barang Brercorak Kesenian dan Kebudayaan	2	-	-	-						
62	Hewan/Ternak dan Tanaman	3	-	-	-						
63	Jumlah Aset Tetap Lainnya (47 s/d 49)		-	-	-						
64	Konstruksi dalam Pengerjaan	f									
65	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	-	-	-						
66	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-						
67	JUMLAH ASET TETAP		2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	1.626.134.375.217,50	1.691.851.736.114,84	1.536.092.543.206,71	1.666.087.897.686,07	1.848.672.165.389,26	1.884.410.850.092,01	1,70
68	ASET LAINNYA	5.3.1.4									
69	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	-	-	-	-	-	0	0	0	
71	Kemitraan dengan pihak ketiga	5.3.1.4.3	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	0,00	0,00	-
72	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	1.246.900.000,00	1.585.310.000,00	1.610.310.000,00	1.803.910.000,00	2.229.346.000,00	2.615.346.000,00	2.615.346.000,00	2.782.342.500,00	10,15
73	Aset Lain - lain	5.3.1.4.5	12.921.605.736,00	5.769.174.900,00	39.633.226.301,00	158.823.450.408,28	153.893.685.755,12	153.955.185.755,12	154.965.016.124,12	155.733.178.886,89	118,64
74	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.3.1.4.6					-61.847.195.488,67	-61.847.195.488,67	-62.543.170.016,18	-63.111.871.871,67	
75	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.7	-	-	-1.151.945.900,00	-1.234.456.400,00	-1.427.218.800,00	-1.714.902.400,00	-1.988.591.600,00	-2.174.485.300,00	15,27
76	JUMLAH ASET LAINNYA		21.248.505.736,00	14.434.484.900,00	47.171.590.401,00	166.472.904.008,28	161.775.812.955,12	100.088.433.866,45	93.048.600.507,94	93.229.164.215,22	57,12
77	JUMLAH ASET		2.616.101.048.725,25	1.888.496.907.434,11	1.749.232.297.544,67	1.942.778.704.194,53	1.817.083.330.015,15	1.928.366.073.703,29	2.132.858.920.772,18	2.132.858.920.772,18	-1,98
78	KEWAJIBAN	5.3.2.1									

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
79	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.1									
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.1	41.120.395,00	42.424.309,00	113.711.529,61	81.633.826,00	0	33.901.831,00	0	35.187.315,00	
70	Utang Bunga	5.3.2.1.1.2				-	-	0	0	0	
71	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.1.3	-	-	1.624.121.600,33	281.760.064,00	187.007.113,00	68.216.683,50	34.980.607,00	77.385.158,33	-6,16
72	Utang Belanja	5.3.2.1.1.4	-	-	8.241.524.142,00	5.679.416.013,00	1.942.384.032,00	714.998.213,40	3.538.827.790,00	3.065.719.162,16	63,15
73	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.1.5	921.745.000,00			-	-	0	332.833.600,00	786.075.948,00	
74	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		962.865.395,00	42.424.309,00	9.979.357.271,94	6.042.809.903,00	2.129.391.145,00	817.116.727,90	3.906.641.997,00	3.964.367.583,49	3.362,98
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.1.2									
76	Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-	-				
77	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-	-	-	0	0	0	
78	JUMLAH KEWAJIBAN		962.865.395,00	42.424.309,00	9.979.357.271,94	6.042.809.903,00	2.129.391.145,00	817.116.727,90	3.906.641.997,00	3.964.367.583,49	3.362,98
79	EKUITAS DANA	5.3.2.2									
80	EKUITAS DANA LANCAR										
81	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	a	89.377.430.982,72	66.033.858.895,87	-						-21,07
82	Pendapatan yang ditangguhkan	b	90.564.314,31	825.518.954,04	-						890,31
83	Cadangan Piutang	c	10.797.647.610,43	8.628.152.924,90	-						23,19
84	Cadangan Persediaan	d	6.842.111.286,00	9.215.743.693,00	-						21,31
85	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	e			-						
86	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		107.107.754.193,46	84.703.274.467,81	-						-17,11

No	URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2016 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	GROWTH (%)
87	EKUITAS DANA INVESTASI	2									
88	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	a	60.616.583.124,41	59.644.011.312,41	-						63,3
89	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	b	2.426.165.340.276,38	1.729.672.712.444,89	-						5,56
90	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	c	21.248.505.736,00	14.434.484.900,00	-						21,32
91	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	d			-						
92	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		2.508.030.429.136,79	1.803.751.208.657,30	-						6,24
93	EKUITAS DANA CADANGAN	3									
94	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	a									
95	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	-	-						
96	Ekuitas Dana		2.615.138.183.330,25	1.888.454.483.125,11	1.778.337.999.806,08	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	1.927.548.956.975,39	2.128.952.278.775,18	2.101.172.062.669,41	-2,24
97	JUMLAH EKUITAS DANA		2.615.138.183.330,25	1.888.454.483.125,11	1.778.337.999.806,08	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	1.927.548.956.975,39	2.128.952.278.775,18	2.101.172.062.669,41	-2,24
98	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.616.101.048.725,25	1.888.496.907.434,11	1.788.317.357.078,02	1.943.286.447.560,94	1.832.490.713.567,30	1.928.366.073.703,29	2.132.858.920.772,18	2.105.136.430.252,91	-2,23

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

3.1.2.2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 - 2017 dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Keempat rasio keuangan tersebut adalah.

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Quick (*Quick Ratio*) merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek.
- c. Rasio Hutang terhadap Asset merupakan rasio kewajiban terhadap asset.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal merupakan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana.

Hasil perhitungan keempat rasio keuangan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.6.
Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2020

No	Uraian	Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	112,24	1.997,57	3,86	7,45	36,77	145,97	0,03	0,02
2	Rasio Quick	105,13	1.780,35	3,28	6,32	33,84	136,74	2,16	3,47
3	Rasio Hutang terhadap Asset	0,00037	0,00002	0,00570	0,00311	0,00117	0,00042	0,00183	0,00186
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,00037	0,00002	0,00561	0,00311	0,00116	0,00042	0,00184	0,00189

Sajian keempat rasio keuangan diatas dapat pula dianalisis sebagai berikut :

a. Rasio Lancar

Rasio lancar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 8 tahun menunjukkan trend yang berfluktuasi dimana Tahun 2013 rasio lancar sebesar 112,24 kemudian meningkat menjadi 1.997,57 pada Tahun 2014 , kemudian menurun tajam pada Tahun 2015 menjadi sebesar 3,86, selanjutnya Tahun 2016 – 2018 kembali mengalami peningkatan masing-masing menjadi 7,45, 36,77 dan 145,97. Pada Tahun 2019 dan 2020

kembali mengalami penurunan menjadi 0,03 dan 0,02. Ini dapat diartinya kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan asset lancar masih berfluktuasi.

b. Rasio Quick

Rasio Quick pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menunjukkan trend yang sama dengan rasio lancar yaitu cenderung berfluktuasi tetapi masih sangat aman dimana rasio quick masih diatas 1 kali. Artinya, kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memenuhi kewajiban jangka pendek minus persediaan dengan jaminan asset lancar masih sangat baik.

c. Rasio Hutang Terhadap Asset

Rasio hutang terhadap asset pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode yang sama mendekati nol. Berarti, hutang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif amat kecil dibandingkan jumlah asset yang dimilikinya.

d. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mendekati nol. Artinya adalah jumlah hutang yang dimiliki amat kecil dibanding jumlah modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan tetapi harus pula dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja. Ini berarti kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang terlihat dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang mengacu pada aturan yang

melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dari segi proporsi penggunaan anggaran maka proporsi belanja langsung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berfluktuasi cenderung menurun diantara 44,11 persen sampai dengan 56,28 persen. Proporsi terkecil pada Tahun 2020 yaitu sebesar 44,11 persen dan tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 56,28 persen.

Proporsi penggunaan belanja langsung oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dinilai belum sesuai dengan ketentuan dimana yang diinginkan adalah proporsi belanja langsung diatas 60 persen. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan belanja tidak langsung yang proporsinya tinggi yaitu selalu diatas 40 persen

Deskripsi proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung atas penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 2016- 2020 dimuat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.7.
Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun					Growth (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Pegawai (gaji/TKD)	79,82	68,44	68,65	68,88	61,54	-6,07
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	1,67	4,74	4,63	3,38	8,20	74,19
5	Belanja Bantuan Sosial	0,23	0,04	0,02	0,01	0,24	481,17
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,38	0,36	0,36	0,40	0,32	-3,10
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol	17,77	26,22	26,30	27,19	23,67	9,56
8	Belanja tidak terduga	0,13	0,20	0,04	0,14	6,03	1103,66
	Total Belanja Tidak Langsung	43,72	48,26	45,61	46,83	55,89	6,73
B	Belanja Langsung						
1	Belanja Pegawai	8,59	11,58	10,18	9,01	13,49	15,25
2	Belanja Barang dan Jasa	30,34	37,65	39,05	38,97	39,10	6,99
3	Belanja Modal	61,07	50,77	50,76	52,02	47,41	-5,82
	Total Belanja Langsung	56,28	51,74	54,39	53,17	44,11	-5,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Untuk sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Mengacu kepada konsep pembiayaan tersebut maka analisis pembiayaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016 - 2020 dapat dilakukan. Hasil perhitungan komponen pembiayaan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel III.8.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016 - 2020 (Dalam Jutaan)

No	Deskripsi Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020*
I	Penerimaan					
1	Penggunaan SILPA	61.665,84	86.832,29	119.148,75	77.182,23	82.125,27
2	Piutang Daerah	0	0	0,00	50,685	0
	Total Penerimaan Pembiayaan	61.665,84	86.832,29	119.148,75	77.232,91	83.025,27
II	Pengeluaran					
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	Total Pengeluaran Pembiayaan	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Pembiayaan Netto	59.165,84	85.332,29	117.148,75	75.232,91	81.025,27

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2020

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama 5 tahun tersebut pembiayaan netto pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah positif atau surplus. Namun SILPA mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Peningkatan SILPA setiap tahun dapat dinilai juga semakin optimalnya penggunaan anggaran pada tahun berjalan dimana realisasi fisik dapat diselesaikan 100 persen namun penggunaan anggaran sesuai dengan pengeluaran yang seharusnya, selain itu dapat pula disebabkan dari optimalnya pengadaan barang/jasa maupun konstruksi melalui sistem e-tendering. Seperti yang tergambar pada SILPA Tahun 2016 sebesar Rp 61,67 milyar, lalu meningkat pada Tahun 2017 – 2018 menjadi Rp. 86,83 Milyar dan

Rp. 119,15 Milyar. Pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 77,18 Milyar dan kembali meningkat pada Tahun 2020 sebesar Rp. 83,03 Milyar.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan cenderung sama pada Tahun 2016 – 2020 sebesar Rp. 2 Milyar, hanya pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1,5 Milyar.

B

A

B

IV

Permasalahan
dan Isu-Isu
Strategis
Daerah

BAB IV

Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

Substansi penting dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah. Mengingat bahwa isu strategis tersebut merupakan pijakan untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Permasalahan Pembangunan merupakan kondisi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan serta sekaligus sebagai komponen bahan dasar (*raw materials*) bagi penyusunan isu strategis. Sedangkan analisis isu-isu strategis merupakan upaya untuk memahami tentang kondisi lingkungan internal dan eksternal dan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Analisis tersebut akan menghasilkan rumusan kebijakan atas berbagai kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan

dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jika dinamika internal dan eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun jika Pemerintah daerah tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu-isu strategisnya maka akan menghadapi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Suatu isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urutan urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 6 (enam) Urusan pilihan.

Namun demikian untuk Urusan Pilihan, setiap daerah dapat menyesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah

Setelah menelaah kajian data dan informasi di BAB 2 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dengan Organisasi Perangkat Daerah pada saat dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Tabel IV.1
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan belum optimal; 2. Mutu pendidikan yang masih rendah; 3. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun belum dapat terwujud; 4. Ketersediaan dan penempatan guru yang belum merata; 5. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
2	Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana Kesehatan yang belum sesuai standar kesehatan dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014; 2. Masih terdapat bangunan Pustu, Polindes dan poskesdes dalam kondisi rusak berat; 3. Pembagian kewenangan aset polindes dan poskesdes antara Desa dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan; 4. Penanganan Stunting yang belum optimal; 5. Kualitas derajat kesehatan lingkungan masih rendah; 6. Peningkatan kasus covid-19; 7. Masih ada desa yang belum UCI;
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan luas lahan pertanian yang dapat dialiri oleh air irigasi masih perlu ditingkatkan; 2. Konektivitas antar desa, kelurahan dan perkotaan masih perlu ditingkatkan; 3. Penyusunan RDTR pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Perda RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 03 tahun 2020 masih perlu ditingkatkan;

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kawasan permukiman yang belum optimal 2. Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih masih rendah 3. Capaian cakupan Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Layak masih rendah 4. Capaian cakupan kualitas jalan lingkungan dalam kondisi baik masih rendah 5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal 6. Masih terdapatnya permukiman dan lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis 2. Masih lemahnya kegiatan pencegahan untuk menghadapi bencana 3. Keterlibatan unsur-unsur lain dalam penanggulangan bencana masih belum optimal 4. Penyebaran informasi bencana masih 5. Belum tersedianya gudang dan peralatan penanganan bencana 6. Penanganan pasca bencana baik fisik maupun pemulihan dampak psikologis/trauma belum optimal
6	Urusan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum optimal
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kompetensi masyarakat yang mendapatkan keterampilan khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan lapangan kerja didalam maupun diluar Kabupaten masih rendah 2. Keinginan masyarakat untuk membuka lapangan usaha sendiri masih rendah, hal ini karena keterbatasan modal dan sarana penunjang usaha; 3. Informasi lowongan kerja dari perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terpublikasikan secara luas; 4. Terbatasnya kewenangan kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dibidang ketenagakerjaan

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta perempuan dalam pembangunan belum optimal 2. Penanganan kasus perlindungan kekerasan pada anak belum optimal
3	Urusan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sebagian pangan strategis masih belum mencukupi dan sebagian cenderung menurun/melandai 2. Kondisi ketahanan pangan masyarakat di beberapa wilayah masih rawan 3. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi 4. Terbatasnya distribusi produk pangan masyarakat 5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan yang masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 6. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat 7. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya, dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyarakat.
4	Urusan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kerawanan konflik sosial yang terjadi di masyarakat masih tinggi khususnya sengketa lahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim belum maksimal 2. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut 3. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 4. Tingginya Abrasi di wilayah pesisir 5. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal 2. Masih rendahnya warga yang berumur 0 - 17 Tahun yang memiliki KIA 3. Cakupan kepemilikan KK dan Dokumen Kependudukan Lainnya khususnya Pendaftaran Penduduk baru dan pindah datang masih rendah
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola pemerintah desa khususnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa belum optimal

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkat keaktifan Bumdes yang semakin menurun 3. Inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan serta pemanfaatannya masih terbatas
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka pemakaian Kontrasepsi modern masih rendah 2. Angka kelahiran total (TFR) masih relatif tinggi 3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) masih relatif tinggi 4. Meningkatnya angka Unmet need (angka kebutuhan KB) 5. Masih rendahnya pemanfaatan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) sebagai pelayanan publik dalam bentuk pelayanan keluarga dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsulting, konseling, pembinaan serta rujukan.
9	Urusan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan jasa perhubungan 2. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang LLAJ belum optimal 3. Angka kecelakaan darat dan air yang masih tinggi
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi publik terhadap masyarakat belum optimal
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran pengelola dan anggota Koperasi untuk melakukan RAT setiap tahun masih rendah 2. Kapasitas SDM pengelola Koperasi masih terbatas 3. Kepatuhan Gerakan Koperasi terkait Perizinan masih rendah
12	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu 2. Pemetaan potensi wilayah 3. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana Olahraga yang masih minim 2. Kelompok Pemuda Usaha Produktif yang masih minim
14	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah 2. Belum terdaftar dan ditetapkannya Objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya benda
15	Unsur Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
16	Unsur Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip OPD secara baku
III. URUSAN PILIHAN		

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pengumpul/Tengkulak terhadap Nelayan masih mendominasi 2. Jangkauan wilayah tangkapan (pompong kapasitas rendah) yang masih terbatas 3. Sarana alat tangkap ramah lingkungan yang masih terbatas 4. Pengolahan hasil tangkapan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing belum optimal 5. Ketersediaan Es Balok untuk kebutuhan nelayan masih kurang 6. Kesadaran nelayan untuk memanfaatkan sarana prasarana penunjang perikanan yang disediakan Pemerintah masih rendah. 7. Sarana penyediaan BBM khusus nelayan masih terbatas 8. SDM Penyuluh Perikanan masih terbatas 9. Tingginya biaya produksi pakan 10. Sulitnya jangkauan pemasaran pada masa panen 11. Rendahnya kapasitas dan kemauan Pokdakkan untuk mandiri 12. Mininya produk olahan perikanan budidaya yang bernilai tambah 13. Rendahnya hasil jua produk di tingkat pembudidaya
2	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masih minim
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya alih fungsi lahan 2. Sebagian besar lahan yang hanya dapat di tanami 1 kali/Tahun 3. Sarana dan Prasarana pertanian belum optimal 4. Akses/Jalan distribusi hasil belum memadai untuk dilalui kendaraan roda 4 sampai ke lahan 5. Kapasitas kelembagaan kelompok tani serta rendahnya kesadaran kelompok mapan untuk berusaha secara mandiri masih rendah 6. Sarana prasarana pasca panen masih terbatas 7. Jangkauan pemasaran dan promosi menggunakan media online hasil produksi belum tersedia 8. Harga jual hasil produksi masih belum stabil dan cenderung situasional.
4	Urusan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki pasar masih kurang, seperti : jumlah lapak/kios, parkir, drainase, mushola, lampu penerangan 2. Manajemen pengelolaan pasar yang masih rendah, seperti : terbatasnya SDM pengelola pasar, penenuhan operasional pengurus pasar, operasional masih bersifat mingguan, kebersihan

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		area pasar dan penertiban alat ukur yang digunakan pedagang harus sesuai SNI
15	Urusan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas produk yang dihasilkan IKM masih belum dapat bersaing ditingkat regional 2. Terbatasnya sarana produksi terpadu pemasaran
16	Urusan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya identifikasi lahan eks transmigrasi khususnya lahan fasum dan fasos dalam penertiban sesuai dengan peruntukannya 2. Minimnya Database kawasan Ex. Transmigrasi
IV. URUSAN PENUNJANG		
1.	Urusan Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas Kinerja yang belum optimal 2. Belum adanya evaluasi dan penilaian terhadap Reformasi Birokrasi
2	Urusan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan dan pengendalian TIPIKOR dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan jumlah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah SDM 3. Belum optimalnya implementasi SPIP pada OPD 4. Masih rendahnya level kapabilitas APIP 5. Masih rendahnya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan 6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan serta aset yang efektif, efisien dan akuntabel
3	Urusan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Pengampu Perencana di OPD dalam menyusun dan melaporkan dokumen perencanaan baik dari sisi perencanaan program maupun evaluasi dan pelaporan masih belum optimal 2. Sumberdaya manusia bidang perencanaan masih kurang terutama di OPD sehingga Perencanaan, maupun Evaluasi dan Pelaporan hanya ditangani oleh satu orang 3. Pelaksanaan aplikasi SIPD dari kemendagri masih belum optimal
4	Urusan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal
5	Urusan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ketersediaan ASN yang belum memadai

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Kompetensi yang belum kompetitif dan kurang disiplin ASN sehingga berpengaruh pada kinerja

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan permasalahan pembangunan ini merupakan salah satu pijakan dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah. Pijakan lainnya dalam penentuan isu strategis daerah adalah isu strategis di tingkat regional, nasional dan internasional.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah

1. Belum Optimalnya Pembangunan Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana perhatian yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan. Perekonomian daerah tentu saja sangat berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat akan menunjukkan bagaimana keterkaitan kedua urusan tersebut untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Setelah sektor pertambangan Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana capaian nilai perekonomiannya masih belum seoptimal wilayah lain. Permasalahan ini terlihat dari minimnya laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dibandingkan dengan wilayah lain, bahkan peringkat terbawah dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jika dilihat dari sisi PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di posisi ketiga tertinggi dibawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi, namun belum mampu mendongkrak nilai tambah produksi kegiatan ekonomi wilayah.

Tabel IV.2

PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Wilayah	PDRB ADH Berlaku (Milyar Rupiah)	LPE (%)
1	Kerinci	10.447,13	3,69
2	Merangin	15.688,09	0,78
3	Sarolangun	14.503,15	-0,26
4	Batanghari	16.431,93	-0,27
5	Muara Jambi	24.508,55	0,27
6	Tanjung Jabung Timur	19.499,94	-3,87
7	Tanjung Jabung Barat	37.153,88	-0,64
8	Tebo	14.758,93	-0,04
9	Bungo	17.374,50	-0,40
10	Kota Jambi	29.815,12	-3,28
11	Kota Sungai Penuh	7.566,00	-0,14
12	JAMBI	206.846,3	-0,46

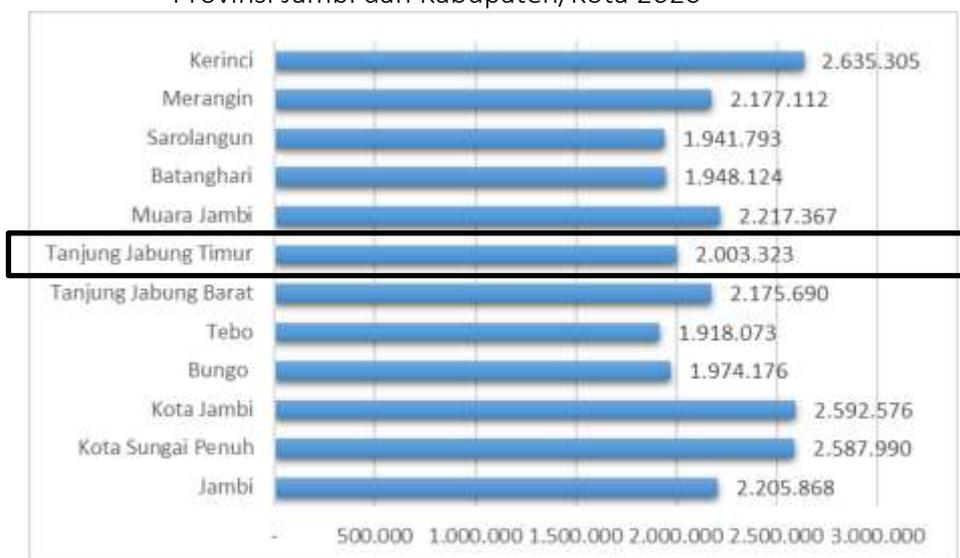
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga masih belum menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) masih berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Tahun 2019 nilai NTP sudah berada di atas 100 yaitu 100,85 poin, hal ini menunjukkan sudah terdapat selisih pendapatan yang diterima petani dibandingkan pengeluarannya untuk usaha tani. Namun demikian kenaikan NTP Tahun 2019 ini belum optimal meningkatkan kesejahteraan petani karena rata-rata nilai NTP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada dibawah angka 100 yaitu 98,56. Selengkapny nilai NTP Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Bab 2 tabel II.24.

Permasalahan terkait perekonomian juga melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam menjalani kesehariannya. Salah satu permasalahan sosial masyarakat Tanjung Jabung Timur adalah terkait kondisi ekonomi rumah tangganya. Terlihat bahwa rata-rata upah atau gaji pekerja formal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.2.003.323,00 dan angka ini masih tergolong rendah dibandingkan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muara Jambi. Rata-rata upah atau gaji pekerja formal tertinggi berada di Kabupaten Kerinci dengan besaran Rp.2.635.305,00 dan rata-rata se-Provinsi Jambi mencapai Rp.2.205.868,00. Namun meskipun rata-rata pendapatannya masih minim, namun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal (Rp) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar IV.1

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal (Rp)
Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Tabel IV.3

Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020
1	Kerinci	3,26	2,89	2,75	2,43
2	Merangin	4,10	3,64	3,80	4,86
3	Sarolangun	2,25	4,18	4,24	5,71

No	Wilayah	2017	2018	2019	2020
4	Batanghari	3,57	4,01	4,70	4,42
5	Muara Jambi	5,39	4,66	5,29	5,43
6	Tanjung Jabung Timur	2,36	1,85	1,71	1,41
7	Tanjung Jabung Barat	3,07	2,46	2,67	2,16
8	Tebo	1,98	2,07	2,99	2,95
9	Bungo	4,89	3,09	3,93	5,94
10	Kota Jambi	5,55	6,56	6,72	10,49
11	Kota Sungai Penuh	4,14	5,44	4,17	5,56
12	JAMBI	3,87	3,86	4,19	5,13
NASIONAL		5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Indikator lain untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jambi. Selengkapnya tingkat kemiskinan Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4
Tingkat Kemiskinan
Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

No	Wilayah	2018	2019	2020
1	Kerinci	7,07	7,13	7,30
2	Merangin	8,88	8,48	8,63
3	Sarolangun	8,73	8,45	8,42
4	Batanghari	10,23	9,75	9,65
5	Muara Jambi	4,05	3,83	3,83
6	Tanjung Jabung Timur	12,38	11,54	10,95
7	Tanjung Jabung Barat	11,10	10,56	10,29
8	Tebo	6,58	6,47	6,26
9	Bungo	5,78	5,60	5,80
10	Kota Jambi	8,49	8,12	8,27
11	Kota Sungai Penuh	2,76	2,81	3,03
12	JAMBI	7,92	7,60	7,58
NASIONAL		9,82	9,41	9,22

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Namun demikian dalam 3 tahun terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup berhasil dalam menekan tingkat kemiskinan dari sebelumnya Tahun 2018 sebesar 12,38 persen menjadi 10,95 persen pada Tahun 2020.

Selain permasalahan perekonomian di atas, terdapat permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi baik secara Global, Nasional maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni Pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan

akan segera berakhir bahkan akhir-akhir ini semakin terus bertambah kasus positif di Provinsi Jambi. Pandemi ini memberikan dampak perekonomian yang cukup signifikan dan masih sulit diprediksi sehingga perlu adanya penanganan dan pemulihan yang terstruktur, khususnya pada saat pandemi ini masih berlangsung.

2. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah dalam pembangunannya.

Salah satu permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah konektivitas antar wilayah desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memperluas konektivitas antar wilayah karena paling tidak ada 3 alasan mengapa konektivitas harus terus didorong yaitu :

1. Konektivitas mampu memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*), dengan menghubungkan pusat – pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Konektivitas dapat memperluas pertumbuhan melalui sistem penyediaan jaringan antar moda yang menghubungkan *hinterland* dengan wilayah yang

tertinggal ke pusat – pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Konektivitas sebagai upaya mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam memaksimalkan manfaat sebuah pembangunan.

Oleh karena itu, konektivitas merupakan cara efektif untuk mempercepat roda perekonomian masyarakat, dan memperpendek jarak tempuh menuju tempat yang memiliki potensi ekonomi sehingga daya saing masyarakat semakin baik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat lebih cepat terwujud. Pada Tahun 2019 capaian konektivitas antar wilayah desa, kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar dengan kondisi mantap sebanyak 66 Desa/Kelurahan atau sebesar 70,97%. Ini artinya masih terdapat 27 Desa/Kelurahan yang masih belum terhubung ke ibu kota Kabupaten dalam Kondisi Mantap. Selain konektivitas permasalahan infrastruktur pembangunan jalan adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Pada Tahun 2019, sepanjang 782,629 km (66,45%) panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan jalan yang tidak diaspal. Sedangkan dari kondisi jalannya, masih cukup banyak jalan yang kondisinya rusak bahkan rusak berat. Pada Tahun 2019, sepanjang 273,937 km (23,26%) panjang jalan berada dalam kondisi rusak atau rusak berat. Hal ini harus diperhatikan mengingat jalan merupakan sarana vital dalam mengakses setiap wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam distribusi berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat.

Selain sarana jalan, penyediaan sarana jaringan irigasi untuk penyediaan air bagi lahan pertanian bagi petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini dikarenakan air merupakan sumber utama kehidupan tanaman dimana jika tanaman kurang air maka sangat berpengaruh terhadap produksi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditopang perekonomiannya dari sektor pertanian dan perikanan sementara sebagian besar lahannya merupakan lahan pertanian rawa yang pengelolaannya sangat tergantung dengan penataan air, dari 44.100 Ha luas jaringan irigasi yang ada, 21,72 persen diantaranya masih dalam kondisi rusak, dan perlu penanganan. Pada Tahun 2019

Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi baru mencapai 37,5% atau baru 63.754 Ha Luas Lahan Pertanian yang terairioleh jaringan irigasi yang dibangun/dipelihara dari total luas lahan pertanian keseluruhan sebesar 169.351 Ha.

Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan air merupakan sumber utama kehidupan masyarakat dimana jika masyarakat mengkonsumsi air tidak layak minum akan meningkatkan angka kesakitan di suatu wilayah. Selain itu sanitasi yang tidak baik juga menyebabkan meningkatnya angka kesakitan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati urutan terendah di banding kabupaten/kota yang lain dalam Provinsi Jambi dalam hal Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak yaitu sebesar 32,78 persen. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 89,37 persen namun masih dibawah kota Jambi dan kota Sungai Penuh.

Tabel IV.5

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020

No	Wilayah	2019	2020
1	Kerinci	66,24	84,60
2	Merangin	46,06	69,20
3	Sarolangun	53,83	69,26
4	Batanghari	57,97	74,18
5	Muara Jambi	70,30	76,57
6	Tanjung Jabung Timur	32,78	89,37
7	Tanjung Jabung Barat	40,67	87,65
8	Tebo	57,33	58,92
9	Bungo	71,19	71,79
10	Kota Jambi	91,43	97,09
11	Kota Sungai Penuh	89,44	94,19
12	JAMBI	62,94	78,86

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati urutan terendah di banding kabupaten/kota yang lain dalam Provinsi Jambi dalam hal Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak yaitu sebesar 50,92 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Wilayah	2019
1	Kerinci	67,77
2	Merangin	73,52
3	Sarolangun	71,77
4	Batanghari	73,43
5	Muara Jambi	84,14
6	Tanjung Jabung Timur	50,92
7	Tanjung Jabung Barat	58,95
8	Tebo	75,95
9	Bungo	77,95
10	Kota Jambi	94,80
11	Kota Sungai Penuh	72,18
12	JAMBI	75,60

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

3. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

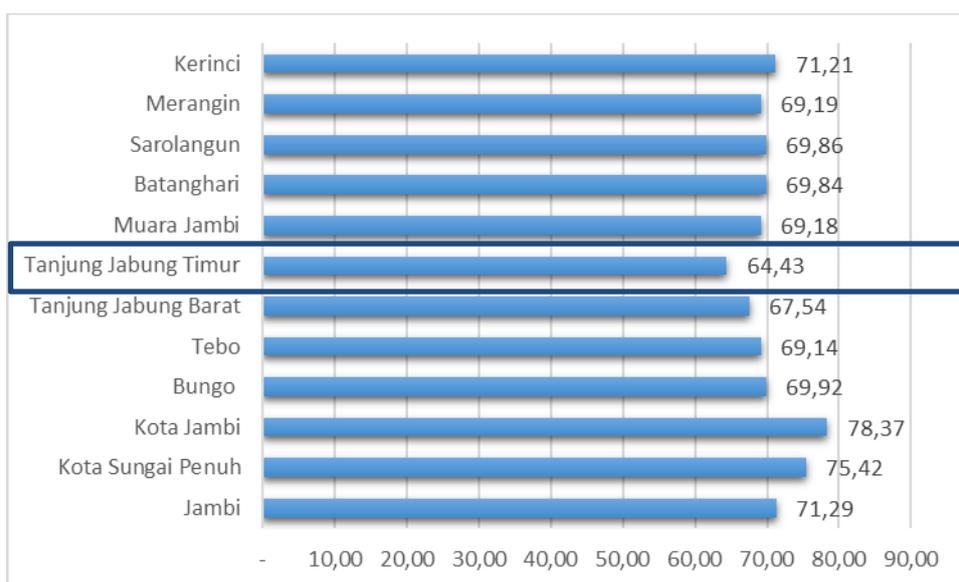
Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan elemen penghitungannya berasal dari Angka Harapan Hidup (AHP), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AHP

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat. HLS digunakan untuk mengetahui berapa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan RLS merupakan alat ukur untuk menghitung seberapa usia sekolah 25 tahun keatas yang menjalani pendidikan normal.

Gambar IV.2

Indeks Pembangunan Manusia menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020



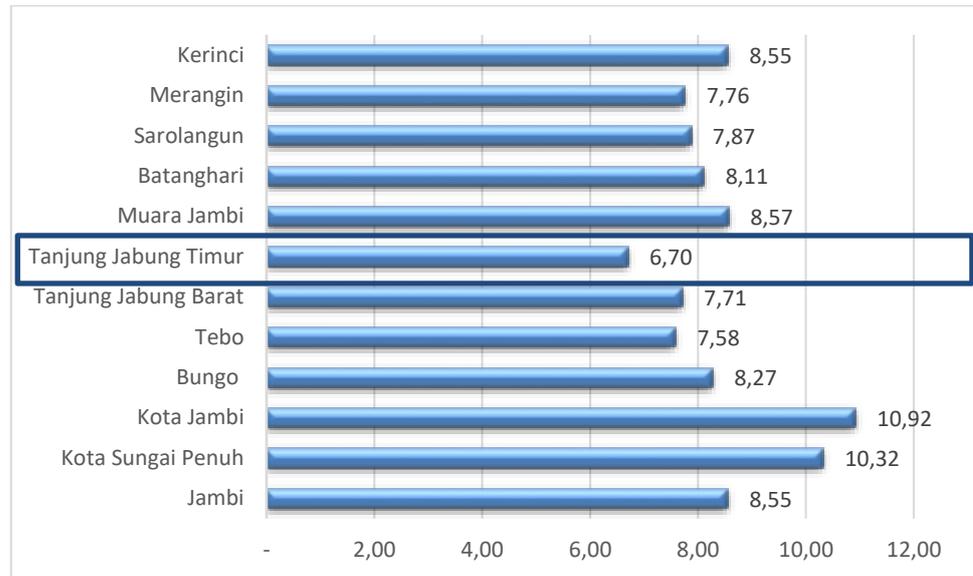
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya, maka terlihat bahwa angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di urutan terendah dari rata-rata IPM kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun Nasional yaitu sebesar 64,43. Hal ini merupakan kerja keras bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Bila dilihat dari capaian angka Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menempati urutan terendah dari rata-rata IPM kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun Nasional yaitu sebesar 6,70 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar IV.3.

Rata-rata Lama Sekolah menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020

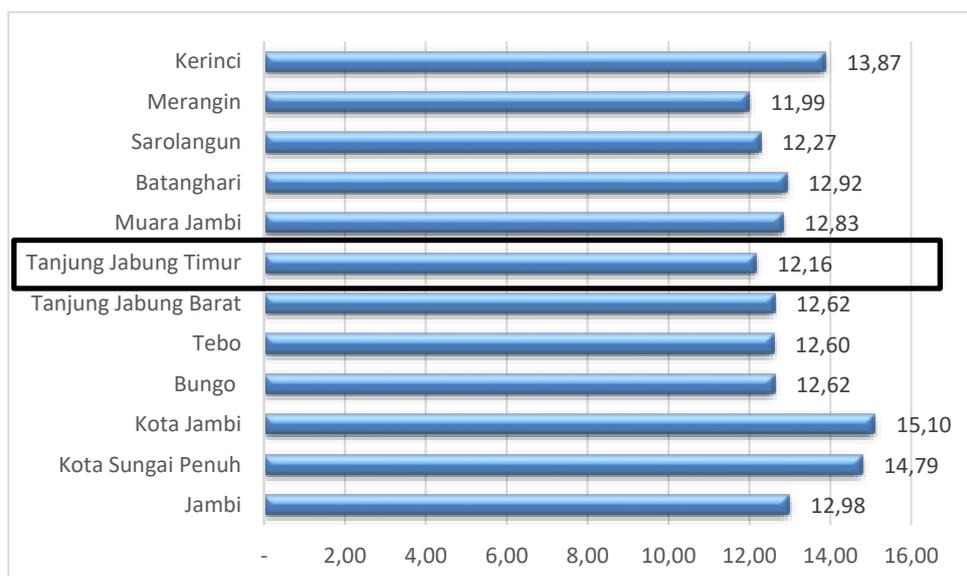


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Selain dari rata-rata lama sekolah, terlihat pula harapan lama sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah dengan capaian 12,16 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jambi yang mencapai 12,93 tahun dan capaian nasional 12,95 tahun. Diharapkan pemerintah daerah mampu “menggenjot” peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk mewujudkan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya saing.

Gambar IV.4

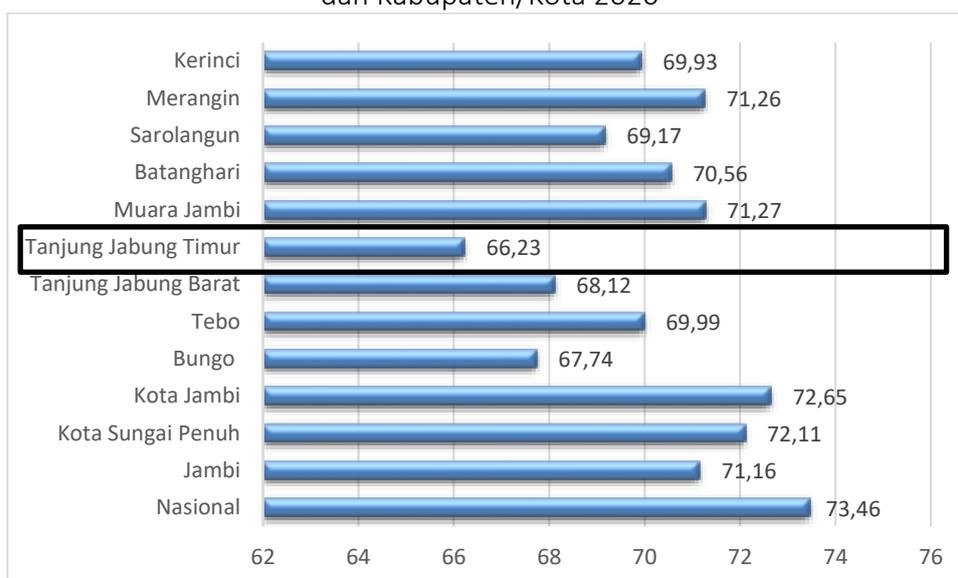
Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat dari capaian angka harapan hidup pada tahun 2019 yang mencapai angka 66,23 tahun. Angka ini masih menempatkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di urutan terendah dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan dibawah angka Provinsi maupun Nasional. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali kendala-kendala yang menurunkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan mengingat kesehatan sangat berpengaruh pada aktivitas keseharian masyarakat sehingga berdampak pada segi sosial maupun ekonominya.

Gambar IV.5
Angka Harapan Hidup Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 2020



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Permasalahan kesehatan yang saat ini menjadi perhatian publik, termasuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dan akan terus ditekan kasus positif semaksimal mungkin. Oleh karena itu, budaya masyarakat yang masih kurang perhatian terhadap kesehatan diri dan lingkungan terutama dalam menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) akan menjadi salah satu poin penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Terdapat 8 (delapan) Area Pembaharuan dan Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penguatan Sistem Pengawasan, 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 4) Penguatan Kelembagaan, 5) Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat sasaran (ribgt sizing)
- 2) Beberapa Peraturan Perundangan dibidang aparatur masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas dan multitafsir
- 3) Alokasi SDM Aparatur Negara dalam hal kualitas, kuantitas dan distribusi menurut wilayah tidak seimbang. Manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.
- 4) Masih terdapat praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 5) Pelayanan Publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara
- 6) Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, produktif dan profesional.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun 2019 belum mendapatkan evaluasi atau penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga belum dapat diketahui Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari Beberapa Indikator penilaian dan area perubahan Reformasi Birokrasi sebenarnya

telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga masih belum dievaluasi oleh Kemenpan RB.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, 2) Birokrasi yang Kapabel dan 3) Pelayanan Publik yang Prima. Dari ke tiga sasaran tersebut terdapat beberapa indikator evaluasi/penilaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

- 1) Sasaran 1 (satu) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Indikator yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, 2018 dan 2019;
 - b. Dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dengan pencapaian laporan 100%;
 - c. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
 - d. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui SP4N Lapor dan SIPUT (Sistem Informasi Pengaduan Terpadu);
 - e. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai kategori CC;
 - f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah dimulai dengan pengembangan e-government melalui Sabak Smart Center untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Sasaran 2 (dua) Birokrasi yang Kapabel. Indikator yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pada Tahun 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ikut/mendaftar untuk dilakukan evaluasi reformasi birokrasi;
 - b. Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.
 - d. Telah disusun ANJAB, ABK, dan Evaluasi Jabatan sebagai dasar dalam penempatan ASN dalam jabatan.
 - e. Telah dilakukan lelang terbuka untuk pengisian jabatan eselon II.
 - f. Pelaksanaan penerimaan CPNS melalui sistem CAT.
 - g. Penerapan E-Kinerja sebagai dasar pemberian TPP
- 3) Sasaran 3 (tiga) Pelayanan Publik yang Prima. Indikator yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Unit Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - c. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan pelayanan PATEN.
 - d. Penyusunan Perkada tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan (PANDU-DESAKU).
 - e. Menetapkan SOP Administrasi Pemerintahan khususnya pada Unit Pelayanan;
 - f. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - g. Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik berada pada kategori tinggi (hijau)

5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah

Pemerintah daerah memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakatnya dengan

melakukan antisipasi berbagai tindak kejahatan yang terjadi. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan juga dengan pihak kepolisian setempat serta peran aktif masyarakat akan menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah yang aman, damai dan tertib. Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban), maka perlu adanya regulasi yang memberi dukungan dalam pencapaiannya.

Menurut data BPS Provinsi Jambi Tahun 2020 Jumlah tindak pidana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan kasus dalam kurun waktu Tahun 2018 – 2020. Pada Tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 234 kasus menurun menjadi 160 dan 106 kasus pada Tahun 2019 dan 2020. Demikian juga resiko terjadinya tindak pidana per 100.000 penduduk pada Tahun 2018 sebesar 107, Tahun 2019 yaitu sebesar 73 dan Tahun 2020 sebesar 46 tindak pidana setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari sisi persentase penyelesaian tindak pidana terjadi peningkatan pada Tahun 2019 dan 2020 dibandingkan Tahun 2018, dimana persentase penyelesaian tindak pidana pada Tahun 2018 sebesar 62,82 persen meningkat menjadi 66,08 persen pada Tahun 2019 dan 81,13 persen pada Tahun 2020. Diharapkan kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat segera diatasi secara dini sehingga tidak timbul korban di masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7

Jumlah Kejahatan yang dilaporkan, Resiko Penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 Penduduk dan persentase penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Item	2018	2019	2020
1	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan (kasus)	234	160	106
2	Resiko Penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 Penduduk (orang)	107	73	46
3	persentase penyelesaian tindak pidana (%)	62,82	66,88	81,13

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

4.2. Analisis Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, maupun berasal dari

dinamika nasional serta dunia internasional. Kebijakan nasional maupun regional yang terkait dengan pembangunan daerah juga dapat menjadi isu strategis. Substansi utama dalam dalam identifikasi dan penyajian isu strategis hal adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh yang besar bagi pencapaian target pembangunan dimasa yang akan datang.

4.2.1 Isu Strategis Global

Kondisi geoekonomi global dan regional saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan secara khusus terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode 2021-2026 ke depan. Beberapa hal terkait dengan kondisi ekonomi global dan regional tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah :

1. Fluktuasi harga komoditas minyak dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro Indonesia, harga komoditas seperti minyak dunia mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a) Tingginya ekspor dari negara- negara anggota OPEC terlepas dari keputusan untuk memotong produksi,
- b) Tingginya persediaan (inventory) minyak mentah dunia,
- c) Terus meningkatnya jumlah pengeboran shale oil di AS,
- d) Meningkatnya produksi minyak dunia dari negara-negara Non OPEC dan
- e) Peningkatan produksi minyak di Libia menjadi faktor yang mendorong menurunnya harga minyak dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa komoditas minyak dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya harga minyak dunia dan batubara dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya pendapatan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, fluktuasi harga komoditas minyak dunia dalam beberapa tahun kedepan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah-langkah strategis untuk mulai menggeser ketergantungan sumber pendapatan daerah dari sektor migas harus segera dilakukan. Keterbatasan anggaran sebagai konsekuensi dari berkurangnya pendapatan daerah akan mengurangi ruang fiskal Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.

2. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke

depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community (AEC)* atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community (APSC)*, dan ASEAN *Socio-Culture Community (ASCC)*. Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di Tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yang bekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tanggal 25-27 September 2015 telah terjadi pertemuan di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen tersebut yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (*Millenium Development Goals*), Tujuan Pembangunan Millenium, yang mulai dijalankan pada September 2000 dan berakhir di Tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di Tahun 2030 berupa

mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan
Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat
Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakain ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Gambar IV.6.

Tujuan Sustainable Development Goals



Sumber : UNDP, 2015

Rekomendasi KLHS RPJMD diperoleh berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam Tabel IV.8 berikut.

Tabel IV.8
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Alih fungsi Lahan	<p>1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya istrik baik dari PLN dan bukan PLN.</p> <p>6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi capaian 90,99% (rumah tangga umum) • Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dominan berada pada level sedang dengan jumlah 81.36%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 0.015% yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu • Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dominan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada penetapan kawasan LP2B di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2. Masih banyak masyarakat melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman 3. Masih rendahnya pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut 4. Masyarakat masih membuka lahan perkebunan secara illegal dikarenakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 3. Program pembinaan jasa konstruksi 4. Program penataan ruang 5. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 7. Program pendukung administrasi perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan penetapan kawasan LP2B b. penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan hydrologis gambut (KHG) c. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	berada pada level sedang dengan jumlah 86.44%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 1.64% yang berada di hamper seluruh kecamatan.	belum adanya perda mengenai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<p>pemerintah daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>8. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi situ, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya.</p> <p>9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, tambak dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>10. Program pengendalian daya rusak air</p> <p>11. Program pengelolaan kelembagaan, data dan sistem informasi sumber daya air</p> <p>12. Program penyusunan</p> <p>13. rencana, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				14. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 15. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 16. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman 17. Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 18. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	
Persampahan	15.9.1 (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> cakupan layanan sampah saat ini hanya mencapai 3% (5.133 Jiwa) yaitu dari total 	1. Pelayanan Persampahan masih rendah 2. Rendahnya kepedulian	1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan	1. Meningkatkan anggaran untuk penanganan pencemaran (sampah, limbah, udara)

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	15.a.1 Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	<p>keseluruhan jumlah penduduk (171.098 Jiwa) di tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah dominan berada pada level sedang dengan jumlah 66,7%, sedangkan pada level rendah dan sangat rendah tidak lebih dari 3% yang tersebar di 11 Kecamatan. 	<p>masyarakat terhadap sampah</p> <p>3. Pengelolaan Sampah yang berorientasi 3R yang belum efektif dan terpadu</p>	<p>capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>4. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>2. Pelatihan melakukan tindakan terhadap pelanggar kerusakan lingkungan</p> <p>3. Menyusun aturan tegas untuk pelarangan membuang sampah dan kesalahan pengolahan limbah</p>
Peningkatan Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik	1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMPMTs/Sed erajat	Tingkat partisipasi pendudukan secara umum pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami peningkatan	<p>1. Peningkatan Pelayanan pendidikan</p> <p>2. Terbatasnya kapasitas SDM aparatur</p>	<p>1. Program pendidikan menengah</p> <p>2. Program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus</p>	<p>1. Mendata sekolah dengan fasilitas dan sarana yang kurang memadai terutama di daerah dengan indeks pendidikan rendah</p>

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	<p>4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>4.3.1 (a) Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin</p> <p>4.3.1 (b) Angka</p>		<p>3. Rendahnya SDM masyarakat yang memiliki keterampilan khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan lapangan kerja.</p> <p>4. Masih ada anak miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi</p> <p>5. Rendahnya minat baca masyarakat</p> <p>6. Belum meratanya guru/tenaga pengajar</p>	<p>3. Program pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>4. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dinas pendidikan</p> <p>6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dinas pendidikan</p> <p>7. Program pengembangan kompetensi aparatur</p>	<p>2. Menambah ketersediaan buku-buku pelajaran terutama di daerah dengan indeks pendidikan rendah</p> <p>3. Pengawasan standar kualitas oleh dinas pendidikan</p> <p>4. Pelaporan sekolah dengan kualitas kurang memadai</p> <p>5. Pelatihan metode pengajaran tenaga pendidik</p> <p>6. Pengawasan tenaga pendidik</p> <p>7. Membina tenaga pendidik dengan standar yang sama</p> <p>8. Penilaian tenaga pendidik secara periodik</p>

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)				9. Menguji kompetensi tenaga pendidik 10. Mendata jumlah guru dan kompetensi tenaga pendidik 11. Menyalurkan guru ke daerah terpencil 12. Memberikan bantuan 13. pendidikan untuk anak-anak kurang mampu 14. Mendata jumlah anak kurang mampu 15. Mendata anak putus sekolah 16. Kerjasama dengan donatur pemberian beasiswa 17. Sekolah gratis untuk anak kurang mampu dan daerah terpencil 18. Mengembangkan potensi aparatur daerah

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
					19. Memanfaatkan potensi aparatur daerah untuk pelatihan dan seminar 20. Penyediaan fasilitas pendukung agar bekerja lebih produktif
Investasi dan Pemodalan	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita 8.1.1 (a) PDB per kapita 8.6.1*Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 112.262.791 naik sebesar 1,62 persen dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 110.477.719, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHB juga mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 mencapai	1. Kemudahan akses pembiayaan 2. Peningkatan publikasi dan promosi produk 3. Pemetaan potensi investasi. 4. Terbatasnya sarana produksi 5. Terbatasnya anggaran 6. Kualitas produk masih perlu ditingkatkan	1. Program pembangunan industri 2. Program pengembangan ekspor 3. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Menggunakan bahan baku lokal 2. Pembatasan penggunaan produk impor 3. Peningkatan produksi 4. Perluasan pasar penjualan hingga ke mancanegara 5. Promosi produk lokal ke konsumen local 6. Pemetaan jalur distribusi produk industri 7. Pelatihan kompetensi tenaga kerja

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
		sebesar Rp. 81.815.169			8. Pendataan angkatan kerja sesuai keahlian 9. Sertifikasi tenaga kerja
Ketahanan Pangan	2.1.2. (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat	Jasa Ekosistem penyediaan Pangan dominan berada pada level sedang dengan jumlah 88,675%, sedangkan pada level rendah dan sangat rendah tidak lebih dari 2% yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu	1. Kodisi ketahanan pangan masyarakat di beberapa wilayah / desa masih rawan 2. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat 3. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging belum optimal. 4. Perlu adanya pemetaan potensi wilayah guna penyusunan perencanaan	Program Ketahanan Pangan	1. Pemetaan daerah kekurangan pangan 2. Meningkatkan kualitas dan cakupan distribusi ikan 3. Pengadaaan dan pengelolaan fasilitas untuk menjaga kualitas ikan 4. Pembuatan ternak ayam, sapi, bebek, kambing 5. Edukasi proses penanaman pangan, beternak, dan menambak. 6. Memasok kebutuhan pangan dari kabupaten luar dalam

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	konsumsi ikan.		dalam bidang ketahanan pangan 5. Adanya disparitas harga diterima petani antara wilayah		Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke daerah rawan pangan 7. Pemanfaatan lahan terbatas untuk penanaman hidroponik 8. Edukasi pemanfaatan lahan sempit menjadi memiliki nilai guna tinggi (pembuatan kolam ikan, berococok tanam) 9. Pemetaan jalur-jalur distribusi 10. Analisis kajian kewilayahan distribusi pangan 11. Menjaga stabilitas harga pangan di pasar

4.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Isu Perekonomian Nasional

Kedepan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang Tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada Tahun 2000 menjadi 21 persen pada Tahun 2018.

Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

2. Agenda Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Tanggal 20 Januari 2020, telah menetapkan Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 adalah : "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong***" Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan 5 (lima) arahan Presiden yaitu :
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan regulasi
 4. Penyederhanaan birokrasi
 5. Transformasi Ekonomi 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :
 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana dan perubahan iklim
 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.3 Isu Strategis Regional

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah “JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”. Visi Pembangunan Provinsi Jambi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Provinsi Jambi tersebut harus dapat diukur dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu, reformasi di bidang hukum dan aparatur.
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya dengan jalan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, dan memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan daerah.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskrimatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib dengan memberi dukungan dalam memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa.
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sara dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan di masa mendatang yang merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan Kompetitif
2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
3. Mewujudkan demokrasi dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tenteram dan tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

2. Perencanaan Pembangunan Daerah Sekitar

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode pembangunan 2016-2021 telah dimulai dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru dengan visi yang ingin dicapai pada Tahun 2021, “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

Adapun upaya untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan; dan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi tersebut, serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas;
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja;
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan;
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan; dan
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.

5. Peningkatan kepastakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelolapemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Muaro Jambi periode pembangunan 2017-2022 telah dimulai dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru dengan visi yang ingin dicapai pada Tahun 2022, "TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA".

Adapun upaya untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, berkualitas, Akuntabel, dan Partisipatif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan serta kebutuhan Dasar Lainnya.
3. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman dan Demokratis.
4. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Utilitas Lainnya Serta Perwujudan Penataan Ruang Yang Memiliki Daya Dukung Lingkungan.
5. Optimalisasi Sumberdaya Daerah Melalui Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatkan daya saing daerah.
6. Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi tersebut, serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah dirumuskan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2017-2022 adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, berkualitas dan partisipatif berbasis teknologi;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul;
3. Terciptanya Ketertiban, Keamanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Harmonisasi Sosial Masyarakat
4. Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
6. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Muaro Jambi menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah Berbasis IT.
4. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
6. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur daerah
9. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
11. Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender
12. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
13. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan
14. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Daerah
15. Menurunnya Angka Kemiskinan
16. Menurunnya Tingkat Pengangguran
17. Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode pembangunan 2018-2023 telah dimulai dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru dengan visi yang ingin dicapai pada tahun 2023, “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANYUASIN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN YANG WARGANYA GUYUB DAN KREATIF BERDASARKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MENUJU Keadilan dan Kesejahteraan untuk Semua”.

Adapun upaya untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Banyuasin yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang;
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan demokratisasi di Banyuasin;

4. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi menuju Banyuasin yang sejahtera dan
5. Meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan 7 Program Prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 adalah:

1. Program Banyuasin CERDAS;
2. Program Banyuasin SEHAT;
3. Program Banyuasin RELIGIUS;
4. Program Banyuasin INFRASTRUKTUR BAGUS;
5. Program Banyuasin PRIMA;
6. Program PETANI BANGKIT dan
7. Program SISTEM PEMERINTAHAN TERBUKA

Pada Tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin melaksanakan Perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan menempatkan 3 Isu Strategis dalam Perubahan RPJMD yaitu :

1. Pelabuhan Tanjung Carat;
2. *Food Estate* dan
3. Penanggulangan Stunting.

Ketiga isu ini akan dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan pada pembangunan untuk mencapai kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Lestari”. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan daerah yang maju dengan daya saing ekonomi yang tinggi dan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dengan SDM berkualitas dan berdaya saing; Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Membangun infrastruktur yang baik dan lengkap serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terpadu,
 2. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial, menyediakan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial dan ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi gender,
 3. Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan taat hukum melalui peningkatan kelembagaan ekonomi dan budaya. Memperkuat peran ekonomi masyarakat. Memperkuat budaya lokal dan tatanan hukum daerah. Melakukan pembenahan kelembagaan sosial ekonomi dan budaya; meningkatkan budaya taat hukum guna menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tentram bagi masyarakat dan daerah,
 4. Mewujudkan Pembangunan yang berkelestarian dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa datang. Memanfaatkan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi dan melakukan konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan
- Dalam pelaksanaan misi, maka dirumuskan sasaran pokok untuk memastikan misi dilaksanakan sesuai koridor yang tepat. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui 4 sasaran yang akan menjadi agenda rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada saat ini telah memasuki Sasaran Pokok yang terakhir yaitu Sasaran RPJMD Keempat (2020-2025). Sasaran RPJMD keempat dari pembangunan jangka panjang daerah merupakan sasaran terberat karena pembangunan di tahapan akhir ini harus mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025. Oleh karena itu, sasaran Pokok pembangunan daerah diarahkan pada

- 1) peningkatan kualitas kelembagaan dan birokrasi pemerintah daerah,
- 2) penguatan sektor industri dan akses pasar komoditas unggulan daerah,
- 3) pemantapan pelayanan publik yang prima.

4.3. Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditengah pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia saat ini, tentu berimplikasi luas biasa terhadap pembangunan yang dilaksanakan, perubahan secara masif terjadi mulai dari perekonomian, pembangunan, dan sosial budaya. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sektor pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat *multiplayer effect* pertumbuhan ekonomi;
4. Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
5. Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk membangun sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
8. Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;

9. Terjadinya kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar;
10. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

B

A

B

V

Visi, Misi,
Tujuan Dan
Sasaran

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Daerah

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **‘Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)’**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

5.2 Misi Daerah

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;***
Ketersediaan sumberdaya pertanian dan perikanan yang melimpah menjadikan karakter masyarakat sebagian besar adalah petani dan nelayan yang ditandai dengan 15,51 Persen distribusi PDRB ditopang dari pertanian, dan perikanan, kondisi ini menjadikan sektor ini menjadi jati diri dan motor penggerak perekonomian daerah. Potensi lahan pangan produktif saat ini dengan luas tanam 9.851 hektar dengan produksi mencapai 41.670 ton/tahun sehingga menjadikan sektor ini potensial untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan sektor perkebunan dengan komoditas terbesar kelapa sawit dengan potensi 38.129 hektar perkebunan sawit masyarakat dan produktivitasnya saat ini masih 2 ton/hektar dan produksi CPO di wilayah kita baru terlayani sebesar 50 persen. Begitu pula dengan komoditas kelapa dalam dengan luas tanam mencapai 58.505 hektar, namun masih terjadi disparitas harga sebesar 16,6%, dan Kopi Liberika dengan potensi saat 1.259 Hektar.

Potensi peternakan dengan populasi ternak sapi sebanyak 20.480 ekor atau 248,8 ton. Dengan tingginya permintaan daging sapi serta daya dukung yang melimpah, sangat mungkin untuk ditingkatkan perkembangbiakannya. Sumberdaya perikanan yang terkandung mencapai 23.886 ton untuk perikanan laut dan 249 ton perikanan darat akan terus ditingkatkan produksi dan pemasarannya. Disamping potensi yang tersedia, juga akan mengembangkan potensi-potensi lainnya sesuai dengan tren yang sedang booming saat ini seperti peternakan lebah madu dan penangkaran burung berkicau.

2. ***Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;***

Publik tentu sepakat bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya yang tersedia, dan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan tersebut dengan catatan SDM tersebut harus unggul dan berdaya saing. Untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tersebut tentu perlu dilakukan upaya sistematis dan komprehensif dengan memfokuskan 3 sasaran yaitu penyiapan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas tenaga kerja.

Pendidikan merupakan gerbang peradaban dan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itu akan menargetkan : 1) menyiapkan tenaga pendidik yang cukup dan berkompeten; 2) menjamin fasilitas belajar dan mengajar yang layak dan nyaman, 3) meningkatkan aksesibilitas yang layak. Sedangkan untuk penyiapan tenaga kerja, akan dilakukan peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja untuk berdaya saing dan siap kerja. Sedangkan untuk sasaran kesehatan, akan mencukupi kebutuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, kapasitas tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih, penciptaan lingkungan sehat, dan upaya promotif dan preventif kesehatan lainnya. Kondisi sehat dan cerdas tentunya belum cukup jika tidak dibarengi dengan mental, moral dan perilaku yang beradab. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cepatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadikan banyaknya kemudahan - kemudahan, namun sisi lain kemajuan teknologi ini berimplikasi terhadap pergaulan bebas hingga merusak norma - norma agama, Pendidikan keagamaan merupakan salah satu cara untuk mencegah hal negatif tersebut terjadi. Untuk itu, akan ditingkatkan peran institusi pendidikan keagamaan yang ada dan tentunya disesuaikan dengan kaidah hukum serta kewenangan yang ada. Dengan adanya kualitas pendidikan dan penguatan sistem kesehatan tentu akan melahirkan generasi yang berkualitas, bermoral dan berdaya saing dengan meningkatkan

keterampilan kerja pada penduduk angkatan kerja khususnya pada jenjang tamatan pendidikan SLTP dan SLTA yang bekerja pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa.

3. ***Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;***

Untuk membangun sebuah daerah dibutuhkan pendanaan yang cukup, untuk itu segala sumber pendanaan harus dioptimalkan tidak saja bergantung pada APBD, investasi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan stimulan kepada pelaku usaha untuk datang berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bersama-sama mengelola sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti sektor Kelapa Sawit yang memiliki potensi lahan rakyat seluas 38.129 Hektar namun faktanya, cashflow yang timbul masih belum optimal, secara data menunjukkan terjadi kehilangan perputaran uang akibat penjualan CPO di luar Kabupaten yang mencapai 50 persen. Coconut oil resources dengan potensi 58 ribu hektar yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi luar biasa di tengah kebijakan nasional terkait Pengolahan kelapa menjadi bio-energi dengan pasar ekspor ke Jepang, menjadi peluang untuk berpacu meningkatkan produksi dan kualitas kepala yang dimiliki untuk mampu bersaing dipasar global.

Oleh karenanya, kedepan akan memfokuskan pada investasi di sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, otomotif, UKM/IKM dan jasa perdagangan.

Peningkatan investasi daerah tentu membuka peluang di sektor ketenagakerjaan, untuk itu, akan dilakukan penyiapan calon tenaga kerja produktif yang berasal dari putra dan putri Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu bersaing di pasar kerja dan akan dilakukan penambahan volume program padat karya serta membangun kemandirian sebagai upaya membuka lapangan kerja baru dalam rangka mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Komitmen untuk meningkatkan investasi daerah tentu tidak serta merta menabrak prinsip pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan lestari, untuk itu komitmen melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kaidah - kaidah yang berlaku terlebih lagi karena 62,98 persen luas wilayah kita adalah gambut yang harus dijaga dan lestarikan.

4. ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;***

Untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan kemampuan birokrat yang mumpuni dan mampu bertransformasi dengan kondisi dinamis. Untuk itu, penguatan birokrasi menjadi komitmen kedepan yang artinya birokrasi yang dibangun harus punya kemampuan melakukan perubahan, kemampuan meningkatkan pelayanan publik yang bersih, berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan berimplikasi pada terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman, dan harmonis.

5.3 Agenda Pembangunan

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan 5 (Lima) **Agenda Pembangunan** yaitu :

1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;

5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.4 Tujuan dan Sasaran

5.4.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
8. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis.

5.4.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari

9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;
15. Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31. Peningkatan Rasa Aman Bagi Ssemua Lapisan Masyarakat.

Tabel V.1.
Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir 2026	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)												
Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan												
I.1.	Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB		2,68	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00	6,00
I.1.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	jumlah Produksi pangan (padi, jagung, kedele) Tahun n dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	0	5,45	10,96	16,52	22,13	27,81	33,48	33,48
I.1.2		Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	jumlah Produksi tanaman perkebunan (kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, pinang) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	0	0,19	0,40	0,60	0,81	1,02	1,24	1,24
I.1.3		Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi hewan ternak	jumlah Populasi ternak (sapi, kambing) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun lalu dibagi produksi tahun lalu x 100	0	3,60	7,36	11,21	15,14	19,15	23,15	23,15
I.1.4		Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	jumlah Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Tahun ini dikurang jumlah Produksi Tahun 2020 dibagi produksi tahun 2020 x 100	0	5,82	11,98	18,49	25,39	32,70	40,00	40,00
I.1.5		Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap	Panjang jalan menuju sentra produksi dalam kondisi mantap	0	0,00	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	130,86
I.1.6		Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompoktani :									
			Pemula	Cukup Jelas	765	765	752	739	726	713	700	700
			Lanjut	Cukup Jelas	308	308	318	328	338	348	358	358
			Madya	Cukup Jelas	117	117	119	121	123	125	127	127
			Utama	Cukup Jelas	4	4	5	6	7	8	9	9
I.1.7		Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar (%)	Akumulasi Total Produksi IKM berstandar yang berbahan baku hasil pertanian dibagi total produk IKM yang berbahan baku hasil pertanian x 100	16,09	16,09	28,71	41,34	53,96	66,58	79,95	79,95
I.1.8		Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari	Selisih Jumlah Destinasi wisata dibagi Jumlah destinasi sebelumnya x 100	0,00%	0,0	14,3	28,6	57,1	85,7	100,0	100,0

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir 2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)												
Misi II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing												
II.1	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	$IK = (UHH-UHH \text{ Min}) / (UHH \text{ Maks}-UHH \text{ Min})$	0,687	0,688	0,690	0,691	0,692	0,693	0,695	0,695
II.1.1		Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Persentase Sarana Prasarana Faskes	Jumlah Bangunan Faskes ditahun n dibagi target sd 2026 x 100	0	2,13	14,89	17,02	17,02	17,02	17,02	85,11
II.1.2		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh tahun 2020 - akumulasi realisasi permukiman kumuh tahun n	123,88	119,88	115,88	112,88	109,88	106,88	103,88	103,88
			Persentase Pelayanan Air Bersih	Jumlah penduduk pengguna Air Bersih dibagi total jumlah penduduk x 100	51,59	57,07	62,55	68,03	73,51	78,99	84,47	84,47
			Persentase Volume Sampah terangkut perhari	(Target Volume sampah tahun n dibagi tahun 2026 x 100	126,47	88,37	90,70	93,02	95,35	97,67	100,00	100,00
II.1.3		Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak	Jumlah Rumah Tangga dg sanitasi layak / total rumah tangga x 100	74,61	73,08	73,29	73,76	74,50	75,25	75,53	75,53
II.2	Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	$IP = (HLS + Rata2 \text{ Lama Sekolah}) / 2$	9,43	9,52	9,61	9,70	9,79	9,88	9,97	9,97
II.2.1		Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	Data BPS	12,16	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18	13,18
			Angka rata-rata lama sekolah	Data BPS	6,7	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76	6,76
II.2.2		Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an	Jumlah Santri Haviz Quran tahun n dibagi Total Target x 100	0	0	20	20	20	20	20	100,00
II.3	Tujuan	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	BPS	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61	71,61
II.3.1		Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi	(Jumlah Target tahun n+kondisi awal)/total target x 100	64,21	69,94	75,66	81,39	87,12	92,84	100,00	100,00
II.3.2		Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	Persentase tenaga kerja magang	(Jumlah Target tahun n ditambah tahun n+1)/total target x 100	0	0	0	0	31,25	62,5	100	100,00
Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari												
III.1.	Tujuan	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79	11,79
III.1.1		Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Cukup Jelas	3,27	3,418	3,581	3,769	4,013	4,33	4,743	4,743
III.1.2		Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan	(jumlah desa/kel yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi mantap ke ibu kota Kabupaten/jumlah desa/kel) x 100%	72,04	73,12	75,27	77,42	79,57	81,72	83,87	83,87
III.1.3		Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100	0,00	4,61	5,74	2,31	4,00	4,00	4,00	4,00
III.1.4		Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah	Realisasi Aplikasi data dan Informasi digital dibagi Rencana Aplikasi x 100	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal 2020	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir 2026		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11		
III Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari														
III.2.	Tujuan	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK	74,18	74,18	75,282	76,384	77,486	78,588	79,69	79,69		
III.2.1		Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam	Realisasi Pabrik Tahun N dibagi rencana pabrik X 100	50,00	50,00	50,00	66,67	83,33	83,33	100,00	100,00		
III.2.2		Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja berbasis elektronik	Realisasi Aplikasi yang tersedia	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
III.2.3		Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja	Jumlah pelaku UMKM / target Pelaku UMKM x 100	0	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00		
III.2.4		Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indek Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	Survey	B	B	B	B	A	A	A	A		
III.3.	Tujuan	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100%	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100	100	100	100	100	100		
III.3.1		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rata-rata Indeks Tutupan lahan + Indeks Kualitas Air + Indeks Kualitas Udara	70,34	66,03	66,53	67,04	67,54	68,04	68,54	68,54		
III.3.2		Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	(Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan) x 100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
IV Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis														
IV.1	Tujuan	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK	Penilaian MenpanRB	NA	C	CC	CC	B	B	B	B		
IV.1.1		Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Penilaian MenpanRB	NA	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 4	Peringkat 5	Peringkat 5		
IV.1.2		Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Penilaian MenpanRB	NA	54,4	55	56	57	58	59	61		
IV.1.3		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian MenpanRB	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
			Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3						
			Indeks Perencanaan	Survey	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian Menpan RB	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
IV.1.4		Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Nilai SAKIP	Penilaian MenpanRB	CC	B	B	B	B	B	BB	BB		
			Opini BPK	Penilaian BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
IV.2	Tujuan	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Pelayanan Publik	Penilaian Menpan RB	NA	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8		
IV.2.1		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman	Survey	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54		
					Indeks Toleransi (Kerukunan Umat Beragama)	Survey Kementerian Agama	NA	71	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
					Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani dibagi total jumlah Pelanggaran Perda x 100	98,6	98,83	99,06	99,29	99,52	99,75	100

B

A

B

VI

Strategi, Arah
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
Daerah

BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan Optimasi Lahan Sub Optimal;
3. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
4. Menyediakan Alsintan;
5. Mencegah dan Menanggulangi Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan;
7. Mengoptimalikan Pengelolaan Perkebunan;
8. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
9. Meningkatkan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Pekebunan Masyarakat;
10. Meningkatkan Populasi Ternak Besar dan Kecil;
11. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat;
12. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
13. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
14. Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan;
15. Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
16. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan;

17. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
18. Meningkatkan dan Optimalisasi Sarana dan Peralatan Penyuluhan;
19. Meningkatkan Kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi;
20. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku IKM/UMKM;
21. Mengembangkan Sarana Pasarana Pemasaran;
22. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
23. Meningkatkan Kepariwisataaan Daerah Berbasis Potensi Agrowisata dan Wisata Bahari;
24. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes;
25. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang di Faskes;
26. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan;
27. Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan;
28. Meningkatkan Penanganan Stunting;
29. Menyediakan Rumah Layak Huni;
30. Meningkatkan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh;
31. Menyediakan Layanan Air Bersih;
32. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Pesampahan;
33. Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat;
34. Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah;
35. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
36. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan Perbaikan Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Rumah Dinas, Sanitasi Sekolah Pendidikan Dasar;
37. Mencetak Santri Penghapal Al-Qur'an;
38. Meningkatkan Sarana Prasana dan Peralatan Balai Latihan Kerja Daerah;
39. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kompetensi, Kualifikasi, Serta Daya Saing Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja;
40. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Instruktur;
41. Menyediakan Jaringan Penyedia Lapangan Kerja;
42. Meningkatkan Layanan Perijinan;
43. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi;
44. Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD;
45. Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD;
46. Menyediakan Media Informasi Potensi Investasi Daerah Berbasis Elektronik;

47. Menyiapkan Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;
48. Menyiapkan Aksesibilitas Penunjang Operasional Pabrik;
49. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;
50. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;
51. Menyediakan Media Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
52. Menyediakan Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
53. Memfasilitasi Pelaku IKM/UMKM dengan Pelaku Jasa Keuangan;
54. Menyediakan Sarana Prasarana Peralatan Pengolahan IKM/UMKM;
55. Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
56. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkesinambungan;
57. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai dengan RTRW Kabupaten;
58. Melakukan Penataan dan Penguatan Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
59. Meningkatkan Kompetensi, Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN, Penataan ASN;
60. Meningkatkan Pengendalian Produk Hukum;
61. Mengembangkan Sistem Manajemen Pembangunan Berbasis Kinerja Melalui Penguatan Proses Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Secara Terpadu;
62. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Perkuatan Kapabilitas APIP dan Perkuatan SPIP;
63. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Direct Services), serta Membangun Pemerintahan Yang Terbuka (Open Government) dengan Perkuatan Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Meningkatkan Komunikasi dan Serapan Aspirasi Publik;
64. Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini, Termasuk Kepada Anak-Anak Usia Sekolah, serta Didukung Upaya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pengampu Kepentingan Yang Berkaitan dengan Keberagaman dan Toleransi;
65. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum;
66. Meningkatkan Pencegahan Terhadap Bencana Alam dan Non Alam.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 - 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan, Penataan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani;
3. Menyediakan Benih Unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE;
4. Menyediakan Benih Tanaman Hortikultura (Semangka, Melon, Cabe dan Sayuran);
5. Menyediakan Bibit Tanaman Hortikultura (Nenas dan Buah Buahan);
6. Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk;
7. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan;
8. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Hortikultura;
9. Menyediakan Alsintan (*Handtractor, Power Thresher, Combine Harvester, Handsprayer, Mesin Pemotong Rumput, Corn Seller, Cultivator*);
10. Menyediakan *Excavator* PC. 100 ;
11. Menyediakan Herbisida, Pestisida dan Insektisida;
12. Memfasilitasi Perlindungan Usaha Tanaman Pangan melalui Jasa AUTP;
13. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Perkebunan;
14. Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, Tanggul dan Jalan Produksi;
15. Melakukan *Updating* Usaha Pekebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit);

16. Melakukan Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi ISPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP;
17. Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao;
18. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan;
19. Mengoptimalkan Sarana Pembibitan;
20. Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan;
21. Menyediakan Obat-Obatan Hama;
22. Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan;
23. Memberikan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Besar Masyarakat Khususnya Ternak Sapi;
24. Melakukan Fasilitasi Pemberian Ternak Kambing;
25. Menyediakan Ternak Unggas;
26. Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak;
27. Menyediakan Obat Obatan;
28. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Ternak;
29. Melakukan Fasilitasi Jasa Pelindungan Usaha Peternakan Masyarakat Melalui Asuransi Ternak Besar;
30. Menyediakan Benih dan Pakan Ikan;
31. Mengembangkan Budidaya Mina Padi;
32. Melakukan Pendataan Kolam/Tambak;
33. Optimalisasi Kolam Tambak Tidak Produktif;
34. Melakukan Fasilitasi dan Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan;
35. Melakukan Fasilitasi Pendirian Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar (1 Kawasan);
36. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
37. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
38. Melakukan Fasilitasi Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
39. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
40. Optimalisasi Pengelolaan Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
41. Menyediakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan;
42. Meningkatkan Sarana Tempat Pelelangan Ikan;
43. Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
44. Melakukan Fasilitasi Jasa Perlindungan Kerja Nelayan melalui Asuransi Nelayan;
45. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Tangkap;

46. Melakukan Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Pelanggaran Sektor Perikanan Tangkap (*Illegal Fishing*) dan Perikanan Budidaya;
47. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
48. Membangun Jalan dan Jembatan yang Menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan;
49. Melaksanakan Pelatihan Teknis Budidaya;
50. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Kelompok;
51. Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S);
52. Meningkatkan Pembinaan Kelompok;
53. Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh;
54. Menyediakan Peralatan dan Pelengkapan Kerja Penyuluh;
55. Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas;
56. Meningkatkan Pengelolaan Demplot Penyuluhan;
57. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk IKM/UMKM;
58. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha Perkoperasian;
59. Melakukan Penataan Perkoperasian;
60. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Usaha IKM/UMKM dan Perkoperasian;
61. Melaksanakan Pelatihan Keterampilan Pelaku IKM/UMKM;
62. Meningkatkan Sarana Prasarana Pasar;
63. Membangun Pasar Baru;
64. Meningkatkan Sarana dan Peralatan Sentra Batik;
65. Optimalisasi Pengelolaan Sentra Batik;
66. Mengembangkan Sentra IKM Olahan Makanan;
67. Menyediakan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
68. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
69. Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Keamanan dan Ketahanan Pangan;
70. Menyediakan Stok Cadangan Pangan Daerah;
71. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Ketahanan Pangan Daerah;
72. Melakukan Pemetaan Potensi Keparisataan Berbasis Agrowisata dan Wisata Bahari;

73. Mengembangkan dan Menyediakan Sarana Prasarana Penunjang;
74. Meningkatkan Pelatihan Kelembagaan dan Pengelolaan Kepariwisata;
75. Menyediakan Sarana dan Aplikasi Promosi Potensi Wisata;
76. Optimalisasi Promosi Potensi Wisata;
77. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes;
78. Melakukan Fasilitas Kesehatan yang Layak;
79. Meningkatkan Kualitas Nakes;
80. Meningkatkan Kuantitas Nakes;
81. Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi;
82. Melakukan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
83. Meningkatkan Pengendalian Penyakit;
84. Meningkatkan Program Germas;
85. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan;
86. Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
87. Meningkatkan Jalan Lingkungan;
88. Membangun Drainase Permukiman;
89. Membangun Ruang Terbuka Hijau;
90. Mengoptimalkan Penyediaan Air Bersih melalui Sistem Pengelolaan dan Berbasis Masyarakat;
91. Mengoptimalkan Pelayanan Penanganan Persampahan;
92. Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
93. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah;
94. Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru;
95. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
96. Memberikan Bantuan Pelatihan Dan Keterampilan;
97. Mengembangkan Sarana Ruang Belajar BLK;
98. Memberikan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi;
99. Menyediakan Instruktur Tetap BLK;
100. Meningkatkan Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah dengan Penyedia Lapangan Kerja/Perusahaan;

101. Melakukan Fasilitasi Calon Tenaga Kerja Study Kerja di Luar Daerah maupun di Luar Negeri;
102. Meningkatkan Pelayanan Peizinan Secara Terpadu Mudah, Cepat, Tepat dan Akurat;
103. Meningkatkan Kualitas Jalan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
104. Mengoptimalkan Pajak Daerah;
105. Mengoptimalkan Retribusi Daerah;
106. Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
107. Mengoptimalkan Lain-Lain PAD yang Sah;
108. Mengoptimalkan Potensi Unit BUMD;
109. Melakukan *Updating* Pemetaan Potensi Investasi Daerah;
110. Menyediakan Aplikasi Sarana Promosi Berbasis Digital;
111. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Promosi Investasi;
112. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;
113. Menyediakan Prasarana Dasar Penunjang Operasional Pabrik;
114. Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Pelaku Usaha;
115. Melakukan Fasilitasi Regulasi Kemudahan Investasi;
116. Menyediakan Aplikasi Sarana Informasi Bursa Kerja Berbasis Digital;
117. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Bursa Kerja;
118. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
119. Melakukan Fasilitasi Perolehan Pemodalán Usaha IKM/UMKM;
120. Memberikan Bantuan Peralatan Pengolahan;
121. Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
122. Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan;
123. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
124. Meningkatkan Perbaikan Kinerja Organisasi;
125. Melaksanakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
126. Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN;
127. Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui Penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja;
128. Meningkatkan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah yang Bertentangan Atau Tidak Sesuai dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi;

129. Melaksanakan Evaluasi Atas Efektifitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Harmonisasi Peraturan;
130. Mengoptimalkan Sistem Aplikasi dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan, Aset, Data dan Informasi Pembangunan serta Kinerja;
131. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
132. Meningkatkan Maturitas SPIP;
133. Meningkatkan Kapabilitas Internal Audit;
134. Meningkatkan Tindaklanjut Temuan;
135. Menyiapkan Rencana Aksi Pencapaian Target SPM;
136. Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima;
137. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik;
138. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan;
139. Menggerakkan Unit Kerja dalam Melakukan Perubahan dengan Membentuk Agen Perubahan;
140. Meningkatkan Budaya Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur;
141. Memetakan Potensi Konflik dan Pemantauan serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi Dimasyarakat;
142. Memberikan Pendidikan Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini;
143. Meningkatkan Koordinasi dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal;
144. Meningkatkan Penegakan Peraturan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat;
145. Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
146. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
147. Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
148. Mengoptimalkan Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19;
149. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel VI.1. dan arah kebijakan pembangunan daerah dimuat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.1.

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
MISI 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan			
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1	Pembangunan/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan
		2	Meningkatkan Optimalisasi Lahan Sub Optimal
		3	Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
		4	Menyediakan Alsintan
		5	Mencegah dan menanggulangi hama tanaman pangan dan Hortikultura
	2 Peningkatan Produksi Perkebunan	6	Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan
		7	Mengoptimalkan pengelolaan perkebunan
		8	Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
		9	Meningkatkan penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan dan hama pekebunan masyarakat
	3 Peningkatan Populasi Hewan Ternak	10	Meningkatkan populasi ternak Besar dan Kecil
		11	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian distribusi serta layanan kesehatan ternak masyarakat
	4 Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	12	Meningkatkan sarana prasarana perikanan budidaya
		13	Meningkatkan sarana prasarana perikanan tangkap
		14	Meningkatkan pengawasan usaha perikanan
	5 Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	15	Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan
	6 Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	16	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan petani dan nelayan
		17	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan
		18	Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan peralatan penyuluhan
	7 Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	19	Meningkatkan kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi
		20	Meningkatkan kapasitas SDM pelaku IKM/UMKM
		21	Mengembangkan sarana pasarana pemasaran
		22	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
	8 Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	23	Meningkatkan kepariwisataan daerah berbasis potensi Agrowisata dan wisata bahari

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI			
MISI 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing							
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RSU	24	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes		
				25	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di Faskes		
				26	Mengoptimalkan Kualitas Tenaga Kesehatan		
				27	Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan		
				28	Meningkatkan Penanganan Stunting		
		2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	3	Perbaikan Sanitasi Masyarakat	29	Menyediakan rumah layak huni
						30	Meningkatkan Penanganan lingkungan Permukiman Kumuh
						31	Menyediakan layanan air bersih
						32	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pesampahan
		33	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat				
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab	1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	34	Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah		
				35	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
				36	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan perbaikan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, rumah dinas, sanitasi sekolah pendidikan dasar		
		2	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	37	Mencetak Santri penghapal Al-Qur'an		
3	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	38	Meningkatkan sarana prasana dan peralatan balai latihan kerja daerah		
				39	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi, serta daya saing sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja		
				40	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Instruktur		
		2	Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	41	Menyediakan jaringan penyedia lapangan kerja		

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI			
MISI 3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari							
1	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	42	Meningkatkan layanan perijinan		
		2	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	43	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi		
		3	Peningkatan PAD	44	Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD		
				45	Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD		
4	Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	46	Menyediakan media informasi potensi investasi daerah berbasis elektronik	47	Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi potensi investasi daerah		
2	Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja	1	Fasilitasi Pendirian Pabrik	48	Menyiapkan aksesibilitas penunjang operasional pabrik		
				49	Menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi		
				50	Menjamin kepastian hukum peluang investasi		
		2	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	51	Menyediakan media informasi lapangan kerja berbasis elektronik	52	Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi lapangan kerja
				3	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	53	Memfasilitasi pelaku IKM/UMKM dengan pelaku Jasa Keuangan
		4	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik			55	Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan
		3	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup	56	Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan
				2	Pengendalian Tata Ruang	57	Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis					
1	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	58	Melakukan Penataan dan penguatan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		2	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	59	Meningkatkan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, dan kesejahteraan ASN, penataan ASN
				60	Meningkatkan Pengendalian produk hukum
		3	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	61	Meningkatkan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
62	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP				
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	63	Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik		
2	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	64	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi.
		2	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	65	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum
				66	Meningkatkan Pencegahan terhadap Bencana alam dan non alam

Tabel VI.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan
Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani
Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE					
Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)
Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)
Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan					
Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura					
Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)
		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)	

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida
	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan
Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi
	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)			
			Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao
Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan					
Mengoptimalkan sarana pembibitan					
Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan					
Menyediakan obat-obatan hama					
		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan	
Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing				
Menyediakan ternak Unggas					
			Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak		Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak
Menyediakan obat obatan					
Meningkatkan pengawasan distribusi ternak					
Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar
Menyediakan benih dan pakan Ikan					
Mengembangkan budidaya Mina Padi					
		Melakukan Pendataan kolam/tambak	Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif		Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan		Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan
	Melakukan Fasilitasi Pendirian kawasan kampung Budidaya Ikan air tawar (1 kawasan)	Menyediakan sarana pasarana pengembangan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar
		Melakukan fasilitasi pengembangan budidaya tambak udang	Menyediakan sarana pasarana pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang
Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan
		Meningkatkan sarana tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan
Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap					
Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (illegal fishing) dan perikanan budidaya
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan
Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya					
Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)					
Meningkatkan pembinaan kelompok					
Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh					
		Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja		Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja	
Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskeswan
Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan					
Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian
Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian
Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian
Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM
Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar
			Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru
Meningkatkan sarana dan peralatan sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik
		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan	
		Menyediakan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.
Menyediakan stok cadangan pangan daerah					
Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah					
	Melakukan Pemetaan potensi keparisataan berbasis agrowisata dan wisata bahari	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang			
Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan					
	Menyediakan sarana dan aplikasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes					
Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Nakes					
Meningkatkan kuantitas nakes					
Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat					
Meningkatkan Pengendalian Penyakit					
Meningkatkan Program Germas					
Meningkatkan Kesehatan Lingkungan					
Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR					
Meningkatkan Jalan Lingkungan					
Melakukan Pembangunan drainase permukiman					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Ruang Terbuka Hijau					
Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat
Mengoptimalkan pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan
Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah					
Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar
Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan
		Mengembangkan sarana ruang belajar BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK	Mengembangkan sarana ruang Pratikum BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK
Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi
		Menyediakan Instruktur tetap BLK		Menyediakan Instruktur tetap BLK	
	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan
		Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat
Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi					
Mengoptimalkan Pajak Daerah					
Mengoptimalkan Retribusi Daerah					
Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah					
			Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Melakukan Upadating pemetaan potensi investasi daerah	Menyediakan aplikasi sarana promosi berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi potensi investasi daerah			
		Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha
	Melakukan Fasilitasi regulasi kemudahan investasi				
		Menyediakan aplikasi sarana informasi bursa kerja berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi Lapangan kerja			
Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan
		Mengoptimalkan Pelayanan administrasi ketenagakerjaan			
Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan
Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi
Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran				
Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja
Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi
Melaksanakan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan
Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja					
Meningkatkan Maturitas SPIP					

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kapabilitas internal audit;					
Meningkatkan Tindaklanjut Temuan					
Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM					
Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima					
Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik					
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan
Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan
Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur					
Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,	Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,	Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,	Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,	Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,	Memberikan Pendidikan tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,
Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
Meningkatkan penegakan Peraturan kepada seluruh lapisan masyarakat					
Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan					
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;					
Meningkatkan Penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19	Meningkatkan Penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19	Meningkatkan Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS)			

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2021 - 2026 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

- I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:
 - a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 2. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - b) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 4. Program Penyuluhan Pertanian.
 - c) Urusan Pangan, melalui program antara lain :
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - d) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
 1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - e) Urusan Industri, melalui Program antara lain :
 1. Program Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - f) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui Program antara lain :
 1. Program Pemberdayaan UMKM;

- 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;
- g) Urusan Penanaman Modal, melalui program antara lain :
 - 1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- h) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
 - 1. Program Aplikasi Informatika;
- j) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
 - 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf;
 - 3. Program Pemasaran Pariwisata.

II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- c) Urusan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
 - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- e) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Persampahan;
- f) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :

- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- g) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Penanaman modal, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 5) Program Promosi Penanaman Modal.
- b) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain:
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
- c) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
 - 1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Urusan Transmigrasi, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- g) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
 - 1) Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 2) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- h) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
 - 1) Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan LH;
 - 2) Pengelolaan Persampahan;

- 3) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 4) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
 - 1) Program Aplikasi Infomatika
 - j) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - l) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penempatan Tenaga kerja;
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - m) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain :
 - 1) Pemberdayaan UMKM
 - n) Urusan Industri, melalui program antara lain :
 - 1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Urusan Sekretariat Daerah, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Urusan Kepegawaian, melalui program antara lain:
 - 1) Program Kepegawaian Daerah;
- c) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;

- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- f) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
 - 1) Program Aplikasi Informatika;
 - 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
- g) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Social;
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- h) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- i) Non Urusan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaProgram dan kegiatan untuk mendukung kebijakan menuju Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Yang MERAKYAT, dapat dilihat pada tabel VI.3. berikut :

Tabel VI.3.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
1 Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan																			
1.1.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a	Cakupan Luas Lahan irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	39,99	50,12	35.778.924	53,00	55,00	30.420.215	57,00	59,00	31.549.563	61,00	61,00	31.901.463	70,00	181.114.711	Dinas PUPR	
		b	Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam kondisi baik	NA	55,26		58,00	61,00		64,00	67,00		70,00	70,00					
		c	Persentase sarana umum masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air Bersih	89,37	90		91	92		93	94		95	95		Dinas Perkim			
1.1.1.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	16,67	2.519.837	33,33	50,00	2.808.599	66,67	83,33	2.875.938	83,33	100,0	3.037.269	100,0	16.840.289	Dinas TPH	
		b	Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	45,45	54,55		63,64	72,73		81,82	90,91		100,0	100,0					
		c	Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	NA	16,67		33,33	50,00		66,67	83,33		90,00	100,0		100,0			
		d	Persentase Ketersediaan Dam Parit	40,00	50,00		60,00	70,00		80,00	90,00		100,0	100,0					
		e	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67		33,33	50,00		66,67	83,33		90,00	100,0		100,0			
		f	Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67		33,33	50,00		66,67	83,33		90,00	100,0		100,0			
		g	Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33	50,00		66,67	83,33		90,00	100,0		100,0			
1.1.1.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a	Skor PPH	93,1	90,5	595.128	91,6	92	608.781	92,5	93,1	636.361	93,2	93,2	669.831	701.485	3.906.622	Dinas Ketahanan Pangan	
		b	Konsumsi Energi	2119	2125		2130	2135		2140	2145		2150	2150					
1.1.1.4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100	100	387.658	100	100	500.263	100	100	513.477	100	100	531.149	100	545.190	2.956.577	Dinas TPH
		b	Persentase AUTP	35,71	46,43		57,14	67,86		78,57	89,29		100	100					
		c	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman	NA	0,16		0,14	0,12		0,1	0,08		0,06	0,06					
		d	Persentase penurunan tingkat kebakaran perkebunan	NA	2		2	1,8		1,8	1,6		1,6	1,6					
1.1.1.5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	54,55	2.538.302	63,64	72,73	6.538.124	81,82	90,91	6.690.448	90,91	100,00	6.898.128	100,00	35.808.710	Dinas TPH	
		b	Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	54,55		63,64	72,73		81,82	90,91		100,00	100,00					
		c	Persentase Inseminasi Buatan	20,17	33,47		46,78	60,08		73,39	86,69		100,00	100,00					
		d	Persentase produksi HPT	33,33	41,67		50,00	58,33		66,67	75		83,33	83,33					

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																			
1 Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.2 Peningkatan Produksi Perkebunan																			
1.1.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a	Cakupan Luas Lahan irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	39,99	50,12	35.778.924	53,00	20.649.924	55,00	30.420.215	57,00	30.814.622	59,00	31.549.563	61,00	31.901.463	61,00	181.114.711	Dinas PUPR
		b	Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam kondisi baik	NA	55,26		58,00		61,00		64,00		67,00		70,00		70,00		Dinas Perkim
		c	Persentase sarana umum masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air Bersih	89,37	90		91		92		93		94		95		95		
1.1.2.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	16,67	2.519.837	33,33	2.631.317	50,00	2.808.599	66,67	2.875.938	83,33	2.967.328	100,0	3.037.269	100,0	16.840.289	Dinas TPH
		b	Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	45,45	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		100,0		100,0		
		c	Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,0		100,0		
		d	Persentase Ketersediaan Dam Parit	40,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,0		100,0		
		e	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,0		100,0		
		f	Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,0		100,0		
		g	Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,0		100,0		
1.1.2.3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	54,55	2.538.302	63,64	6.088.521	72,73	6.538.124	81,82	6.690.448	90,91	6.898.128	100,00	7.055.188	100,00	35.808.710	Dinas TPH
		b	Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		100,00		100,00		
		c	Persentase Inseminasi Buatan	20,17	33,47		46,78		60,08		73,39		86,69		100,00		100,00		
		d	Persentase produksi HPT	33,33	41,67		50,00		58,33		66,67		75		83,33		83,33		
1.1.2.4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100	100	387.658	100	478.840	100	500.263	100	513.477	100	531.149	100	545.190	100	2.956.577	Dinas TPH
		b	Persentase AUIP	35,71	46,43		57,14		67,86		78,57		89,29		100		100		
		c	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman	NA	0,16		0,14		0,12		0,1		0,08		0,06		0,06		
		d	Persentase penurunan tingkat kebakaran perkebunan	NA	2		2		1,8		1,8		1,6		1,6		1,6		
1.1.3 Peningkatan Populasi Hewan Ternak																			
1.1.3.1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a	Persentase penurunan angka kematian ternak (%)	0,04	0,15	313.680	0,13	412.757	0,12	419.079	0,10	431.545	0,09	447.945	0,08	461.520	0,08	2.486.526	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		b	Persentase Sampel Pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan	18,70	40,65		48,78		56,91		65,04		73,17		81,30		81,30		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
1 Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.4 Peningkatan Produksi Hasil Perikanan																			
1.1.4.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	a	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	83,86	85,06	1.610.844	86,06	183.920	87,36	1.576.187	88,36	1.635.426	89,56	1.707.288	90,76	1.773.640	90,76	8.487.304	Dinas Perikanan
1.1.4.2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	a	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	57,16	59,16	272.359	64,96	183.918	70,76	266.499	73,76	276.515	78,76	288.666	81,76	299.884	81,76	1.587.842	Dinas Perikanan
1.1.4.3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	a	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	18,18	18,18	221.812	36,36	183.922	54,55	217.039	72,73	225.197	90,91	235.092	100,00	244.229	100,00	1.327.290	Dinas Perikanan
1.1.5 Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan																			
1.1.5.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		72,58
1.1.6 Meningkatkan Daya Saing Pertanian dan Perikanan																			
1.1.6.1	Program Penyuluhan Pertanian	a	Cakupan Bina Kelompok tani	32,71	43,93	1.011.979	55,14	1.958.684	66,36	2.107.438	77,57	2156076,10	88,79	2.222.491	100,00	2.272.519	100,00	11.729.187	Dinas TPH
		b	Cakupan Bina Kelompok tani	0,29	0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29
1.1.6.2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	a	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	83,86	85,06	1.610.844	86,06	183.920	87,36	1.576.187	88,36	1.635.426	89,56	1.707.288	90,76	1.773.640	90,76	8.487.304	Dinas Perikanan
1.1.6.3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	a	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	57,16	59,16	272.359	64,96	183.918	70,76	266.499	73,76	276.515	78,76	288.666	81,76	299.884	81,76	1.587.842	Dinas Perikanan
1.1.6.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a	Persentase penurunan angka kematian ternak (%)	0,04	0,15	313.680	0,13	412.757	0,12	419.079	0,10	431.545	0,09	447.945	0,08	461.520	0,08	2.486.526	Dinas Bunnak
		b	Persentase Sampel Pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan	18,70	40,65		48,78		56,91		65,04		73,17		81,30		81,30		
1.1.7 Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.7.1	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	a	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	45,08	50,00	570.159	60,00	183.919	70,00	557.892	80,00	578.860	90,00	604.295	100,00	627.781	100,00	3.122.905	Dinas Perikanan
		b	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	37,55	38		38,5		39		39,5		40		40,5		40,5		
1.1.7.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	a	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	8,07	14,15	157.848	20,24	174.374	16,59	172.501	19,02	181.968	21,45	193.073	23,89	204.137	23,89	1.083.900	Dinas Kop UKM
1.1.7.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	a	Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal	88,28	88,31	178.620	88,75	191.975	88,9	210.000	89,05	195.050	89,25	220.000	89,31	220.000	89,31	1.215.644	DPMPPTSP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																			
1 Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.7 Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan																			
1.1.7.4	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	a	Persentase peningkatan IKM Formal	20,62	20,62	82.280	27,13	118.650	34,88	160.877	42,64	166.032	46,51	172.459	54,26	178.116	54,26	878.413	Dinas Perindag
1.1.7.5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	a	Persentase Koperasi mandiri	NA	0,00	31.668	2,08	31.668	4,17	34.608	6,25	36.507	8,33	38.735	10,42	40.955	10,42	214.140	Dinas Kop UKM
1.1.7.6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	a	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	43	51,00	107.957	59,00	107.962	67,00	117.979	75,00	124.454	83,00	132.049	91,00	139.616	91,00	730.018	Dinas Kop UKM
1.1.7.7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	a	Persentase peningkatan Sentra IKM	44,44	44,44	1.812.604	55,56	814.608	66,67	1.104.525	77,78	1.139.922	88,89	1.184.045	100,00	1.222.882	100,00	7.278.586	Dinas Perindag
1.1.7.8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a	Persentase peningkatan pasar sehat	0	0	386.195	10	1.004.241	20	1.361.648	30	1.405.284	40	1.459.679	50	1.507.557	50	7.124.605	Dinas Perindag
1.1.7.9	Program Aplikasi Informatika	a	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	1.532.789	81,82	1.419.607	90,91	1.571.520	95,45	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Dinas Kominfo
1.1.7.10	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a	Skor PPH	93,1	90,5	595.128	91,6	695.035	92	608.781	92,5	636.361	93,1	669.831	93,2	701.485	93,2	3.906.622	Dinas Ketahanan Pangan
			Konsumsi Energi	2119	2125		2130		2135		2140		2145		2150		2150		
1.1.7.11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	a	Persentase penanganan daerah rawan pangan,	92,47	93,55	48.500	94,62	56.500	95,70	49.612	96,77	51.860	97,85	54.588	100,00	57.167	100,00	318.227	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.7.12	Pogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	a	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan	57,14	64,29	609.771	71,43	159.771	78,57	623.759	85,71	652.018	92,86	686.312	100,00	718.744	100,00	3.450.374	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.7.13	Program Pengawasan Keamanan Pangan	a	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	100,00	4.029	100,00	31.060	100,00	4.122	100,00	4.309	100,00	4.535	100,00	4.750	100,00	52.804	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.8 Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari																			
1.1.8.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
			Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		Dinas Perkim
1.1.8.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	a	Persentase Destinasi Pariwisata aktif	20,00	20,00	482.102	26,67	482.102	33,33	430.396	40,00	441.862	46,67	453.160	53,33	463.071	53,33	2.752.692	Dinas Parbudpora
1.1.8.3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	a	Persentase peningkatan Sentra IKM	44,44	44,44	1.812.604	55,56	814.608	66,67	1.104.525	77,78	1.139.922	88,89	1.184.045	100,00	1.222.882	100,00	7.278.586	Dinas Perindag
1.1.8.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	a	Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf	20	20	93.858	40	93.698	60	83.792	80	86.024	100	88.223	100	90.153	100	535.748	Dinas Parbudpora
1.1.8.5	Program Pemasaran Pariwisata	a	Persentase Kunjungan Wisatawan	64,22	86,67	495.477	88,33	495.477	89,33	442.336	90,00	454.121	90,67	465.732	91,33	475.918	91,33	2.829.060	Dinas Parbudpora
1.1.8.6	Program Aplikasi Informatika	a	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	1.532.789	81,82	1.419.607	90,91	1.571.520	95,45	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Dinas Kominfo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing																		
2.1 Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat																		
2.1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes (Puskesmas dan Pustu) dan RS																		
2.1.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a. Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		Dinas Perkim
2.1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	NA	62,5		70		77,5		85		92,5		100		100		Dinas Kesehatan
		b. Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4 PKM	8 PKM	870.070	10 PKM	706.051	12 PKM	691.014	14 PKM	746.557	17 PKM	782.547	17 PKM	798.250	17 PKM	4.594.490	
		c. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	66,22	66,22		67,57		70,27		72,97		75,68		75,68		75,68		RSUD NH
2.1.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Persentase Rumah Tangga PHBS	49,40	49,98	524.248	50,55	490.997	51,13	526.106	51,70	537.086	52,28	557.098	52,85	571.315	52,7	3.206.850	Dinas Kesehatan
2.1.1.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	a. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di Puskesmas	100	100	547.584	100	495.944	100	549.524	100	560.993	100	581.896	100	596.746	100	3.332.686	Dinas Kesehatan
2.1.1.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Jumlah Kematian Ibu	6	6		6		5		5		4		4		4		Dinas Kesehatan
		b. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	19/ 1.000 KH	19/ 1.000 KH		18.5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17.5/ 1.000 KH		17/ 1.000 KH		16.5/ 1.000 KH		16.5/ 1.000 KH		
		c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20/ 1.000 KH	20/ 1.000 KH		19.5/ 1.000 KH		19/ 1.000 KH		18.5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17.5/ 1.000 KH		17.5/ 1.000 KH		
		d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	18/ 1.000 KH	18/ 1.000 KH	61.694.697	17.5/ 1.000 KH	38.106.190	17/ 1.000 KH	58.394.942	17.5/ 1.000 KH	60.749.525	16/ 1.000 KH	63.060.473	16.5/ 1.000 KH	64.690.677	16.5/ 1.000 KH	346.696.504	
		e. Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,74	75		80		85		90		95		100		100		
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan RSUD	86,06	87		88		89		90		91		92		92		RSUD NH
2.1.1.6	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	a. Persentase PPKS di Kecamatan	NA	70	658.650	75	622.390	80	652.103	85	676.685	90	704.526	95	732.082	95	4.046.435	Dinas PPKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing																			
2.1 Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat																			
2.1.2 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman																			
2.1.2.1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	a	Pengurangan Luas permukiman kumuh	123,88	119,88	304.185	115,88	975.000	112,88	140.000	109,88	122.437	106,88	125.724	103,88	127.688	103,88	1.795.034	Dinas Perkim
2.1.2.2	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		Dinas Perkim
2.1.2.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	a	Persentase Draenasi dalam kondisi baik	NA	60	595.936	60	410.000	65	4.639.090	70	4.735.107	75	4.886.378	80	4.976.783	80	20.243.293	Dinas Perkim
2.1.2.4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	a	Persentase LPJU terpasang	39,57	39,57	9.095.671	51,64	5.027.161	63,71	7.197.391	75,79	7.322.153	87,86	7.518.713	100,00	7.636.183	100,00	43.797.273	Dinas Perkim
		b	Persentase Taman Kota terbangun	72,73	72,73		77,92		83,12		88,31		93,51		100,00		100,00		
2.1.2.5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	a	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	23,58	26,71	9.686.585	32,27	5.724.825	34,55	7.664.981	36,90	7.797.848	39,43	8.007.177	42,13	8.132.279	42,13	47.013.695	Dinas Perkim
2.1.2.6	Program Pengelolaan Persampahan	a	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	43	38	588.793	39	533.567	40	601.360	41	622.942	42	651.486	43	675.565	43	3.673.713	Dinas LH
2.1.3 Perbaikan Sanitasi Masyarakat																			
2.1.3.1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	a	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	74,61	73,08	8.384.736	73,29	1.267.549	73,76	1.567.303	74,50	1.594.471	75,25	1.637.274	75,53	1.662.854	75,53	16.114.187	Dinas Perkim
2.2 Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas																			
2.2.1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar																			
2.2.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		Dinas Perkim
2.2.1.2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	a	Rasio Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	78,60	78,85	394.776	79,10	890.851	79,36	394.207	79,61	403.677	79,86	421.460	80,11	432.066	80,11	2.937.038	Dinas Pendidikan
		b	Persentase Guru yang bersertifikat pendidik	81,06	81,57		82,53		83,49		84,45		85,41		86,37		86,37		
2.2.1.3	Program Pengelolaan Pendidikan	a	Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,33	93.834.561	12,5	47.002.495	12,67	93.699.402	12,84	95.950.255	13,01	100.177.112	13,18	102.698.105	13,18	533.361.929	Dinas Pendidikan
		b	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,7	6,71		6,72		6,73		6,74		6,75		6,76				

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
2 Misi II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing																			
2.2 Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas																			
2.2.2 Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah																			
2.2.2.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	NA	75	4.908.135	80	4.322.524	85	4.376.807	90	4.443.352	95	4.558.207	100	4.639.722	100	27.248.747	Sekretariat Daerah
2.3 Tujuan : Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing																			
2.3.1 Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja																			
2.3.1.1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	a	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (%)	NA	69,94	302.275	75,66	217.837	81,39	302.818	87,12	315.647	92,84	331.566	100,00	346.181	100,00	1.816.324	Dinas Nakertrans
2.3.2 Pelaksanaan studi kerja/ magang																			
2.3.2.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	a	Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	NA	40	49.950	45	49.496	50	50.040	55	52.160	60	54.790	65	57.205	65	313.641	Dinas Nakertrans
2.3.2.2	Program Hubungan Industrial	a	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	NA	70	102.680	73	99.347	76	102.864	79	107.222	82	112.630	85	117.594	85	642.337	Dinas Nakertrans
3 Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																			
3.1 Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah																			
3.1.1 Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah																			
3.1.1.1	Program Pelayanan Penanaman Modal	a	Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal	88,28	88,31	178.620	88,75	191.975	88,9	210.000	89,05	195.050	89,25	220.000	89,31	220.000	89,31	1.215.644	DPMPPTSP
3.1.1.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	NA	16,67	99.684,82	33,33	189.470,20	50,00	176.160,55	66,67	140.000,00	83,33	150.000,00	100,00	170.000,00	100,00	925.315,57	DPMPPTSP
3.1.1.3	Program Promosi Penanaman Modal	a	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	NA	0	-	0	-	25	50.000	50	50.000	75	100.000	100	120.000	100	320.000	DPMPPTSP
3.1.1.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a	Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	134,36	148,7	392.594	163,5	449.200	188,1	472.791	244,5	472.791	317,9	510.000	413,2	522.536	1475,9	2.819.913	DPMPPTSP
3.1.1.5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	a	Persentase Data dan Informasi yang Valid	100	100	42.354	100	113.023	100	50.000	100	50.000	100	120.000	100	120.000	100	495.377	DPMPPTSP
3.1.2 Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana																			
3.1.2.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		Dinas Perkim

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																			
3 Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																			
3.1 Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah																			
3.1.3 Peningkatan PAD																			
3.1.3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a	Persentase peningkatan pasar sehat	0	0	386.195	10	1.004.241	20	1.361.648	30	1.405.284	40	1.459.679	50	1.507.557	50	7.124.605	Dinas Perindag
3.1.3.2	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	a	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang	100,00	100,00	133.378	100,00	249.554	100,00	338.370	100,00	349.213	100,00	362.730	100,00	374.628	100,00	1.807.874	Dinas Perindag
3.1.3.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	a	Persentase peningkatan PAD	93,83	94	916.951	95	842.406	96	852.790	97	876.698	98	899.171	100	921.740	100	5.309.757	Badan Keuangan Daerah
3.1.3.4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	54,55	2.538.302	63,64	6.088.521	72,73	6.538.124	81,82	6.690.448	90,91	6.898.128	100,00	7.055.188	100,00	35.808.710	Dinas TPH
		b	Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		100,00		100,00		
		c	Persentase Inseminasi Buatan	20,17	33,47		46,78		60,08		73,39		86,69		100,00		100,00		
		d	Persentase produksi HPT	33,33	41,67		50,00		58,33		66,67		75		83,33		83,33		
3.1.3.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	66,03	206.785	66,53	181.737	67,04	211.199	67,54	218.778	68,04	228.803	68,54	237.259	68,54	1.284.561	Dinas LH
3.1.3.6	Program Pengelolaan Persampahan	a	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	43	38	588.793	39	533.567	40	601.360	41	622.942	42	651.486	43	675.565	43	3.673.713	Dinas LH
3.1.3.7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	a	Persentase EksTransmigran yang dibina/dilatih	100	70	458.665	74	328.558	78	459.488	82	478.954	86	503.111	90	525.287	90	2.754.064	Dinas Nakertrans
3.1.3.8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	a	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	57,16	59,16	272.359	64,96	183.918	70,76	266.499	73,76	276.515	78,76	288.666	81,76	299.884	81,76	1.587.842	Dinas Perikanan
3.1.4 Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah																			
3.1.4.1	Program Pelayanan Penanaman Modal	a	Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal	88,28	88,31	178.620	88,75	191.975	88,9	210.000	89,05	195.050	89,25	220.000	89,31	220.000	89,31	1.215.644	DPMPSTP
3.1.4.1	Program Aplikasi Informatika	a	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	1.532.789	81,82	1.419.607	90,91	1.571.520	95,45	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Dinas Kominfo
3.2 Tujuan : Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja																			
3.2.1 Fasilitas Pendirian Pabrik																			
3.2.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan	a	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR
		b	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58		
3.2.1.2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	a	Persentase Penegakan Perda	100	100	307.428	100	268.991	100	323.268	100	334.750	100	349.767	100	357.664	100	1.941.870	Satpol PP dan Damkar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
	3 Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																		
	3.2 Tujuan : Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja																		
	3.2.1 Fasilitasi Pendirian Pabrik																		
3.2.1.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	a	Persentase LPJU terpasang	39,57	39,57	51,64	63,71	75,79	87,86	100,00	100,00	43.797.273	Dinas Perkim						
		b	Persentase Taman Kota terbangun	72,73	72,73	77,92	83,12	88,31	93,51	100,00	100,00								
3.2.1.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	NA	17	99.685	33	189.470	50	176.161	67	140.000	83	150.000	100	170.000	100	925.316	DPMPTSP
	3.2.2 Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik																		
3.2.2.1	Program Aplikasi Informatika	a	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	1.532.789	81,82	1.419.607	90,91	1.571.520	95,45	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Dinas Kominfo
3.2.2.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	a	Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	NA	40	49.950	45	49.496	50	50.040	55	52.160	60	54.790	65	57.205	65	313.641	Dinas Nakertrans
3.2.2.3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	NA	17	99.685	33	189.470	50	176.161	67	140.000	83	150.000	100	170.000	100	925.316	DPMPTSP
	3.2.3 Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja																		
3.2.3.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	a	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	8,07	14,15	157.848	20,24	174.374	16,59	172.501	19,02	181.968	21,45	193.073	23,89	204.137	23,89	1.083.900	Dinas Kop UKM
3.2.3.2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	a	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	45,08	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	3.122.905	Dinas Perikanan						
		b	Tingkat konsumsi Ikan masyarakat (kg/kapita)	37,55	38	38,5	39	39,5	40	40,5									
3.2.3.3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	a	Persentase peningkatan Sentra IKM	44,44	44,44	1.812.604	55,56	814.608	66,67	1.104.525	77,78	1.139.922	88,89	1.184.045	100,00	1.222.882	100,00	7.278.586	Dinas Perindag
	3.2.4 Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik																		
3.2.4.1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	a	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (%)	NA	69,94	302.275	75,66	217.837	81,39	302.818	87,12	315.647	92,84	331.566	100,00	346.181	100,00	1.816.324	Dinas Nakertrans

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																			
3	Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																			
3.3	Tujuan : Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan																			
3.3.1	Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
3.3.1.1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	66,03	206.785	66,53	181.737	67,04	211.199	67,54	218.778	68,04	228.803	68,54	237.259	68,54	1.284.561	Dinas LH	
3.3.1.2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	NA	100	92.855	100	92.830	100	94.837	100	98.240	100	102.742	100	106.539	100	588.043	Dinas LH	
3.3.1.3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	a	Jumlah Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat	NA	0	65.332	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas LH	
3.3.1.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a	Persentase persetujuan teknis (Pertek) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	100	10.010	100	10.290	100	10.224	100	10.591	100	11.076	100	11.485	100	63.675	Dinas LH	
3.3.2	Pengendalian Tata Ruang																			
3.3.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	a	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	1.790.768	100	1.800.761	100	1.523.609	100	1.543.301	100	1.580.067	100	1.597.625	100	9.836.130	Dinas PUPR	
4	Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																			
4.1	Tujuan : Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas																			
4.1.1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi																			
4.1.1.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	NA	75	4.908.135	80	4.322.524	85	4.376.807	90	4.443.352	95	4.558.207	100	4.639.722	100	27.248.747	Sekretariat Daerah	
4.1.2	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan																			
4.1.2.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	NA	75	4.908.135	80	4.322.524	85	4.376.807	90	4.443.352	95	4.558.207	100	4.639.722	100	27.248.747	Sekretariat Daerah	
4.1.2.2	Program Kepegawaian Daerah	a	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	NA	54,431	4.266.314	56,995	3.261.235	59,607	61,678	4.633.554	61,678	4.973.233	63,72	5.149.820	63,72	5.306.270	63,72	27.590.426	BKPSDMD
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	NA	70		72		74			76		78		80				

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penangan g Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																				
4 Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																					
4.1 Tujuan : Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas																					
4.1.3 Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan																					
4.1.3.1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a	Persentase keselarasan pembangunan	100	100	100	1.014.827	100	1.114.825	100	1.132.145	100	1.168.401	100	1.216.634	100	1.256.420	100	6.903.252	Bappeda	
		b	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	102,78	85	88		91		94		97		100		100		100			
4.1.3.2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	84,53	85	88	1.703.049	91	1.789.999	94	1.817.808	97	1.876.021	100	1.953.466	100	2.017.349	100	11.157.692	Bappeda	
4.1.3.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	a	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	89,49	90	92	942.000	94	338.190	96	342.359	98	351.957	100	360.979	100	370.039	100	2.705.523	Badan Keuangan Daerah	
4.1.3.4	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	NA	75	80	4.908.135	85	4.322.524	90	4.376.807	95	4.443.352	100	4.558.207	100	4.639.722	100	27.248.747	Sekretariat Daerah	
4.1.3.5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a	Persentase kepatuhan pengembalian temuan BPK	26,48	40	45	2.715.891	50	3.595.739	55	2.995.435	60	3.089.466	70	3.213.176	70	3.316.030	70	18.925.737	Inspektorat	
4.1.3.6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	a	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	2	2	2	299.277	2	202.033	3	330.081	3	340.443	3	354.075	3	365.409	3	1.891.316	Inspektorat	
4.1.4 Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur																					
4.1.4.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	NA	75	80	4.908.135	85	4.322.524	90	4.376.807	95	4.443.352	100	4.558.207	100	4.639.722	100	27.248.747	Sekretariat Daerah	
4.1.4.2	Program Aplikasi Informatika	a	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	81,82	1.532.789	90,91	1.419.607	95,45	1.571.520	100,00	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Dinas Kominfo	
4.1.4.3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	a	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	88,37	206.059	88,37	794.001	90,70	811.266	95,35	820.067	831.323	100,00	841.330	100,00	841.330	100,00	4.304.046	Dinas Kominfo
4.1.4.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	a	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78,00	84,00	534.043.503	84,00	534.485.526	88,30	531.380.298	90,00	545.108.925	90,00	567.951.774	93,00	583.375.838	93,00	3.297.655.863	Seluruh OPD	
4.2 Tujuan : Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis																					
4.2.1 Terciptanya kohesi sosial masyarakat																					
4.2.1.1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	a	Presentase konflik yang difasilitasi	100	100	100	745.744	100	745.924	100	765.756	100	796.915	100	833.625	100	870.187	100	4.758.151	Badan Kesbangpol	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun ke-												Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)																		
4 Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																			
4.2 Tujuan : Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis																			
4.2.1 Terciptanya kohesi sosial masyarakat																			
4.2.1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	a	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	NA	16,67	23.660	33,33	23.660	50,00	24.289	66,67	25.277	83,33	26.442	100,00	27.602	100,00	150.930	Badan Kesbangpol
4.2.1.3	Program Pengelolaan Pendidikan	a	Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,33	93.834.561	12,5	47.002.495	12,67	93.699.402	12,84	95.950.255	13,01	100.177.112	13,18	102.698.105	13,18	533.361.929	Dinas Pendidikan
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,7	6,71		6,72		6,73		6,74		6,75		6,76		6,76		
4.2.2 Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat																			
4.2.2.1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	a	Persentase Penegakan Perda	100	100	307.428	100	268.991	100	323.268	100	334.750	100	349.767	100	357.664	100	1.941.870	Satpol PP dan Damkar
4.2.2.2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a	Persentase Ormas yang aktif	37,97	44,30	37.344	50,63	37.344	56,96	38.336,90	63,29	39.896,84	69,62	41.734,69	75,95	43.565,14	75,95	238.222	Badan Kesbangpol
4.2.2.3	Program Penanggulangan Bencana	a	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	NA	0,5	1.271.673	0,5	1.208.916	0,5	1.324.670	0,5	1.378.505	0,5	1.445.067	0,5	1.506.104	0,5	8.134.936	BPBD
4.2.2.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	a	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	NA	60	151.022	70	87.118	75	158.803	80	164.444	90	171.821	100	175.700	100	908.909	Satpol PP dan Damkar
4.2.2.5	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	a	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100	100	387.658	100	478.840	100	500.263	100	513.477	100	531.149	100	545.190	100	2.956.577	Dinas TPH
			Persentase AUTP	35,71	46,43		57,14		67,86		78,57		89,29		100				
			Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman	NA	0,16		0,14		0,12		0,1		0,08		0,06				
			Persentase penurunan tingkat kebakaran perkebunan	NA	2		2		1,8		1,8		1,6		1,6				

B

A

B

VII

Kerangka
Pendanaan
Pembangunan
dan Program
Perangkat
Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur anggaran lima tahun yang akan datang yaitu Tahun 2016-2021 antara lain proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif.

Proyeksi pendapatan dan belanja mengikat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data *outlier* atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja wajib mengikat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi APBD tahun sebelumnya sebagaimana telah dianalisis sebelumnya dan dirumuskan kembali dengan pendekatan

kebijakan keuangan daerah dimasa datang. Hal ini dilakukan agar proyeksi tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target yang mampu dicapai.

Pendapatan dalam APBD Tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 918.394.498.847,00 dan Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 1.165.290.066.203,80 atau meningkat rata-rata sebesar 5,38 persen per tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan meningkat dari Rp 51.946.378.762,00 Tahun 2021 menjadi Rp 63.200.712.488,33 Tahun 2026 atau PAD diperkirakan meningkat rata-rata 4,01 persen pertahun, Pendapatan Transfer diperkirakan meningkat dari Rp 838.169.520.085,00 Tahun 2021 menjadi Rp 1.070.094.713.426,42 Tahun 2026 atau diperkirakan meningkat rata-rata 5,13 persen pertahun, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan meningkat dari Rp 28.278.600.000,00 Tahun 2021 menjadi Rp 31.994.640.289,05 Tahun 2026 atau diperkirakan meningkat rata-rata 2,5 persen pertahun.

Tabel VII.1.

Proyeksi Pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDAPATAN DAERAH	918.394.498.847,00	1.052.788.806.477,47	1.078.072.516.436,33	1.106.381.267.473,14	1.135.446.873.210,15	1.165.290.066.203,80
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.946.378.762,00	54.924.233.911,09	56.185.203.267,53	58.432.611.398,23	60.769.915.854,16	63.200.712.488,33
1.1	Pajak Daerah	18.922.000.000,00	20.578.880.000,00	20.466.035.200,00	21.284.676.608,00	22.136.063.672,32	23.021.506.219,21
1.2	Retribusi Daerah	2.232.055.500,00	2.220.265.840,00	2.309.076.473,60	2.401.439.532,54	2.497.497.113,85	2.597.396.998,40
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.794.487.723,00	7.066.267.230,53	7.348.917.919,75	7.642.874.636,54	7.948.589.622,00	8.266.533.206,88
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.997.835.539,00	25.058.820.840,56	26.061.173.674,18	27.103.620.621,15	28.187.765.446,00	29.315.276.063,84
2	PENDAPATAN TRANFER	838.169.520.085,00	968.879.007.566,39	992.177.109.043,80	1.017.495.696.846,79	1.043.462.674.147,16	1.070.094.713.426,42
2.1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	795.108.844.753,00	921.741.815.350,00	946.936.487.022,00	971.124.059.274,45	995.931.745.635,51	1.021.375.511.701,98
2.2	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	43.060.675.332,00	47.137.192.216,39	45.240.622.021,80	46.371.637.572,34	47.530.928.511,65	48.719.201.724,44
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	28.278.600.000,00	28.985.565.000,00	29.710.204.125,00	30.452.959.228,13	31.214.283.208,83	31.994.640.289,05
3.1	Pendapatan Hibah	28.278.600.000,00	28.985.565.000,00	29.710.204.125,00	30.452.959.228,13	31.214.283.208,83	31.994.640.289,05
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3.3	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	918.394.498.847,00	1.052.788.806.477,47	1.078.072.516.436,33	1.106.381.267.473,14	1.135.446.873.210,15	1.165.290.066.203,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur , 2021

Proyeksi belanja wajib mengikat pada RPJMD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan dalam utamanya Tahun 2022-2026.

Adapun proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,23 persen, jika pada Tahun 2021 sebesar Rp. 614.113.590.577 menjadi Rp. 680.444.488.728 pada Tahun 2026. Pertumbuhan tertinggi pada pos belanja bagi hasil sebesar 3,23 persen, pos belanja bantuan keuangan (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) sebesar 3,08 persen dan pos belanja pegawai sebesar 2,41 persen.

Tabel VII.2.

Proyeksi Anggaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026 (Rp)

NO	BELANJA	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BELANJA OPERASI	447.457.544.130	464.007.285.623	475.545.712.244	487.373.215.220	499.496.690.726	511.923.566.569
1	Belanja Pegawai	410.054.568.930	427.025.137.923	437.700.409.731	448.642.919.975	459.858.992.974	471.355.467.798
2	Belanja Hibah	36.671.575.200	36.247.607.700	37.107.308.513	37.988.501.845	38.891.725.011	39.817.528.757
3	Belanja Bantuan Sosial	731.400.000	734.540.000	737.994.000	741.793.400	745.972.740	750.570.014
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.081.712.772	3.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	Belanja Tidak Terduga	10.081.712.772	3.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
III	BELANJA TRANSFER	143.574.333.675	151.194.783.681	155.004.217.119	158.910.068.948	162.914.796.929	167.020.922.159
1	Belanja Bagi Hasil	1.967.537.000	1.970.923.126	2.049.760.051	2.131.750.453	2.217.020.471	2.305.701.290
2	Belanja Bantuan Keuangan	141.606.796.675	149.223.860.555	152.954.457.069	156.778.318.496	160.697.776.458	164.715.220.869
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	1.3000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas		614.113.590.577	611.202.069.304	625.549.929.363	640.783.284.168	663.911.487.654	680.444.488.728

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VII.3.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 (Rp)

Uraian	TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	4	5
Pendapatan	918.394.498.847	1.052.788.806.477	1.078.072.516.436	1.106.381.267.473	1.135.446.873.210	1.165.290.066.204
Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Dikurangi:						
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	614.113.590.577	611.202.069.304	625.549.929.363	640.783.284.168	663.911.487.654	680.444.488.728
Kapasitas riil kemampuan keuangan	343.280.908.270	480.586.737.174	491.522.587.073	504.597.983.305	510.535.385.556	523.845.577.476

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel VII.4. Untuk mengaplikasikan program prioritas, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tanggungjawab OPD tersebut. Adapun program prioritas yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan tersebut beserta target pendanaan pembangunan dimuat pada Tabel VII.5 berikut ini:

Tabel VII.4.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	343.280.908.270	480.586.737.174	491.522.587.073	504.597.983.305	510.535.385.556	523.845.577.476
B	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	614.113.590.577	611.202.069.304	625.549.929.363	640.783.284.168	663.911.487.654	680.444.488.728
I	BELANJA OPERASI	447.457.544.130	457.007.285.623	468.545.712.244	480.373.215.220	499.496.690.726	511.923.566.569
1	Belanja Pegawai	410.054.568.930	420.025.137.923	430.700.409.731	441.642.919.975	459.858.992.974	471.355.467.798
2	Belanja Hibah	36.671.575.200	36.247.607.700	37.107.308.513	37.988.501.845	38.891.725.011	39.817.528.757
3	Belanja Bantuan Sosial	731.400.000	734.540.000	737.994.000	741.793.400	745.972.740	750.570.014
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.081.712.772	3.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	Belanja Tidak Terduga	10.081.712.772	3.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
III	BELANJA TRANSFER	143.574.333.675	151.194.783.681	155.004.217.119	158.910.068.948	162.914.796.929	167.020.922.159
1	Belanja Bagi Hasil	1.967.537.000	1.970.923.126	2.049.760.051	2.131.750.453	2.217.020.471	2.305.701.290
2	Belanja Bantuan Keuangan	141.606.796.675	149.223.860.555	152.954.457.069	156.778.318.496	160.697.776.458	164.715.220.869
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel VII.5.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Pada Akhir Periode (2026)	
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		Target	(Rp. 000)
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Pendidikan																		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	82,25	82,5	211.097.775	83	213.648.192	83,3	210.793.711	84	215.857.411	84,5	225.366.487	85	231.037.916	85	1.307.801.493	Dinas Pendidikan	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,33	93.834.561	12,5	47.002.495	12,67	93.699.402	12,84	95.950.255	13,01	100.177.112	13,18	102.698.105	13,18	533.361.929	Dinas Pendidikan	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,7	6,71		6,72		6,73		6,74		6,75		6,76		6,76			
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	78,60	78,85	394.776	79,10	890.851	79,36	394.207	79,61	403.677	79,86	421.460	80,11	432.066	80,11	2.937.038	Dinas Pendidikan	
	Persentase Guru yang besertifikat pendidik	81,06	81,57		82,53		83,49		84,45		85,41		86,37		86,37			
Kesehatan																		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	89,23	89,25	77.364.287	89,3	77.206.809	89,35	78.568.273	89,40	79.060.959	89,45	82.715.451	89,50	84.081.660	89,60	478.997.439	Dinas Kesehatan	
	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78		81		84		88,31		88,6		89		89			
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	6	6	61.694.697	6	38.106.190	5	58.394.942	5	60.749.525	4	63.060.473	4	64.690.677	4	346.696.504	Dinas Kesehatan	
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	19/ 1.000 KH	19/ 1.000 KH		18,5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		17/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH					
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20/ 1.000 KH	20/ 1.000 KH		19,5/ 1.000 KH		19/ 1.000 KH		18,5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH					
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	18/ 1.000 KH	18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		17/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		16/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH					
	Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,74	75		80		85		90		95		100					
	Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan RSUD	86,06	87		88		89		90		91		92					
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	NA	62,5	870.070	70	706.051	77,5	691.014	85	746.557	92,5	782.547	100	798.250	100	4.594.490	Dinas Kesehatan	
	Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4 PKM	8 PKM		10 PKM		12 PKM		14 PKM		17 PKM							
	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	66,22	66,22		67,57		70,27		72,97		75,68		75,68					
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di Puskesmas	100	100	547.584	100	495.944	100	549.524	100	560.993	100	581.896	100	596.746	100	3.332.686	Dinas Kesehatan	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	49,40	49,98	524.248	50,55	490.997	51,13	526.106	51,70	537.086	52,28	557.098	52,85	571.315	52,7	3.206.850	Dinas Kesehatan	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Pada Akhir Periode (2026)	
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		Target	(Rp. 000)
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	13.319.745	81	13.393.026	84	11.332.609	88,3	11.479.082	90	11.752.544	93	11.883.141	93	73.160.148	Dinas PUPR	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Luas Lahan irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	39,99	50,12	35.778.924	53,00	20.649.924	55,00	30.420.215	57,00	30.814.622	59,00	31.549.563	61,00	31.901.463	61,00	181.114.711	Dinas PUPR	
	Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam kondisi baik	NA	55,26		58,00		61,00		64,00		67,00		70,00		70,00			
	Persentase sarana umum masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air Bersih	89,37	90		91		92		93		94		95		95			
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih melalui Jaringan Perpipaan	23,58	26,71	9.686.585	32,27	5.724.825	34,55	7.664.981	36,90	7.797.848	39,43	8.007.177	42,13	8.132.279	42,13	47.013.695	Dinas Perkim	
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase masyarakat yang terlayani	NA	-	-	4,30	900.000	4,30	900.000	4,30	900.000	4,30	900.000	4,30	900.000	4,30	4.500.000	Dinas Perkim	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	74,61	73,08	8.384.736	73,29	1.267.549	73,76	1.567.303	74,50	1.594.471	75,25	1.637.274	75,53	1.662.854	75,53	16.114.187	Dinas Perkim	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drenasi dalam kondisi baik	NA	60	595.936	60	410.000	65	4.639.090	70	4.735.107	75	4.886.378	80	4.976.783	80	20.243.293	Dinas Perkim	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04	73,12	137.748.174	75,27	99.856.482	77,42	115.991.699	79,57	117.561.598	81,72	120.411.527	83,87	121.825.154	83,87	713.394.635	Dinas PUPR	
	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik	65,58	66,75		67,92		69,08		70,25		71,42		72,58		72,58			
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Angkatan Kerja Terampil Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	85,0	86,0	371.579	87,1	371.563	88,2	316.144	89,3	320.230	90,3	327.859	91,4	331.502	91,4	2.038.879	Dinas PUPR	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	1.790.768	100	1.800.761	100	1.523.609	100	1.543.301	100	1.580.067	100	1.597.625	100	9.836.130	Dinas PUPR	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Perumahan dan Kawasan Pemukiman																		
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	12.867.246	81	9.883.112	84	10.181.833	86	10.358.329	87,5	10.636.392	88,2	10.802.573	93	64.729.485	Dinas Perkim	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kepuasan hunian di rusunawa	NA	80,00	-	80,00	331.515	80,00	100.701	85,00	122.437	85,00	125.724	90,00	127.688	90,00	808.065	Dinas Perkim	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pengurangan Luas permukiman kumuh	123,88	119,88	304.185	115,88	975.000	112,88	140.000	109,88	122.437	106,88	125.724	103,88	127.688	103,88	1.795.034	Dinas Perkim	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase LPIJU terpasang	39,57	39,57	9.095.671	51,64	5.027.161	63,71	7.197.391	75,79	7.322.153	87,86	7.518.713	100,00	7.636.183	100,00	43.797.273	Dinas Perkim	
	Persentase Taman Kota terbangun	72,73	72,73		77,92		83,12		88,31		93,51		100,00					
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	10.030.953	81	10.294.664	84	10.505.708	87	10.901.652	90	11.406.562	93	11.759.555	93	64.899.095	Satpol PP dan Damkar, BPBD	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100	100	307.428	100	268.991	100	323.268	100	334.750	100	349.767	100	357.664	100	1.941.870	Satpol PP dan Damkar	
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	NA	60	151.022	70	87.118	75	158.803	80	164.444	90	171.821	100	175.700	100	908.909	Satpol PP dan Damkar	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	NA	0,5	1.271.673	0,5	1.208.916	0,5	1.324.670	0,5	1.378.505	0,5	1.445.067	0,5	1.506.104	0,5	8.134.936	BPBD	
Sosial																		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	3.934.694	81	4.197.164	84	4.225.380	88,31	4.390.231	90	4.585.357	93	4.773.558	93	26.106.385	Dinas Sosial PPPA	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sosial	17,36	17,36	14.039	34,72	14.094	52,08	15.076	69,44	15.664	86,81	16.360	100,00	17.032	100,00	92.265	Dinas Sosial PPPA	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7,00	7,00	222.094	14,00	208.812	28,00	238.501	35,00	247.806	42,00	258.820	49,00	269.443	49,00	1.445.477	Dinas Sosial PPPA	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Updating DTKS	100	100,00	404.360	100,00	403.220	100,00	434.233	100,00	451.174	100,00	471.227	100,00	490.568	100,00	2.654.782	Dinas Sosial PPPA	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	100	100	57.895	100	74.929	100	62.172	100	64.598	100	67.469	100	70.238	100	397.301	Dinas Sosial PPPA	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Tenaga Kerja																		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.367.205	81	4.466.489	84	4.375.048	88,31	4.560.394	90	4.790.402	93	5.001.553	93	27.561.091	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (%)	NA	69,94	302.275	75,66	217.837	81,39	302.818	87,12	315.647	92,84	331.566	100,00	346.181	100,00	1.816.324	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	NA	40	49.950	45	49.496	50	50.040	55	52.160	60	54.790	65	57.205	65	313.641	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	NA	70	102.680	73	99.347	76	102.864	79	107.222	82	112.630	85	117.594	85	642.337	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,76	88	71.044	88,5	68.499	89	76.292	89,5	79.269	90	82.792	90,5	86.190	90,5	464.087	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	100	100	635.000	100	635.006	100	681.912	100	708.517	100	740.007	100	770.380	100	4.170.823	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak	NA	Pratama	79.602	Pratama	79.386	Pratama	85.483	Madya	88.818	Madya	92.766	Madya	96.573	Madya	522.629	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100	100	466.686	100	477.131	100	501.163	100	520.716	100	543.860	100	566.182	100	3.075.738	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
Ketahanan Pangan																		
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	77,3	78	3.552.633	82	3.842.757	86	3.634.130	88,31	3.798.775	89	3.998.574	90	4.187.532	93	23.014.400	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEADALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan	57,14	64,29	609.771	71,43	159.771	78,57	623.759	85,71	652.018	92,86	686.312	100,00	718.744	100,00	3.450.374	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	93,1	90,5	595.128	91,6	695.035	92	608.781	92,5	636.361	93,1	669.831	93,2	701.485	93,2	701.485	Dinas Ketahanan Pangan	
	Konsumsi Energi	2119	2125		2130		2135		2140		2145		2150		2150			

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Ketahanan Pangan																		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan,	92,47	93,55	48.500	94,62	56.500	95,70	49.612	96,77	51.860	97,85	54.588	100,00	57.167	100,00	318.227	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	4.029	100	31.060	100	4.122	100	4.309	100	4.535	100	4.750	100	52.804	Dinas Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup																		
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	81	5.181.681	82	5.351.771	84	5.209.003	85	5.401.325	86	5.655.697	87	5.870.276	87	32.669.751	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	NA	-	-	-	50	150.000	50	150.000	50	150.000	50	150.000	50	150.000	600.000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	66,03	206.785	66,53	181.737	67,04	211.199	67,54	218.778	68,04	228.803	68,54	237.259	68,54	1.284.561	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis (Pertek) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	100	10.010	100	10.290	100	10.224	100	10.591	100	11.076	100	11.485	100	63.675	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	NA	100	92.855	100	92.830	100	94.837	100	98.240	100	102.742	100	106.539	100	588.043	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat	NA	0	65.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.332	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	43	38	588.793	39	533.567	40	601.360	41	622.942	42	651.486	43	675.565	43	3.673.713	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																			
Kependudukan dan Catatan Sipil																			
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.361.403	81	4.483.430	84	4.624.711	88,31	4.828.355	90	5.065.597	93	5.298.641	93	28.662.137	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	100	100	326.021	100	337.298	100	345.703	100	360.926	100	378.660	100	396.080	100	2.144.688	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100	100		100		100		100		100		100		100			100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93	20,93		26,2		31,4		42,44		52,55		63,66		63,66				
	Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang	100	100		100		100		100		100		100		100			100	100
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen	100	100		100		100		100		100		100		100			100	100
Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	100	128.079	100	135.980	100	136.420	100	141.791	100	148.758	100	155.602	100	846.631	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100	100		100		100		100		100		100		100				
	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	0	100		100		100		100		100		100		100			100	
	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,83	99,83		99,83		99,84		99,94		99,96		99,98		99,98			99,98	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100	100	557.843	100	570.173	100	591.521	100	617.568	100	647.912	100	677.719	100	3.662.736	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	NA	100	5.997	100	5.850	100	6.359	100	6.639	100	6.965	100	7.285	100	39.093	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	11,63	25,58		39,53		53,49		67,44		81,40		93,02		93,02				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	3.052.680	81	3.198.873	84	3.260.456	87	3.398.606	90	3.561.905	93	3.722.900	93	20.195.418	Dinas PMD		
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa yang mengikuti bintek pengelolaan keuangan desa	0	80	430.015	85	471.573	90	459.283	95	478.744	100	501.747	100	524.425	100	2.865.787	Dinas PMD		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Bumdes yang aktif	67,12	68,49	1.165.948	69,86	1.160.392	71,23	1.245.306	72,60	1.298.071	73,97	1.360.442	75,34	1.421.933	75,34	7.652.092	Dinas PMD		
	Persentase PKK Aktif	NA	50		53		56		59		62		62						
	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek	NA	64,29		71,43		78,6		85,71		92,86		100		100				

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.042.980	81	4.414.773	84	4.002.793	88,31	4.153.683	90	4.324.578	93	4.493.727	93	25.432.532	Dinas PPKB	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	LPP	1,1	0,9	140.995	0,88	15.712	0,86	139.594	0,84	144.856	0,82	150.815	0,80	156.714	0,8	748.686	Dinas PPKB	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	2,75	2,74	4.166.725	2,72	2.499.756	2,7	4.125.308	2,68	4.280.816	2,66	4.456.942	2,64	4.631.268	2,64	24.160.815	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	54,48	58,00		60,00		60,42		60,8		61,00		61,35		61,35			
	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	14,67	14		13,65		13,00		12,00		11,45		11,10		11,10			
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	43	37		35		34		32,00		30,00		28,00		28,00			
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	64,43	658.650	64,5	622.390	64,65	652.103	65	676.685	65	704.526	65	732.082	64,8	4.046.435	Dinas PPKB	
Perhubungan																		
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	5.114.116	81	5.058.499	84	4.475.068	88	4.657.553	90	4.885.918	93	5.092.890	93	29.284.043	Dinas Perhubungan	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalulintas	NA	100	907.640	100	282.700	100	794.223	100	826.610	100	867.140	100	903.873	100	4.582.187	Dinas Perhubungan	
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	0	20	350.310	20	106.780	40	306.536	40	319.036	40	334.679	40	348.856	40	1.766.197	Dinas Perhubungan	
Komunikasi dan Informasi																		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	3.144.234	81	3.279.929	84	3.223.684	88,3	3.357.984	90	3.529.732	93	3.682.421	93	20.217.984	Diskominfo	
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	206.059	81,40	794.001	88,37	811.266	90,70	820.067	95,35	831.323	100,00	841.330	100,00	4.304.046	Diskominfo	
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	1.532.789	81,82	1.419.607	90,91	1.571.520	95,45	1.636.990	100,00	1.720.716	100,00	1.795.151	100,00	9.676.774	Diskominfo	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Statistik																		
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang Di Informasikan	50	50	80.766	56,25	84.804	62,5	82.806	68,75	86.256	75	90.668	81,25	94.590	81,25	519.889	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Persandian																		
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	6,98	23,26	7.625	27,91	8.580	32,56	7.818	37,21	8.143	41,86	8.560	46,51	8.930	46,51	49.656	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																		
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	2.991.135	81	3.170.793	84	3.268.815	87	3.448.204	90	3.658.630	93	3.868.301	93	20.405.878	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP Aktif	6	8	16.105	10	16.555	12	17.601	14	18.567	16	19.700	18	20.829	18	109.356	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10	25	41.079	30	41.079	35	44.893	40	47.356	45	50.246	50	53.126	100	277.779	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	48,00	56,00	76.034	64,00	74.074	72,00	83.093	80,00	87.653	88,00	93.002	96,00	98.332	96,00	512.189	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	43	51	107.957	59	107.962	67	117.979	75	124.454	83	132.049	91	139.616	91	730.018	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi mandiri	NA	0,00	31.668	2,08	31.668	4,17	34.608	6,25	36.507	8,33	38.735	10,42	40.955	10,42	214.140	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	8,07	14,15	157.848	20,24	174.374	16,59	172.501	19,02	181.968	21,45	193.073	23,89	204.137	23,89	1.083.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Aktif	63,27	64,04	65.647	64,81	59.121	65,58	71.741	66,35	75.678	67,12	80.296	67,89	84.898	67,89	437.381	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Penanaman Modal																		
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	88,31	3.204.374	88,75	3.639.239	88,9	3.758.944	89,05	4.030.282	89,25	4.104.002	89,31	4.305.000	89,31	23.041.841	DPMPSTP	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	NA	16,67	99.685	33,33	189.470	50,00	176.161	66,67	140.000	83,33	150.000	100,00	170.000	100,00	925.316	DPMPSTP	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Invstasi Yang Dilaksanakan	NA	-	-	-	25,00	50.000	50,00	50.000	75,00	100.000	100,00	120.000	100,00	320.000	DPMPSTP		

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal	88,28	88,31	178.620	88,75	191.975	88,9	210.000	89,05	195.050	89,25	220.000	89,31	220.000	89,31	1.215.644	DPMPTSP
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	134,36	148,7	392.594	163,5	449.200	188,1	472.791	244,5	472.791	317,9	510.000	413,2	522.536	1.475,9	2.819.913	DPMPTSP
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang Valid	100	100	42.354	100	113.023	100	50.000	100	50.000	100	120.000	100	120.000	100	495.377	DPMPTSP
Pemuda Dan Olahraga																		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda aktif	46,67	46,67	1.156.646	46,67	1.156.646	53,33	1.032.593	53,33	1.060.103	60,00	1.087.208	66,67	1.110.987	66,67	6.604.184	Dinas Parbudpora
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat PORPROV Cakupan Pembinaan Olahraga	NA	0	6.542.077	3	3.822.797	0	5.840.425	3	5.996.023	0	6.149.332	2	6.283.826	2	34.634.480	Dinas Parbudpora
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100	100	450.000	100	450.000	100	401.737	100	412.439	100	422.985	100	432.236	100	2.569.397	Dinas Parbudpora
Kebudayaan																		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40,00	40,00	429.142	50,00	429.822	60,00	383.116	70,00	393.323	80,00	403.379	90,00	412.202	90,00	2.450.983	Dinas Parbudpora
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang	27,27	36,36	1.154.682	45,45	854.683	54,55	1.030.840	63,64	1.058.303	72,73	1.085.362	81,82	1.109.101	81,82	6.292.971	Dinas Parbudpora
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0	3,70	357.972	7,41	217.692	25,93	319.579	40,74	328.093	55,56	336.482	70,37	343.841	70,37	1.903.658	Dinas Parbudpora
Perpustakaan																		
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	88,31	88,4	3.474.715	88,5	3.300.471	88,6	3.441.882	88,7	3.629.853	88,8	3.850.417	89,0	4.070.027	89,0	21.767.365	Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) Tingkat Gemar Membaca	NA	19,0	276.918	21,5	290.097	25,0	292.302	28,0	308.265	30,0	326.997	35,0	345.647	35,0	1.840.227	Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	53,9	18.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.172	Dinas Perpustakaan Kearsipan
Kearsipan																		
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0	2,33	105.707	4,65	112.429	6,98	73.883	9,30	63.027	11,63	86.855	13,95	87.416	13,95	529.317	Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelesaian program perlindungan dan penyelamatan arsip	-	-	-	-	-	100,00	30.825	100,00	47.400	100,00	30.282	100,00	36.402	100,00	144.909	Dinas Perpustakaan Kearsipan

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
Pertanahan																		
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian sengketa Lahan	27,78	27,78	-	38,89	10.000	50,00	10.000	61,11	10.000	72,22	10.000	83,33	10.000	83,33	50.000	Sekretariat Daerah	
Urusan Pemerintahan Pilihan																		
Kelautan dan Perikanan																		
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.873.615	81	5.132.162	84	4.768.759	87	4.947.987	90	5.165.407	93	5.366.155	93	30.254.086	Dinas Perikanan	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	83,86	85,06	1.610.844	86,06	183.920	87,36	1.576.187	88,36	1.635.426	89,56	1.707.288	90,76	1.773.640	90,76	8.487.304	Dinas Perikanan	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	57,16	59,16	272.359	64,96	183.918	70,76	266.499	73,76	276.515	78,76	288.666	81,76	299.884	81,76	1.587.842	Dinas Perikanan	
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	18,18	18,18	221.812	36,36	183.922	54,55	217.039	72,73	225.197	90,91	235.092	100	244.229	100	1.327.290	Dinas Perikanan	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	45,08	50,00	570.159	60,00	183.919	70,00	557.892	80,00	578.860	90,00	604.295	100,00	627.781	100,00	3.122.905	Dinas Perikanan	
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	37,55	38		38,5		39		39,5		40		40,5					
Pariwisata																		
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.897.980	81	5.131.180	84	4.372.661	88,31	4.489.155	90	4.603.936	93	4.704.630	93	28.199.543	Dinas Parbudpora	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata aktif	20,00	20,00	482.102	26,67	482.102	33,33	430.396	40,00	441.862	46,67	453.160	53,33	463.071	53,33	2.752.692	Dinas Parbudpora	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan	64,22	86,67	495.477	88,33	495.477	89,33	442.336	90,00	454.121	90,67	465.732	91,33	475.918	91,33	2.829.060	Dinas Parbudpora	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf	20	20	93.858	40	93.698	60	83.792	80	86.024	100	88.223	100	90.153	100	535.748	Dinas Parbudpora	
Pertanian																		
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	16.613.546	81	17.695.100	84	18.737.221	88,31	19.203.348	90	19.832.352	93	20.320.873	93	112.402.441	Dinas TPH	
	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78		85		87		88,3		90		90					
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	54,55	2.538.302	63,64	6.088.521	72,73	6.538.124	81,82	6.690.448	90,91	6.898.128	100,00	7.055.188	100,00	35.808.710	Dinas TPH	
	Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		100,00					
	Persentase Inseminasi Buatan	20,17	33,47		46,78		60,08		73,39		86,69		100,00					
	Persentase produksi HPT	33,33	41,67		50		58,33		66,67		75		83,33					

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Pada Akhir Periode (2026)	
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		Target	(Rp. 000)
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Pilihan																		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	16,67	2.519.837	33,33	2.631.317	50,00	2.808.599	66,67	2.875.938	83,33	2.967.328	100	3.037.269	100	16.840.289	Dinas TPH	
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	45,45	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91		100,00		100,00			
	Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100		100			
	Persentase Ketersediaan Dam Parit	40,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100			
	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67		33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00			
	Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100			
	Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100			
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100	100	387.658	100	478.840	100	500.263	100	513.477	100	531.149	100	545.190	100	2.956.577	Dinas TPH	
	Persentase AUTP	35,71	46,43		57,14		67,86		78,57		89,29		100		100			
	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman	NA	0,16		0,14		0,12		0,1		0,08		0,06		0,06			
	Persentase penurunan tingkat kebakaran perkebunan	NA	2		2		1,8		1,8		1,6		1,6		1,6			
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok tani	32,71	43,93	1.011.979	55,14	1.958.684	66,36	2.107.438	77,57	2.156.076	88,79	2.222.491	100,00	2.272.519	100,00	11.729.187	Dinas TPH	
	Cakupan Bina Kelompok tani	0,29	0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		1,76		Dinas Bunnak	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian ternak (%)	0,04	0,15	313.680	0,13	412.757	0,12	419.079	0,10	431.545	0,09	447.945	0,08	461.520	0,08	2.486.526	Dinas Bunnak	
	Persentase Sampel Pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan	18,70	40,65		48,78		56,91		65,04		73,17		81,30		81,30			
Perdagangan																		
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pasar sehat	0	0	386.195	10	1.004.241	20	1.361.648	30	1.405.284	40	1.459.679	50	1.507.557	50	7.124.605	Dinas Perindag	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar	NA	100	159.224	100	180.634	100	244.921	100	252.770	100	262.554	100	271.166	100	1.371.271	Dinas Perindag	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang	100,00	100,00	133.378	100,00	249.554	100,00	338.370	100,00	349.213	100,00	362.730	100,00	374.628	100,00	1.807.874	Dinas Perindag	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri	100	100	256.324	100	317.482	100	430.473	100	444.268	100	461.465	100	476.601	100	2.386.613	Dinas Perindag	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Urusan Pemerintahan Pilihan																		
Perindustrian																		
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	3.710.559	81	4.380.593	84	5.939.636	88,31	6.129.982	90	6.367.257	93	6.576.107	93	33.104.134	Dinas Perindag	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Sentra IKM	44,44	44,44	1.812.604	55,56	814.608	66,67	1.104.525	77,78	1.139.922	88,89	1.184.045	100,00	1.222.882	100,00	7.278.586	Dinas Perindag	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan IKM Formal	20,62	20,62	82.280	27,13	118.650	34,88	160.877	42,64	166.032	46,51	172.459	54,26	178.116	54,26	878.413	Dinas Perindag	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan IKM Produktif	35,83	40,00	-	45,83	202.576	55,56	274.672	69,44	283.474	83,33	294.447	100,00	304.105	100,00	1.359.274	Dinas Perindag	
Transmigrasi																		
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase EksTransmigran yang dibina/dilatih	100	70	458.665	74,0	328.558	78,0	459.488	82,0	478.954	86,0	503.111	90,0	525.287	90,0	2.754.064	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
Perencanaan																		
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	4.528.112	81	4.872.461	84	4.948.157	88,31	5.106.618	90	5.317.426	93	5.491.317	93	30.264.090	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan pembangunan	100	100	1.014.827	100	1.114.825	100	1.132.145	100	1.168.401	100	1.216.634	100	1.256.420	100	6.903.252	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	102,78	85	-	88	-	91	-	94	-	97	-	100	-	100	-		
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	84,53	85	1.703.049	88	1.789.999	91	1.817.808	94	1.876.021	97	1.953.466	100	2.017.349	100	11.157.692	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Keuangan																		
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	16.001.344	81	16.150.355	84	16.349.435	87	16.807.792	90	17.238.630	93	17.671.317	93	100.218.873	Badan Keuangan Daerah	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP	171.597.155	WTP	153.426.052	WTP	155.317.292	WTP	159.671.613	WTP	163.764.512	WTP	167.874.978	WTP	971.651.602	Badan Keuangan Daerah	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	89,49	90	942.000	92	338.190	94	342.359	96	351.957	98	360.979	100	370.039	100	2.705.523		
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD	-7,9	2	916.951	2	842.406	2	852.790	2	876.698	2	899.171	2	921.740	2	5.309.757		

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	
BELANJA OPERASI																		
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
Kepegawaian																		
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	6.643.265	81	8.849.408	84	7.215.111	88,31	7.744.040	89	8.019.011	90	8.262.627	90	46.733.463	BKPSDMD	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	NA	54,431%	4.266.314	56,995%	3.261.235	59,607%	4.633.554	61,678%	0	63,720%	5.149.820	63,720%	5.306.270	63,720%	22.617.193	BKPSDMD	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	NA	70		72		74		76		78		80		80			
Penelitian dan Pengembangan																		
5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	65	3.235.396	70	3.450.809	72	3.649.604	75	3.837.420	78	4.057.628	79	4.275.909	79	22.506.767	Badan Litbangda	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah	NA	100	526.788	100	649.958	100	594.229	100	624.809	100	660.663	100	696.204	100	3.752.650	Badan Litbangda	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																		
Pengawasan																		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	6.213.380	81	6.208.803	84	6.852.917	88,31	7.068.041	90	7.351.064	93	7.586.371	93	41.280.576	Inspektorat	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kepatuhan pengembalian temuan BPK	26,48	40	2.715.891	45	3.595.739	50	2.995.435	55	3.089.466	60	3.213.176	70	3.316.030	70	18.925.737	Inspektorat	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	2	2	299.277	2	202.033	2	330.081	3	340.443	3	354.075	3	365.409	3	1.891.316	Inspektorat	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																		
Sekretariat Daerah																		
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	88,3	27.996.352	89	22.742.978	89,5	23.036.124	90	23.395.489	91	24.015.744	92	24.455.951	93	145.642.637	Sekretariat Daerah	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra	NA	100	4.908.135	100	4.312.524	100	4.366.807	100	4.433.352	100	4.548.207	100	4.629.722	100	27.198.747	Sekretariat Daerah	
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	NA	100	2.329.129	100	1.674.997	100	1.696.032	100	1.721.819	100	1.766.325	100	1.797.913	100	10.986.215	Sekretariat Daerah	
Sekretariat DPRD																		
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	78	32.420.578	81	28.657.219	84	27.504.392	88,31	28.114.258	90	28.900.122	93	29.523.352	93	175.119.920	Sekretariat DPRD	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	100	100	7.210.248	100	4.510.858	100	6.116.901	100	6.252.534	100	6.427.308	100	6.565.912	100	37.083.761	Sekretariat DPRD	

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggungjawab sebelum Perubahan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)		
				Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target		(Rp. 000)
BELANJA OPERASI																		
Unsur Kewilayahan																		
Kewilayahan Kecamatan																		
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	32.829.773	81	35.322.234	84	35.817.207	87	37.516.633	90	39.608.121	93	41.471.988	93	222.565.956	11 Kecamatan	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	1.100.750	100	1.121.793	100	1.377.596	100	1.439.406	100	1.514.468	100	1.585.729	100	8.139.742	11 Kecamatan	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan	NA	100	13.873.663	100	13.880.485	100	14.412.914	100	14.976.201	100	15.648.426	100	16.379.744	100	89.171.432	11 Kecamatan	
	Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan	NA	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	-		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan	100	100	310.910	100	384.359	100	477.529	100	498.169	100	537.845	100	560.869	100	2.769.681	11 Kecamatan	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	100	0	100	77.445	100	79.131	100	81.976	100	85.421	100	88.744	100	412.718	8 Kecamatan	
Unsur Pemerintahan Umum																		
Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	2.977.747	81	3.062.233	84	3.157.026	88,31	3.285.486	89	3.436.832	90	3.587.569	91	19.506.893	Badan Kesbangpol	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	NA	16,67	23.660	33,33	91.956	50,00	101.439	66,67	128.119	83,33	147.337	100,00	169.437	100,00	661.947	Badan Kesbangpol	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang ikut pemilu	80,25	80,25	859.175	80,25	840.346	80,25	844.346	81,16	850.777	81,16	858.172	81,16	869.942	81,16	5.122.757	Badan Kesbangpol	
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	37,97	44,30	37.344	50,63	37.344	56,96	38.337	63,29	39.897	69,62	41.735	75,95	43.565	75,95	238.222	Badan Kesbangpol	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan penyakit masyarakat	58,33	58,5	67.281	58,75	117.022	59	125.022	59,25	143.775	59,5	170.340	59,75	195.891	59,75	819.332	Badan Kesbangpol	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang difasilitasi	100	100	745.744	100	675.337	100	679.337	100	686.932	100	705.891	100	721.266	100	4.214.506	Badan Kesbangpol	

B

A

B

VIII

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD.

Indikator kinerja program adalah gambaran berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama memperlihatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi deskripsi tentang prestasi organisasi di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi syarat, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel VIII.1.

Tabel VIII.1.
Indikator Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026

Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	2,68	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00	6,00
Indeks Kesehatan	0,687	0,688	0,690	0,691	0,692	0,693	0,695	0,695
Indeks Pendidikan	9,43	9,52	9,61	9,70	9,79	9,88	9,97	9,97
Rasio Kesempatan Kerja	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61	71,61
Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79	11,79
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	74,18	74,18	75,28	76,38	77,49	78,59	79,69	79,69
Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	C	CC	CC	B	B	B	B
Indeks Rasa Aman	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54

Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 bertujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Indeks Gini. Indikator kinerja daerah tersebut di kategorikan atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel VIII.2 dan VIII.3 berikut.

Tabel VIII.2.

Indikator Kinerja Makro dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Makro	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Pertumbuhan PDRB	-3,87%	1,25	1,60	2,25	2,5	2,7	3,00	3,00
2	Laju inflasi	0,70%	3,2	3,35	3,25	3,3	3,2	3,1	3,1
3	Indek Gini	0,29	0,26	0,27	0,265	0,26	0,285	0,25	0,25
4	Pendapatan perkapita (Juta)	81,82	108,99	110,35	112,01	113,97	116,25	118,87	118,87
5	Angka kemiskinan	10,95%	10,75%	10,50%	10,30%	10,00%	9,90%	9,70%	9,70%
6	IPM	64,43	64,75	65	65,35	65,8	66,35	67	67
7	TPT	1,1	1,52%	1,60%	1,65%	1,70%	1,60%	1,50%	1,50%

Tabel VIII.3.

Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi									
1.	Seluruh Urusan Pemerintah Daerah								
1.1	Pertumbuhan PDRB	-3,87%	1,25	1,60	2,25	2,5	2,7	3,00	3,00
1.2	Laju inflasi	0,70%	3,2	3,35	3,25	3,3	3,2	3,1	3,1
1.3	Indek Gini	0,29	0,26	0,27	0,265	0,26	0,285	0,25	0,25

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1.4	Pendapatan perkapita (Juta)	81,82	108,99	110,35	112,01	113,97	116,25	118,87	118,87
1.5	Angka kemiskinan	10,95%	10,75%	10,50%	10,30%	10,00%	9,90%	9,70%	9,70%
1.6	IPM	64,43	64,75	65	65,35	65,8	66,35	67	67
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf	99,27%	99,30%	99,33%	99,36%	99,39%	99,42%	99,45%	99,45%
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	6,7 Th	6,71 %	6,72 %	6,73 %	6,74 %	6,75 %	6,76 %	6,76 %
1.3	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33 %	12,50 %	12,67 %	12,84 %	13,01 %	13,18 %	13,18 %
1.4	APK PAUD	77,54%	79,34%	81,18%	82,98%	84,78%	86,58%	88,38%	88,38%
1.5	APM SD / sederajat	99,18%	99,19%	99,20%	99,21%	99,22%	99,23%	99,24%	99,24%
1.6	APM SMP / sederajat	81,87%	81,88%	81,89%	81,90%	81,91%	81,92%	81,93%	81,93%
1.7	APK SD / sederajat	108,29%	108,32%	108,52%	108,72%	108,92%	109,12%	109,32%	109,32%
1.8	APK SMP / sederajat	91,63%	91,64%	91,65%	91,66%	91,67%	91,68%	91,69%	91,69%
2	Kesehatan								
2.1	Angka usia harapan hidup	66,23	66,30	66,35	66,40	66,45	66,50	66,55	66,60
2.2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	19/1.000 KH	19,00 /1.000 KH	18,00 /1.000 KH	17,00 /1.000 KH	16,00 /1.000 KH	15,00 /1.000 KH	14,00 /1.000 KH	14,00 /1.000 KH
2.3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	9,00 /1.000 KH	8,50 /1.000 KH	8,00 /1.000 KH	7,50 /1.000 KH	7,00 /1.000 KH	6,50 /1.000 KH	6,0 /1.000 KH	6,0 /1.000 KH
2.4	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	4,84%	4,65%	4,40%	4,10%	3,90%	3,70%	3,50%	3,50%
2.5	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (wasting) pada anak balita	3,8%	3,5%	3,2%	2,9%	2,6%	2,3%	2%	2%
2.6	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita	20,05%	19,05%	18,05%	17,05%	16,05%	15,05%	14,05%	14,05%
2.7	Prevalensi Ibu Hamil KEK (kekurangan energi Kronis)	7,29%	7,20%	7,11%	7,02%	6,93%	6,84%	6,75%	6,75%
2.8	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	15,43%	15%	14,5%	14,0%	13,5%	13,0%	12,5%	12,5%
2.9	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	16%	16%	15,50%	15%	14,50%	14%	14,50%	14,50%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
2.10	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	35,44%	50,0%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.11	Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,74%	67,0%	70%	73%	76%	79%	82%	82%
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31,52%	35,0%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketenagakerjaan								
3.1	TPAK	74,18	74,30%	74,40%	74,55%	74,75%	75,00%	75,30%	75,30%
3.2	TPT	1,1	1,52%	1,60%	1,65%	1,70%	1,60%	1,50%	1,50%
Fokus Seni, Budaya dan Olah raga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian	60 Group	65 Group	70 Group	75 Group	80 Group	85 Group	90 Group	90 Group
1.2	Jumlah gedung	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
2	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah klub olahraga	32 klub	40 klub	45 klub	50 klub	55 klub	60 klub	65 klub	65 klub
2.2	Jumlah gedung olahraga	17 unit	17 unit	18 unit	21 unit	24 unit	25 unit	28 unit	28 unit
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD	97,79%	97,81%	97,83%	97,85%	97,87%	97,89%	97,91%	97,91%
1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	103,10%	103,11%	103,12%	103,13%	103,14%	103,15%	103,16%	103,16%
1.3	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	92,23%	92,24%	92,25%	92,26%	92,27%	92,28%	92,29%	92,29%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1.4	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	91,11%	92,11%	93,11%	94,11%	95,11%	96,11%	97%	97%
1.5	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	83,60%	83,64%	83,68%	83,72%	83,76%	83,80%	83,84%	83,84%
1.6	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	37,94%	37,95%	37,96%	37,97%	37,98%	37,99%	38,00%	38,00%
1.7	Rasio guru/murid SD sederajat	54,04%	54,09%	54,14%	54,19%	54,24%	54,29%	54,34%	54,34%
1.8	Rasio guru/murid SMP sederajat	67,25%	67,27%	67,29%	67,31%	67,33%	67,35%	67,37%	67,37%
1.9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	7,78%	7,70%	7,68%	7,64%	7,62%	7,60%	7,58%	7,58%
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	10,65%	10,63%	10,61%	10,59%	10,57%	10,55%	10,53%	10,53%
1.11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,73%	99,62%	99,64%	99,67%	99,69%	99,73%	99,80%	99,80%
1.12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,45%	97,46%	97,47%	97,48%	97,49%	97,50%	97,51%	97,51%
1.14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,60%	78,85%	79,19%	79,36%	79,61%	79,86%	80,11%	80,11%
2	Kesehatan								
2.1	Jumlah Puskesmas	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	18 unit	18 unit	18 unit	19 unit
2.2	Jumlah Puskesmas rawat inap	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	11 unit	11 unit	11 unit
2.3	Jumlah Pustu	58 unit	59 unit	59 unit	60 unit	60 unit	60 unit	61 unit	61 unit
2.4	Jumlah Polindes	31 unit	31 unit	31 unit	32 unit	32 unit	33 unit	33 unit	33 unit
2.5	Jumlah Posyandu	290 unit	290 unit	290 unit	292 unit	293 unit	294 unit	295 unit	295 unit
2.6	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
2.7	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan	4	8	10	12	14	17	17	17
2.8	Persentase RS yang terakreditasi	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
2.9	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Jumlah kematian ibu	6	6	6	5	5	4	4	4
2.11	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	89,45%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%
2.12	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan	67,74%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2.13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,16%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%	99,00%	99,00%	99,00%
2.14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	82,68%	88%	89%	90%	92%	94%	95%	95%
2.15	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	76,98%	77%	77,50%	78%	78,50%	79%	79,50%	79,5%
2.16	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	22,78	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
2.17	Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,93	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
2.18	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	13,31	15%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
2.19	Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	96,24	97%	97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%	99,5%
2.20	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,49	98%	98,5%	99%	99,5%	100%	100%	100%
2.21	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	93,76%	96,8%	97%	97,5%	97,7%	98%	98%	98%
2.22	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	14,5	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	45,0
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9,57	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
2.24	Persentase ASI eksklusif	62,77%	63,0%	65,0%	68,0%	70,0%	72,0%	75,0%	75,0%
2.25	Persentase keluarga yang mengikuti program keluarga berencana (KB)	NA	80,0%	82,0%	84,0%	86,0%	88,0%	90,0%	90,0%
2.26	Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	NA	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%
2.27	Persentase keluarga yang sudah menjadi anggota JKN	66,30%	67,0%	70,0%	73,0%	76,0%	79,0%	82,0%	82,0%
2.28	Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	65,00%	67,0%	70,0%	72,0%	75,0%	77,0%	80,0%	80,0%
2.29	Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	70,0%	73,0%	76,0%	79,0%	82,0%	85,0%	88,0%	88,0%
2.30	Persentase desa UCI	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%	94,5%	95,0%	95,5%	95,5%
2.31	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit kategori Kelas "C"	NA	66,52%	67%	68%	69%	70%	71%	71%
2.32	Jumlah dokter spesialis dasar	NA	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
2.33	Jumlah dokter spesialis penunjang	NA	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
2.34	Jumlah dokter umum	NA	9 orang	8 orang	9 orang				
2.35	Jumlah dokter gigi	NA	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
2.36	Jumlah apoteker	NA	3 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
2.37	BOR (Bed Occupancy Rate)	29,31	29,72	29,98	30,24	30,49	31,01	31,27	31,27
2.38	ALOS (Average Length Of Stay)	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,60
2.39	BTO (Bed Turn Over)	28,00	30,00	37,73	38,67	39,62	40,56	41,50	41,50
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Panjang jalan kabupaten (Km)	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km	1.177,77 Km
3.2	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	19,47%	20,97%	22,47 %	23,97%	25,97%	27,97%	29,97%	29,97%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
3.3	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	72,04%	73,12%	75,27%	77,42%	79,57%	81,72%	83,87%	83,87%
3.4	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	33,52%	38,78%	39,81%	40,76%	41,71%	42,67%	43,62%	43,62%
3.5	Cakupan Luas Lahan irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	39,99%	50%	53%	55%	57%	59%	61%	61%
3.6	Cakupan Luas Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam kondisi baik	NA	55,26%	58,00%	61,00%	64,00%	67,00%	70,00%	70,00%
3.7	Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD-Alkal	N	39,60 Km	31,10 Km	35 Km	40 Km	45 Km	50 Km	240,7 Km
3.8	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %	91 %
3.9	Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	N	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	10 %	100%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Pengurangan luas permukiman kumuh (Ha)	123,88	119,88	115,88	112,88	109,88	106,88	103,88	103,88
4.2	Persentase LPJU terpasang	39,57	39,57	51,64	63,71	75,79	87,86	100	100
4.3	Persentase Taman Kota terbangun	72,73	72,73	77,92	83,12	88,31	93,51	100	100
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Penegakan Perda	98,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Respon Time Rate pada daerah layanan WMK	NA	60%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
5.3	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
5.4	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang ikut pemilu	80,25	80,25	80,25	81,16	81,16	81,16	81,16	81,16
5.5	Persentase Ormas yang aktif	37,97	44,3	50,63	56,96	63,29	69,62	75,95	75,95
5.6	Persentase penanganan penyakit masyarakat	58,33	58,5	58,75	59	59,25	59,5	59,75	59,75
5.7	Presentase konflik yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
6	Sosial								
6.1	Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sosial	17,36	17,36	34,72	52,08	69,44	86,81	100	100
6.2	Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7	7	14	28	35	42	49	49
6.3	Updating DTKS	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanggulangan Bencana								
7.1	Respon Time Penanganan Tanggap Darurat	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (%)	NA	69,94%	75,66%	81,39%	87,12%	92,84%	100%	100%
1.2	Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	NA	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
1.3	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	NA	70%	73%	76%	79%	82%	85%	85%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak								
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,76	88	88,5	89	89,5	90	90,5	90,5
2.2	Persentase peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Status Kabupaten Layak Anak	NA	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
2.4	Persentase pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pangan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
3.1	Konsumsi Energi	2119	2125	2130	2135	2140	2145	2150	2150
3.2	Skor PPH	93,1	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2	93,2
3.3	Persentase penanganan daerah rawan pangan,	92,47	93,55	94,62	95,7	96,77	97,85	100	100
3.4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
3.5	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100	100
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	66,03	66,53	67,04	67,54	68,04	68,54	68,54
4.2	Persentase persetujuan teknis (Pertek) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)	43,0	38	39	40	41	42	43	43
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93	20,93	26,2	31,4	42,44	52,55	63,66	63,66
5.4	Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Persentase penerbitan Kutipan Akta Perceraian	0,00	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
5.10	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,83	99,83	99,83	99,84	99,94	99,96	99,98	99,98
5.11	Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan	100,00	100	100	100	100	100	100	100
5.12	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.13	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	11,63	25,58	39,53	53,49	67,44	81,40	93,02	93,02
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Persentase desa dengan administrasi baik	0	75,34	76,71	78,08	79,45	80,82	82,19	82,19
6.2	Persentase Bumdes yang aktif	67,12	68,49	69,86	71,23	72,60	73,97	75,34	75,34
6.3	Persentase Keselarasan Program PKK dengan Pemda	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek	NA	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	2,75	2,74	2,72	2,7	2,68	2,66	2,64	2,64
7.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	54,48	58	60	60,42	60,75	61	61,35	61,35
7.3	Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	14,67	14	13,65	13	12	11,45	11,1	11,1
7.4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	43	37	35	34	32	30	28	28
7.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	64,43	64,5	64,65	64,7	64,75	64,8	64,8
8	Perhubungan								
8.1	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas	NA	100	100	100	100	100	100	100
8.2	Persentase Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	0	20	20	40	40	40	40	40

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
9	Komunikasi dan informatika								
9.1	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	81,40	88,37	90,70	95,35	100,00	100,00
9.2	Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah	72,73	72,73	81,82	90,91	95,45	100,00	100,00	100,00
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
10.1	Persentase KSP/USP Aktif	6,00	8,00	10	12	14	16	18	18
10.2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10,00	25,00	30	35	40	45	50	100
10.3	Persentase Koperasi sehat	48,00	56,00	64	72	80	88	96	96
10.4	Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian	43,00	51,00	59	67	75	83	91	91
10.5	Persentase Koperasi mandiri	NA	0,00	2,08	4,17	6,25	8,33	10,42	10,42
10.6	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	8,07	14,15	20,24	16,59	19,02	21,45	23,89	23,89
10.7	Persentase Usaha Mikro Aktif	63,27	64,04	64,81	65,58	66,35	67,12	67,89	67,89
11	Penanaman Modal								
11.1	Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia	NA	17	33	50	67	83	100	100
11.2	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	NA	0	0	25	50	75	100	100
11.3	Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal	88,28	88,31	88,75	88,9	89	89	89	89
11.4	Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	134,36	148,7	163,5	188,1	245	318	413	1.476
11.5	Persentase Data dan Informasi yang Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase organisasi pemuda aktif	46,67	46,67	46,67	53,33	53,33	60,00	66,67	66,67
12.2	Peringkat PORPROV	NA	0	3	0	3	0	2	2

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
12.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.4	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Statistik								
13.1	Persentase Data Statistik Sektor OPD yang Di Informasikan	50,00	50	56,25	62,5	68,75	75	81,25	81,25
14	Kebudayaan								
14.1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40	40	50	60	70	80	90	90
14.2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	27,27	36,36	45,45	54,55	63,64	72,73	81,82	81,82
14.3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0,00	3,70	7,41	25,93	40,74	55,56	70,37	70,37
15	Perpustakaan								
15.1	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat)	NA	19,00	21,50	25,00	28,00	30,00	35,00	35,00
15.2	Tingkat Gemar Membaca	NA	NA	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
15.3	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kearsipan								
16.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0	2,33	4,65	6,98	9,30	11,63	13,95	13,95
16.2	Persentase penyelesaian program perlindungan dan penyelamatan arsip	0	0	0	100	100	100	100	100
17	Persandian								
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	6,98	23,26	27,91	32,56	37,21	41,86	46,51	46,51
18	Pertanahan								
18.1	Persentase Penyelesaian sengketa Lahan	27,78	27,78	38,89	50,00	61,11	72,22	83,33	83,33
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1.1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	83,86	85,06	86,06	87,36	88,36	89,56	90,76	90,76
1.2	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	57,16	59,16	64,96	70,76	73,76	78,76	81,76	81,76
1.3	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	18,18	18,18	36,36	54,55	72,73	90,91	100,00	100,00
1.4	Persentase produksi olahan hasil perikanan (%)	45,08	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
1.5	Tingkat konsumsi Ikan masyarakat (kg/kapita)	37,55	38,00	38,50	39,00	39,50	40,00	40,50	40,50
2	Pariwisata								
2.1	Persentase Destinasi Pariwisata aktif	NA	50	55	60	65	70	75	75
2.2	Persentase Kunjungan Wisatawan	64,22	65,0	75,0	85,0	90,0	95,0	100,0	100,0
2.3	Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf	NA	15	20	25	30	35	40	40
3	Pertanian								
3.1	Persentase Ketersediaan Benih	54,55	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100,0	100,0
3.2	Persentase Ketersediaan Pupuk	54,55	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100,0	100,0
3.3	Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian	16,67	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,0	100,0
3.4	Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimasi lahan	45,45	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100,0	100,0
3.5	Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani	NA	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,0	100,0
3.6	Persentase Ketersediaan Dam Parit	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,0	100,0
3.7	Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
3.8	Persentase AUTP	35,71	46,43	57,14	67,86	78,57	89,29	100,0	100,0
3.9	Cakupan Bina Kelompok tani	32,71	43,93	55,14	66,36	77,57	88,79	100,0	100,0
4	Perdagangan								
4.1	Persentase peningkatan Sentra IKM	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00
4.2	Persentase peningkatan IKM Formal	20,62	20,62	27,13	34,88	42,64	46,51	54,26	54,26
4.3	Persentase peningkatan IKM Produktif	35,83	40,00	45,83	55,56	69,44	83,33	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
5	Perindustrian								
5.1	Persentase peningkatan pasar sehat	0	0	10	20	30	40	50	50
5.2	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Pelayanan Tera dan Tera Ulang	100	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Transmigrasi								
6.1	Persentase EksTransmigran yang dibina/dilatih	NA	70	74	74	82	86	90	90
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan								
1.1	Persentase keselarasan pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD	102,78	85	85	85	85	85	85	85
1.3	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	84,53	85	85	85	85	85	85	85
2	Pengawasan								
2.1	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	26,48	30	35	40	45	50	55	55
2.2	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	2	2	2	2	3	3	3	3
3	Kepegawaian dan Diklat								
3.1	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	NA	0,54	0,57	0,60	0,62	0,64	0,64	0,64
3.2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	NA	70	72	74	76	78	80	80
4	Keuangan								
4.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
4.2	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	89,49	90	92	94	96	98	100	100
4.3	Persentase peningkatan PAD	-7,9	2	2	2	2	2	2	2
5	Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Nilai Tukar Petani	106,49	101,4	101,5	101,6	101,7	101,8	101,9	101,9
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur									
1	Bidang Perhubungan								
1.1	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalulintas	NA	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	0	20	20	40	40	40	40	40
2	Bidang Penataan ruang								
2.1	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang								
	a. Bank Pemerintah	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
	b. Bank swasta	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
3.2	Jumlah restoran/rumah makan	73 unit	75 unit	80 unit	85 unit	90 unit	95 unit	100 unit	100 unit
3.3	Jumlah hotel/penginapan	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit
4	Bidang Lingkungan Hidup								
4.1	Persentase Pelayanan Air Bersih	45,1	50,58	56,06	61,54	67,02	72,5	77,98	77,98

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
5	Komunikasi dan Informasi								
5.1	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	74,42	74,42	81,40	88,37	90,70	95,35	100,00	100,00
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Indeks Rasa Aman	NA	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54
2	Jumlah demo (kali)	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Jenis pajak dan retribusi	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah	10 Jenis Pajak, 16 Retribusi Daerah
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Rasio ketergantungan	43,75	46,00	45,50	45,00	44,50	43,50	42,50	42,50

B

A

B

IX

PENUTUP

BAB IX

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jambi selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan pendorong bagi upaya mewujudkan visi dan misi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kerjasama yang baik antar perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian, kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi, pelaku dunia usaha dan masyarakat Tanjung Jabung Timur melalui kemitraan juga sangat diperlukan.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 ini dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Guna memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Semua pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

2. Setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026.
3. Guna melaksanakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan penjabaran RPJMD, diawali dengan menyusun dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari renstra Perangkat Daerah.
 - b. Tahapan partisipatif dilakukan untuk mendapatkan masukan guna Penyempurnaan Rencana Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c. Tahapan Penyusunan Akhir RKPD dilakukan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman pada hasil forum Perangkat Daerah.
4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJMD pada tahun ke 3 (tiga) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Kelurahan Rano, Muara Sabak Barat
Jambi, Indonesia

Telp. (0740) 7370006 Fax. (0740) 7370006
Website : www.tanjabtinkab.go.id